



## CONTENTS

**Foreword, Sambutan, dan Prakata.** [i-iv]

**QASIM AHMAD,**

*Learning from the Past: A Contentious Issue?* [1-10]

**TUTY ENOCH MUAS,**

*Mengenal Lebih Dekat Triad dan Serikat Rahasia Tiongkok.* [11-28]

**SITI NORKHALBI HAJI WAHSALFELAH,**

*Sejarah Sosio-Budaya Kraftangan di Brunei Darussalam:  
Barangan Logam dan Kain Tenunan.* [29-40]

**HILAL AHMAD WANI & ANDI SUWIRTA,**

*United Nations Involvement in Kashmir Conflict.* [41-50]

**MASAKAREE ARDAE @ NIK MUHAMMAD SYUKRI NIK WAN,**

*Kesejarahan Ajaran Sifat 20 di Alam Melayu.* [51-64]

**LINDA SUNARTI,**

*Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976:  
Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama.* [65-80]

**ARVIN TAJARI,**

*Regional Dimension of Malaysia's Foreign Policy during the Cold War,  
1957-1989: A Historical Evaluation.* [81-90]

**MAMAN LESMANA,**

*Teks-teks Humor Politik di Indonesia:  
Sekedar Hiburan atau Sekaligus Kritikan?* [91-100]

**AHMAT ADAM,**

*Pendidikan Sejarah di Malaysia Dewasa ini:  
Sejauh Manakah ia Relevan kepada Pembinaan Nasion?* [101-114]

**Info-susurgalur-tainment.** [115-122]

## Foreword



*My first and foremost gratitude to Allah SWT (Subhanahu Wa-Ta'ala) for blessing us with the strength to publish the "SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah" (Journal of the History Education and Historical Studies) again, issue of March 2014. As a Southeast Asian regional journal, SUSURGALUR is a platform for the researchers and scholars of history to deliver the results of their studies and researches done on the history, not only in Brunei Darussalam, Indonesia, and Malaysia, but also in other Southeast Asia regions. This makes the SUSURGALUR as a source of the latest information for scholars, students, and the public about the history and history education, and in fact about current affairs of the ASEAN (Association of South East Asian Nations) countries.*

*As I said that learning of history is to learn about the life experiences of the past that we should be wise in this life. "Historia Magistra Vitae", history is the teacher of life. By learning from the experiences of the past, we will not repeat the mistakes that happened in the past, to act wisely in the present, and optimistic in looking to the future.*

*Of course, there are many things that we can get from learning a history. One is that the study of history, then, we will not lose our identity and character as a nation. Nations that do not have an identity, thus, are the nations that forget history. And the only nation that "crazy" are forgetting the past, do not remember who he was, and lose his identity as a nation.*

*In this context, it is true when Soekarno, the first President of the Republic of Indonesia, in 1960s had stated about JAS MERAH ("Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" or Do Not Leave Occasional History). It is also appropriate when Mahathir Mohamad, the fourth Prime Minister of Malaysia, in the 1990s reminds us of MELUPA ("Melayu Mudah Lupa" or Malay Easy to Forget). Everything looked and advised that we, as a civilized nation, do not forget about our origins, our journey of history, and ultimately our identity, which distinguishes it from other nations in the world.*

*Although history is important, both in terms of function and role, but in the context of implementation, for example in the learning process in schools, history is often seen as a boring lesson. When we asked to the students in the school about who the teacher in teaching the subject is unattractive and boring, then, surely the answer is a history teacher. Why is that? Because history teacher, said the students, in teaching only the row number of years, the names of figures and events are long, and had no relevance to current interests.*

*About history includes the subject that less attractive to students in schools, both primary and secondary schools, also continues to the tertiary education institution. The number of students at the Department of History, in a college as well as in a university, rarely exceed 50 people. This is contrast to the students in the Department of Science, Technology, Medicine, Economics, and even the Department of Law. A limited number of students of history, of course, implies a number of historians and history educators that be produced by the college or the university. It is common knowledge today that the number of Historians and History Educators in a nation-state could be counted by the fingers alone, because there is indeed a bit.*

*One purpose of the publication of the SUSURGALUR journal, since the first edition in March 2013, is to generate interest and attention to the History and History Education. By studying and researching the history of the various events, periods, figures, and other areas – one again not only in the context of nation-states like in Brunei Darussalam and in Indonesia, but also in other countries of Southeast Asia, even the world – then, we will gain experiences and lessons of various and interesting.*

*Finally, I hope and believe that researchers and scholars of history and history education will also be able to utilize the SUSURGALUR journal as a medium to disseminate the latest findings. This would directly and indirectly lifts the credibility of SUSURGALUR journal in the society as a beneficial reading material, particularly as a scholarly journal among academicians nationally, regionally as well as internationally.*

*Bandar Seri Begawan, 22nd March 2014.*

**Assoc. Prof. Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah**

*Editor-in-Chief of the SUSURGALUR Journal; and*

*Director of APB UBD (Academy of Brunei Studies, University of Brunei Darussalam)*

## Sambutan



Pada tahun 2000-an, ketika saya membuat kajian terhadap bukunya Benedict R.O'G. Anderson, seorang Indonesianist terkenal dari Amerika Serikat, yang berjudul "Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia, dan Dunia", saya menyatakan bahwa kata kunci untuk memahami "nasionalisme" di Asia Tenggara – dan dalam kaitannya dengan Dunia – adalah hantu komparasi atau "the spectre of comparison". Makna dari kata ini adalah bernuansa jamak. Di satu sisi adalah tragis bahwa para elite terdidik yang mengkreasi nasionalisme di kota-kota besar di tiga negara yang bertetangga (Indonesia, Thailand, dan Philipina) serta jaraknya relatif dekat itu – seperti Jakarta, Bangkok, dan Manila – seolah-olah tidak saling menyapa dan berinteraksi.

Mereka lebih banyak mengapresiasi dan mengkomparasi nasionalisme ke kota-kota pusat satelit kolonial mereka di Eropa dan Amerika Serikat yang jaraknya relatif jauh.

Namun di sisi lain – dan ini yang lebih penting dan menarik – bahwa cara mereka memahami dan mengkomparasi nasionalisme itu terlalu simplistis dan dilematis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Soekarno di Indonesia ketika memuji-muji Adolf Hitler dalam mengembangkan nasionalisme tanpa harus memahami secara kritis moralitas pemimpin dari Jerman itu di mata masyarakat Barat sendiri.

Bahwa Soekarno, sebagai salah seorang "the founding fathers of Indonesia nation-state", sering membuat komparasi-komparasi yang sederhana tentang nasionalisme Indonesia – dan akibatnya kurang tepat – sudah umum diketahui. Pandangan triloginya tentang nasionalisme Indonesia – masa lalu yang gemilang, masa sekarang yang suram, dan masa depan yang penuh harapan – bukan saja merupakan "hantu" bagi pihak kolonial Belanda, tetapi juga menciptakan mitos politik tersendiri yang juga, seperti orang percaya pada "hantu", sukar dihilangkan, yakni bahwa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun.

Memang, Ben Anderson adalah ilmuwan sosial yang serba bisa, terutama dalam kemampuannya berbahasa. Lusinan bahasa ia kuasai dengan baik – mulai dari bahasa Jawa, Indonesia, Thailand, Tagalog, Vietnam, Cina, Spanyol, Belanda, Perancis, Jerman, dan tentu saja Inggris-Amerika – sebagai modal dasar untuk bisa memahami dan menganalisis masyarakat yang menjadi objek studinya. Kendati begitu, kritik terhadap Ben Anderson sebagai ilmuwan sosial yang serba bisa juga banyak. Di kalangan sejarawan sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh Taufik Abdullah dan almarhum Sartono Kartodirdjo, dua sejarawan terkenal Indonesia, sampai pada kesimpulan bahwa salah satu tugas utama seorang sejarawan adalah mampu memahami secara benar dan objektif tentang kelampauan, serta berusaha menguji secara kritis keumuman "grand theory" dengan sumber-sumber sejarah yang ada.

Kritik tersebut didasarkan oleh kenyataan bahwa studinya tentang persistensi budaya Jawa dalam politik kontemporer Indonesia pada masa Orde Baru, misalnya, telah menempatkan Ben Anderson sebagai ilmuwan sosial yang hanya mau menggunakan perspektif dengan optik "etnosentrisme budaya Jawa" secara berlebihan dalam memahami realitas sosial Indonesia yang plural. Akhirnya – dengan meminjam petuah ilmiah seorang sejarawan – bahwa tidak mesti pilihan studi, analisis, dan simpulan dari seorang ilmuwan sosial dan kemanusiaan itu didasarkan atas sikap "rasa marah dan berat sebelah". Sebab jika yang terakhir ini dilakukan akan bermuara pada pengaburan dan pengabaian fakta-fakta sosial yang sebenarnya.

Jurnal SUSURGALUR ini, saya pikir, adalah media yang tepat dan relevan untuk membangun kembali wacana secara kritis terhadap dua fenomena yang saya kemukakan di atas: hasil penelitian seorang ilmuwan dan pernyataan seorang negarawan. Menguji secara kritis hasil-hasil penelitian dan pernyataan seseorang adalah tugas kita semua agar tercipta masyarakat yang cerdas dan beradab. Wawasan yang kritis, objektif, adil, dan seimbang di satu sisi, dengan dibarengi oleh sikap yang tekun, teliti, rajin, dan tetap bersemangat adalah etos kerja seorang ilmuwan yang sejati.

Akhirnya, selamat membaca artikel-artikel dalam jurnal SUSURGALUR ini dengan dibarengi oleh sikap seorang ilmuwan sejati. Semoga ada manfaatnya.

Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 23 Maret 2014.

**Andi Suwirta, M.Hum.**

Ketua Umum ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia); dan Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

## Prakata



Dalam sebuah persidangan antarabangsa, yang dianjurkan oleh ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung, pada tahun 2006, saya pernah membuat kenyataan tentang peri pentingnya peranan Sejarah. Sungguhpun relevansi sejarah di zaman ledakan teknologi maklumat ini semakin diragukan, tetapi mengingati dan memahami sejarah negara-bangsa melalui kepelbagaian kaedah, seperti melalui tulisan, ceramah, kursus, dan seterusnya mengajarkan pendidikan sejarah dari sekolah rendah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi, sebenarnya masih memainkan peranan sebagai pemangkin pembinaan bangsa.

Masa silam yang dihidupkan kembali melalui paparan kajian-kajian sejarah dan kisah-kisah boleh diambil sebagai contoh dan sekaligus sebagai pedoman kepada generasi berikutnya. Tanpa memahami sejarah, atau kurang "sense of history", agak sukar untuk mengwujudkan kesedaran sejarah di kalangan masyarakat Brunei, lebih-lebih lagi ke atas generasi baru. Mungkin mereka mahir dan berkebolehan dalam menguasai ilmu sains, matematik, dan teknologi maklumat, tetapi mereka tidak tahu siapa dan dari mana asal-usul dan kedudukan mereka.

Kesedaran sejarah, atau "historical consciousness", diakui sebagai tahap perkembangan penting ke atas daya pemikiran manusia. Kesedaran tentang waktu dan pengalaman masa lampu suatu bangsa merupakan faktor penting dalam memandu arah-tuju dan perjalanan suatu bangsa dalam mengenali jatidiri atau identitinya. Jatidiri bangsa Brunei, sejak zaman sebelum kedatangan Islam sehingga ke negara moden ini, ternyata ia adalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang Raja. Selepas kedatangan Islam, jatidiri Brunei dengan amalan sistem beraja terus diwujudkan, tetapi ia sudah berubah kepada senario baru dengan elemen MIB (Melayu Islam Beraja) dan telah menjadi jati diri masyarakat Brunei sekarang ini.

Melalui sejarah juga masyarakat Brunei akan dapat memahami peringkat dan proses pembentukan negaranya. Brunei pada awalnya adalah sebuah negara kecil, yang kemudiannya mampu berkembang hingga mempunyai empayar yang luas, seperti mana yang berlaku dalam zaman pemerintahan Sultan Bolkuah dan Sultan Hassan. Maknanya, dalam mempelajari sejarah seperti ini, ia boleh menjadi satu motivasi kepada generasi muda bahawa masyarakat Brunei juga boleh maju dan berkembang setanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dalam pada itu, kejatuhan Brunei, terutama dalam abad ke-19 M, sudah tentu menimbulkan keinsafan dan kesedaran bahawa tidak selama-lamanya sesebuah negara itu berkeadaan gemilang. Oleh itu, ia boleh memberikan pengajaran agar masyarakat Brunei perlunya berwaspada setiap masa dengan perancangan yang teratur dalam mengendalikan negara agar perkara yang menyedihkan itu tidak berulang lagi. Perebutan kuasa politik bukanlah satu penyelesaian kepada masalah negara, tetapi ia boleh menjerumuskan negara kepada kehancuran, seperti mana yang berlaku dalam perang saudara pada abad ke-17 M, tetapi apa yang lebih penting ialah kesepakatan dan perpaduan dalam mempertahankan dan membangun negara.

Adalah juga penting diambil pemerhatian bahawa buku-buku teks yang digunakan dalam pendidikan sejarah di sekolah-sekolah diharapkan menjadi sumber inspirasi yang positif, konstruktif, dan kreatif dalam diri pelajar. Mereka bukan saja dapat memahami sejarah Brunei seperti yang terdapat dalam kurikulum, buku-buku teks dari sekolah rendah hingga menengah rendah yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk dilaksanakan pada tahun 1991 dan menengah atas pada tahun 2000 yang sudah disuntik dengan unsur-unsur "Brunei-Centric", tetapi juga akan dapat menimbulkan rasa cinta kepada negara, bangsa, agama dan raja, selaras dengan konsep MIB (Melayu Islam Beraja).

Akhir sekali, saya berhasrat agar jurnal SUSURGALUR ini boleh memainkan peranan sebagai wadah bagi mencetuskan idea dan pemikiran terbaru, hasil penyelidikan dari para sarjana dalam berbagai bidang disiplin. Sepertimana yang saya kerap nyatakan bahawa dapatan penyelidikan dan idea bernas yang tidak diterbit, ianya setakat menjadi hiasan dan barangan antikuarian sahaja di pusat-pusat sumber sesebuah jabatan pendidikan. Dan ini adalah satu pembaziran, kerana ianya tak dibaca oleh ramai orang.

Bandar Seri Begawan, 24hb Mac 2014.

**Prof. Madya Dr. Haji Awg Asbol bin Haji Mail**

Pensyarah Kanan di Program Pengajian Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD (Universiti Brunei Darussalam); dan Ahli Sidang Pakar ASPENSI di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

QASIM AHMAD

## Learning from the Past: A Contentious Issue?

**ABSTRACT:** *Given that history is “man-made” and those who study or read history are men and women who carry with them their own respective perspectives and value systems, it is difficult to imagine that people will learn the same lessons from history. This is not to say that one cannot learn from history; one certainly can, but expect not that one’s view would be broadly shared by others. This article looks at the controversy surrounding the often heard exhortation that one ought to take lessons from history, lest one would succumb to repeating past follies. However, the aptness of trying to learn from history has often been questioned. This skepticism is understandable as it is said that the exercise cannot possibly be free from subjective elements. On the other hand, a persistent doubting or outright denying of the appropriateness of trying to draw lessons from the historical past, could in a way, undermine the very *raison d’être* or rationale for studying history itself. While some might be prepared to debunk history as a discipline, others would certainly want to defend its usefulness. In an attempt to shed some light to this seeming quandary, this article proposes that our attention be directed to the “obvious” lessons that we can glean from the past, contentious though that proposal might be.*

**KEY WORD:** *History, historical lessons, interpretations, perspectives, value systems, and contentious issue.*

**IKHTISAR:** *Artikel ini bertajuk “Belajar dari Masa Lalu: Satu Isu Perbalahan?”. Memandangkan bahawa sejarah adalah “buatan manusia” dan mereka yang mengkaji atau membaca sejarah adalah lelaki dan wanita yang membawa bersama perspektif mereka masing-masing dan sistem nilai, ia adalah sukar untuk membayangkan bahawa orang akan belajar mengenai pelajaran yang sama dari sejarah. Ini bukan untuk mengatakan bahawa kita tidak boleh belajar dari sejarah; satu yang pasti boleh, tetapi tidak mengharapkan pandangan seseorang akan dikongsi secara meluas oleh orang lain. Artikel ini meninjau kontroversi yang sering berlegar di sekitar saranan agar kita mengambil pelajaran dari sejarah demi menghindari kesilapan masa silam. Namun begitu, kewajaran gesaan ini sering dipersoalkan. Sikap sangsi ini tidak sukar difahami kerana usaha sedemikian itu dikatakan tidak mungkin telerai dari unsur subjektif. Sebaliknya, tindakan mempersoalkan secara berterusan atau menafikan secara mutlak kecocokan upaya mendapatkan iktibar dari sejarah boleh, dari satu segi, menjejaskan asas pengkajian sejarah itu sendiri. Mungkin sesetengah pihak tidak keberatan untuk mencabar keutuhan sejarah sebagai satu disiplin, tetapi tentunya ada golongan lain yang mahu membela peranannya. Sebagai satu langkah untuk menghuraikan sedikit-sebanyak dilema yang kelihatan ini, artikel ini mengajak para pembaca memberikan tumpuan kepada pengajaran “jelas” yang dapat diperolehi dari sejarah, biarpun anjuran itu juga boleh mengundang kontroversi.*

**KATA KUNCI:** *Sejarah, pelajaran sejarah, tafsiran, perspektif, sistem nilai, dan isu perbalahan.*

### INTRODUCTION

With regard to the Western concept of knowledge, or rather hierarchy of knowledge in classical Europe of the Greek and Roman world, philosophy used to occupy the uppermost rank.

A philosopher was, then, looked upon by society as the keeper and dispenser of wisdom. However, following the Scientific Revolution of the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries, philosophy lost its pre-eminent position. Its place was taken

over by scientific knowledge. If logic was the bedrock upon which philosophy was built and nurtured, empiricism, or empirical evidence, came to be the basis of scientific knowledge. The tool for acquiring and verifying this knowledge is, of course, laboratory experiments.

The achievement of scientific knowledge was crowned by of the 18<sup>th</sup> century Industrial Revolution and all the visible fruits that civilization managed to reap from it. Industrialization has brought material benefits to Western civilization in ways that were difficult to imagine previously. Inevitably, with the bestowal of such tangible rewards, men became more than ready and ever willing to discard logic in favour of empiricism. In other words, logic alone as a premise for knowledge became, over the years, harder to sustain. In the wake of empiricism and scientific knowledge not only logic but faith, the underlying basis for religious knowledge, also came under serious assault.

The compelling attraction of science was such that those studying human societies and affairs soon found themselves describing their field of activities as social sciences. Augustus Comte (1798-1857) used the term physical science to describe such a pursuit. Leopold von Ranke (1795-1886) believed that it was possible to write history as it actually happened. He, therefore, believed in the concept of objectivity and positivism in the study of history. This trend of thinking gave rise to the heyday of positivism in historiography. It was, as it turned out, too good to last. The position was assailed by the relativists who emphasised and elaborated on the subjective elements of historical research and writing. It was a charge to which the positivists had no real answer.

Nevertheless, historians claim that they are, or at least aspire to be, objective when writing or dealing with historical events. However, their

definition of the term “objective” is qualitatively different from the one that is understood by the natural scientists. A historian confronted by someone doubting the veracity of his or her finding or conclusion, cannot answer the skeptic in the way that a natural scientist can. A historian cannot hope to silence the doubter by inviting him or her to witness a repeat experiment in a laboratory (Gardiner, 1961:91).

Of late, the post-modernists came with a new round of searing attacks on historical writing. The denunciations against historical writing coming from amongst them range from one alleging that historical writing is but another form of literature to one contending that there is nothing in it beyond the text. In short, history is what the historian makes of it, nothing more nothing less. As one post-modernist historian, Keith Jenkins puts it:

The past has and always will go with anybody without a trace of jealousy or a hint of permanent fidelity to any particular caller: hagiographers, antiquarians, professionals, Marxists, Annalists, Structuralists, fascists, feminists, pragmatic neo-Rankians, anybody can have it. And why not? Nobody has a patent on “the past”; it can be used or ignored by anyone (Jenkins, 2003:10-11).

The post-modernist assertion that there is nothing beyond the text is but going a little too far. Naturally, many historians have come to the defence of their own craft (Windschuttle, 1996; and McCullagh, 1998). In many respects, the post-modernists can be said to be attacking a “straw-man” as no historian worth his or her salt would completely deny the presence of subjective elements in his or her work, the profession to be “objective” notwithstanding.

Historians have always been aware that different historians read the past differently, what with their own and respective value systems. Historians have their own sense of understanding of the varied phenomena that they study

and all these, more often than not, tend to become embedded in their thinking and writing. The late and renowned English historian, E.H. Carr (1892-1982), quoted the words of his fellow countryman, C.P. Scott (1846-1932), a journalist and a member of Parliament, to highlight this point. What C.P. Scott said was: "Facts are sacred, opinion is free" (Carr, 1976:10). However, to proceed from this contention to say that history is just but literature is another thing all together.

Historical writing, out of sheer necessity, has to be selective. By definition, everything that has happened in the past until yesterday is history. But it is inconceivable that someone can write a history of the vast panorama, the entire past. Over the years, historians have veered towards their own individual areas of focus. Fields of specializations have been chosen by different historians according to their respective preferences or out of some other considerations.

Some of the selected areas are based on national or regional entities or their relatedness to some allied disciplines. This connection with some other academic disciplines has given rise to fields or categories like social history, medical history, economic history, and the like. The vocational devotion of a historian depends a great deal upon his or her interest, professional calling, training as well as the very purpose in writing history. Therefore, who the writer is, the audience he or she is writing the piece for and the goal for which the task is being undertaken could all be factors that can, in one way or the other, help shape or determine the final nature of any piece of historical work.

### **THE EXHORTATION TO LEARN FROM HISTORY**

Despite the contested nature of historical writing, calls have often been made that one should undertake the

study of history seriously and benefit from what it can teach the present generation. This, it is said, ought to be done so as to avoid pitfalls that societies had suffered in the past. In the words of the 20<sup>th</sup> century American-Spanish philosopher, George Santayana (1863-1952), "Those who cannot learn from history are doomed to repeat it".<sup>1</sup>

National leaders world-wide, as well as others, have been known to repeat this pronouncement in one form or another. For instance, one of Malaysia's previous Prime Ministers, Tun Dr. Mahathir Mohamed, when delivering the Opening Address at the 16<sup>th</sup> Conference of the International Association of Historians of Asia held in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, in July 2000, reiterated that "history is not just for school children but also for adults, particularly those who are entrusted with determining the policies of a nation" (*New Straits Time*, 28/7/2000:1-2). Later, in August 2002, he told participants of a national level patriotism assembly in Johor, "If we are ignorant of our history, we may commit mistakes which have occurred in the past [...] which have caused us to be colonized for 450 years" (*Daily Express*, 25/8/2002:2).

The predisposition towards looking up to history for valuable lessons, or guides, has endured the test of time and has not been confined to any one country. In 2010, in neighbouring Indonesia, a high government official had stressed the importance of history in the national character building effort. To the official, Hari Untoro Drajat, the Director-General of History and Antiquities, history teaching should not only be concerned with dishing out historical facts but must also be directed towards strengthening the national consciousness and identity. A failure

<sup>1</sup>See article entitled "George Santayana" in *New World Encyclopedia*. Available [online] also at [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/George\\_Santayana](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/George_Santayana) [accessed in Shah Alam, Malaysia: 17/10/2013].

to realize the latter, he warned, would result in the weakening of national character. Should that happen, he said, history teachers would have to take the blame or share the responsibility for it (*Kompas*, 16/6/2010:12).

Similarly in 2012, Malaysia's Minister of Education, Tan Sri Muhyiddin Yassin, had articulated these very same sentiments. He believed that the study of history in schools would foster "the patriotic spirit and multi-racial unity" amongst Malaysia's younger generation (*The Malay Mail*, 2/9/2012:3). Towards that end the government has implemented a policy that requires students to at least secure a pass in history in their Malaysian Certificate of Education (MCE) or *Sijil Pelajaran Malaysia* (SPM). This, it had been explained, would ensure that they would give serious attention to Malaysian history and be conscious of it. If current students do not know "what happened in the past", said the country's Second Education Minister, Datuk Seri Idris Jusoh, they "will not appreciate what we have now".<sup>2</sup>

Next door to Malaysia, in Singapore, the government too had embarked on this kind of agenda. It had introduced history as a compulsory subject at the lower secondary level (Tong Chia, 2012).

Academics had also argued about this need to draw lessons from history and to utilize it for the purpose of nation building. Mohamad Rodzi Abd Razak of UKM (National University of Malaysia) had argued that "Patriotism is a major element in the study of history".

---

<sup>2</sup>See, for example, news entitled "Bernama: 'Compulsory Pass for History Not Meant to Burden Students, Says Idris Jusoh'" in *Borneo Post Online*. Available [online] also at <http://www.theborneopost.com/2013/11/06/compulsory-pass-for-history-not-meant-to-burden-students-says-idris-jusoh/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 2/12/2013]; and news entitled "Compulsory Pass for History Not Meant to Burden Students: Idris Jusoh – Bernama" in *The Malaysian Insider*. Available [online] also at <http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/compulsory-pass-for-history-not-meant-to-burden-students-idris-jusoh-bernam> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 5/3/2014].

The study, he added, ought to be geared towards developing national awareness and nurturing the "feelings of love for the nation and state" (Rodzi Abd Razak, 2009).

Another Malaysian academic, Professor Sidek Baba of the International Islamic University of Malaysia, had also made known his views on this issue. In the context of history teaching in schools, he had emphasized on the importance of drawing lessons from history. In an article published in 2012, he wrote: "Learning and studying history would enable men to know the reasons why a certain [undesirable] event occurred in the past and why it should not be repeated in our time and in future" (Baba, 2012:1).

In an almost similar vein, James Campbell of Deakin University, wrote in July 2013, "Having a good grasp of History is key, not simply because of what it tells us about the past but also how it informs our understanding of and engagement with the present and aspirations for the future" (Campbell, 2013:5).

Latching this kind of concern and belief to the present world geopolitics and the perceived Sino-American rivalry, a Senior Research Fellow at the Institute of China Studies, University of Malaya, in Kuala Lumpur, Malaysia, Lee Poh Ping, had this to say, "[...] the wise leader can learn from history rather than repeat it" (Poh Ping, 2014).

**Laudable Aspirations.** These encouragements to study and learn from history are indeed laudable. They certainly reflect an enduring trust amongst many citizens in the role that history can play to enlighten and steer society towards achieving its own well-being.

Noble though this kind of aspiration is, the pursuit of such an ideal, of course not without its challenges. Learning from history is, to say the least, problematic. As has been said earlier, people, historians, and others

alike, differ in their understanding of what really took place in the past. People are selective about the past and, on top of that, interpret historical events or happenings differently. Thus, people could well be drawing different lessons from past events.

To some, this state of affairs might be something that is most welcomed. To others, this might not at all be acceptable. Nevertheless, amongst those that find it unacceptable, there might be some that are prepared to live with it. Those that cannot come to terms with this kind of scenario, that is having a past that is portrayed differently by different people, run the risk of veering towards being exclusivist. They might succumb to the tendency to hold those that portray the past differently as being “dishonest”. As a corollary to this, they might therefore claim or allege that there are certain quarters that have drawn, consciously or otherwise, inappropriate, wrong or even false lessons from past events (Patten, 2009:17).

In the circumstances, there is, therefore, a need for one to be a little more circumspect when placing trust in the ability of history to be an informant and interpreter of the past. History does not come into existence on its own free-will; it is man-made. The “objective” past is an elusive creature. Perceptions and interpretations often vary from one individual to another. These are surely challenges that all ought to be aware of right from the very start of any discussion on this subject.

### **VERSIONS OF THE SAME PAST**

Students of history are only too familiar with the prevalence of varied interpretations of past events. This has emanated from many quarters and in numerous places. Different value systems, diverse definitions of terms, even personal or national sentiments, have certainly coloured the various recollections or reconstructions of the past. Non-historians have also stepped

into the controversies and made known the sides that they support or believe in. A mention of a few of the better known, or publicly reported, outcomes of this kind of clash of interpretations would suffice to illustrate this point:

*First*, to Chinese historians and Chinese in general, the Nanking Massacre was a hideous crime that the Japanese should apologize for; however, the charge is unacceptable to the Japanese side, at least the conservative side.<sup>3</sup> Yet it has also been alleged that China has selectively excluded from the nation’s school textbooks accounts of past Chinese aggressions not only against Japan but also against Vietnam as well as Korea (Terrill, 2003:284-286).

*Second*, in 2006, the Algerian Prime Minister, Abdelaziz Belkhadem, insisted that France should admit the French crime related to the loss of millions of Algerian lives in the country’s independence struggle; the Algerian move came in the wake of a 2005 French National Assembly law that referred to “the positive role of the French presence overseas, especially in North Africa”, and praising the Algerians who took side with the French in the war for independence (cited in *The Jakarta Post*, 13/11/2006:11).

*Third*, the Beijing criticism of the Taiwan government for deleting from secondary school history textbooks phrases that link both China and Taiwan as one entity (cited in *The Star*, 1/2/2007:44).

*Fourth*, the controversy regarding the MCP (Malayan Communist Party)’s role in Malaya’s fight for independence. One historian who has no quarrel with accepting the part played by MCP has this to say: “Only in totalitarian state is there only one version – the official version – of any historical event” (Yue-Yi, 2007:6). Following the death of Chin Peng in September 2013, the

<sup>3</sup>For a detailed account of the “Nanking Massacre” from the Chinese perspective, see, for instance, Iris Chang (1997).

controversy was reignited. As a New Zealander historian puts it, “The scars of that period have not healed” (Reid, 2013).

*Fifth*, the Israeli government’s decision to accept two versions of the historical account of the creation of the state of Israel: for Arab Israeli students, the 1948 Arab-Israeli War is a “catastrophe”; and for Israeli Jewish students, a “war of independence” (cited in *The Star*, 23/7/2007:33).

With such varied conceptualizations and/or interpretations, lessons to be derived would naturally be different for different people. A Canadian historian, Professor Margaret Macmillan, has gone into great depth to analyse this issue of problematic or controversial handling of the past in her work, *The Uses and Abuses of History*.<sup>4</sup>

What then? What can one learn from history? Can one claim that people learn from history only what they wish to learn? And surely this is not taking the effort to resolve the predicament very far.

These are the kinds of challenges that have been alluded or referred to earlier in this writing. There is, therefore, a need to address these issues in order to overcome the quandary somehow, if at all possible.

**Agreeing Upon a Premise.** As a way out from this conundrum, one may suggest here that, for students of history or people in general, there is a need perhaps to draw out the obvious: to go back to basics, if one may.

As a start, there is a need perhaps to agree upon a common premise, or an assumption. This issue has been touched prior to this, though not in a conclusive manner. A basic calling of

history is to help the present generation better understand the past and derive benefits from that understanding.

It is also hoped that knowledge and understanding of the past can be utilised to chart a more meaningful future for all.

To avoid past blunders, there is a need to relook at those blunders or oversights. Of course the exercise, as already pointed out above (and that is why it cannot be conclusive), is fraught with difficulties. However, despite all that, the goal would have to be pursued regardless.

Otherwise, historical writing would become a pursuit undertaken simply for its own sake. Some might retort: what is wrong with that? Indeed, one can argue that there is absolutely nothing wrong with it if that is what one fervently desires in life (Blake, 1986:viii).

However, if, on the other hand, one is predisposed towards being a little more utilitarian in one’s approach to life, or if one cannot afford the luxury of pursuing the studying of history solely for its own sake, then one needs to assign a purpose to it. To learn from history might, then, be the generally acceptable purpose. This also means that one is not going along with what has been consistently advocated by the post-modernists.

**Focusing on the “Obvious”.** One can try to illustrate the point that one wants to make here by first explaining what is meant by the term “obvious”. At the outset, one can suggest that something that is “obvious” is something that can be generally accepted by ordinary men and women. Thus, for this particular purpose, one can pose this kind of consideration: would it not be “obvious” to all and sundry that people as a whole value freedom, abhor oppression by others and invasion of their land by outsiders? Is there not a lesson that can be learnt from the Western occupation of foreign countries and colonialism in general, Western or otherwise?

---

<sup>4</sup>See, for further information, Margaret Macmillan (2009); Simon Heffer (2009), available [online] also at <http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/5514219/The-Uses-and-Abuses-of-History-by-Margaret-MacMillan-review.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 5/3/2014]; and Tom Holland (2009), available [online] also at <http://www.theguardian.com/books/2009/apr/26/uses-abuses-history-macmillan> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 29/10/2013].

Following on the above argument, it would also be “obvious” that a people that had been subjugated by a foreign power would sooner or later retaliate or rise up against the occupying power in one form or another; hence, the independent movements that the world had witnessed in the last century across nations of the Third World.

The recalcitrant attitude of the French notwithstanding (Blake, 1986), not all colonial powers are unwilling to acknowledge their past wayward actions. Thus, the present Dutch Government, for instance, had come around to admitting past excesses and agreed to grant monetary compensation to the relatives of those who were victimized during the colonial era. In the latest case, it is related to a series of summary executions of Indonesians that took place between December 1946 and February 1947 in South Sulawesi. In that whole tragedy, thousands of people lost their lives.<sup>5</sup>

Yet up to this day we have nations, buoyed in part by their own sense of military power, resorting to the act of invading foreign nations in order to pursue whatever national interests that they wish to pursue. Does it surprise us that the attendant warfare would lead and had led to further flare-up?

### **IGNORING THE LESSONS OF HISTORY**

A seasoned and keen analyst of international affairs, Gabriel Kolko, has succinctly made the observation that executors of wars have to believe that fire-power and economic muscle hold the answer to all political and human problems. Many national leaders,

Gabriel Kolko claims, are averse to rejecting such “traditional reasoning” or “conventional wisdom” lest others might deem them unfit for national office (Kolko, 2006:173). Yet these strategies, to Gabriel Kolko, are wantonly irrational. He likened those leaders mounting such maneuvers as “blind men and women”. They are merely concerned with making a success of their political careers but in the end “states make monumental errors, and people suffer” (Kolko, 2006:173).

Wading into the discussion on the Iraq War, Robert K. Brigham has held up the war as an example of the failure of the American leadership to learn from history. He contends that the American government under Bush “learned nothing from the Vietnam War”. Consequently, this “recklessness” would “haunt U.S. foreign policy for years to come” (Brigham, 2008:177).

The Bush administration had been warned against going into Iraq. Two months before the invasion, realist scholars, John Mearsheimer and Stephen Walt, published their article, “An Unnecessary War”, in the January/February 2003 issue of *Foreign Affairs*, emphasizing the danger of the military adventure.<sup>6</sup>

However, what many American policy makers learnt from the Vietnam War (erroneously, one may say), is that they have to overcome the “Vietnam Syndrome”. Americans, it was believed should not be blighted by the Vietnam experience. They should not be forever held hostage by the fear of losing American lives in foreign military expeditions. They have to debunk, so they believe, the notion that American

<sup>5</sup>See, for further information, Bastiaan Scherpen (2013), available [online] also at <http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/netherlands-apologizes-for-indonesian-colonial-killings/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 1/11/2013]; and news entitled “Dutch Apologize for Massacre” in *The Jakarta Post* (13/10/2013), available [online] also at <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/13/dutch-apologize-massacre.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 1/11/2013].

<sup>6</sup>As cited in Knud Erik Jorgensen (2010). See also, for example, the articles entitled “Case Study 3 Realists Deeming Iraq and Vietnam Unnecessary” in <http://www.palgrave.com/politics/jorgensen/resources/casestudies/casestudy3.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 24/9/2013]; and “War with Iraq is Not in America’s National Interest” in *The New York Times* (26/9/2002), available [online] also at <http://www.bear-left.com/archive/2002/0926oped.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 28/10/2013].

military incursions oversea are destined to be in vain. In other words, America badly needs to win a war to overcome the phobia. A quick and decisive victory in Iraq, it was reasoned out, would enable Americans to prevail over the ghosts of Vietnam once and for all.

However, the expectations of the American policy makers *vis-à-vis* the Iraq campaign were rudely dashed. They had ignored the prior warning about the Iraq operation at their own peril. The hope of putting the Vietnam syndrome behind them failed to materialize. Instead, as observed by Robert K. Brigham, “There already is an Iraq syndrome, one comparable to the Vietnam syndrome that forced that [sic] United States to take a hard look at its policies and practices” (Brigham, 2008:178).

History had recorded numerous comparable tragedies. Can we then not say that the lessons of history are “obvious”, but man is also prone to act “irrationally” on many an occasion. Reflecting on the troubled times of the present world, Alan Cowell was driven to make this disturbing observation: “Whatever historians may conclude, policy makers now confront a time of imponderables where the lessons of the past, if glimpsed, do not seem to have been absorbed”.<sup>7</sup>

**Contested Notions.** What is “irrational” in the eyes of some might not be so in the eyes of others. A national leader responsible for, or who was a party to, a military onslaught, might even be prepared to justify his action by invoking his religious faith. Thus, with regard to the Iraq War, Tony Blair, the former Prime Minister of Britain, was quoted as having said that he was ready to answer before God for “those who have died or have been horribly maimed as a result of my

decisions”.<sup>8</sup>

The above notwithstanding, there is also the Western or rather the American, industrial military complex that had a vested interest in the militarization of the United States. The country’s financial establishment, the major weapons manufacturers and contractors as well as the oil and energy conglomerates are said to be very much involved in this particular effort. They, it has been alleged, have enormous influence and this surely would be difficult to overestimate (Chossudovsky, 2007:322).

War, in short, can be an economic enterprise. Therefore, when national leaders declare that they launch foreign wars in order to protect “national interests”, their words ought to be taken with a grain of salt. The interests of these conglomerates might not be too far from their minds. On this very point, Noam Chomsky, a long standing critic of American foreign policy, has caustically remarked that “national interest” is but “a technical term referring to the special interests of domestic sectors that are in a position to determine policy” (Chomsky, 2004:29).

Whatever it is, these national leaders and stakeholders in the conglomerates view world affairs from their own respective perspectives. These perspectives might be based purely on political calculations, economic considerations, or on their understanding of their religious calling. These actors are likely to defend those considerations and perspectives as “rational”.

**Rationality and Irrationality.** What must be also “obvious” to many by now is that “rationality” and “irrationality” are viewed differently by different people; again value systems, or belief systems, come into play in this matter. Thus,

<sup>7</sup>See, for further information, Alan Cowell (2013). Available [online] also at <http://www.thestar.com.my/News/World/2013/09/01/Lessons-of-the-past-not-learned/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 4/3/2014].

<sup>8</sup>As cited in Colin Brown (2003). Available [online] also at <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1429109/Campbell-interrupted-Blair-as-he-spoke-of-his-faith-We-dont-do-God.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 21/10/2013].

within this very framework, the ordering of societies based on brute power and capability can still pass as a “rational” act to some people: “rationality” then is in the eyes of the beholder. After all, as the realists are never tired of reminding those who care to listen, international relations operate in a state of anarchy.

The American case cited above is, of course, only an example. One can surely find parallels or similarities elsewhere in our present world, recent history, or in older ones. Inevitably, one would also encounter identical problems that would render the exercise of learning from history problematic.

## CONCLUSION

Given that history is “man-made” and those who study or read history are men and women who carry with them their own respective perspectives and value systems, it is difficult to imagine that people will learn the same lessons from history. One ought to appreciate, of course, the laudable goal of wanting to learn from history.

However, at the same time, one ought not to be too carried away by such a pronouncement. This is not to say that one cannot learn from history; one certainly can, but expect not that one’s view would be broadly shared by others. It will remain, whether one likes it or not, a contentious issue.

## Bibliography

- Article entitled “Case Study 3 Realists Deeming Iraq and Vietnam Unnecessary” in <http://www.palgrave.com/politics/jorgensen/resources/casestudies/casestudy3.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 24<sup>th</sup> September 2013].
- Article entitled “George Santayana” in *New World Encyclopedia*. Available [online] also at [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/George\\_Santayana](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/George_Santayana) [accessed in Shah Alam, Malaysia: 17<sup>th</sup> October 2013].
- Article entitled “War with Iraq is Not in America’s National Interest” in *The New York Times*. New York, USA: 26<sup>th</sup> September 2002. Available [online] also at <http://www.bear-left.com/archive/2002/0926oped.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 28<sup>th</sup> October 2013].
- Baba, Sidek. (2012). “Pentingya Subjek Sejarah Diperkasa” in *Utusan Malaysia*. Kuala Lumpur, Malaysia: 24<sup>th</sup> September.
- Blake, R. (1986). *The Decline of Power, 1915-1964*. London: Paladin.
- Brigham, Robert K. (2008). *Iraq, Vietnam, and the Limits of American Power*. New York: Public Affairs.
- Brown, Colin. (2003). “Campbell Interrupted Blair as He Spoke of His Faith: ‘We Don’t Do God’” in *The Telegraph*, 4<sup>th</sup> May. Available [online] also at <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1429109/Campbell-interrupted-Blair-as-he-spoke-of-his-faith-We-dont-do-God.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 21<sup>st</sup> October 2013].
- Campbell, James. (2013). “History Matters” in *New Sunday Times*. Sydney, Australia: 14<sup>th</sup> July.
- Carr, E.H. (1976). *What is History?* Middlesex: Penguin Books.
- Chang, Iris. (1997). *The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II*. New York: Basic Books.
- Chomsky, Noam. (2004). *Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance*. London: Penguin Books.
- Chossudovsky, Michel. (2007). *America’s “War on Terrorism”*. Batu Caves: Thinker’s Library.
- Cowell, Alan. (2013). “Lessons of the Past: Not Learned” in *The Star Online*, 1<sup>st</sup> September. Available [online] also at <http://www.thestar.com.my/News/World/2013/09/01/Lessons-of-the-past-not-learned/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 4<sup>th</sup> March 2014].
- Daily Express* [newspaper]. Kota Kinabalu, Malaysia: 25<sup>th</sup> August 2002.
- Gardiner, Patrick. (1961). *The Nature of Historical Explanation*. Oxford: Oxford University Press.
- Heffer, Simon. (2009). “The Uses and Abuses of History by Margaret MacMillan: Review” in *The Telegraph*, 13<sup>th</sup> June. Available [online] also at <http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/5514219/The-Uses-and-Abuses-of-History-by-Margaret-MacMillan-review.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 5<sup>th</sup> March 2014].
- Holland, Tom. (2009). “History Lives: For Good and Ill” in *The Guardian*, 26<sup>th</sup> April. Available [online] also at <http://www.theguardian.com/books/2009/apr/26/uses-abuses-history-macmillan> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 29<sup>th</sup> October, 2013].
- Jenkins, Keith. (2003). *Refiguring History: New Thoughts on an Old Discipline*. London: Routledge.
- Jorgensen, Knud Erik. (2010). *International Relations Theory: A New Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.

- Kolko, Gabriel. (2006). *The Age of War: The United States Confronts the World*. Boulder: Lynne Rienner Publishres.
- Kompas* [newspaper]. Jakarta, Indonesia: 16<sup>th</sup> June 2010.
- Macmillan, Margaret. (2009). *The Uses and Abuses of History*. London: Profile Books.
- McCullagh, C. Behan. (1998). *The Truth of History*. London: Routledge.
- New Straits Time* [newspaper]. Kuala Lumpur, Malaysia: 28<sup>th</sup> July 2000.
- News entitled "Bernama: 'Compulsory Pass for History Not Meant to Burden Students, Says Idris Jusoh'" in *Borneo Post Online*. Available [online] also at <http://www.theborneopost.com/2013/11/06/compulsory-pass-for-history-not-meant-to-burden-students-says-idris-jusoh/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 2<sup>nd</sup> December 2013].
- News entitled "Compulsory Pass for History Not Meant to Burden Students: Idris Jusoh – Bernama" in *The Malaysian Insider*. Available [online] also at <http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/compulsory-pass-for-history-not-meant-to-burden-students-idris-jusoh-bernam> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 5<sup>th</sup> March 2014].
- News entitled "Dutch Apologize for Massacre" in *The Jakarta Post*. Jakarta, Indonesia: 13<sup>th</sup> October 2013. Available [online] also at <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/13/dutch-apologize-massacre.html> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 1<sup>st</sup> November 2013].
- Patten, Chris. (2009). "History: Often Used and Many Times Abused" in *New Straits Times*. Kuala Lumpur, Malaysia: 29<sup>th</sup> July.
- Poh Ping, Lee. (2014). "Past Lessons for US and China" in *The Star Online*. Kuala Lumpur, Malaysia: 8<sup>th</sup> January. Available [online] also at <http://www.thestar.com.my/News/Regional/2014/01/08/Past-lessons-for-US-and-China/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 6<sup>th</sup> March 2014].
- Reid, Anthony. (2013). "Chin Peng: An Obituary" in *CPI (Centre for Policy Initiatives)*, 7<sup>th</sup> October. Available [online] also at [http://english.cpiasia.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2552:chin-peng-an-obituary&catid=228:commentary&Itemid=196](http://english.cpiasia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2552:chin-peng-an-obituary&catid=228:commentary&Itemid=196) [accessed in Shah Alam, Malaysia: 17<sup>th</sup> October 2013].
- Rodzi Abd Razak, Mohamad. (2009). "Pembinaan Negara Bangsa Malaysia: Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan" in *Jebat*, 36, pp.90-106. Available [online] also at <http://journalarticle.ukm.my/362/1/1.pdf> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 31<sup>st</sup> October 2013].
- Scherpen, Bastiaan. (2013). "Netherlands Apologizes for Indonesian Colonial Killings" in *Jakarta Globe*. Jakarta, Indonesia: 12<sup>th</sup> September. Available [online] also at <http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/netherlands-apologizes-for-indonesian-colonial-killings/> [accessed in Shah Alam, Malaysia: 1<sup>st</sup> November 2013].
- Terrill, Ross. (2003). *The New Chinese Empire and What it Means for the United States*. New York: Basic Books.
- The Jakarta Post* [newspaper]. Jakarta, Indonesia: 13<sup>th</sup> November 2006.
- The Malay Mail* [newspaper]. Kuala Lumpur, Malaysia: 2<sup>nd</sup> September 2012.
- The Star* [newspaper]. Kuala Lumpur, Malaysia: 1<sup>st</sup> February 2007; and 23<sup>rd</sup> July 2007.
- Tong Chia, Yeow. (2012). "History Education for Nation Building and State Formation: The Case of Singapore" in *Citizenship Teaching & Learning*, Vol.7, No.2. Available [online] also at [http://www.academia.edu/1562722/History\\_education\\_for\\_nation\\_building\\_and\\_state\\_formation\\_T](http://www.academia.edu/1562722/History_education_for_nation_building_and_state_formation_T) [accessed in Shah Alam, Malaysia: 18<sup>th</sup> October 2013].
- Windschuttle, Keith. (1996). *The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists are Murdering Our Past*. San Francisco: Encounter.
- Yue-Yi, Hwa. (2007). "Communists' Role Recognised: Historian" in *The Sun*. Kuala Lumpur, Malaysia: 7<sup>th</sup> February.

TUTY ENOCH MUAS

## Mengenal Lebih Dekat *Triad* dan Serikat Rahasia Tiongkok

**IKHTISAR:** Ketika mendengar atau membaca kata “Triad”, hampir semua orang akan menghubungkannya dengan kelompok “bawah tanah” atau kriminal di Tiongkok. Stigma itu memang tidak salah, karena dalam sejarah Tiongkok, “Triad” tercatat sebagai bagian dari Serikat Rahasia atau “Mimi Shehui”, yang aktivitasnya ada di sekitar perjudian, pelacuran, penyelundupan, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Di sisi lain, tokoh penggerak revolusi Tiongkok, Sun Yatsen, mengakui peran Serikat Rahasia dalam revolusi. Fakta yang kontradiktif tersebut menarik untuk diteliti. Bagaimana sebenarnya asal-usul dan seluk-beluk Serikat Rahasia di Tiongkok?; mengapa “Triad” yang menjadi ikon Serikat Rahasia Tiongkok sampai sekarang?; serta apa saja aktivitasnya dan bagaimana respon rakyat Tiongkok terhadapnya? Beberapa pertanyaan tersebut merupakan pokok bahasan yang dianalisis melalui pendekatan sejarah. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan secara lebih utuh tentang Serikat Rahasia di Tiongkok, terutama perkembangannya di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan “Triad” berjalan beriringan dengan perkembangan diaspora bangsa Tionghoa di seluruh dunia. Dewasa ini, baik sistem rekrutmen keanggotaan dan tata-kelola organisasi maupun aktivitas “Triad” pasti lebih kompleks. Oleh karena itu, kajian tentang “Triad” tetap relevan untuk ditelusuri dan didalami.

**KATA KUNCI:** “Triad”, Serikat Rahasia, asal-usul, seluk-beluk, kontradiksi, pendekatan sejarah, dan bangsa Tionghoa.

**ABSTRACT:** This paper entitled “Knowing More of the Triad and Secret Society in China”. When hear or read the word of Triads, almost everyone will associate it with the Chinese “under ground” or criminal community. This stigma of course did no wrong, because in Chinese history, Triads was recorded as part of a Secret Society or “Mimi Shehui”, which its activities were around gambling, prostitution, smuggling, robbery, and even murder. On the other hand, Sun Yatsen as a leader of Chinese revolution, has recognized the role of Secret Societies in the revolution. The facts of being contradictory is interesting to be researched. How exactly the origin and the ins and outs of Secret Societies in China?; why until now Triads become the icon of China Secret Societies?; and what are their activities and how the Chinese people’s response to them? The questions are the subjects that will be analyzed through historical approach. The goal is to introducing the Chinese Secret Societies in a more comprehensive way, especially their development in the 19th century until the early 20th century. The development of Triads run in tandem with the development of Chinese people diaspora around the world. Nowadays, the system of recruitment, membership, and governance of the organization and activities of Triads is certainly more complex. Therefore, study of Triads remain relevant to be searched and explored.

**KEY WORD:** Triad, Secret Societies, origin, the ins and outs of, contradiction, historical approach, and Chinese people.

### PENDAHULUAN

Kisah tentang *Triad* telah mengilhami banyak film Hongkong, Tiongkok, dan bahkan Hollywood. Umumnya, orang mengidentikkan *Triad* dengan *Mafia* di Italia, atau *Yakuza* di Jepang. Latar

belakang kisah-kisah *Triad* berputar di sekitar perjudian, pelacuran, penyelundupan, perampokan, pembunuhan, dan dunia hitam kriminal lainnya. Meskipun demikian, didalam kisah-kisah yang keras, kejam, dan

**Dr. Tuty Enoch Muas** adalah Dosen Senior di Program Studi Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademis, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: [mutu1722@yahoo.com](mailto:mutu1722@yahoo.com)

bahkan terkadang sadis itu, hampir dapat dipastikan selalu terselip nilai-nilai kesetiakawanan, kepatuhan, serta kehormatan diri dan kelompok yang harus dijunjung tinggi. Mungkin hal inilah yang menyebabkan cerita tentang *Triad* tidak pernah kekurangan penggemar. Seakan cerita tentang mereka adalah pelampiasan ekspresi sisi liar manusia yang tidak semua orang bisa melakukannya, meskipun terkadang dibutuhkan.

Dalam sejarah Tiongkok, *Triad* tercatat sebagai bagian dari Serikat Rahasia, atau *Mimi Shehui*, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan sebutan *Secret Society*. Serikat Rahasia di Tiongkok telah tumbuh dan berkembang selama ribuan tahun. Lebih menarik lagi, ternyata perannya dalam sejarah pergerakan rakyat melawan rejim yang bobrok tak dapat disangkal. Hanya saja kehadirannya seringkali tidak ditonjolkan, hal ini mungkin terkait dengan adanya unsur kerahasiaan, baik dalam organisasi maupun gerakannya.

Pentingnya peran Serikat Rahasia dalam sejarah pergerakan rakyat Tiongkok bahkan diakui pula oleh tokoh penggerak revolusi Tiongkok, yaitu Sun Yatsen. Dalam salah satu tulisannya pada tahun 1904, Sun Yatsen menyatakan sebagai berikut:

[...] 还有致会堂(中国的反满会党)的存在, 这个国家内一般都称之为中国共济会, 其宗旨乃是“反清(满洲)复明(中国)”。这个政治团体已存在了二百多年, 有数千万会员散布在整个华南: 侨居这个国家(按指美国)这内的中国人中, 约有百分之八十都属于这个会党(孙中山选集 /*Sun Zhongshan Xuanji*, 1959:61).

**Terjemahan:**

[...] selain itu masih ada satu organisasi politik (partai Tiongkok yang menentang Man), bangsa kita mengenalnya sebagai serikat saling menolong, slogannya adalah “lawan Qing (Manchu), bangkitkan Ming (Tiongkok)”. Organisasi politik ini sudah ada sejak 200 tahun lebih, memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di Tiongkok bagian selatan: 80% orang

Tionghoa yang tinggal di luar negeri (misalnya di Amerika) adalah anggota organisasi ini.

Chiang Kaishek, yang menjadi pengganti Sun Yatsen, juga memanfaatkan Serikat Rahasia untuk memperkuat posisi rejimnya. Menurut Mark Craig (2002:65), hampir semua penguasa Tiongkok di era 1920-1949 (baik *Warlord*, militer Jepang, kaum Nasionalis, maupun Komunis) memanfaatkan kalangan “bawah tanah” atau Serikat Rahasia ini dalam strategi sosial-politik mereka.

Kenyataan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, di antaranya adalah: “Bagaimana sebenarnya asal-usul dan seluk-beluk Serikat Rahasia di Tiongkok?” Bila ada begitu banyak Serikat Rahasia, mengapa *Triad* yang menjadi ikon Serikat Rahasia Tiongkok sampai sekarang? Apa saja aktivitasnya dan bagaimana respon rakyat Tiongkok terhadapnya?

Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan sejarah, dengan fokus temporal pada sekitar abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Sumber yang digunakan bukanlah sumber primer yang berbentuk dokumen-dokumen atau arsip. Meskipun demikian, baik buku-buku maupun artikel yang digunakan sebagai rujukan, sebagian besar merupakan hasil penelitian mendalam dari para peneliti yang telah terpercaya integritas keilmuannya. Proses interpretasi juga dilakukan dengan sangat hati-hati, antara lain melalui cara membandingkan data dari berbagai sumber, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dengan menarik “benang merah” yang ada di antaranya.

Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan secara lebih utuh tentang Serikat Rahasia di Tiongkok, dan semoga dapat pula membangkitkan minat untuk

penelitian tentang Serikat Rahasia atau *Triad* yang lebih beragam dan mendalam.

### **SERIKAT RAHASIA TIONGKOK: ANTARA JIAOMEN, HUIDANG, DAN TRIAD**

Kapan tepatnya saat pertama kali hadir dan berperannya Serikat Rahasia dalam masyarakat Tionghoa, tak dapat dikatakan dengan pasti. Cerita awal kehadirannya lebih banyak merupakan legenda yang menyebar dari mulut ke mulut, disamping itu adanya unsur kerahasiaan menyebabkan tidak sembarang orang bisa memasuki organisasinya. Berkaitan dengan kerahasiaan tersebut, lalu bagaimana pada akhirnya keberadaan dan peran Serikat Rahasia ini dapat terungkap dalam sejarah? Tentang hal ini, Barend Ter Haar memaparkannya seperti berikut:

Even the archival materials are never first-hand account by *Triad* members, but rather are reports, in Classical Chinese (as use in the memorials and other official documents) and bureaucratic Mandarin (*guanhua*, 官话), by non-participants, describing what they themselves had seen or otherwise summarizing information obtained during extensive interrogations [...]. This means that our archival materials are rarely recorded in the languages which *Triad* members actually spoke, the only exception being when literati or other higher-educated people were interrogated (Ter Haar, 2002:19).

Ungkapan Barend Ter Haar (2002) di atas menyebabkan peneliti harus ekstra hati-hati dalam menggunakan sumber yang berkaitan dengan Serikat Rahasia. Meskipun demikian, dalam hal kemunculan Serikat Rahasia di Tiongkok, semua sumber menyebutkan bahwa secara tradisional dalam sejarah Tiongkok dikenal dua bentuk Serikat Rahasia, yaitu *Jiaomen* dan *Huidang*. Wang Tianjiang (1963:83), dalam tulisannya yang berjudul “Shijiu Shiji Xia Banji Zhongguode Mimi Huishe” (十九世纪下半级中国的秘密会社),

menyebutkan bahwa “Sekte Teratai Putih” atau *Bailian Jiao* dapat ditunjuk sebagai representasi bentuk *Jiaomen*, dan “Serikat Langit dan Bumi” atau *Tiandi Hui* sebagai representasi bentuk *Huidang*, namun tak dapat dipastikan yang mana yang lebih dulu lahir dan berkembang di Tiongkok.

*Jiaomen*, artinya sekte, merupakan kelompok yang cenderung berorientasi pada ajaran agama (religi), khususnya pada ajaran Buddha dan ajaran Dao.<sup>1</sup> *Bailian Jiao* (Sekte Teratai Putih) yang disebut sebagai cikal bakal *Jiaomen* didirikan oleh seorang guru Buddha yang bernama Hui Yuan. Kelompok ini didirikan dengan tujuan sebagai kelompok meditasi dan penyeru *Amithaba* atau *Amida*.<sup>2</sup>

*Bailian Jiao* berkembang pada sekitar tahun 376-634 Masehi, namun setelah periode tersebut sampai abad ke-14 tidak terdengar lagi kegiatannya (Ward & Stirling, 1925, I:4). Menurut William Stanton (1900), dalam bukunya yang berjudul *The Triad Society or Heaven and Earth Association*, pada masa pemerintahan Hui Zong dari dinasti Song (1102-1119), sebuah gerombolan yang dipimpin oleh Song Jiang dan Lu Junyi mengucapkan sumpah setia yang dilanjutkan dengan minum darah semua anggotanya yang sudah dicampur dengan anggur. Kejadian ini dianggap sebagai saat berdirinya *Bailian Jiao*, karena sejak saat ini

<sup>1</sup>Mulanya orientasi kelompok ini hanya pada Buddhisme, sesuai dengan sejarah kelahiran *Bailian Jiao* (Sekte Teratai Putih) yang didirikan oleh seorang rahib Buddha. Pada masa pemerintahan Kangxi (1644-1722), dikeluarkan maklumat suci yang isinya, antara lain, menentang ajaran Buddha dan Dao, dan memerintahkan agar pengikut kedua ajaran ini dihukum. Padahal ajaran Buddha dan Dao telah dibiarkan tumbuh berdampingan dengan ajaran Konfusius oleh kaisar-kaisar Cina sejak abad ke-9. Hal ini menjadi salah satu sebab berbaurnya ajaran Buddha dan Dao dalam masyarakat, serta menjadi satu kekuatan moral yang bertentangan dengan Konfusianisme. Lihat, selanjutnya, J.M.S. Ward & W.G. Stirling (1925:3).

<sup>2</sup>*Amithaba* atau *Amida* adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Sang Buddha, yang dikenal sebagai 5 *Jina* (penakluk yang menang). *Amithaba* artinya sinar cahaya yang tak terbatas. Lihat, selanjutnya, Depag RI (1980:25-26).

kegiatan *Bailian Jiao* banyak terdengar (Stanton, 1900:2). Bahkan menurut Tao Chengzhang (1957:101), dalam artikelnya yang berjudul “Jiao Hui Yuanliu Kao” (教会源流考), *Bailian Jiao* adalah salah satu kekuatan penyokong dinasti Song.

Pada sekitar tahun 1279, bangsa Mongol dapat mengalahkan dinasti Song dan menguasai Tiongkok, kemudian mendirikan dinasti Yuan dengan Kubilai Khan sebagai kaisar pertamanya. Pemerintahan Kubilai Khan sampai dua orang penerusnya berlangsung dengan baik, namun setelah itu pemerintahan mulai lemah, terutama setelah Xun Di naik tahta pada tahun 1333. Pada masa itu terjadi berbagai gerakan rakyat dan puncaknya adalah pada tahun 1344. Saat itu Han Shantong memimpin gerakan dan mengumumkan bahwa ia adalah keturunan pendiri *Bailian Jiao*, serta menyampaikan kedatangan kembali *Maitreya* atau Sang Buddha (Ward & Stirling, 1925, I:5; dan Stanton, 1900:2-3).

Han Shantong dalam gerakannya dibantu oleh empat pimpinan lainnya dan seorang rahib Buddha yang bernama Zhu Yuanzhang. Gerakan ini mengenakan sorban merah sebagai ciri khasnya, sehingga dikenal sebagai gerakan “Sorban Merah”. Dinasti Yuan akhirnya dapat dijatuhkan oleh gerakan tersebut, lalu berdirilah dinasti Ming. Inilah sukses *Bailian Jiao* yang pertama kali tercatat dengan jelas dalam sejarah Tiongkok.

Kaisar pertama dinasti Ming adalah Zhu Yuanzhang, kemudian dikenal sebagai kaisar Hong Wu yang memerintah tahun 1368-1399. Konon, aksara *Hong* dari nama Hong Wu inilah yang diambil sebagai nama Serikat Rahasia yang lain, yaitu *Hongmen*. Kelompok ini dianggap sebagai cikal-bakal *Huidang*. Pengikut *Hongmen* ini memuja langit sebagai ayah dan memuja bumi sebagai ibu, sehingga disebut juga *Tiandi Hui* atau “Serikat Lagit dan Bumi” (de Barry, Wingtsu &

Burton eds., 1960:650).

*Huidang*, artinya asosiasi atau perserikatan, merupakan kelompok yang lebih banyak didasari oleh kebutuhan untuk saling menolong dan saling melindungi, khususnya dalam urusan duniawi. Saat kelahirannya yang tepat, juga tidak dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan bahwa organisasi semacam Serikat Rahasia ini sudah ada sejak zaman dinasti Han (206 SM – 220 M),<sup>3</sup> tapi tak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara organisasi tersebut dengan yang berkembang kemudian (Stanton, 1900:1).

Sekitar akhir dinasti Han Timur (220 M), tiga orang jenderal ditunjuk oleh kaisar untuk mematahkan pemberontakan yang terjadi waktu itu. Ketiga orang tersebut adalah Guandi, Liubei, dan Zhangfei.<sup>4</sup> Sebelum berangkat berperang, mereka mengucapkan sumpah setia untuk mati dan hidup bersama, dengan mengorbankan sapi jantan hitam dan kuda putih di kebun persik. Kejadian ini ditunjuk sebagai sumber tradisi pengucapan sumpah dan pengorbanan dalam upacara pelantikan anggota *Hongmen*, namun tak dapat dijadikan titik awal berdirinya kelompok *Hongmen* atau *Huidang* (Ward & Stirling, 1925, I:1-2; dan Stanton, 1900:1).

Ada satu legenda lain yang erat kaitannya dengan kelahiran *Huidang*, dan sering kali disebut juga sebagai

<sup>3</sup>Sejak zaman dinasti Han (206 SM – 220 M) sudah ada organisasi yang hampir sama dengan Serikat Rahasia, diantaranya adalah: (1) *Zhimei* atau Perkumpulan Alis Oranye, pada masa peralihan dinasti Han Barat ke Han Timur sekitar tahun 16-17 M. Perkumpulan ini mengadakan gerakan menentang pembaharuan Wangmang; (2) *Tongma* atau Perkumpulan Kuda Tembaga; dan (3) *Tiejing* atau Perkumpulan Tulang Kering Besi. Lihat, selanjutnya, William Stanton (1900:1).

<sup>4</sup>Guandi, Liubei, dan Zhangfei dalam sejarah Tiongkok dikenal sebagai pemimpin perang pada akhir dinasti Han. Ketiga orang ini kemudian mendirikan tiga negara, yaitu Wei, Wu, dan Shu. Pemerintahan tiga negara ini dalam sejarah Tiongkok dikenal sebagai zaman tiga negara (*epoch 3 negara*) yang berlangsung pada tahun 221-277 Masehi. Lihat, selanjutnya, J.M.S. Ward & W.G. Stirling (1925, I:1-2).

kisah kelahiran *Triad*. Legenda ini berawal pada sekitar masa pemerintahan Kangxi dari dinasti Qing, yang memerintah tahun 1664-1722. Saat itu terjadi pemberontakan suku Eleuth<sup>5</sup> dari Asia Tengah di Tiongkok bagian utara. Untuk mengatasi pemberontakan ini, kaisar meminta bantuan para rahib Buddha dari kuil Shaolin<sup>6</sup> yang terletak di provinsi Fujian, karena para rahib ini dikenal sebagai ahli seni beladiri. Ternyata pemberontakan memang dapat dipadamkan, sehingga kaisar berkenan memberikan kedudukan atau jabatan kepada rahib-rahib tersebut sebagai hadiah. Para rahib menolak pemberian ini karena lebih mementingkan kehidupan damai di kuil.

Penolakan ini, ditambah dengan hasutan beberapa pejabat istana yang merasa iri atas keberhasilan para rahib, menyebabkan kaisar memerintahkan untuk membakar kuil dan membasmi semua pengikutnya. Serangan mendadak ini menyebabkan kuil Shaolin porak-poranda dan para rahib berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Dalam usaha menyelamatkan diri, para rahib menemukan pedupaan ajaib yang bertuliskan *Fan-Qing Fu-Ming* yang berarti “Hancurkan Qing Bangkitkan Ming”, dan tulisan *Cong-Tian Xing-Dao* yang berarti “Bertindak Mengikuti Perintah dari Langit”.

Para rahib, yang hanya tersisa lima orang, berhasil meloloskan diri dari

<sup>5</sup>Suku bangsa Eleuth adalah suku bangsa yang menguasai Sungaria di Mongolia Barat, tepatnya di daerah pegunungan Altai, dikenal juga sebagai suku bangsa Kalmuks. Wilayahnya berbatasan dengan Tiongkok sehingga sering terjadi bentrokan, terutama berkaitan dengan usaha ekspansi kedua belah pihak. Di bawah pimpinan *Kontaisha* (Raja) Ziwang Araptan (1643-1727), yang memerintah Sungaria pada tahun 1697-1727, suku Eleuth ini sering melakukan serangan ke Tiongkok, diantaranya pada tahun 1715 ketika Tiongkok diperintah oleh kaisar Kangxi. Lihat, selanjutnya, Arthur W. Hummel ed. (1943-1944, I:265 dan II:756-759).

<sup>6</sup>*Shaolin* adalah nama sebuah kuil yang didirikan oleh seorang rahib Buddha yang bernama Da Sunyeye pada zaman dinasti Tang. Terletak di desa Jiulianshan, kecamatan Futian, Fuzhou, provinsi Fujian. Lihat, selanjutnya, William Stanton (1900:29).

kejaran tentara kaisar. Mereka tiba di provinsi Guandong, dan bertemu dengan lima orang bekas pejabat dinasti Ming yang menjadi pimpinan gerakan anti Qing, kemudian bersepakat untuk bersatu melawan dinasti Qing. Di tempat mereka bersembunyi, ada satu organisasi dinasti Qing yang dipimpin oleh Chen Jinan, maka bersatulah mereka dan mengungsi ke kota Muyang di provinsi Fujian. Di tempat ini kegiatan gerakan dilakukan secara rahasia, antara lain dengan mendirikan toko obat yang sebenarnya digunakan sebagai tempat pertukaran informasi diantara anggota-anggota organisasi anti dinasti Qing tersebut.

Kejadian itu kemudian menjadi titik-tolak berbagai kegiatan *Hongmen* atau *Tiandi Hui* atau *Triad*, yang semuanya kemudian dikenal sebagai kelompok *Huidang*. Legenda atau kisah ini mempunyai berbagai macam versi dan variasi, namun semuanya berkesimpulan sama, yakni sejak saat itu *Tiandi Hui* menjadi sangat terkenal di Tiongkok (Stanton, 1900:29-38; Davis, 1977:8; dan O’Callaghan, 1978:11).

*Triad*, atau tiga serangkai, merupakan istilah yang digunakan oleh Sinolog Barat pada awal abad ke-19 untuk menunjuk kelompok *Huidang*. Umumnya, nama-nama serikat dari kelompok ini selalu menyertakan 3 (tiga) unsur kehidupan, yaitu: langit, bumi, dan manusia. Contohnya, *San Dian Hui* (三点会) atau “Serikat Tiga Itik”; *San He Hui* (三合会) atau “Serikat Tiga Persekutuan”; *San He Hui* (三河会) atau “Serikat Tiga Sungai”, dan lain-lain. Sejak itu, sebutan *Triad* menjadi sebutan umum untuk menunjuk organisasi “bawah tanah” atau Serikat Rahasia Tiongkok sampai sekarang.

## KEANGGOTAAN DAN SISTEM ORGANISASI SERIKAT RAHASIA

Pada dasarnya, keanggotaan Serikat Rahasia bersifat terbuka, dalam arti tidak membedakan, baik kelas, asal

daerah, usia, maupun jenis kelamin. Di antara dua bentuk Serikat Rahasia, yaitu *Jiaomen* dan *Huidang*, terlihat perbedaan, baik ciri keanggotaan maupun sistem organisasinya. Paparan berikut ini akan membahas perbedaan tersebut, termasuk perkembangan keanggotaan dan organisasi Serikat Rahasia pada abad ke-19, serta posisi kaum perempuan didalamnya.

Sesuai dengan tempat lahir dan awal gerakan *Jiaomen* yang berpusat di pedesaan, maka anggota *Jiaomen* sebagian besar adalah orang desa yang hidup dari pertanian, usaha kerajinan tangan, golongan tuan tanah kecil, *gentry*,<sup>7</sup> dan pegawai rendahan di desa. Sistem organisasi yang diterapkan mengikuti “model kepemimpinan kepala keluarga” atau *Jia Zhang Zhiguanli Xingshi*,<sup>8</sup> dan berorientasi pada sistem klan atau *Zongfa*.

Oleh karena itu, dalam *Jiaomen* berlaku peraturan berjenjang yang ketat, dimana tidak semua permasalahan yang ada dalam organisasi diketahui, apalagi diputuskan bersama oleh semua anggotanya. Dalam sistem seperti ini, anggota yang berstatus pengikut tidak boleh mendengarkan pembicaraan pimpinan, dan faktor kesetiaan

<sup>7</sup>*Gentry* adalah salah satu status dalam masyarakat feodal Tiongkok, dalam bahasa Mandarin disebut *Shenshi*. Pengertian *gentry* di Tiongkok berbeda dengan di Inggris. Kaum *gentry* di Inggris adalah kelompok pemilik tanah di pedesaan, sedangkan di Tiongkok kaum *gentry* dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan atau gelar akademis yang diperoleh melalui ujian negara. Kaum *gentry* ini biasanya merupakan pemuka masyarakat di wilayahnya, derajat pendidikannya menentukan jabatannya dalam pemerintahan. Kaum *gentry* ini merupakan kelompok elite dalam masyarakat; dalam keadaan damai, mereka merupakan pendukung setia, bahkan dapat bertindak sebagai penentu dan pengambil pajak, mengepalai proyek pekerjaan umum, memonopoli perdagangan, membentuk milisi lokal, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam keadaan goncang, mereka dapat menjadi kekuatan yang membahayakan pemerintah, sama bahayanya dengan kekuatan Serikat Rahasia. Lihat, selanjutnya, Chang Chungli (1971:3); dan Feiling Davis (1977:2-26).

<sup>8</sup>“Model Kepemimpinan Kepala Keluarga” (家长制管理形式 atau *Jia Zhang Zhiguanli Xingshi*) adalah sistem kepemimpinan dimana keputusan akhir ada di tangan ketua dan tidak bisa diganggu gugat.

mendapat tekanan utama (Tianjiang, 1963:90).

Sedangkan *Huidang* pada mulanya juga banyak tergantung pada sistem kepemimpinan klan dan tuan tanah. Hal ini terlihat dalam *Tiandi Hui*; namun memasuki tahun 1860-1870, *Tiandi Hui* tidak banyak berkembang, peranannya diambil-alih oleh *Gelao Hui* dan Serikat Rahasia yang lain, yang berkembang pesat terutama pada akhir abad ke-19. *Gelao Hui* mulanya terbentuk dari tentara yang diberhentikan, yaitu setelah berakhirnya gerakan Taiping.<sup>9</sup>

Kemudian untuk meningkatkan jumlah anggota, kelompok *Gelao Hui* ini bergerak di kalangan buruh angkutan dan pelayaran, penganggur, dan gelandangan. Setelah itu mereka juga bergerak ke desa-desa, untuk menyerap keanggotaan dari kalangan petani dan orang-orang desa, sehingga keanggotaan *Huidang (Gelao Hui)* jauh lebih majemuk bila dibandingkan dengan keanggotaan *Jiaomen*. Berdasarkan keanggotaan yang demikian majemuk, maka sistem organisasi yang diterapkannya pun jauh lebih terbuka, dan ada kesejajaran antara pimpinan dan anggotanya. Permasalahan yang ada dalam organisasi umumnya diketahui oleh semua anggotanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Jiaomen* mencerminkan organisasi petani yang mendapat pengaruh kuat dari sistem ekonomi feodal dan sistem klan, sehingga sistem organisasinya bersifat tertutup. Sedangkan *Huidang* adalah organisasi kaum penganggur dan gelandangan yang tumbuh dari rasa persamaan nasib, sehingga mempunyai sistem organisasi yang lebih terbuka.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dan gerakan Serikat Rahasia pada abad ke-19, perbedaan ciri keanggotaan dan sistem organisasi

<sup>9</sup>Gerakan atau pemberontakan *Taiping* adalah gerakan rakyat yang dipimpin oleh Hong Xiuquan, terjadi pada tahun 1850-1864, dengan tujuan menghancurkan pemerintahan dinasti Qing dan mendirikan negara *Taiping Tianguo*.

**Tabel 1:**  
Kategori dan Sebutan Anggota

Kategori Anggota	Sebutan	Artinya
I. Tiga utama atau <i>Shangsan / Laodage</i>	<i>Laodage</i> <i>Laoyer</i> <i>Laosan</i>	Saudara tua Saudara ke dua Saudara ke tiga
II. Tiga menengah atau <i>Zhongsan / Erge</i>	<i>Laosi</i> <i>Laowu</i> <i>Laoliu</i>	Saudara ke empat Saudara ke lima Saudara ke enam
III. Tiga bawahan atau <i>Xiasan / Sandi</i>	<i>Laoqi</i> <i>Laoba</i> <i>Dajiu</i> atau <i>Xiaojiu</i>	Saudara ketujuh Saudara ke delapan Anggota biasa atau pengikut

(Sumber: Feiling Davis, 1977:103).

antara *Jiaomen* dan *Huidang* sudah tidak menyolok lagi. Semuanya telah berbaur, sehingga dikenal satu pola Serikat Rahasia yang umum. Hanya nama-nama perserikatan yang membedakan mereka, seringkali nama ini dibuat sebagai pengganti nama Serikat Rahasia yang mengalami kegagalan dalam suatu gerakan, dengan maksud menjaga kerahasiaan dalam usaha melanjutkan gerakan tersebut.

Wang Tianjiang (1963) menyebutkan bahwa anggota pendukung Serikat Rahasia pada abad ke-19 adalah orang-orang yang mengalami tekanan pada masa pemerintahan setengah feodal setengah kolonial, yaitu masa setelah Perang Candu. Tekanan di berbagai bidang kehidupan pada masa ini menghasilkan “barisan gelandangan yang tidak memiliki apa-apa” atau *Youmin Wuchanzhi Duiwu*.<sup>10</sup> Kelompok ini terdiri dari petani miskin, pengrajin kecil, pedagang kecil, buruh pelabuhan, buruh angkutan, tentara yang diberhentikan, dan sebagainya (Tianjiang, 1963:83-84).

Berdasarkan uraian Wang Tianjiang (1963) ini, Jean Chesneaux dalam bukunya yang berjudul *Secret Society in China*, menyimpulkan bahwa anggota Serikat Rahasia dapat dibagi dalam

lima kategori, yaitu: (1) orang-orang yang menginginkan penyesuaian dan peningkatan kelas; (2) orang-orang yang ingin mempertahankan kehormatan atau kejayaan dirinya, atau juga orang yang mencari pertolongan dalam kesulitan dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri; (3) orang-orang yang tanpa pekerjaan tetap; (4) orang yang ingin menjadi orang yang terkuat secara fisik, pengacau, dan tukang berkelahi; serta (5) pencuri, bandit, dan sebagainya (Chesneaux, 1971:74).

Selain itu juga ada klasifikasi anggota yang dilakukan berdasarkan kategori tingkatan dan fungsi, biasanya terdiri dari sembilan tingkatan. Kesembilan tingkatan ini dibagi lagi dalam tiga kategori keanggotaan, untuk membedakan tingkat hukuman dan kewajiban, seperti terlihat dalam tabel 1.

Klasifikasi menurut fungsi mencerminkan pola hubungan di antara tingkatan. Tiga tingkatan utama terdiri dari ketua, wakil ketua, dan instruktur, atau *Shanzhu*, *Fu Shanzhu*, dan *Xiansheng*. Tingkat ini merupakan kelompok pengambil keputusan akhir dari berbagai kebijaksanaan umum dan bertanggung jawab atas keberhasilan jalannya organisasi. Tingkatan tiga menengah adalah barisan depan yang berfungsi terutama dalam upacara-upacara pelantikan anggota. Orang-orang ini mempunyai hubungan yang dekat dengan para leluhur. Di luar upacara, kelompok ini bertanggung

<sup>10</sup>*Youmin Wuchanzhi Duiwu* (游民无产者队伍).

Sebutan ini menggambarkan betapa parahnya keadaan sosial-ekonomi Tiongkok pada masa pemerintahan setengah feodal setengah kolonial, dimana rakyat miskin semakin lama semakin bertambah jumlahnya.

jawab dalam memilih dan menentukan calon anggota yang potensial, juga bertanggung jawab dalam memperluas pengaruh organisasi. Tingkatan tiga bawahan merupakan anggota biasa yang berfungsi sebagai agen, penghubung, atau pembawa/penyebarkan berita-berita organisasi. Mereka merupakan orang-orang yang tersebar di berbagai tempat, dan secara periodik harus melaporkan berbagai hal yang berhubungan dengan organisasi.

Susunan organisasi dibagi dalam 5 wilayah tingkat I sebagai 5 markas, dan 5 wilayah tingkat II sebagai 5 markas cabang. Ini dimaksudkan untuk mengingat 5 orang rahib dan 5 orang pimpinan pemberontak yang berhasil meloloskan diri dari kejaraan tentara dinasti Qing dan mendirikan Serikat Rahasia. Pembagian wilayah ini sekaligus dibedakan dengan warna dan bentuk bendera serta lambang tulisan tertentu sebagai ciri khas masing-masing wilayahnya, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, markas besar Fujian dengan cabang Gansu, warna bendera hitam, berbentuk belah ketupat dengan lambang tulisan 江 (*Jiang*) dan 彪 (*Biao*), yang berarti perhiasan.

*Kedua*, markas besar Guandong dengan cabang Guangxi, warna bendera merah, berbentuk segitiga dengan lambang tulisan 洪 (*Hong*) dan 寿 (*Shou*), yang berarti dirgahayu atau panjang umur.

*Ketiga*, markas besar Yunnan dengan cabang Sichuan, warna bendera oranye, berbentuk persegi empat dengan lambang tulisan 泪 (*Lei*) dan 合 (*He*), yang berarti persatuan.

*Keempat*, markas besar Hunan dengan cabang Hubei, warna bendera putih, berbentuk jajaran genjang dengan lambang tulisan 淇 (*Qi*) dan 和 (*He*), yang berarti keselarasan.

*Kelima*, markas besar Zhejiang dengan cabang Jiangxi dan Henan, warna bendera hijau, berbentuk lingkaran dengan lambang tulisan

泰 (*Tui*) dan 同 (*Tong*), yang berarti kebersamaan (Stanton, 1900:38-40).

Masing-masing markas mempunyai wilayah dan kekuasaan yang otonom, serta mempunyai pimpinan sendiri-sendiri. Seringkali markas-markas ini berjalan sendiri-sendiri, tidak berhubungan satu sama lain, bahkan kadang-kadang saling bersaing, sehingga pembagian wilayah seperti di atas tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Chesneaux, 1971:31). Kepemimpinan dipilih terutama berdasarkan senioritas atau usia; tapi sejalan dengan perkembangan organisasi, maka kepemimpinan ditentukan oleh kesetiaan dan lamanya keanggotaan. Cara yang digunakan untuk memilih pimpinan bersifat terbuka, dimana setiap anggota berhak memberikan suaranya.

Hal lain yang menarik dari keanggotaan dan sistem organisasi Serikat Rahasia adalah praktek emansipasi perempuan. Dalam masyarakat Tionghoa tradisional, kaum perempuan diharuskan tunduk sepenuhnya kepada orang tua, keluarga, dan suaminya. Kesempatan mereka untuk menunjukkan kemampuannya di luar lingkungan keluarga, seperti bidang sosial, ekonomi, ataupun politik adalah sangat terbatas. Pendidikan formal bagi perempuan ditiadakan, perempuan dilarang ikut dalam ujian negara, atau menjadi pegawai pemerintah. Kebiasaan membatasi kaki perempuan sejak kecil (*lily foot*), lebih memperjelas betapa sempitnya ruang gerak dan rendahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Keadaan seperti di atas terutama terjadi di kalangan keluarga kaya, sedangkan dalam keluarga miskin perempuan biasanya lebih berperan. Selain harus mengurus rumah tangga, mereka juga membantu pekerjaan suaminya di ladang, atau berjualan di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa

perempuan di kalangan keluarga miskin, memainkan peran penting dalam menegakkan ekonomi keluarga, sehingga kaum perempuan di sini lebih punya hak bicara dalam pengambilan keputusan, atau ada kesejajaran antara kedudukan laki-laki dan perempuan (Davis, 1977:94-95).

Dalam Serikat Rahasia, yang sebagian besar anggotanya adalah dari kalangan keluarga miskin, laki-laki dan perempuan mendapat penghargaan yang seimbang. Kesempatan yang dimiliki anggota perempuan untuk mencapai kedudukan atau peran penting dalam organisasi, sama besarnya dengan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki. Untuk menghindari konflik yang tak diinginkan, biasanya kaum perempuan dijadikan bagian tersendiri dari Serikat Rahasia yang bersangkutan. Seperti dalam organisasi Boxer, ada bagian yang disebut *Lentera Merah*, *Lentera Biru*, *Lentera Hijau*, dan sebagainya, yang merupakan bagian khusus untuk perempuan (Davis, 1977:63 dan 96).

Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan dalam Serikat Rahasia sangat besar, mereka tidak hanya merupakan kekuatan penyokong tapi juga dapat menjadi kekuatan penentu. Hal ini terlihat dalam gerakan Taiping, dimana perempuan berperan langsung dalam peperangan (Chesneaux ed., 1972:68).

*Bailian Jiao* juga memberi kebebasan kepada perempuan untuk memasuki organisasinya. Bagi perempuan yang sudah menikah, mereka disumpah untuk tidak membicarakan rahasia organisasi meskipun kepada suaminya sendiri. Bila sepasang suami-istri menjadi anggota Serikat Rahasia yang sama, maka mereka mempunyai hak dan kekuasaan yang lebih besar dalam organisasi. Jika si istri lebih dulu menjadi anggota, maka ia tetap berhak menjadi ketua yang terutama mengurus masalah intern organisasi (Davis, 1977:95).

Paparan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa Serikat Rahasia menghargai perempuan, yang dalam masyarakat Tionghoa pada saat itu sangat dianggap remeh dan tidak berarti. Bahkan, Serikat Rahasia menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan penyokong organisasinya. Semua hal tersebut turut menunjang tumbuhnya minat rakyat Tiongkok untuk menyokong dan bahkan ikut dalam aktivitas Serikat Rahasia.

### **RITUAL, SUMPAH, DAN UPACARA PELANTIKAN**

Ritual dalam Serikat Rahasia diciptakan untuk melengkapi keabsahannya, sebagai satu bentuk organisasi massa yang terbentuk karena merasa tidak sesuai lagi dengan norma-norma Konfusianisme yang dikembangkan oleh pemerintahan dinasti Qing (golongan orthodox). Meskipun demikian, tidak berarti Konfusianisme tidak berpengaruh sama sekali dalam Serikat Rahasia; persepsi moral Konfusianisme sedikit-banyak tetap mempengaruhi Serikat Rahasia, contohnya adalah dalam hal pemujaan kepada para leluhur (Ward & Stirling, 1925, II:26). Kaidah-kaidah ritual Serikat Rahasia dapat dikatakan merupakan gabungan dari berbagai ajaran yang berkembang di Tiongkok, terutama Daoisme dan Buddhisme.

Bentuk ritual yang paling dominan adalah upacara pelantikan anggota baru yang didalamnya tercakup pengucapan atau pengambilan sumpah dari calon anggotanya. Sumpah dalam Serikat Rahasia terdiri dari 36 butir, yang benar-benar harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Pelanggaran terhadap sumpah dapat diancam dengan hukuman mati. Selain itu, ada juga upacara-upacara lain yang terutama dilakukan bila hendak mengadakan gerakan, penyerangan, ataupun kegiatan lainnya. Upacara semacam ini biasanya diadakan bersamaan dengan pekan raya,

atau pada hari-hari pasar. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan tidak menarik perhatian pihak lain.

Penyelenggaraan upacara pelantikan anggota waktunya harus ditentukan berdasarkan perhitungan hari dan bulan yang baik. Juga sedapat mungkin menunggu sampai jumlah calon anggota yang akan dilantik memadai, yaitu sekitar 50 orang atau lebih. Dalam keadaan darurat/khusus, bisa juga diselenggarakan upacara kecil tanpa memperhatikan jumlah anggota. Dalam kondisi semacam itu, upacara dilakukan di rumah salah satu anggota, dan dihadiri oleh seorang atau lebih tokoh penting organisasi. Upacara pelantikan yang besar biasanya dilaksanakan dalam satu ruangan tertentu (rahasia), atau di salah satu kuil yang sudah diteliti sebelumnya untuk memenuhi syarat kerahasiaan. Tempat semacam ini disebut *Muyangcheng* atau “Kota Muyang”.

Di dalam *Muyangcheng* terdapat ruangan suci yang disebut *Honghuating* atau “Ruangan Bunga Merah”. Di sinilah bagian terpenting dari upacara pelantikan anggota baru dilaksanakan. Dalam upacara pelantikan yang lengkap, kegiatan ritual terbagi dalam tiga tahap, yaitu: (1) pertunjukan atau dramatisasi mitos asal-usul Serikat Rahasia yang dilakukan di ruang utama; (2) upacara pengambilan sumpah yang dilakukan di *Honghuating*; dan (3) perayaan atau pesta yang dilakukan selama beberapa hari.

Sebelum upacara itu dilaksanakan, para anggota harus dalam keadaan bersih dan segar. Mereka mengenakan pakaian katun putih, tangan kanan, bahu, dan dada harus terbuka, kaki celana sebelah kiri digulung sampai batas lutut, dan mengenakan sandal jerami, dengan ikat kepala berwarna merah.

Semua bentuk dan rangkaian ritual tersebut, dari sisi fungsinya, memiliki efektivitas yang bersifat *pasif*

dan *aktif*. Secara *pasif*, ritual menjadi mitos kelahiran, sumber ideologi, dan estetika bagi Serikat Rahasia. Dalam ritual ditegaskan bahwa tujuan utama kelahiran Serikat Rahasia adalah untuk mengembalikan keadilan dan kehormatan dalam pemerintahan dan kehidupan bangsa Tionghoa. Upaya balas dendam terhadap pemerintahan dinasti Qing merupakan usaha untuk memperoleh keadilan dan kehormatan tersebut.

Secara *aktif*, kegiatan ritual berperan langsung secara psikologis untuk mengekalkan persatuan diantara anggotaa Serikat Rahasia. Ide-ide perserikatan yang abstrak terungkap secara nyata dalam kegiatan ritual ini. Dengan demikian, pada dasarnya ritual dalam Serikat Rahasia dimaksudkan untuk memelihara dan memperkokoh persatuan dan solidaritas di kalangan anggotanya (Davis, 1977:143-144).

#### **KARTU ANGGOTA, BAHASA RAHASIA, DAN SANKSI**

Serikat Rahasia harus semaksimal mungkin merahasiakan, baik keberadaan maupun kegiatannya. Meskipun demikian, komunikasi dan kontrol terhadap atau diantara anggotanya harus tetap berjalan. Oleh karena itu dibuatlah alat-alat atau sarana yang memungkinkan roda organisasi berjalan lancar, diantaranya adalah kartu anggota, bahasa rahasia, dan hukuman.

Kartu anggota diberikan kepada para anggota Serikat Rahasia setelah upacara pelantikan anggota. Kartu tersebut digunakan sebagai tanda pengenal, atau untuk menunjukkan kebenaran keanggotaan seseorang dalam Serikat Rahasia tertentu. Bentuk, ukuran, dan warna kartu anggota beraneka ragam, namun umumnya dibuat berdasarkan aturan penulisan *Bagua* atau “8 diagram”, dan dicetak di atas sehelai kain. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari resiko robek dan sebagainya. Warna yang dipilih

biasanya putih, merah, atau kuning.

Huruf-huruf dalam kartu anggota tersebut dicetak dalam bentuk oktagonal dengan bentuk segitiga. Ciri khusus perserikatan dicetak di tengah-tengah dalam warna merah tua. Huruf-huruf itu biasanya ditulis dengan aturan atau rancangan khusus atau tersendiri, dengan maksud agar tidak mudah dipahami oleh yang bukan anggota perserikatan tersebut (Stanton, 1900:72-74).

Bahasa khusus sangat diperlukan oleh Serikat Rahasia. Hal itu berkaitan dengan status organisasinya yang illegal, bertentangan dengan pemerintah, dan bersifat rahasia, maka Serikat Rahasia harus benar-benar dapat menjamin kerahasiaannya. Untuk itu diciptakan tanda-tanda atau isyarat khusus untuk memudahkan komunikasi diantara sesama anggotanya dan tentu saja hanya dipahami oleh anggota-anggotanya. Inilah yang disebut sebagai “bahasa rahasia”.

Berikut ini beberapa contoh “bahasa rahasia” yang dipergunakan oleh Serikat Rahasia di Tiongkok:

*Pertama*, menggunakan gerakan tangan atau badan, misalnya untuk menyatakan 5 elemen kehidupan yaitu: (1) Emas, kedua tangan diangkat dan ujung-ujung jari bertemu di atas kepala; (2) Kayu, kedua tangan disilangkan di atas perut; (3) Bumi, jongkok, ujung jari kedua tangan bertemu di depan dada; (4) Api, kaki dikangkangkan, tangan diangkat dengan siku ditekuk, pergelangan tangan ditekuk dengan jari-jari lurus ke samping; dan (5) Air, kaki dikangkangkan, kaki kanan ditekuk, berat badan bertumpu di kaki kanan, dua tangan di pinggang (Ward & Stirling, 1925, I:110-111).

*Kedua*, menggunakan bentuk huruf/ aksara atau tulisan tertentu. Huruf/ aksara kadang-kadang dipecah, ditambah, digabung, ditukar, atau diganti dengan nomor-nomor, dan lain-lain.

*Ketiga*, mengenakan pakaian dengan cara yang ganjil. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa ia adalah anggota Serikat Rahasia, ia melipat kerah bajunya ke dalam dan menggulung lengan baju sebelah kanan (Ward & Stirling, 1925, I:122).

*Keempat*, menggunakan satu barang dengan cara tertentu, misalnya dalam menghadirkan cangkir teh/minuman, pipa, atau ketika memberikan sirih (Stanton, 1900:125-126).

*Kelima*, menggunakan ungkapan khusus, biasanya diambil dari ungkapan yang digunakan dalam acara ritual. Misalnya, bila seseorang ingin mengetahui identitas orang lain yang bertemu di jalan, ia akan menabrak orang itu, bila orang tersebut bertanya, “Apakah matamu buta?”, lalu dijawab, “Saya tidak buta, mata saya lebih besar dari matamu”, maka itu berarti kedua orang tersebut adalah sama-sama anggota Serikat Rahasia.

*Keenam*, menggunakan bahasa slang *Triad*. Misalnya, untuk menyatakan anggota serikat = 香 = *xiang* = wangi; dan untuk bukan anggota = 风 = *feng* = angin (Stanton, 1900:93-94).

Serikat Rahasia selain mempunyai aturan dalam ritual, juga menciptakan aturan tentang sanksi bagi anggotanya yang menyerupai hukum atau undang-undang dalam satu negara. Sanksi ini mengatur berbagai bentuk hukuman yang tepat bagi berbagai macam pelanggaran, baik pelanggaran terhadap sumpah maupun terhadap peraturan organisasi lainnya. Hukuman ini biasanya berbentuk pemenggalan kepala, pemotongan satu atau kedua belah telinga, dan pemukulan dengan tongkat bambu dalam jumlah hitungan tertentu.

Hukuman diberikan berdasarkan pertimbangan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan, tidak dilakukan secara drastis, dan bentuknya dapat merupakan gabungan tiga bentuk hukuman di atas. Tidak ada hukuman yang berbentuk pembakaran

hidup-hidup, ataupun dengan pencekikan. Hukuman juga dilakukan berdasarkan pertimbangan tingkat keanggotaan. Orang yang berada pada tingkat tiga utama (*shangsan*), bila melakukan pelanggaran dapat diancam dengan hukuman mati; hukuman ini harus dilakukan sendiri dengan sukarela, sesuai dengan permintaan atau persetujuan seluruh anggota. Tingkat tiga menengah (*zhongsan*), bila melakukan pelanggaran harus melakukan bunuh diri atas perintah pimpinan Serikat. Sedangkan, tingkat tiga bawahan (*xiasan*) bila melakukan pelanggaran harus menjalani hukuman mati atas perintah *Tongkat Merah* atau *Bendera Merah*.<sup>11</sup>

Perbuatan-perbuatan yang dianggap merupakan pelanggaran, sehingga harus dijatuhi hukuman menurut aturan sanksi, umumnya meliputi dua hal. *Pertama*, pelanggaran terhadap aturan hubungan seks, di antara sesama anggota atau kerabatnya, telah ditetapkan bahwa hubungan seks yang dilakukan oleh sesama anggota adalah tabu, sebagaimana aturan hubungan seks diantara saudara sekandung. *Kedua*, pelanggaran terhadap larangan menindas atau mengorbankan orang lain untuk keuntungan pribadi secara ekonomi. Seperti tindakan mengkhianati anggota yang lain untuk mendapatkan suatu hadiah, menjual rahasia perserikatan kepada orang luar, atau menggelapkan keuangan perserikatan, dan lain sebagainya (Davis, 1977:148-149).

Sanksi dalam Serikat Rahasia berfungsi untuk menguatkan solidaritas dan persatuan diantara anggota, dengan jalan mencegah terjadinya konflik atau

perselisihan diantara mereka. Selain itu juga berfungsi untuk mencegah terbukanya rahasia perserikatan ke dunia luar, yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian atau kelalaian anggotanya.

### **PERKEMBANGAN KEGIATAN SERIKAT RAHASIA DAN RESPON MASYARAKAT**

Tumbuh dan berkembangnya organisasi berbentuk Serikat Rahasia tidak terlepas dari perkembangan yang melingkupi masyarakatnya. Berlandaskan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Tiongkok pada abad ke-19, maka setidaknya ada dua hal yang berkontribusi langsung terhadap tumbuh-suburnya Serikat Rahasia di Tiongkok. Kedua hal tersebut adalah: (1) penyelewengan ajaran-ajaran Konfusius oleh pemerintahan dinasti Qing; dan (2) tekanan ekonomi yang semakin memberatkan kehidupan rakyat.

Konfusianisme merupakan faham yang sudah mendarah-daging dalam masyarakat Tionghoa. Meskipun ajaran Konfusius sesungguhnya lebih merupakan pemikiran filsafat dan sistem nilai atau etika, tapi pengaruhnya terasa di segala sendi kehidupan masyarakat. Pada zaman dinasti Tang (618-907) ditetapkan sistem ujian negara bagi calon pegawai pemerintah (Fung, 1952, II:xii); dan pada zaman dinasti Qing, sistem ujian ini sepenuhnya mengacu kepada ajaran Konfusius, sehingga ajaran Konfusius semakin dalam tertanam pada masyarakat Tiongkok (Davis, 1977:8).

Konfusius dalam ajarannya menekankan pentingnya kesetiaan, seperti tercermin dalam konsep *Xiao* atau “berbakti”, yang menghendaki agar anak berbakti kepada orang tua, tidak hanya sekedar sebagai tindakan balas budi, melainkan harus didasari oleh rasa hormat dan kasih-sayang. Ajaran ini pula yang mendasari pentingnya pemujaan kepada para leluhur dalam masyarakat Tiongkok.

<sup>11</sup>“Tongkat Merah” atau “Bendera Merah”, atau *Hongguan*, adalah salah satu jabatan dalam Serikat Rahasia yang menyerupai kepala keamanan. Jabatan ini merupakan jabatan penting dalam kepengurusan, karena orang yang menjabatnya harus merupakan orang yang kuat secara fisik dan ahli bela diri. Salah satu tugasnya adalah melatih anggota dalam ilmu bela diri dan sekaligus sebagai pelindung keamanan anggota perserikatan secara keseluruhan. Lihat, selanjutnya, Sean O’Callaghan (1978:30).

Konsep *Li* atau “ritus” antara lain mengatur pola hubungan diantara sesama manusia yang dikenal dengan sebutan *Wu Lun*, yaitu hubungan antara anak dan orang tua, menteri dengan bawahan, suami dengan istri, kakak dengan adik, serta hubungan diantara sesama teman. Konfusius mengharapkan agar manusia dapat menjadi “manusia sejati” atau *Junzi*, yang mempunyai sifat-sifat setia, adil, penuh kebaikan, bijaksana, dan sopan-santun. Semua sifat tersebut tercakup dalam konsep *Ren* atau “arif bijaksana” (de Barry, Wingtsu & Burton eds., 1960:25-27). Bila semua ajaran tersebut dijalankan dengan baik, diharapkan akan terjadi harmoni atau keselarasan dalam kehidupan perorangan, kehidupan keluarga, masyarakat, dan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di zaman pemerintahan dinasti Qing, didirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum yang sepenuhnya berdasarkan ajaran Konfusius. Pengajaran diberikan seperti dalam khotbah-khotbah, sehingga tidak menjamin mutu keberhasilannya. Guru yang mengajar tidak begitu antusias dan seringkali mengajar tanpa perasaan, sehingga inti semua pelajaran dapat dirangkum dalam kalimat “bayarlah pajakmu, maka terpeliharalah kedamaianmu” (Davis, 1977:10-11).

Konsep *Junzi* sebenarnya mengandung pengertian yang amat luas. Bagi Konfusius, setiap orang dapat mencapai atau menjadi *Junzi*, bila ia dapat menerapkan kelakuan yang baik dalam kehidupannya. Setelah dikeluarkannya Maklumat Suci (zaman Kangxi),<sup>12</sup> yang dijadikan pedoman ujian

negara, pengertian *Junzi* menjadi kabur.

Kata *Junzi* kemudian cenderung diartikan sebagai satu jabatan atau gelar bangsawan, karena orang yang lulus ujian negara dianggap menguasai dengan baik ajaran Konfusius; dan karena itu ia dapat menjadi pegawai pemerintah (Davis, 1977:10-11). Perkembangan itu menyebabkan sasaran ajaran Konfusius menjadi sulit tercapai. Untuk mencapai status *Junzi*, rakyat secara formal harus mengikuti ujian negara dengan birokrasi yang tidak mudah. Pada saat yang sama, rakyat lebih banyak bergelut dengan kesulitan hidup, dan kesempatan untuk menghafal ajaran Konfusius sangat sedikit, sehingga sangat sulit untuk lulus dalam ujian negara tersebut.

Di sisi lain, Konfusius membagi masyarakat dalam 4 strata, yaitu: pegawai, petani, pengrajin, dan pedagang. Berdasarkan stratanya, petani ada di atas pedagang, hanya satu tingkat di bawah pegawai. Sektor pertanian yang merupakan penunjang utama perekonomian Tiongkok, seharusnya dapat menunjang pembagian strata di atas. Dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena petani di Tiongkok lebih banyak tergantung pada pemilik tanah atau kelompok tuan tanah, sehingga petani tetap saja merupakan golongan terbesar dari orang-orang miskin.

Pegawai pemerintah terutama diambil dari golongan atas dan menengah dan para pedagang, atau dengan kata lain diambil dari golongan yang lebih mempunyai uang dan kesempatan untuk belajar, hanya kadang-kadang saja diambil dari golongan petani (Chesneaux, 1971:4-6). Hal itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam masyarakat dan menyuburkan tindakan korupsi.

Keadaan yang demikian menyebabkan rakyat mencari bentuk

<sup>12</sup>Maklumat Suci Kangxi, yang terdiri dari 16 asas muara politik, dikeluarkan pada tahun 1672. Maklumat suci ini dipelajari oleh para pelajar dan disebarluaskan pada rakyat setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Cina. Isi 16 asas muara politik ini antara lain menekankan agar rakyat senantiasa menjaga keselarasan hidup dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat; serta dengan menjauhi ajaran-ajaran yang dilarang oleh pemerintah. Di samping itu, rakyat dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar pajak

dan senantiasa patuh agar terhindar dari hukuman seluruh keluarga. Lihat, selanjutnya, Immanuel C.Y. Hsu (197:102).

lain dari keteraturan yang ada, untuk mendapatkan kepuasan. Mereka kemudian mendapatkannya dalam Daoisme, yang dikembangkan oleh Lao Zi, yaitu seorang filsuf Cina yang hidup pada zaman Zhanguo, 403-256 SM (Sebelum Masehi). Ajaran Dao menyerukan manusia untuk kembali ke alam, tidak perlu memaksakan diri dan melawan alam. Dengan kata lain, manusia hendaknya bekerja sesuai kemampuannya, dan sewaktu-waktu ia harus bisa hidup dalam kesunyian sambil memikirkan kehidupannya sendiri.

Buddhisme yang masuk ke Cina sekitar abad ke-1 Masehi, juga menjadi alternatif panutan bagi rakyat. Ajaran Buddha yang banyak mengacu pada keprihatinan, seperti puasa dan meditasi untuk mencapai kenikmatan *Nirwana* atau “alam langgeng”, yaitu alam kehidupan sesudah mati, terasa lebih menjanjikan. Konsep-konsep Daoisme dan Buddhisme ini banyak yang bertentangan dengan Konfusianisme, terutama dalam hal penghargaan terhadap nilai manusia sebagai individu, namun tetap diminati karena menawarkan hal yang berbeda (de Barry, Wingtsu & Burton eds., 1960:51-53 dan 306-312).

Ajaran Daoisme dan Buddhisme kemudian berbaur dalam masyarakat, sehingga sulit membedakannya lagi dan menjadi satu panutan masyarakat. Fungsi ajaran Daoisme dan Buddhisme dalam masyarakat tidak terbatas hanya sebagai “candu bagi rakyat”. Pertentangan filosofis antara ajaran Daoisme dan Buddhisme dengan Konfusianisme, dan adanya kecenderungan rakyat untuk berkelompok, melibatkan kedua ajaran ini dalam sistem organisasi klan dan kegiatan pemberontakan (Davis, 1977:12).

Pemberontakan itu sendiri sebenarnya memang dimungkinkan dalam Konfusianisme, yaitu apabila *Tian Ming* atau “perintah (mandat)

dari langit”, yang menunjuk kaisar sebagai mediator antara rakyat dan *Tian*, tidak dijalankan dengan baik atau diselewengkan. Dalam keadaan ini rakyat berhak melakukan “pencabutan mandat” atau *Ge Ming*, yang dalam bahasa Mandarin juga berarti “revolusi” (Chesneaux, 1971:6).

Kelompok pemberontak ini semakin berkembang dan kemudian disebut sebagai kelompok *heterodox*, yang bertentangan dengan kelompok *orthodox* (pemerintah). Kelompok *heterodox* ini menyokong terbentuknya organisasi gelap yang kemudian dikenal sebagai Serikat Rahasia. Maklumat Suci yang dikeluarkan pemerintah dinasti Qing, melarang orang berkhotbah dan melakukan prosesi keagamaan. Hukum tambahan dalam Code Besar Qing (*Da Qing Luli*) melarang orang membentuk perkumpulan lebih dari 20 orang laki-laki. Di samping itu, pemerintah dinasti Qing sering menyerang kuil-kuil yang dianggap sebagai sarang pemberontak dan penghasut. Semua ini membangkitkan rasa anti dinasti Qing dan semangat perlawanan rakyat, dan menyuburkan tumbuhnya Serikat Rahasia di Tiongkok (Davis, 1977:13).

Sementara itu, pemerintahan dinasti Qing pada akhir abad ke-19 mulai dilanda berbagai krisis, yang kemudian mengarah pada kemunduran pemerintahan. Krisis ekonomi merupakan krisis yang langsung dirasakan akibatnya oleh rakyat, sehingga sangat mempengaruhi keadaan sosial-politik dalam negeri. Timbulnya berbagai krisis ini terutama disebabkan oleh kebobrokan aparat pemerintah sendiri, yang tercermin dari semakin meluasnya tindakan korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak sarana umum yang tidak dikelola dengan baik, misalnya pada tahun 1852-1853, tanggul yang tidak diurus menyebabkan air sungai Kuning (*Huanghe*) mengikis dan menghancurkan bagian tepi

sungai di wilayah Kaifeng. Sungai ini kemudian berubah alirannya, menuju laut di sebelah utara semenanjung Shandong, 800 kilometer dari muara asalnya di sebelah selatan. Akibatnya, daerah-daerah luas yang dilaluinya menjadi rusak. Bencana kelaparan menimpa beberapa daerah, seperti provinsi Henan pada tahun 1847, daerah lembah sungai Panjang tahun 1849, dan provinsi Hunan tahun 1850 (Chesneaux, Bastid & Bergere, 1976:86). Pertambahan penduduk yang pesat dan mulai masuknya pengaruh asing, terutama setelah Perang Candu, semakin memperburuk krisis ekonomi yang melanda Tiongkok pada masa itu.

Dalam krisis ekonomi yang demikian parah, pemerintah dinasti Qing masih juga mewajibkan rakyat untuk membayar pajak tanah. Tarif pajak semakin tinggi dan harus dibayar tunai yang disesuaikan dengan kurs perak dan tembaga. Di samping itu, para pemilik tanah terus memaksakan pekerjaan kepada para petani penggarap tanahnya. Rakyat yang sebagian besar petani menjadi semakin menderita.

Tekanan ekonomi yang demikian berat menyebabkan timbulnya rasa tidak puas, kecewa, dan marah di kalangan rakyat. Keadaan ini memudahkan tumbuhnya solidaritas sosial diantara mereka, maka di sinilah berperan Serikat Rahasia sebagai penggalang persatuan yang didasari oleh rasa senasib. Kelompok Serikat Rahasia inilah yang kemudian banyak mengorganisir gerakan anti dinasti Qing.

Keinginan kalangan yang tertekan, terutama yang tertekan secara ekonomi untuk memperoleh ketentraman dan keinginan untuk mendapatkan tempat bergantung, merupakan motivasi utama masuknya seseorang kedalam Serikat Rahasia, sehingga rasa senasib menjadi landasan utama kokohnya persatuan dalam Serikat Rahasia. Saling tolong-menolong serta saling melindungi, di

antara sesama anggota, merupakan tujuan dan bentuk kegiatan utama Serikat Rahasia.

Secara umum tampak bahwa kegiatan Serikat Rahasia lebih banyak berbentuk gerakan atau pemberontakan. Tujuan utama gerakan dan pemberontakannya itu ialah untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan pemerintahan. Bila ditinjau secara politik, tampak ada keinginan untuk memerdekakan Tiongkok dari pemerintah asing atau dinasti Qing. Hal ini tercermin dari slogan gerakannya yang berbunyi *Fan-Qing Fu-Ming* atau "Hancurkan Qing Bangkitkan Ming" (Davis, 1977:73).

Perampokan bersenjata juga sering dilakukan oleh anggota Serikat Rahasia, seperti penyerangan terhadap iring-iringan yang membawa upeti dari pemerintah daerah ke pusat, dan penyerangan ke penjara serta kantor-kantor administrasi pemerintah. Sasaran utama perampokan biasanya adalah golongan orang kaya, seperti tuan tanah, pedagang besar, dan sebagainya.

Perampokan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dana dalam menyokong kelangsungan hidup mereka, atau kelompok rakyat miskin yang merupakan bagian terbesar dari anggota Serikat Rahasia. Mereka melakukan kegiatan ini di bawah slogan *Dafu Jipin* atau "Pukul si Kaya dan Tolong si Miskin" (Chesneaux, 1971:61).

Menurut Feiling Davis (1977:74-78), dalam bukunya yang berjudul *Primitive Revolutionaries of China*, ada tujuh macam tujuan dan kegiatan yang dilakukan Serikat Rahasia, yaitu:

*Pertama*, menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan (misalnya terluka dalam perjalanan), dan melepaskannya dari ancaman.

*Kedua*, menolong orang yang sedang dalam kesulitan atau tekanan ekonomi.

*Ketiga*, menyelesaikan atau mengatasi perselisihan, misalnya ada seseorang anggota yang melakukan penyelewengan yang serius, maka

dewan harus mengambil keputusan untuk mencapai keadilan, atau bila terjadi perselisihan diantara sesama anggota/saudara.

*Keempat*, melindungi keuangan anggota secara fisik. Dalam Serikat Rahasia tidak dikenal sistem bank, maka diantara sesama anggota harus saling menjaga milik mereka, tidak boleh saling mencuri.

*Kelima*, menyelenggarakan pertemuan persaudaraan secara massal, seperti upacara pelantikan anggota baru, atau festival untuk mempererat persaudaraan.

*Keenam*, mengurus pemakaman orang yang mempunyai hubungan dengan salah satu anggota. Pada saat itu semua anggota sedapat mungkin bisa berpartisipasi, namun bila yang meninggal adalah seorang anggota, maka anggota yang lain tidak boleh hadir dalam pemakamannya. Hal ini adalah untuk menjaga kerahasiaan organisasi, karena biasanya kematian anggota Serikat Rahasia disebabkan oleh hal-hal yang tidak biasa (karena dibunuh atau lainnya).

*Ketujuh*, menjadi perwakilan dalam kerja sama usaha ekonomi dengan Serikat Rahasia lainnya. Misalnya dalam pembagian keuntungan dari usaha perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Biasanya tempat seperti itu merupakan penyamaran pusat kegiatan Serikat Rahasia.

Tujuan dan bentuk kegiatan seperti terangkum di atas menyebabkan Serikat Rahasia di era pemerintahan dinasti Qing, khususnya di era pertengahan sampai akhir abad ke-19, mendapat sambutan dan bahkan didambakan oleh rakyat. Perannya sebagai inisiator gerakan rakyat Tiongkok juga sangat menonjol, namun setelah berakhirnya Revolusi Xinhai (1911), keterlibatan Serikat Rahasia dalam gerakan politik semakin berkurang.

Setelah jatuhnya pemerintahan dinasti Qing, kegiatan politik banyak diambil-alih oleh organisasi lain, seperti

partai politik, organisasi profesi, dan organisasi sosial lainnya (persatuan pedagang, persatuan cendekiawan, dan lain-lain). Sejak itu, kegiatan Serikat Rahasia lebih menonjol dalam dunia kriminal. Kegiatan mereka terutama berkembang di daerah-daerah pelabuhan besar, seperti Shanghai dan Hongkong (Chesneaux, 1971:34). Dalam dunia politik, Serikat Rahasia tidak lagi menjadi inisiator gerakan, namun cenderung menjadi alat para penguasa atau kelompok lainnya untuk mencapai, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan mereka.

## **KESIMPULAN**

Serikat Rahasia adalah salah satu bagian unik dari sejarah Tiongkok. Keunikan itu antara lain terlihat dari kontradiksi-kontradiksi yang melingkupinya. Namanya “Serikat Rahasia” sehingga bergerak di “bawah tanah”, namun dampak gerakannya mampu mereshahkan bahkan meruntuhkan rejim penguasa; aktivitasnya berada di lingkaran dunia hitam yang ditabukan oleh masyarakat, namun kehadirannya disambut dan bahkan didambakan oleh masyarakat; anggotanya mampu berperilaku kejam bahkan sadis terhadap musuh, namun kesetiakawanan dan kehormatan diri menjadi nilai-nilai pokok yang harus dipatuhi dan dijalani.

Kontradiksi-kontradiksi tersebut seolah menguatkan teori kontradiksi yang menyatakan bahwa adanya kontradiksilah yang menyebabkan kehidupan manusia terus bergerak dan berubah. Teori ini diyakini kebenarannya oleh pemimpin legendaris Tiongkok modern, Mao Zedong.<sup>13</sup>

Sejak berdirinya RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Serikat Rahasia

---

<sup>13</sup>Mao Zedong adalah pemimpin Tiongkok yang berhasil memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 1 Oktober 1949. Selama masa pemerintahannya, “Teori Kontradiksi” (矛盾论), yang merupakan interpretasinya atas “Dialektika Materialisme”, telah menjadi salah satu landasan bagi berbagai kebijakan yang diambilnya.

atau *Triad* mendapat tekanan dari pemerintah, dan keberadaannya di Tiongkok pun dianggap ilegal. Meskipun demikian, hampir dapat dipastikan bahwa secara umum masyarakat mengetahui dan mengakui bahwa *Triad*, dengan beragam aktivitasnya, masih ada diantara mereka. Bahkan sebagian dari mereka masih kerap berhubungan dan memanfaatkan kehadiran kelompok “bawah tanah” tersebut, terutama di kalangan pedagang dan pengusaha.

Dunia memang terus berubah, namun organisasi yang terbentuk berlandaskan “saling tolong”, “persaudaraan”, dan “rasa senasib” sulit disangkal eksistensinya dan sangat tidak mungkin diberantas. Justru, organisasi-organisasi semacam inilah yang seringkali ada di balik keberhasilan bisnis kaum Tionghoa di luar Tiongkok.

Perkembangan *Triad* adalah berjalan beriringan dengan perkembangan diaspora bangsa Tionghoa di seluruh dunia. Dewasa ini, baik sistem rekrutmen keanggotaan dan tata-kelola organisasi maupun aktivitas *Triad* pasti lebih kompleks. Oleh karena itu, pengetahuan tentang sejarah dan seluk-beluk *Triad* tetap relevan untuk ditelusuri dan didalami.

## Bibliografi

- Chengzhang, Tao (陶成章). (1957). ”Jiao Hui Yuanliu Kao” (教会源流考) dalam *Xinhai Geming* (辛亥革命), Vol.III, hlm.99-111.
- Chesneaux, Curwen [ed]. (1972). *Popular Movement and Secret Societies in China, 1840-1950*. Stanford California: Stanford University Press.
- Chesneaux, Jean. (1971). *Secret Society in China in the Nineteenth and Twentieth Centuries*. Hongkong, Singapore, and Kuala Lumpur: Heineman Educational Books (Asia) Ltd., translated by Gillian Netle.
- Chesneaux, Jean, Marianne Bastid & Marie Claire Bergere. (1976). *China: From Opium Wars to the 1911 Revolution*. New York: Pantheon Books, translated by Anne Destiny.
- Chuli, Chang. (1971). *The Chinese Gentry: Studies on Their Role in Nineteenth Century Chinese Society*. Taipei: Xunyu Tushu, Taiwan edition.
- Craig, Mark. (2002). “The Chinese Underworld: Historical Secret Society Antecedents and the Contemporary Period” dalam *Chinese Triads: Perspectives on Histories, Identities, and Spheres of Impact*. Singapore: Singapore History Museum.
- Davis, Feiling. (1977). *Primitive Revolutionaries of China: A Study Secret Societies of Late Nineteenth Century*. London and Hanley: Rontledge & Kegan Paul.
- de Barry, W.M. Theodore, Chang Wingsu & Watson Burton [eds]. (1960). *Record of Civilization Source and Studies, No.LIV-LVI, Introduction to Oriental Civilization: Source of Chinese Tradition*. New York: Columbia University Press.
- Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia]. (1980). *Kitab Suci Sanghyang Kamahayanikan: Naskah Terjemahan dan Penjelasannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fung, Yulan. (1952). *A History of Chinese Philosophy*, Volume I & II. Princeton: Princeton University Press, translated by Derk Bodde.
- Hsu, Immanuel C.Y. (1970). *The Rise of Modern China*. Taiwan: Rainbow Bridge Book Company.
- Hummel, Arthur W. [ed]. (1943-1944). *Eminent Chinese of Ching Period, 1644-1912*, 2 Vols. Washington D.C.: US Government Printing Office.
- O’Callaghan, Sean. (1978). *The Triad: The Illustrated Inside Story of the Chinese Mafia*. London: Cox 7 Wimen Ltd.
- Stanton, William. (1900). *The Triad Society or Heaven and Earth Association*. Shanghai, Yokohama, and Singapore: Kelly & Walsh Ltd.
- Sun Zhongshan Xuanji* (孙中山选集). (1959). Shangjuan (上卷), Beijing (北京): Renmin Chubanshi (人民出版社).
- Ter Haar, Barend. (2002). “Myth in the Shape of History: Elusive Triad Leaders” dalam *Chinese Triads: Perspectives on Histories, Identities, and Spheres of Impact*. Singapore: Singapore History Museum.
- Tianjiang, Wang (王天奖). (1963). “Shijiu Shiji Xia Banji Zhongguode Mimi Huishe” (十九世纪下半级中国的秘密会社) dalam *Lishi Yanjiu* (历史研究), No.2, hlm.83-100.
- Ward, J.M.S. & W.G. Stirling. (1925). *The Hung Society or the Society of Heaven and Earth*, 2 Vols. London: Baskerville Press Ltd.



**Film tentang Triad**

(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 23/2/2014)

Kisah tentang *Triad* telah mengilhami banyak film Hongkong, Tiongkok, dan bahkan Hollywood. Umumnya, orang mengidentikkan *Triad* dengan *Mafia* di Italia, atau *Yakuza* di Jepang. Latar belakang kisah-kisah *Triad* berputar di sekitar perjudian, pelacuran, penyelundupan, perampokan, pembunuhan, dan dunia hitam kriminal lainnya. Meskipun demikian, di dalam kisah-kisah yang keras, kejam, dan bahkan terkadang sadis itu, hampir dapat dipastikan selalu terselip nilai-nilai kesetiakawanan, kepatuhan, serta kehormatan diri dan kelompok yang harus dijunjung tinggi.

SITI NORKHALBI HAJI WAHSALFELAH

## Sejarah Sosio-Budaya Kraftangan di Brunei Darussalam: Barangan Logam dan Kain Tenunan

**IKHTISAR:** Dari catatan sejarah menunjukkan bahawa Negara Brunei Darussalam kaya dengan warisan khazanah budaya material. Budaya material ini adalah merupakan hasil pertukangan tangan, atau kraftangan, yang dicipta untuk memenuhi keperluan masyarakat yang selalunya mempunyai kepentingan bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan semasa. Budaya material mempunyai peranan yang wajar dan realistik dalam kehidupan, sama ada di rumah atau pada peringkat komuniti. Kraftangan ialah suatu peninggalan yang diwariskan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Penghasilan kraftangan ini juga adalah sumber ekonomi yang dapat membantu memperbaiki status ekonomi pengeluar. Di samping itu, hasil kraftangan ini juga mempunyai kepentingan simbolik, seperti memberikan perlambangan identiti budaya dan bangsa. Kertas kerja ini akan membincangkan beberapa jenis kraftangan yang dihasilkan oleh masyarakat Brunei dan kepentingannya dalam masyarakat Brunei. Di samping itu akan dilihat juga peranan masyarakat dan pihak kerajaan dalam memastikan kesinambungan pengeluaran dan penggunaan budaya material ini sebagai suatu langkah yang penting dalam usaha untuk mempertahankan warisan budaya atau identiti ke-Brunei-an.

**KATA KUNCI:** Budaya material, kraftangan, logam, kain tenunan, sumber ekonomi, jatidiri dan identiti bangsa, serta masyarakat Brunei.

**ABSTRACT:** This paper entitled "Socio-Cultural History of Handicrafts in Brunei Darussalam: Metal and Fabric Weave". The historical record shows that Brunei Darussalam is rich in heritage of material cultural. This material culture is the result of crafts that are created to meet the needs of the community which often have an interest in accordance with the changes and developments. Material culture had a reasonable and realistic in life, whether at home or at the community level. Handicraft is a legacy passed down from one generation to another generation. Handicraft production is also of economic resources that can help improve the economic status of the manufacturer. In addition, handicrafts also have symbolic significance, such as providing representation and cultural identity of the nation. This paper will discuss several kinds of handicrafts produced by the Brunei and its interest in the Brunei community. In addition will be seen the role of society and the government to ensure the continuity of production and consumption of material culture as an important step in the effort to defend the cultural heritage or identity of the Bruneian.

**KEY WORD:** Material culture, handicrafts, metal, cloth weaving, economic resources, self-esteem and national identity, and community of Brunei.

### PENDAHULUAN

Dari catatan sejarah menunjukkan bahawa Negara Brunei Darussalam kaya dengan khazanah budaya material. Istilah "budaya material" ini juga merangkumi hasil pertukangan tangan, atau kraftangan, yang dicipta untuk memenuhi keperluan masyarakat yang

selalunya mempunyai kepentingan sesuai dengan perubahan dan perkembangan semasa. Budaya material mempunyai peranan yang wajar dan realistik dalam kehidupan, sama ada di rumah atau pada peringkat komuniti. Di samping itu, hasil kraftangan ini juga mempunyai kepentingan simbolik, seperti perlambangan identiti

Siti Norkhalbi Haji Wahsalfelah, Ph.D. ialah Pensyarah di Akademi Pengajian Brunei UBD (Universiti Brunei Darussalam), Jalan Tunku Link, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: [norkhalbi.wahsalfelah@ubd.edu.bn](mailto:norkhalbi.wahsalfelah@ubd.edu.bn)

budaya dan bangsa.

Kraftangan ialah suatu peninggalan yang diwariskan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Menurut sejarah, manusia mula mencipta barangan kraft di antara 8000 tahun Sebelum Masehi (Mat Arus, 2002). Malah keupayaan manusia untuk membuat barangan kraft adalah jauh lebih awal sebelum mereka mencipta tulisan. Dari itu, barangan kraft ini adalah merupakan bukti utama dan peninggalan, atau kesan legasi, yang tertua sekali tentang ekspresi budaya (Schlereth, 1985).

Terdapat berbagai jenis kraftangan, termasuk pembuatan tembikar, anyaman, pertukangan kayu, pertukangan logam, dan kain tenunan. Kertas kerja ini hanya akan menumpukan perbincangan tentang pengeluaran dan penggunaan kraftangan yang diperbuat dari logam seperti keris, *celapa*<sup>1</sup> dan gangsa, dan kain tenunan; serta kepentingan barangan kraftangan ini dalam masyarakat Brunei.

### **SEJARAH PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN HASIL KRAFTANGAN DI BRUNEI DARUSSALAM**

Tarikh sebenar tentang kewujudan kraftangan di Brunei masih belum dapat ditentukan. Namun terdapat bukti yang menunjukkan bahawa barangan hasil kraftangan mungkin telah pun wujud di Brunei seawal-awalnya dalam abad ke-7 Masehi. Berdasarkan kajian arkeologi, dimana penggalian yang dibuat oleh Tom Harrison pada tahun 1952-1953 di Kota

---

<sup>1</sup>*Celapa* ialah tempat untuk menaruh sirih pinang. Di Brunei Darussalam, terdapat berbagai jenis tempat menaruh sirih pinang yang merangkumi *celapa*, *tipa*, dan *kaskol*. Dalam kertas kerja ini ketiga-tiga istilah akan digunakan untuk merujuk tempat menaruh sirih pinang sesuai dengan taraf pengguna atau pemilikinya. *Celapa* ini berubah namanya sesuai dengan taraf pembesar diraja tertentu. *Celapa* yang dianugerahkan kepada Wazir dan Kepala Ceteria dikenali sebagai *kaskol*, manakala bagi Ceteria Besar, Ceteria Pengalasan Besar, dan Ceteria Pengalas Damit, serta Manteri-manteri pula dipanggil *tipa*.

Batu, telah menemukan pelbagai artifak yang digunakan dalam pembuatan kain tenunan seperti pemintal benang, penyisir benang, pasa, alat petenunan, alat pemukul benang, bekas pencelup kain, dan juga ditemui alat yang digunakan dalam pertukangan logam, seperti acuan tanah berbentuk tiub yang dipercayai sebagai bekas acuan untuk membuat bedil serta artifak yang diperbuat dari tembaga. Pertarikan *radiocarbon* yang dilakukan telah menunjukkan pertarikan di antara tahun 800 hingga 1850 Masehi (Pg Hj Osman, 2002). Ini membuktikan bahawa kegiatan bertukang tangan telah pun wujud di Brunei pada sekitar abad ke-7 Masehi.

Pada bulan Mei 1999, penyelamatan arkeologi telah dilakukan di sebuah pulau kecil di kawasan Kota Batu dan menemukan kesan tinggalan tahi besi. Empat artifak yang berbentuk seperti tiub atau ruas bulu yang diperbuat dari tanah liat dengan campuran bahan-bahan seperti arang, pecahan batu quartz, batu pasir, dan kulit padi (Pg Hj Osman, 2002). Galian terbaru yang dilakukan di Kampung Limau Manis pada bulan Oktober 2002, juga telah menemukan alat-alat bertenun kain (Pg Hj Osman, 2003). Penemuan terbaru ini merupakan bukti yang mengukuhkan bahawa penduduk tempatan mempunyai kemahiran dalam kraftangan kain tenunan dan logam.

Pengeluaran dan penggunaan barangan kraftangan, seperti kain tenunan, barangan tembaga, emas dan perak, bukan suatu yang asing di kalangan masyarakat Brunei (Haji Wahsalfelah, 2006b). Menurut catatan awal yang dibuat oleh pengembara-pengembara asing yang datang ke Brunei, banyak menyebutkan kemahiran bertukang tangan ini tertumpu di Kampong Ayer.

Di zaman sebelum naungan British, Kampong Ayer bukan sahaja merupakan pusat pemerintahan tetapi juga merupakan pusat kebudayaan

dan perekonomian yang sangat penting (Abdullah al-Habsyi, 1983/1984; dan Haji Serudin, 1996). Pada ketika itu, terdapat beberapa buah kampung yang dinamakan bersempena dengan kemahiran atau pekerjaan penduduk kampung (Haji Ibrahim, 1996a). Spencer St. John (1962) ada menyebutkan nama-nama kampung atas kemahiran penduduknya, di antaranya ialah “Kampong Pandai Besi” yang penduduknya mahir bertukang besi; dan “Kampong Pandai Emas”<sup>2</sup> bagi tempat kediaman tukang emas, perak, dan bertenun kain.

Bukti lain yang merujuk kepada catatan sejarah pula memberikan andaian bahawa asal-usul kraftangan di Brunei adalah dari pertembungan pengaruh China, India, dan Jawa. Brunei pada suatu ketika dulu pernah menjadi pelabuhan penting, atau *entreport*, kepada pedagang-pedagang asing yang datang dari India dan China. Brunei juga telah dicatatkan mengimpot bahan-bahan mentah seperti benang sutera yang berwarna-warni dan timah dari China (Hirth & Rockhill, 1966; dan Pg Hj Osman, 2002).

Satu bukti yang menunjukkan adanya pengaruh Jawa tentang asal-usul kraftangan ini ialah dengan merujuk catatan tentang persabungan ayam di antara Awang Alak Betatar, Raja Brunei yang pertama, sebelum memeluk agama Islam dengan Betara Majapahit. Taruhannya, jika Betara Majapahit kalah maka ia harus menyerahkan kapal beserta segala isinya mesti diserahkan kepada Raja Brunei. Manakala jika Raja Brunei kalah, maka baginda terpaksa menyerahkan negeri Brunei di bawah kekuasaan Majapahit.

Dalam persabungan itu, ayam Awang Alak Betatar telah menang dan ini bermakna Betara Majapahit terpaksa menyerahkan kapal beserta isinya kepada Raja Brunei. Di dalam

kapal tersebut termasuk 40 orang tukang, termasuk tukang tembaga, emas dan perak, serta tukang tenun kain (Haji Ibrahim, 1985); dan mereka ini ditempatkan di Kampung Sungai Kedayan.

Dan ini juga dinyatakan oleh Peter Blundell (1923:86-87), yang membuktikan bahawa penduduk Kampung Sungai Kedayan tersebut memang mahir dalam pertukangan emas, perak, dan bertenun kain; dan di zaman dulu hasil kerja mereka banyak ditempah oleh golongan diraja. Perkara ini dikukuhkan lagi dengan pernyataan yang dibuat oleh Spencer St. John, seperti berikut:

*Many of the people are employed casting brass guns, or are goldsmiths or general traders and latterly their women have commenced the manufacture of expensive and handsome gold brocade (John, 1962:256).*

Pengaruh asing terhadap kraftangan di Brunei tidak hanya terhadap bahan mentah dan kemahiran, tetapi juga dari segi penggunaan ukiran dan motif. Tidak dinafikan bahawa penggunaan motif yang berasaskan binatang tidak biasa digunakan dalam barangan kraftangan, kerana pengaruh agama Islam; namun terdapat sebilangan kecil motif binatang seperti ukiran naga digunakan, terutama pada barang-barang tembaga seperti ciri, langguai, bedil, dan gangsa. Menurut Pg Karim Pg Hj Osman (2002), pengaplikasian elemen-elemen asing ini telah menambahkan lagi variasi seni kraftangan Brunei ke tahap yang lebih baik dan menarik.

Ketika Pigafetta datang melawat Brunei pada tahun 1521, beliau mencatatkan kekagumannya terhadap adat-istiadat diraja. Beliau juga mencatatkan tentang tembakan meriam yang merupakan tembakan kehormat dibuat sejak pagi hingga ke petang, yang menunjukkan menandakan rutin harian raja mulai bangun tidur, bersiram, santap, dan beradu. Ini menunjukkan bahawa

<sup>2</sup>Kampung ini juga dikenali dengan nama “Kampung Sungai Kedayan”.

Brunei adalah merupakan sebuah negara yang mempunyai kuasa besar. Dicatatkan juga bahawa Brunei adalah merupakan sebuah bandar yang kaya dengan budaya seni pertukangan perak dan bertenun kain (Brown, 1974; Nicholl ed., 1975; dan Hughes-Hallet, 1998).

Dalam catatan tersebut, Pigafetta juga menyebutkan tentang penggunaan pedang, tombak, dan perisai oleh pengawal-pengawal Istana. Peralatan yang diperbuat daripada perak, seperti kedudukan dian dan pelita, juga digunakan. Para pembesar negara membawa keris dan memakai pakaian dari kain tenunan. Selain menjadi pakaian, kain tenunan juga dijadikan sebagai langsir di istana (Brown, 1974; Nicholl ed., 1975; dan Hughes-Hallet, 1998:32-33).

Dalam *Silsilah Raja-raja Brunei*, yang dicatatkan oleh Imam Yaakub (dalam Sweeney, 1998), juga banyak menyebutkan tentang penggunaan budaya material dalam adat-istiadat diraja, iaitu majlis menobatkan raja. Di antara alat-alat yang digunakan ialah kasur bertepi emas, puan kerajaan, keris kerajaan, pedang kerajaan, dan perisai kerajaan. Disebutkan juga penggunaan penastan perak, kabuk perak, persigupan emas, lembing bersampak emas, dan lain-lain.

Kini, dalam adat-istiadat diraja, penggunaan kraftangan yang diperbuat daripada logam seperti keris, gangsa, bedil, celapa, kabuk dan penastan, pesigupan, dan alat-alat yang lain masih lagi digunakan (Awang Abbas, 2002/2003). Barangan kraftangan ini mempunyai peranan sebagai alat kebesaran dan juga alat perhiasan diraja yang digunakan semasa istiadat-istiadat seperti perkahwinan diraja, istiadat bergelar, hari keputeraan, dan seumpamanya. Kain tenunan juga dipakai oleh para pembesar dan para jempunan yang menghadiri istiadat-istiadat diraja.

## **KEPENTINGAN KRAFTANGAN LOGAM DAN KAIN TENUNAN DALAM MASYARAKAT MELAYU**

Dalam masyarakat Melayu, pengeluaran dan penggunaan kraftangan logam dan kain tenunan tidak hanya mempunyai fungsi gunaan, tetapi juga menekankan kepada fungsi ekspresif dan simbolik. Keseimbangan fungsi-fungsi tersebut memberikan nilai yang lebih tinggi ke atas barangan kraftangan (Wan Yusoff *et al.*, 2004).

Pengeluaran dan penggunaan barangan kraftangan ini berkait rapat dengan adat, kebudayaan, dan kesenian warisan bangsa Melayu. Sebagai contoh, motif-motif yang digunakan untuk menghiasi barangan kraftangan melambangkan jatidiri Melayu yang mengandungi nilai-nilai seni keindahan dan kehalusan tradisi budaya Melayu (Shaari & Suleiman, 2006). Ini menunjukkan bahawa barangan kraftangan merupakan elemen yang penting dalam sosio-budaya masyarakat Melayu yang meliputi ruang lingkup yang luas sebagai lambang nilai budaya dan identiti (Haji Wahsalfelah, 2004a).

Barangan kraftangan yang diperbuat daripada logam, samada emas, perak, tembaga dan besi seperti keris, celapa, gangsa mahupun kain tenunan, mempunyai peranan penting dalam masyarakat Melayu. Barangan kraftangan ini biasa dilihat penggunaannya dalam upacara adat, seperti majlis perkahwinan, istiadat penganugerahan gelaran, dan sebagainya. Barangan kraftangan ini tidak hanya terhad penggunaannya di kalangan golongan atasan, tetapi juga dalam lingkungan masyarakat biasa.

*Pertama, Warisan Tradisi.* Dalam upacara-upacara keraian seperti perkahwinan, barangan kraftangan seperti keris, celapa, gangsa, dan kain tenunan berfungsi untuk menunjukkan “kemajalisan” bangsa Melayu yang mementingkan adab sopan dan nilai keindahan.

Di zaman tradisi, keris merupakan sebahagian daripada pakaian kaum lelaki yang bukan hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga alat perhiasan yang sentiasa dipakai dimana pun mereka berada. Bagi masyarakat Melayu, keris adalah lambang kejantanan; dan merupakan satu keaiban bagi lelaki dewasa jika tidak memakai dan memiliki sebarang keris (Hj Abd Rahman & Hj Awg Shapawi, 2005).

Kini, penggunaan keris di kalangan kaum lelaki hanya terhad dalam upacara-upacara tertentu sahaja. Dalam majlis perkahwinan, keris adalah asesori penting bagi pengantin lelaki. Ketika itu, keris tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan bagi menunjukkan statusnya sebagai “raja sehari”, tetapi untuk menimbulkan semangat kepahlawanan dan kegagahan selaku orang yang akan bertanggungjawab bagi melindungi “permaisurinya” (Hj Abd Rahman & Hj Awg Shapawi, 2005).

Celapa juga mempunyai peranan yang penting dalam tradisi masyarakat Melayu. Selain dari digunakan sebagai bekas menyimpan sirih pinang, celapa juga berfungsi sebagai tempat menyimpan barang kemas, wang, dan peralatan menjahit. Di samping itu, celapa juga digunakan dalam perubatan (Bulat, 2002).

Di kalangan masyarakat Melayu tradisi, sesebuah keluarga itu dianggap tidak sempurna jika tidak terdapat celapa di rumah mereka, kerana celapa disifatkan sebagai penyeri atau raja dalam sesebuah rumah tangga. Dari itu, celapa dijadikan sebagai salah satu hantaran pengantin lelaki kepada pengantin perempuan.<sup>3</sup> Walau bagaimanapun, kini amalan ini telah digantikan dengan menghantar sirih junjung (Bulat, 2002).

Celapa juga berperanan dalam kehidupan seharian masyarakat tradisi

yang melambangkan nilai adab sopan. Kebiasaan bagi masyarakat Melayu untuk menghidangkan sirih pinang yang disimpan didalam celapa atau tipa kepada tetamu berkunjung ke rumah. Amalan ini merupakan penghormatan yang ditunjukkan kepada tetamu yang datang.

Satu lagi barangan kraftangan yang masih berfungsi di kalangan masyarakat Melayu ialah gangsa. Gangsa biasanya berbentuk bulat dan mempunyai kaki serta mempunyai hiasan motif-motif yang melambangkan identiti kesenian Melayu. Gangsa ini lazimnya digunakan untuk meletakan barang-barang tertentu seperti pakaian dan makanan, terutama dalam upacara-upacara tertentu seperti majlis pertunangan dan majlis perkahwinan.

Dalam majlis pertunangan, semua barang hantaran seperti cincin, wang mahr, kain jong sarat, dan pakaian akan diletakkan di atas gangsa. Begitu juga dalam adat perkahwinan, gangsa digunakan sebagai tempat untuk meletakan segala barang-barang yang akan digunakan di sepanjang majlis perkahwinan, seperti bedak tujuh warna, bunga rampai, air wangi, dan sebagainya.

Pakaian persalinan bagi pengantin juga biasanya diletakkan di atas gangsa. Selain itu, gangsa juga digunakan untuk meletakan makanan yang dihidangkan kepada pengantin. Penggunaan gangsa untuk meletakan barangan dalam upacara ini boleh ditafsirkan sebagai tanda penghormatan (Sulaiman & Md Jos, 2005).

Satu lagi barangan kraftangan yang berperanan penting dalam masyarakat Melayu ialah kain tenunan. Kain tenunan Brunei digunakan sebagai pakaian dan juga hantaran perkahwinan. Dalam keadaan ini, kain tenunan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan dan mengeratkan hubungan sosial, serta melambangkan status sosial (Renne, 1995; dan Haji Wahsalfelah, 2003).

Bagi masyarakat Melayu Brunei,

<sup>3</sup>Penggunaan celapa sebagai hantaran perkahwinan masih lagi diamalkan di kalangan Puak Melayu Bisaya di Brunei Darussalam. Sila rujuk Kipli Bulat (2002:9-10).

kain tenunan Brunei jenis jong sarat dijadikan sebagai salah satu hantaran perkahwinan yang mesti diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Sebuah perkahwinan tersebut dianggap tidak sempurna, malah boleh menimbulkan aib, jika pengantin lelaki tidak mampu memberikan kain tenunan Brunei kepada bakal isterinya. Di samping melambangkan kasih-sayang, pemberian kain tenunan juga menunjukkan kestabilan kedudukan kewangan pengantin lelaki (Haji Wahsalfelah, 2005).

Kain tenunan yang diberikan sebagai balasan hantaran pertunangan atau perkahwinan dari pengantin perempuan menunjukkan bahawa pengantin perempuan tersebut mempunyai status yang sama atau lebih tinggi taraf sosialnya dengan pengantin lelaki. Selain dari hantaran, kain tenunan Brunei juga dipakai oleh pengantin di sepanjang majlis perkahwinan mereka. Pada upacara tersebut, pasangan pengantin akan memakai pakaian sedondon yang diperbuat dari kain tenunan. Keseragaman warna dan ragam hias pakaian tersebut melambangkan kesatuan dan kesefahaman (Haji Wahsalfelah, 1999).

Pemakaian kain tenunan dalam majlis perkahwinan dalam masyarakat Melayu tidak hanya dilihat sebagai perluahan makna simbolik tentang hubungan sosial, tetapi juga perasaan tanggungjawab yang perlu dipenuhi dalam melayani pasangan pengantin dengan sewajarnya, sesuai dengan pepatah Melayu bahawa pasangan pengantin adalah merupakan “raja sehari” di hari perkahwinan mereka.

Selain dari majlis perkahwinan, kain tenunan juga biasa dipakai ketika “majlis mandi berlawat”. Majlis ini diadakan bagi ibu yang melahirkan anak pertama dan biasanya diadakan selepas 40 hari, iaitu melimpasi waktu pantang. Majlis ini diadakan sebagai tanda kesyukuran dan proses peralihan

kepada status baru sebagai seorang ibu. Ketika majlis mandi berlawat ini, ibu yang diraikan memakai pakaian seperti pengantin, manakala anaknya akan dipakaikan dengan baju baru dan disalut dengan kain jong sarat.

Majlis berkhatan juga biasa diadakan di kalangan masyarakat Melayu Brunei, bukan hanya bagi anak lelaki tetapi juga anak perempuan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan majlis ini berbeza di antara lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, majlis berkhatan biasanya diadakan setelah melalui proses berkhatan ketika berumur sekitar sepuluh tahun, manakala bagi anak perempuan pula diadakan pada usia muda beberapa bulan hingga dua tahun. Biasanya, majlis berkhatan ini diadakan setelah anak lelaki atau perempuan yang telah dikhatankan itu sembuh.

Majlis berkhatan ini biasanya diadakan dimana ibu bapa anak yang diraikan akan menjemput saudara mara dan sahabat handai mereka, dan para tetamu akan dijamu dengan berbagai-bagai jenis makanan, sama ada makanan basah atau kering. Di samping itu, para tetamu juga akan diberikan bungkusan berbentuk makanan atau bunga telur untuk dibawa pulang. Dalam majlis tersebut, anak lelaki yang diraikan dipakaikan pakaian Melayu yang lengkap, termasuk songkok atau dastar (tanjak) dan sinjang (*samping*) dari kain tenunan. Manakala bagi anak perempuan pula akan dibalut dengan kain jong sarat.

Majlis sempena meraikan akil baligh bagi remaja perempuan, yang dikenali sebagai majlis mandi berhias, juga diadakan, terutama di kalangan golongan bangsawan dalam masyarakat Melayu Brunei. Majlis ini diadakan setelah remaja tersebut mendapat haid pertama. Pelaksanaan majlis ini serupa dengan majlis berkhatan bagi lelaki. Dalam majlis tersebut remaja perempuan akan dihias dan dipakaikan dengan pakaian seperti pengantin

serta dipakaikan “kain kapit” dari kain tenunan.

Penggunaan kain tenunan ini tidak hanya terhad dalam upacara-upacara meraikan kehidupan, tetapi juga digunakan dalam upacara kematian. Dalam masyarakat Melayu, kain tenunan digunakan sebagai kain penutup keranda, terutama di kalangan golongan atasan. Penggunaan ini bukan hanya dilihat sebagai pemakaian akhir yang menandakan penghormatan kepada si mati, tetapi juga melambangkan status sosial dan ekonomi si mati dan keluarganya (Haji Wahsalfelah, 2005).

**Kedua, Adat-Istiadat Diraja.** Negara Brunei Darussalam adalah negara yang mengamalkan sistem monarki yang masih mengamalkan adat-istiadat diraja, walaupun terdapat perubahan yang diselaraskan dengan perkembangan semasa. Dalam adat-istiadat diraja, barangan kraftangan yang diperbuat dari emas, perak, dan tembaga menunjukkan identiti pengguna atau pemiliknya.<sup>4</sup> Sebagai contoh, pembesar diraja yang dianugerahkan gelaran Wazir, Ceteria, dan Menteri akan menerima alat-alat kebesaran seperti keris dan tempat menyimpan sirih.

Bagi Wazir dan Kepala Ceteria, kaskol (celapa) yang dianugerahkan kepada mereka adalah diperbuat dari emas. Bagi Ceteria Besar, Ceteria Pengalasan Besar, Ceteria Pengalasan Damit, dan Manteri-manteri, iaitu: Pehin Dato Perdana Menteri dan Pehin Orang Kaya Di-Gadong, dianugerahkan tipa yang beranakan perak. Manakala Manteri-manteri yang lain dianugerahi tipa yang beranakan tembaga.

Kain tenunan juga kepentingan dalam adat-istiadat diraja sebagai pakaian adat, anugerah, dan alat kebesaran. Penggunaan kain tenunan menggambarkan status pemakai atau

pemilikinya; dan juga boleh ditafsirkan sebagai lambang kekuasaan dan tanggungjawab (Haji Wahsalfelah, 2006a).

Apabila seseorang dikurniakan gelaran, beliau juga akan dianugerahkan dengan persalinan pakaian dan “pakaian kerajaan” (Yusuf, 1975). Dalam pakaian kerajaan itu termasuklah sepasang baju dan seluar, sampung, dan dastar dari kain tenunan. Warna dan rekabentuk kain sampung dan dastar itu bergantung kepada kedudukan orang yang dikurniakan gelaran itu di dalam hierarki politik tradisi Brunei (Haji Wahsalfelah, 2004b).

Dalam sistem politik tradisi, sesuatu gelaran yang dikurniakan bukan sahaja merupakan penghormatan semata-mata, tetapi juga merupakan tanggungjawab. Tanggungjawab mereka sebagai “mata, telinga dan mulut” kepada Sultan untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai keadaan rakyat dan menyampaikan sesuatu hasrat baginda kepada pihak yang berkenaan bagi menyempurnakan amanah rakyat (Pg Mohd Yusof, 1988).

Penganugerahan persalinan pakaian dan regalia yang lain seolah-olah menggambarkan penyerahan suatu elemen tugas dan tanggungjawab dari raja kepada orang yang dikurniakan gelaran tersebut. Penganugerahan tersebut juga merupakan suatu pemindahan sebahagian kuasa yang ada pada raja kepada orang yang dianugerahi gelaran untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai orang yang diamanahkan untuk membangun dan menjaga kesejahteraan serta keamanan negara (Haji Wahsalfelah, 1999).

Pengagihan alat kebesaran seperti keris dan celapa, serta kain tenunan dalam penganugerahan gelaran itu juga boleh ditafsirkan sebagai pengukuhan hubungan antara raja dengan pembesar yang dilantik. Objek digunakan sebagai perluan dalam bentuk yang nyata

<sup>4</sup>Bagi penjelasan lanjut mengenai adat-istiadat diraja di Negara Brunei Darussalam, sila lihat P.M. Yusuf (1975).

atau *tangible expression* (Layton, 1981) tentang pengakuan kepemimpinan dan kuasa yang diamanahkan terhadap orang yang dianugerahi gelaran tersebut.

Di zaman dahulu, persalinan pakaian juga dianugerahkan kepada perutusan yang dilantik oleh Sultan. Dalam *Silsilah Raja-raja Brunei* dicatatkan bahawa apabila Sultan menghantar perutusan baginda ke luar negara, setiap ahli rombongan perutusan tersebut dikurniakan dengan sepengadak pakaian persalinan, dan pegawai-pegawai utama juga akan dikurniakan dengan alat kebesaran seperti keris, pedang, dan payung (Sweeney, 1998:73). Penganugerahan ini boleh dilihat sebagai metafora kuasa dan kewibawaan (Cohn, 1989) yang memberikan kekuasaan ke atas pegawai-pegawai yang diutus untuk bertindak bagi pihak raja. Penerimaan penganugerahan itu pula melambangkan ketaatan mereka kepada raja dan kesediaan mereka untuk menjunjung perintah raja (Haji Wahsalfelah, 2005).

### **PELESTARIAN KRAFTANGAN**

Kesinambungan pengeluaran kraftangan bergantung penuh kepada hidupnya penggunaan khazanah warisan ini di kalangan masyarakat. Keutuhannya adalah merupakan perlambangan tentang identiti dan budaya bangsa Melayu. Adalah menjadi tanggungjawab yang harus dipikul oleh semua pihak, termasuk pihak kerajaan dan semua ahli masyarakat, bagi memastikan budaya ini tidak pupus ditelan arus perubahan zaman.

Penubuhan institut kemahiran pertukangan tangan sangat penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kesinambungan kewujudan budaya material dalam tradisi Melayu di Brunei Darussalam. Di antara langkah yang telah dibuat oleh pihak kerajaan ialah menubuhkan Pusat Latihan Kesenian dan

Pertukangan Tangan pada tahun 1975. Matlamat utama penubuhan institusi ini ialah untuk menghidupkan semula semua jenis pertukangan tempatan yang hampir dan telah mengalami kepupusan.

Bagi merealisasikan tujuan ini, Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan telah menawarkan kursus-kursus kemahiran, termasuk pertukangan emas, perak dan tembaga, serta bertenun kain. Para pelatih dikehendaki mengikuti kursus selama tiga tahun. Di sepanjang tempoh kursus, para pelatih didedahkan sistem pembelajaran yang perperingkat-peringkat, bermula dengan pengajaran asas tentang kemahiran yang dipelajari. Setelah itu, pelatih akan didedahkan kepada peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan, dan seterusnya pelatih diberi peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan menjalani latihan amali.

Usaha lain juga telah dibuat bagi memastikan kesinambungan warisan tradisi bertenun kain, iaitu dengan menubuhkan bengkel tenunan di kawasan perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Kampong Bolkiah A dan B, yang terletak di kawasan Kampong Ayer. Penubuhan bengkel tenunan di Kampong Ayer ini adalah merupakan langkah untuk menghidupkan semula aktiviti tradisi masyarakat di lokasi asal bagi menarik pelancong asing (Haji Ibrahim, 1996b; dan Muhammad Melayong, 2006). Di samping itu, bengkel ini diwujudkan untuk memberi galakan kepada penduduk di kawasan ini untuk mempertingkatkan sumber ekonomi mereka.

Penubuhan Koperasi Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei Berhad juga telah diungkayahkan pada tahun 1995. Keahlian Koperasi ini dikhususkan bagi lepasan dari Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan. Walaupun tujuan Koperasi ini ditubuhkan untuk membantu

ahli-ahlinya bagi meningkatkan ekonomi dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti menjalankan aktiviti-aktiviti perusahaan dan perdagangan, tetapi penubuhan ini secara tidak langsung boleh dilihat sebagai usaha pelestarian pengeluaran kraftangan. Dengan bantuan yang diberikan ini pastinya akan menggalakan para tukang dan pengusaha untuk mempertingkatkan atau memperluaskan pengeluaran barangan kraftangan.

Pengaplikasian barangan kraftangan seperti keris, celapa, gangsa, dan kain tenunan, terutama dalam adat-istiadat diraja, membantu dalam memastikan kesinambungan pengeluaran kraftangan ini di negara Brunei Darussalam. Sesuai dengan perkembangan arus globalisasi, para tukang dan pengusaha kraftangan perlu mempunyai wawasan untuk meneroka pengeluaran dengan memanfaatkan pasaran global dan mengeluarkan produk-produk kraftangan tidak hanya untuk penggunaan tempatan. Dari itu, usaha bagi memperkembangkan pengeluaran kraftangan ini perlu dilakukan dengan memperluaskan penggunaan barangan kraftangan melampaui batas penggunaan tradisi dan adat-istiadat, seperti mengeluarkan produk cenderamata dan *tourist art* (Haji Aji & Mohd Zaidi, 2004).

## KESIMPULAN

Keris, celapa, gangsa, dan kain tenunan merupakan beberapa barangan kraftangan yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu Brunei. Barang-barangan ini mempunyai peranan penting dalam sejarah sosio-budaya masyarakat yang tidak hanya terhad kepada fungsi gunaan, tetapi juga merupakan khazanah warisan yang melambangkan identiti, nilai, dan budaya bangsa.

Di samping itu, penghasilan kraftangan ini juga adalah sumber ekonomi yang dapat membantu

memperbaiki status ekonomi pengeluar. Dari itu, langkah-langkah pelestarian pengeluaran dan penggunaan kraftangan ini perlu diusahakan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan budaya material dalam memelihara warisan tradisi dan jatidiri bangsa, tetapi tidak kurang penting adalah untuk memastikan pengeluarannya dapat dimanfaatkan untuk mempertingkatkan ekonomi mereka.

## Bibliografi

- Abdullah al-Habsyi, Syed Hashim. (1983/1984). "The Traditional Economics Activities in the Kampong Ayer". *Unpublished B.A. Thesis*. Singapore: University of Singapore.
- Awang Abbas, Masdiana. (2002/2003). "Pertukangan Logam dalam Masyarakat Melayu Brunei Masa Kini". *Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Brunei, Tidak Diterbitkan*. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.
- Blundell, Peter. (1923). *The City of Many Waters*. London: Arrowsmith.
- Brown, D.E. (1974). "Antonio Pigafetta's Account of Brunei in 1521" dalam *Brunei Museum Journal*, 2:2, ms.171-179.
- Bulat, Kipli. (2002). *Warisan Budaya: Keindahan Bentuk dan Ragam Hias Calapa*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Muzium-muzium Brunei.
- Cohn, B.S. (1989). "Cloth, Clothes, and Colonialism: India in the Nineteenth Century" dalam A.B. Weiner & J. Schneider [eds]. *Cloth and Human Experience*. Washington and London: Smithsonian Institution Press, ms.303-353.
- Haji Aji, Fatimah & Norwatiza Mohd Zaidi. (2004). *Directory of Handicraft Entrepreneurs in Brunei Darussalam*. Bandar Seri Begawan: Brunei Museums Department.
- Haji Ibrahim, Abdul Latif. (1985). "The Changing Symbolism and Function of the Bedil, the Cannon of Brunei". *Unpublished M.Phil. Thesis*. Cambridge, UK: University of Cambridge.
- Haji Ibrahim, Abdul Latif. (1996a). "Variations and Changes in the Names of and Locations of the Wards of Brunei's Kampong Ayer Over the Last Century" dalam *Kampong Ayer: Warisan, Cabaran, dan Masa Depan*. Gadong: Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, ms.18-34.
- Haji Ibrahim, Abdul Latif. (1996b). "Kampong Ayer: Warisan, Cabaran, dan Masa Depan". *Kertas kerja* dibentang dalam Simposium

- Antarabangsa Kampong Ayer, anjuran Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, pada 6-9 September.
- Haji Serudin, Md Zain [Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Haji]. (1996). "Ucapan Rasmi Majlis Pembukaan Rasmi Simposium Antarabangsa Kampong Ayer". *Kertas ucapan rasmi* dalam Simposium Antarabangsa Kampong Ayer, anjuran Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, pada 6 September.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (1999). "The Traditional Woven Textiles of Brunei Darussalam". *Unpublished M.A. Thesis*. Durham: University of Durham.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (2003). "Penggunaan Kain Tenunan Tradisional dalam Masyarakat Melayu Brunei: Satu Tinjauan Awal" dalam *Beriga*, 79 [April-June], ms.3-17.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (2004a). "Material Budaya dan Pembinaan Identiti Budaya Kebangsaan Brunei Darussalam". *Kertas kerja* dibentang dalam Seminar Kebangsaan Calak Brunei: Ke Arah Mengangkat Martabat Bangsa, anjuran Universiti Brunei Darussalam, di Negara Brunei Darussalam.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (2004b). "Kain Tenunan Tradisional dalam Adat-Istiadat Diraja Brunei: Manifestasi Perlambangan Status dan Kekuasaan" dalam *Beriga*, 85 [October-December], ms.63-75.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (2005). "Traditional Woven Textiles: Tradition and Identity Construction in the 'New State' of Brunei Darussalam". *Unpublished Ph.D. Thesis*. Australia: University of Western Australia.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (2006a). "Kain Tenunan Brunei: Warisan, Cabaran, dan Masa Depan". *Kertas kerja* dibentang dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu mengenai Warisan Seni Budaya Melayu: Pelestarian dan Pembangunan, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 8-9 November.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. (2006b). "Transformasi Lokasi Pengeluar Kain Tenunan: Kesenambungan Warisan Budaya Brunei Darussalam". *Kertas kerja* dibentang dalam Konferensi Antaruniversiti di Borneo-Kalimantan ke-2: Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan/Bandar di Borneo-Kalimantan, di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, pada 13-15 Ogos.
- Hirth, F. & W.W. Rockhill. (1966). *Chau Jua Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Entitled Chu-Fan-Chi*. New York: Paragon Book Reprint Corp.
- Hj Abd Rahman, Norzarinah & Dyg Joshopiana Hj Awg Shapawi. (2005). "Keris Brunei". *Kertas tidak diterbitkan* dalam Kerja Kursus AB 3204: Budaya Material Brunei, anjuran Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam.
- Hughes-Hallett, H.R. (1998). "A Sketch of the History of Brunei". *Papers Relating to Brunei in the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*. Kuala Lumpur: First published in 1968, pp.28-45.
- John, Spencer St. (1962). *Life in the Forests of the Far East*. London: Smith, Elder and Co.
- Layton, R. (1981). *The Anthropology of Art*. London: Granada Publishing.
- Mat Arus, Baharuddin. (2002). "Industri Tembaga di Brunei, Satu Pendekatan Sains dan Teknologi: Isi dan Prospek". *Kertas kerja* dibentang dalam Seminar dan Fiesta Kraftangan Brunei, anjuran Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei, Jabatan Muzium-muzium, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 4-6 Jun.
- Muhammad Melayong, Muhammad Hadi. (2006). "Kampong Ayer (Aying): Cabaran dan Masa Depan". *Kertas kerja* dibentang dalam Konferensi Antaruniversiti di Borneo-Kalimantan ke-2: Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan/Bandar di Borneo-Kalimantan, di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, pada 13-15 Ogos.
- Nicholl, R. [ed]. (1975). *European Sources for the History of the Sultanate of Brunei in the Sixteenth Century*. Bandar Seri Begawan: Muzium-muzium Brunei.
- Pg Hj Osman, Pg Karim. (2002). "Sejarah Awal Perusahaan Kraftangan Brunei dan Bukti-bukti Melalui Kesan Peninggalan Arkeologi". *Kertas kerja* dibentang dalam Seminar dan Fiesta Kraftangan Brunei, anjuran Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei, Jabatan Muzium-muzium, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 4-6 Jun.
- Pg Hj Osman, Pg Karim. (2003). "Tapak Sungai Limau Manis: Satu Kajian Awal dari Perspektif Arkeologi". *Kertas kerja* dibentang dalam Seminar Sejarah Brunei: Menyusuri Sejarah Nasional, anjuran Yayasan Sultan Hassanal Bolkihah dan Persatuan Sejarah Brunei, di Pusat Da'wah, Berakas, Brunei Darussalam.
- Pg Mohd Yusof, Pg Ahmad [Dato Seri Paduka Haji]. (1988). *Adat-Istiadat dalam Kursus untuk Graduan-graduan yang Baru Berkhidmat*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Adat-Istiadat Negara.
- Renne, E.P. (1995). *Cloth that Does Not Die: The Meaning of Cloth in Bunu Social Life*. Seattle: University of Washington Press.
- Schlereth, T.J. (1985). "Material Culture and Cultural Research" dalam *Material Culture: A Research Guide*. Lawrence: University Press of Kansas, ms.1-34.

- Shaari, Nazlina & Norhayati Suleiman. (2006). "Peranan Tekstil di dalam Sosial Budaya Melayu Sarawak". *Kertas kerja* dibentang dalam Konferensi Antaruniversiti di Borneo-Kalimantan ke-2: Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan/Bandar di Borneo-Kalimantan, di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, pada 13-15 Ogos.
- Sulaiman, Exzayrani & Ramazah Md Jos. (2005). "Gangsa: Satu Tinjauan Awal". *Kertas tidak diterbitkan* dalam Kerja Kursus AB 3204: Budaya Material Brunei, anjuran Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam.
- Sweeney, A. (1998). "Silsilah Raja-raja Brunei". *Papers Relating to Brunei in the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*. Kuala Lumpur: First published in 1968, ms.46-127.
- Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir *et al.* (2004). *Teknologi Melayu: Konsep dan Bibliografi*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Yusuf, P.M. (1975). "Adat-Istiadat Diraja Brunei Darussalam" dalam *The Brunei Museum Journal*, Vol.3, No.3. Bandar Seri Begawan: Jabatan Muzium-muzium Brunei.



**Seni Kraftangan Brunei**  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 11/2/2014)

Seni Kraftangan Brunei merupakan salah satu budaya yang klasik di Negara Brunei Darussalam dan masih ada sehingga sekarang. Seni kraftangan yang dimaksudkan seperti pertukangan perak, tembaga, tenunan kain, anyaman, songkok, dan seni ukir. Kesemua ini dibuat di sebuah muzium di Brunei yang bernama Muzium Brunei.

HILAL AHMAD WANI & ANDI SUWIRTA

## United Nations Involvement in Kashmir Conflict

**ABSTRACT:** *Third party involvement or mediation is one of the methods to resolve the conflict. Mediation is the process of conflict resolution. In Kashmir conflict, the major involvement for the conflict resolution is the role of United Nations (UN). Actually, Kashmiris have been suppressed through the process of centralization and over centralization. Anyway, United Nations resolutions strengthened the Kashmiri movement of freedom. However, it is also reality that, somehow and somewhere, UN had failed in Kashmir conflict in order to give the final touch to its resolutions. In addition, Kashmir conflict remains a longstanding dispute in international politics. The Kashmir imbroglio could have been resolved if UN had taken its responsibility. On the other side, the main failure of third party mediation in Kashmir context is India's strong rejection to third party mediation. It is not wrong that if Kashmiris were demanding their due share and due rights that is right of self-determination and freedom. All parties of the Kashmir conflict should respect the covenants and resolutions of UN and protect human blood, which is costless. Finally, it can be said that India cannot win the hearts of Kashmiris through might and force basis, rather it is only possible through tolerance, love, respect the dignity of Kashmiris, and above all through greater autonomy.*

**KEY WORD:** *United Nations, Kashmir conflict, India, Pakistan, third party, conflict resolution, and right of self-determination.*

**IKHTISAR:** *Artikel ini berjudul "Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konflik Kashmir". Keterlibatan pihak ketiga atau mediasi merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan konflik. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik. Dalam konflik Kashmir, keterlibatan utama untuk resolusi konflik adalah peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sebenarnya, Kashmir telah ditekan melalui proses sentralisasi dan sentralisasi yang berlebihan. Lagi pula, resolusi PBB memperkuat gerakan kemerdekaan Kashmir. Namun juga kenyataan bahwa, entah bagaimana dan dimana, PBB telah gagal dalam konflik Kashmir untuk memberikan sentuhan akhir untuk resolusinya. Selain itu, konflik Kashmir tetap menjadi sengketa lama dalam politik internasional. Keruwetan Kashmir bisa saja diselesaikan jika PBB telah mengambil tanggung jawabnya. Di sisi lain, kegagalan utama mediasi pihak ketiga dalam konteks Kashmir adalah penolakan yang kuat dari India untuk mediasi pihak ketiga. Maka tidak salah jika Kashmir menuntut bagian dan hak-hak mereka yakni hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Semua pihak dalam konflik Kashmir harus menghormati perjanjian dan resolusi PBB dan melindungi jiwa manusia, yang tiada terkira. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa India tidak bisa memenangkan hati rakyat Kashmir melalui kekuatan dan basis tentara, melainkan hanya mungkin melalui toleransi, cinta, menghormati martabat rakyat Kashmir, dan di atas semuanya melalui otonomi yang lebih besar.*

**KATA KUNCI:** *Perserikatan Bangsa-Bangsa, konflik Kashmir, India, Pakistan, pihak ketiga, resolusi konflik, dan hak menentukan nasib sendiri.*

### INTRODUCTION

*"In our search for lasting solution to Kashmir problem, both in its external and internal dimensions, we shall not traverse solely on*

*the beaten track of the past. Mindsets will have to be altered and historical baggage jettisoned", Atal Behari Vajpayee, Prime Minister of India, on January 2002 (cited by Bose, 2003:1).*

**Dr. Hilal Ahmad Wani** is a Research Fellow at Centre for Civilizational Dialogue UM (University of Malaya) in Kuala Lumpur, Malaysia; and **Andi Suwirta, M.Hum.** is a Senior Lecturer at the Department of History Education UPI (Indonesia University of Education) in Bandung, West Java, Indonesia. Corresponding authors are: [wanihilal@gmail.com](mailto:wanihilal@gmail.com) and [atriwusidna@gmail.com](mailto:atriwusidna@gmail.com)

*“If we want to normalize relations between Pakistan and India, and bring harmony to the region, the Kashmir dispute will have to be resolved peacefully through a dialogue, on the basis of the aspirations of the Kashmiri people. Solving the Kashmir issue is the joint responsibility of our two countries [...] Mr. Vajpayee [...] I take you up on this offer. Let us start talking in this spirit”, General Pervez Musharraf, President of Pakistan, on January 2002 (cited by Bose, 2003:1).*

Kashmir conflict remains both a struggle for a land as well as about the rights of people to determine their future. From the very beginning, when Kashmir conflict reached in United Nations platform at that time, it was declared by the UN (United Nations) that let Kashmiris decide their own destiny and future; in other sense, it is also called plebiscite that means people are free to decide their own will. Although UN had played a good role in preventing, the hostilities and antagonistic attitude of two countries (India and Pakistan), but it did not play any crucial role as an international body in order to protect the interests of Kashmiris.

What was wrong if Kashmiris as marginalized people were demanding their due share and their due rights? Kashmir problem could have been solved if UN had played its role, but every learned man knows that international politics is totally based on some kind of interest or bargaining. India always rejected the plebiscite notion, which is the major reason that India never tolerated any third party mediation and involvement in Kashmir issue.

Since 1947, Kashmiris are fighting for their right to self-determination and special rights, which India violated through the discriminatory and power means. Many gross violations took place in Jammu and Kashmir still it is going on, but the question is why UN is silent and not doing anything in order to prevent the cycle of violence and barbarism of India over Kashmiris (Ganguly, 2003). Has UN failed in

its agendas and primary objectives? The need is to secure humanity be it Kashmiris, or any body else, because the human blood is much worthy and costly no body can pay its cost (Ahmad Wani, Suwirta & Fayeye, 2013b).

It is quite clear that if UN will not play its positive role in Kashmir conflict, then, whole of South Asian region will remain under the grip of suspicion and turmoil; and on the other side, UN popularity as an international organization will come to end. Kashmir, along with the Israeli-Palestinian conflict and the war in Korean peninsula, was among the first crisis that the United Nations had to confront in the post-world war II period. More than sixty years have passed when the Kashmir conflict was first debated and discussed at the UN platform.

However, it is irony that conflict is yet continues and it needs complete solution. The UN involvement in the Kashmir conflict largely lasted for 17 years (1948-1965). After the Indo-Pak (India-Pakistan) war of 1965, the engagement with Kashmir continued at a very nominal level till the third Pakistan-India war of 1971. It completely ended with the signing of the Shimla Agreement in 1972, an Indo-Pak peace agreement, which laid emphasis on adopting a bilateral framework to solve the Kashmir imbroglio and kept the UN out of the picture afterwards.

During the course of its engagement with the Kashmir conflict, spanning 23 years (1948-1971), the UN passed a number of resolutions, which were aimed at mediation and the resolution of the conflict. Between 1948 and 1971, the UN Security Council passed 23 resolutions on Kashmir conflict. The UN resolutions regarding the Kashmir issue are not self enforceable. In other words, the resolutions are recommendatory in nature and can be enforced only if the parties to the dispute, viz. India and Pakistan, consent to their application (Ahmad Wani, Suwirta & Fayeye,

2013a). Indian refusal to implement the UN resolutions on Kashmir was to relegate them to the margins of the conflict (Ganguly, 2003:173).

India lodged a complaint under Art.35 (Chapter VI) of the UN Charter in the UN Security Council on 1 January 1948, charging Pakistan with “aiding and abetting” the Pakistani tribal invasion in Jammu and Kashmir. In the United Nations, India claimed that all the territories of the Princely State of Jammu and Kashmir legally belonged to her by the virtue of the treaty of accession signed by the Hindu King of the Kingdom with the Indian Union (Mohd Pir & Rashid Shiekh, 2013). Two weeks later, Pakistan responded to the Indian complaint with counter charges. Pakistan denied having aided the raiders, accused India of annexing Kashmir and of trying to throttle Pakistan in its infancy.

#### **DEBATS ON KASHMIR IN THE UNITED NATIONS**

The first UN (United Nations) debate on Kashmir started under the rubric of “Kashmir Question”. However, the Pakistani delegation argued that the Kashmir Question had to be seen in the context of India’s attempts to negate the existence of the newly born State of Pakistan and that the conflict in Kashmir was threatening the very survival of Pakistan. The Pakistani argument was to prevail and the debate in the UN shifted from “Kashmir Question” to “India-Pakistan Dispute”.

The UN Military Observers Group, that was later established in divided territories of Kashmir with offices in both Indian Occupied Kashmir and Pakistan Occupied Kashmir, was to be known as “UN Military Observer Group in India and Pakistan” (UNMOGIP) and not as “UN Military Observer Group in Kashmir”. The job of the group was to monitor, investigate, and report complaints of ceasefire violations along the “ceasefire line” in Kashmir to the United Nations.

After hearing Indian and Pakistani representatives, the UN Security Council passed its first resolution (Resolution 38) on Kashmir conflict on 17 January 1948, calling India and Pakistan to exercise restraint and ease tensions. Three days later, on 20 January 1948, the Security Council passed another resolution (Resolution 39), creating the United Nations Commission for Indian and Pakistan (UNCIP) to investigate the dispute and mediate between the two countries led by Britain and the United States of America.

The UN Security Council passed another resolution (Resolution 47) on 21 April 1948, which enlarged the membership of the UNCIP from 3 to 5, called the cessation of hostilities between India and Pakistan, withdrawal of all Pakistani troops and tribesmen and bulk of Indian troops (except for a minimal number required for maintaining law order), allowing return of refugees, release of political prisoners, and holding of a UN supervised plebiscite in the Princely State of Jammu and Kashmir to determine the aspirations of her people. The plebiscite was to be held by a UN appointed plebiscite administrator. The UN Security Council passed another resolution on 3 June 1948, which reaffirmed the previous resolutions and asked the UNCIP to proceed to the “disputed areas” to carry out its mission as stated under Resolution 47 of 21 April 1948.<sup>1</sup>

The United Nations Commission’s plan for a cease-fire and Truce Agreement was formalized in its resolution of 13 August 1948, which proposed that:

Question of the accession of the State of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite: a plebiscite will be held when it shall be

<sup>1</sup>See, for example, [file:///H:/pen\\_data\\_un/Kashmir and United Nations.html](file:///H:/pen_data_un/Kashmir_and_United_Nations.html) [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 10/12/2013].

found by the Commission that the ceasefire and truce agreements set forth in the parts I and II (regarding the ceasefire and withdrawal of Pakistani troops in the State of Jammu and Kashmir, respectively) of the Commission's Resolution of 13 August 1948 have been carried out and arrangements for the plebiscite have been completed; the Secretary-General of the United Nations will in agreement with the commission, nominate a "plebiscite administrator" who shall be personality of high international standing and commanding general confidence (cited in Hilali, 1997).

The UNCIP (United Nations Commission for Indian and Pakistan) reached the Indian sub-continent in July 1948 and after deliberations with Indian and Pakistani leadership, produced a proposal, which called for an immediate ceasefire and truce agreement between India and Pakistan, withdrawal of all Pakistani tribals and nationals, and bulk of India's troops. India rejected the proposals on the basis of the argument that the proposal did not opportune and blame on Pakistan, which India considered as the aggressor in Kashmir; whereas Pakistan rejected the plan as the interim administration of valley of Kashmir and the territories that had fallen under Indian control had been assigned to Sheikh Abdullah's control.

Sheikh Abdullah, who had become the Prime Minister of the autonomous Jammu and Kashmir State on 5 March 1948, was considered by Pakistan as India's ally and by implication could influence the plebiscite in India's favour. Pakistan also rejected the agreement on the ground that it was supposed to withdraw all its forces from the state; whereas India allowed to retain some of its troops to maintain order, which could potentially lead to coercion or intimidation of voters by Indian forces to influence the outcome of the proposed plebiscite (Hilali, 1997:65-72).

On August 14, 1948, the UNCIP submitted proposals to the Indian and

Pakistani government, which for the first time contained an acknowledgement from Pakistan about the presence of its troops in the State of Jammu and Kashmir. The proposal envisioned the withdrawal of Pakistani troops and nationals, and bulk of Indian troops from the state, subsequent to their withdrawal the administration of the territory was to be run by the commission.

On December 11, 1948, the UNCIP laid out a new set of proposals that elaborated on the question of plebiscite in the State of Jammu and Kashmir. As per the proposals stated:

[...] "the question of accession to India or Pakistan" was to be decided by a free and impartial plebiscite, which was contingent upon having a case-fire. The two countries accepted the cease-fire plan and allowed the UN to observe the ceasefire from 1 January 1949. The ceasefire line "went through the western part of Jammu and the eastern part of Poonch, leaving the capital city of Poonch on the Indian side of the line, then crossed the Jhelum River at a point west of Uri and made a large sweep following the valley of the Kishinganga River. From there, it proceeded to Kargil, which also remained on the Indian side, and then north-west to the Chinese border. Hunza, Gilgit, Baltistan, Chilas, the great part of Poonch, and the smaller part of Jammu remained in control of Pakistan and Azad Kashmir" (cited in Bazaz, 1951:326).

On January 5, 1949, the United Nations came up with a new plan for a plebiscite. To address Pakistan's fears that the plebiscite outcome may be influenced in India's favour by Sheikh Abdullah, who was seen as close to Indian PM (Prime Minister) Nehru, and had been appointed as the interim head of Jammu and Kashmir administration and the limited Indian troops which were meant to maintain law and order during the plebiscite.

The UN proposed that the State of Jammu and Kashmir should be under the full control of the Plebiscite Administrator. The Plebiscite

Administrator was to enjoy quasi-sovereign powers over the State of Jammu and Kashmir. The proposal was rejected by the Indian side, which maintained that the state had become a part of the Indian Union.

In December 1949, UNSC (United Nations Security Council) President, General A.G.L. McNaughton, tried to mediate between Indian and Pakistan at the UN, but failed to manage an agreement between the two sides. General A.G.L. McNaughton submitted a series of proposals, suggesting demilitarization of Kashmir to ensure an impartial plebiscite in Kashmir. These proposals were rejected by India.

After the failure of General A.G.L. McNaughton proposals, the United Nations replaced the UNCIP by a single UN representative Owen Dixon in 1950. Owen Dixon, after meeting the officials of India and Pakistan, soon concluded that there was a little or no hope regarding an Indo-Pak agreement on demilitarization proposals. Owen Dixon came up with a set of proposals, which envisioned holding a "regional plebiscite in the State of Jammu and Kashmir".

The proposals submitted to the UN Security Council in 1950, suggested: (1) Holding a plebiscite in the whole State of Jammu and Kashmir, region by region; and (2) Holding a plebiscite only in regions which were "doubtful", the rest would constitute those regions that were expected to vote definitely either for an accession with either India and Pakistan. The "doubtful" region was meant to be the valley of Kashmir.

However, India and Pakistan could not come to an agreement on the Owen Dixon proposals. After the failure of Owen Dixon, the UN appointed Frank Graham as a UN representative to mediate between Indian and Pakistan to get them to agree on holding a plebiscite in Kashmir. Frank Graham worked from 1951-1953 without meeting any success. Frank Graham was followed by Gunnar Jarring in 1957, who also

failed to make any headway on Kashmir (Lamb, 1992:228-230).

In the wake of the termination of the mandate of UNCIP, the UN Security Council passed Resolution 91 on 30 March 1951, which established the UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) to monitor the ceasefire line (now called *Line of Control*, the border that divides Indian and Pakistani controlled parts of Kashmir) in Kashmir. The UNMOGIP still maintain its presence in both Indian Administered Kashmir and Pakistan Administered Kashmir.

On 23 January 1957, India's client regime in Jammu and Kashmir, led by Bakshi Ghulam Mohammad, adopted a constitution for the state and a resolution ratifying the state's accession with India. Pakistan raised the issue in the UN Security Council and a day after, the UNSC (United Nations Security Council) passed a resolution, which reiterated the earlier UN resolutions on Kashmir that called for a final settlement of the dispute "in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the UN" (Lamb, 1992:229).

Thus, the 1957 UN resolution deemed any constitution change undertaken by India within Indian Administered Kashmir as irrelevant to the resolution of Kashmir conflict. The Owen Dixon plan seemed to be the last serious endeavour on part of the UN to solve the Kashmir conundrum. Although Pakistan kept raising the Kashmir issue in the United Nations in the 1960s, UN involvement in Kashmir was considerably reduced after Indo-Pak war of 1965. In 1962, the Kashmir question was again debated and discussed in the UN Security Council.

However, the UNSC failed to pass a resolution on Kashmir in view of a Soviet Union veto, which discouraged the UNSC from pursuing the Kashmir

question afterwards. The UN was virtually elbowed out of the Kashmir dispute by Russia after the Indo-Pak war of 1965, when Russian negotiated the Tashkent Peace Agreement between the two rival nations on January 1965. During the Indo-Pak 1965 war, the UN passed a strongly worded resolution, calling on India and Pakistan to agree on a ceasefire.

However, it was only after intense pressure applied by the two superpowers, USA (United States of America) and the Soviet Union that India and Pakistan agreed to observe a UN sponsored ceasefire on 23 September 1965. The last UNSC resolution (307) that dealt with Kashmir was passed in the wake of the India-Pakistan war of 1971, where Kashmir was not at the centre of the conflict between the two countries. The resolution could be passed only after Indian had declared a unilateral ceasefire. UNSC attempts to pass resolutions during the 1971 war were blocked by a Soviet Union veto and with the signing of the Shimla peace accord between India and Pakistan in 1972, which laid stress on bilateral solutions to the Kashmir issue, the UN involvement in Kashmir was in reality dead (Brown, 1993:162).

The failure of the UN in mediating a solution to the Kashmir dispute can be largely ascribed to Indian refusal to heed to the resolutions. India had taken the issue to the UN with the hope that the international body would declare Pakistan as an aggressor in the 1947-1948 war and would help her to gain control over Pakistan Administered Kashmir as India claimed the whole of Kashmir by virtue of the accession treaty signed by the Maharaja of Jammu and Kashmir with her. Contrary to India's expectations, the UN called for a plebiscite in Kashmir. Consequently, India was to shy away from implementation of UN resolutions.

The fresh delineation "cease-fire line" which was originally established

in 1949, after the Indo-Pakistan ceasefire in Jammu and Kashmir by India and Pakistan in 1972, converted the "ceasefire line" into Line of Control (LOC), which from an Indian perspective turned the temporary border in the disputed territory of Kashmir into a de facto "permanent border between" India and Pakistan. Pakistan was forced to accept the change in the wake of its defeat in the 1971 war.

India contended that with the formation of Line of Control, the mandate of the UNMOGIP had expired. However, Pakistan insisted that the "UN Military Observer Group in India and Pakistan" (UNMOGIP) continue monitoring the LOC as it was a disputed border; and that the "LOC" was in fact the original ceasefire line. India wanted the UNMOGIP to leave, as it did not want to accept any sort of international intervention in the Kashmir conflict.

Since 1972, India has not reported to the UNMOGIP, whereas Pakistan has continued to report Indian violations of the LOC to the observer group, while the movement of the UNMOGIP is unrestricted in Pakistan Administered Kashmir. The Observer group is nowhere in sight beyond their office premises at Sonawari locality of Srinagar. With its limited mandate, the group has played virtually no role in the conflict after 1972. Even during the popular Kashmir uprising in 1989-1990, when hundred and thousands of Kashmiris marched in pro-freedom processions in Kashmir valley and when thousands crossed the LOC to receive arms training, the UNMOGIP remained in Liberation in its Srinagar office.

In October 2001, the UNMOGIP Chief, Major General Hermann Loidolt, described Kashmir as a "tormented country" and blamed India and Pakistan for playing games with Kashmir. The observer also described the LOC as a ceasefire-line and a disputed border, which fell under UNMOGIP mandate. The statement evinced a sharp reaction

form India, which called the UN observer's statement as "uncalled for" and the Indian External Affairs Minister threatened to lodge a complaint in the UN against the Observer.

Not surprisingly, Major General Hermann Loidolt statement was welcomed by Kashmiri separatist leaders (Behera, 2008:208-215). The most recent UN effort to engage with Kashmir came during the Indo-Pak border confrontation of 2002, when India mobilized half a million troops along its border with Pakistan to pressurize Pakistan to stop aiding insurgents in Kashmir. UN Secretary-General, Kofi Anan, efforts to mediate during the crisis were snubbed by India. Kofi Annan was not allowed to visit India and to placate Indian fears; Kofi Annan stated that UN resolutions on Kashmir were not "enforceable in a mandatory sweep" (cited in Behera, 2008:211).

Nevertheless, the Kashmir issue was for a long time discussed and debated in the United Nations, which then accepted the principle of a plebiscite to resolve the Kashmir conflict. Hopes were raised in the early 1950s for an Indo-Pakistani reconciliation, but the issue has remained a bone of contention between the two major actors of South Asia.

There were chances to resolve the Kashmir issue in its early stages through international arbitration and by reference to the Kashmiris-themselves – as was agreed by both Pakistan and India – the course of events in South Asia would have been quite different. Even the wars of 1965 and 1971, as well as the futile and extremely expensive arms race, could have been avoided and minimized.

### **UNITED NATIONS STRENGTHENED KASHMIRI MOVEMENT**

Though UN (United Nations) involvement in Kashmir has been reduced to a naught, the existence of UN resolutions on Kashmir has greatly shaped Kashmiri political identity *vis-à-*

*vis* the Kashmir conflict. The disputed status of Kashmir, as declared by the UN, played on the psyche of Kashmiri people and strengthened their distinct political identity. The UN involvement in Kashmir has left a firm imprint on separatist party, Plebiscite Front, alluded to and took its name from the UN's notion of plebiscite (Schofield, 2004:1-4).

The party was established in 1955 in Indian Administered Kashmir by Sheikh Abdullah's close associate, Afzal Beig, and defined the Kashmiri self-determination movement for around two decades. In Pakistan Kashmiri nationalists formed Administered Kashmir, a pro-independence party, also by the name of Plebiscite Front. Though not formally linked to the Kashmir valley centered, Plebiscite Front shared its political vision.

Despite that, the UN resolutions on Kashmir gave Kashmiris only two choices to determine their political fate, *viz.* accession to India or to Pakistan; and the Plebiscite movement in both parts of Kashmir while calling for a UN referendum in Kashmir wanted the inclusion of an independent Kashmir as a political option in the plebiscite.

From 1955 to 1974, the words, Plebiscite Front and Plebiscite, known as *Mahaz-e-Rai Shumari* and *Rai-Shumari*, respectively, in Kashmir were to dominate the popular political discourse in Kashmir. "Hold the plebiscite now, holds it fast", constituted the key slogans of the Plebiscite movement in Kashmir during the 1950s and 1960s (Schofield, 2004).

When a popular uprising broke out against Indian rule in Indian administered Kashmir in 1990, one of most shouted slogans during pro-independence processions was to be, "until a plebiscite is held, our struggle will continue". During the heady days of the 1990, uprising large pro-Independence processions of Kashmiris would often lead to the UNMOGIP

(United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) headquarters in Srinagar to lodge protests and call on the UN to implement its resolutions on Kashmir.

In one such procession, more than a million Kashmiris marched up to the UNMOGIP headquarters in Srinagar on 1 March 1990, shouting pro-freedom slogans and calling for a UN supervised plebiscite. The crowd also submitted memorandum to UN Secretary-General urging him to intervene and push India into granting Kashmiris their “right to self determination”. Even now, it is a common practice among Kashmiri separatists to send memorandum to the UNMOGIP in Srinagar, demanding implementation of UN resolutions in Kashmir or the fulfillment of the right of self-determination of Kashmiris.

In the ongoing wave, pro-independence mass protests in Kashmir, Kashmiris are again looking towards the UN with a faint hope. On August 18, 2008, responding to the call of separatist leaders who had called for a mass march up to UNMOGIP office, hundreds of thousands of people from the length and breadth of the valley converged near the Tourist Reception Centre, close to the UNMOGIP office in Sonawari locality of Srinagar to urge on the UN to intervene in Kashmir. The sea of people comprising students from schools, colleges and universities, doctors, teachers, paramedics, thousands of Kashmir government employees, professionals, and peasant masses-carried placards which read, “Stop Genocide of Kashmiris, Intervene UNO [United Nations Organization]”, “Banki-Moon, Come Soon”, “We Want Plebiscite”, etc (Koithara, 2004:34-35).

Representatives of the Kashmiri separatist leadership presented a memorandum (addressed to UN Secretary-General, Banki-Moon) to the UNMOGIP Observers, urging on the UN to intervene in Kashmir. The memorandum, which was also

published in the local press in Kashmir valley, stated as follows:

We, the people of Jammu and Kashmir, have firm faith in the institution of United Nations, which has been working for the mitigation of the sufferings of the oppressed around the world, will actively engage/monitor and intervene in Jammu and Kashmir; and (1) Call upon India to end its forcible occupation of Jammu and Kashmir and also desist from use of brute force against the people of Jammu and Kashmir; and (2) By itself take all effective measures in giving the people of the state, the chance to exercise their right to self-determination for deciding their future as has been conceded to them by Pakistan and India and approved by the United Nations Organization (cited in Koithara, 2004:36-37).

Some of the protestors carried copies of the memorandum, which had been circulated by the “Coordination Committee” of the separatist leadership. In Kashmir’s current media and popular discourses on Kashmir conflict, “UN Kashmir relationship” has again come under focus. Kashmir valley’s largest selling English daily, *Greater Kashmir*, recently cited Zafar Shah, an eminent Kashmiri lawyer, as saying “*When armed resistance broke out in the valley in 1990, at least 600 memorandums were presented to the UN Observers stationed in Kashmir*”. Zafar Shah, a Kashmiri nationalist, further said as follows:

The UN resolutions passed in 1948 are the backbone of the Kashmir struggle and give legitimacy to it. Despite the UN’s gross failure in Kashmir, the presence of UNMOGIP office in Kashmir continues to symbolically affirm the Kashmiri sentiment that their land is not yet another Indian state but an internationally recognized disputed territory and their cause is a historical and just one (cited in Hilali, 1997:80-84).

The words of “United Nations”, “Self-Determination”, and “Plebiscite” have become integral to the Kashmiri political lexicon. Though the UN has failed in bringing about a solution to the Kashmir

conundrum, its past involvement in Kashmir conflict has undoubtedly provided legitimacy and strength to the separatist argument in Kashmir (Ahmad Wani & Andi Suwirta, 2013).

Ironically, on the one hand, Kashmiri separatism has drawn strength from the UN resolutions but, on the other hand, the framing of the Kashmir conflict as an India-Pakistan (inter-state) conflict in the UN has prevented international recognition of the Kashmiri nationalist movement as the defining characteristic of the present day Kashmir conflict.

### **CONCLUSION**

The history of the Kashmir negotiations is marked by a series of failures, lack of trust, and mutual suspicion on the part of both Pakistan and India. Several times negotiations took place, but ultimately ended without constructive result. India never accepted any proposal concerning demilitarization and holding a plebiscite in Kashmir. In this perspective, Kashmir is still a most important irritant between India and Pakistan.

However, the trouble of Kashmir is wholly indigenous and India's stand on the issue is morally bankrupt and politically indefensible. Throughout the earlier years till the present day, the Kashmir has been a source of misery, tension, instability, and bloodshed in South Asia. India had no hesitation in backing out from all commitments and is not willing to accept UN (United Nations) resolutions. India claims that UN resolutions (13 August 1948 and 5 January 1949) are undisputed and inviolable principle – the principle of the right of self-determination – which forms the cornerstone of many international charters and declarations designed to establish national and human rights around the world on firm foundations.

The facts of the Kashmir issue show that numerous historic opportunities were lost to resolve the stalemate of Kashmir due to obstinacy on the part of

the Indian leadership. The concessions from both sides under the UN auspices, as initially agreed by them, could have helped South Asia to avert a continuum of unnecessary tragedies that were to befall its peoples. In the same vein, Nehru-Ayub talks unable to mature into an agreement on Kashmir. Neither the wars nor the various summits between Pakistan and India resulted in a tangible solution to the problem.

The Shimla Accord underlined Pakistani pronouncements on Kashmir being a disputed territory, which needed to be resolved through more resolute efforts, particularly through negotiations or by UN resolutions. Kashmir conflict is long standing unresolved dispute and it remains a matter of international interest. The United Nations retains the status in this matter, which it was granted by the original Indian reference under Article 35 of the UN Charter, and the Security Council still has the duty to endeavour to bring about by persuasion the implementations of its resolutions.

Although secessionism is not a good option to be adopted in Kashmir context, rather greater autonomy is best mechanism to be restored and protected. UN could play a greater role in order to check gross violations of human rights and misuse of powers in Kashmir valley. As an international community, it can pave a way to peace and prosperity in disturbed areas like Kashmir.

It can be said tactfully that if UN will not play its work, which it has been assigned, then, there is no need of such institution. Paradigm shift could be made when India and Pakistan, including Kashmiris, will accept the resolutions of United Nations; otherwise, it would be a tough task to be resolved. Keeping in view the respect of United Nations among the countries of world, it is better option for both India and Pakistan to go through the provisions and covenants of United Nations and resolve the Kashmir problem without

following the path of terror and insecurity.

International mediation or involvement, whether through UN or other international bodies, could be best mechanism for the conflict resolution process in Kashmir. However, irony is that India rejects third party mediation because India knew that it would expose the actuality of Kashmir conflict. Whereas the second rival, Pakistan, invites third party mediation for resolving the Kashmir issue. The UN has twice called for a referendum in Kashmir, which is yet to be held.

## **Bibliography**

- Ahmad Wani, Hilal & Andi Suwirta. (2013). "Understanding Kashmir Conflict: Looking for its Resolution" in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1(2) September. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UBD, and ASPENSI. Available [online] also at: [www.susurgalur-jksps.com](http://www.susurgalur-jksps.com)
- Ahmad Wani, Hilal, Andi Suwirta & Joseph Fayeye. (2013a). "Conflict Resolution and Conflict Transformation: Some Reflections" in *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(1) Juni. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNSUR, and ASPENSI. Available [online] also at: [www.atikan-jurnal.com](http://www.atikan-jurnal.com)
- Ahmad Wani, Hilal, Andi Suwirta & Joseph Fayeye. (2013b). "Untold Stories of Human Rights Violations in Kashmir" in *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, 6(1) August. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UMP, and ASPENSI. Available [online] also at: [www.educare-ijes.com](http://www.educare-ijes.com)
- Bazaz, Prem Nath. (1951). *The History of the Struggle for Freedom in Kashmir*. Bombay: Vora.
- Behera, Chadha Navnita. (2008). *Demystifying Kashmir*. New Delhi: Pearson Longman.
- Bose, Sumantra. (2003). *Kashmir Roots of Conflict: Paths to Peace*. New Delhi: Vistaar.
- Brown, William Norman. (1993). *The United States and India and Pakistan*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [file:///H:/pen\\_data\\_un/Kashmir and United Nations.html](http://file:///H:/pen_data_un/Kashmir%20and%20United%20Nations.html) [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: December 10, 2013].
- Ganguly, Sumit. (2003). *The Kashmir Question: Retrospect and Prospect*. London: Frankcass.
- Hilali, A.Z. (1997). "Kashmir Dispute and UN Mediation Efforts: An Historical Perspective" in *Small Wars and Insurgencies*. UK: Routledge, pp.61-84.
- Koithara, Verghese. (2004). *Crafting Peace in Kashmir through a Realist Lens*. New Delhi: Sage.
- Lamb, Alastair. (1992). *Kashmir: A Disputed Legacy, 1846-1990*. Karachi: Oup Publisher.
- Mohd Pir, Ali & Ab Rashid Shiekh. (2013). "Formation of the Princely State of Jammu and Kashmir: The Historical Perspectives" in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1(2) September. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UBD, and ASPENSI. Available [online] also at: [www.susurgalur-jksps.com](http://www.susurgalur-jksps.com)
- Schofield, Victoria. (2004). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan, and the Unending War*. New Delhi: Viva Publisher.

## Kesejarahan Ajaran Sifat 20 di Alam Melayu

**IKHTISAR:** Ramai ulama Islam yang terkemudian mencampurkan penulisan akidah dengan ilmu falsafah. Percampuran ini menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah Tauhid. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Al-Imam al-Sanusi memperkenalkan ajaran Sifat 20 menerusi penulisan "Umm al-Barahin" dan menjadi pilihan bagi kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam. Bilakah munculnya ajaran tersebut di alam Melayu? Artikel ini cuba memecahkan persoalan tersebut. Sehubungan dengan itu, objektif artikel ini adalah untuk mengkaji kesejarahan ajaran Sifat 20 di alam Melayu. Bagi mencapai objektif tersebut, kajian ini menggunakan analisis kandungan melalui data perpustakaan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ajaran Sifat 20 telah muncul kali pertama di utara Afrika pada abad ke-15 M (Masehi) dan tersebar kemudiannya ke alam Arab. Pada abad ke-17 M, ia telah terdedah pada alam Melayu melalui penulisan beberapa orang ulama, antaranya Ahmad bin Aminuddin Qadhi, Al-Syaikh Nur al-Din al-Raniri, dan Syeikh Abdul Rauf Singkil. Pada abad ke-18 M, penulisan Sifat 20 "Umm al-Barahin" mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Malayu oleh Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, diikuti dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, dan disebar-luas kemudiannya oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani pada abad ke-19 M.

**KATA KUNCI:** Sifat 20, kesejarahan, "Umm al-Barahin", Al-Imam al-Sanusi, pusat pengajian Islam, dan alam Melayu.

**ABSTRACT:** This paper entitled "An Historical Account on the Teachings of the 20 Attributes in the Malay World". Many of the late Islamic scholars writings mixed faith with philosophy. This mixing had created ambiguity on the notion of the belief in the unity of God. In order to address these problems, Al-Imam al-Sanusi introduced the teachings of the 20 Attributes of Allah through his book "Umm al-Barahin" which became the choice materials for many scholars in Islamic studies centers. When did these teachings emerge in the Malay world? This paper, thus, makes an attempt to resolve the issue. Accordingly, the objective of this paper is to examine the historical account on the teachings of the 20 Attributes of Allah in the Malay world. To achieve the objective, this study used content analysis through library data. The research findings showed that the teachings on the 20 Attributes of Allah first appeared in northern Africa in the 15th century and later spread to the Arab world. In the 17th century, it was exposed to the Malay world through the writings of some scholars, such as Ahmad bin Aminuddin Qadhi, Al-Syaikh Nur al-Din al-Raniri, and Syeikh Abdul Rauf Singkil. In the 18th century, the 20 Attributes of Allah in "Umm al-Barahin" begun to be translated into the Malay language by Sheik Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, followed by Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani which was widespread later by Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani in the 19th century.

**KEY WORD:** 20 Attributes, historical account, "Umm al-Barahin", Al-Imam al-Sanusi, Islamic studies center, and Malay world.

### PENDAHULUAN

Akidah *Tauhid* merupakan satu bidang ilmu pengetahuan yang paling tinggi kedudukannya dalam agama Islam, kerana tujuan utama dijadikan

manusia adalah untuk beribadat kepada Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan pada firman-Nya dalam surah Al-Dharyat, ayat

Dr. Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan ialah Dekan Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, 33000 Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: [masakaree@kuisas.edu.my](mailto:masakaree@kuisas.edu.my) dan [mohdsyukri.nikwan@yahoo.com](mailto:mohdsyukri.nikwan@yahoo.com)

56, yang bermaksud: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah-Ku” (dalam *Al-Qur’an al-Karim*, 1413 H).

Justeru, ibadat kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas. Dimaksudkan dengan “niat yang jelas” adalah sengaja beribadat hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sengaja berbuat demikian tidak akan tercapai matlamatnya, kecuali dengan mengenal Allah SWT secara tepat. Dengan kata lain, tidak berlaku penyembahan kecuali dengan niat; dan tidak berlaku niat kecuali dengan mengenal Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh yang demikian, mengenal Allah SWT adalah suatu suruhan bagi setiap yang bermukalaf. Adapun *zan* (menyangka) dan *taklid* (menurut kata orang tanpa berfikir sendiri) tidak memadai dalam urusan akidah (Al-Syafi’i, t.th.), sebagaimana pula firman Allah SWT dalam surah Muhammad, ayat 19, yang bermaksud: “Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah” (dalam *Al-Qur’an al-Karim*, 1413 H).

Dalam rangka menjaya usaha mengenal atau mengetahui tentang Allah SWT, ramai para pakar yang terlibat penulisan mereka secara khusus menerusi ilmu Akidah *Tauhid*. Antara penulisan yang paling terkenal di alam Melayu adalah penulisan *Umm al-Barahin* (Ibu Segala Tanda), karya Al-Imam al-Sanusi,<sup>1</sup> atau yang dikenali sebagai ajaran Sifat 20.

Artikel ini bertujuan untuk membincang persoalan kesejarahan ajaran Sifat 20, khususnya di alam Melayu. Antara persoalan yang dikemukakan adalah: (1) Bilakah

munculnya ajaran Sifat 20?; (2) Apakah nama-nama yang dianugerahkan kepada ajaran Sifat 20?; dan (3) Bilakah kemunculannya di alam Melayu?

Dalam menjawab persoalan tersebut, artikel ini akan dimulakan dengan sejarah kemunculan ajaran Sifat 20 secara umum, diikuti dengan persoalan nama-nama yang dianugerahkan dan kemunculannya di alam Melayu. Seterusnya, artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan.

## SEJARAH KEMUNCULAN AJARAN SIFAT 20

Mengikut catatan Ibn Khaldun, 732-808 H (Hijriah) / 1332-1406 M (Masehi), atau nama penuhnya ialah ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, ternyata bahawa ramai di kalangan ulama-ulama Islam yang terkemudian lebih banyak terpengaruh dengan ilmu falsafah asing. Mereka menghimpunkan beberapa jenis ilmu akal yang berbeza-beza menjadi satu ilmu, sehingga berlakunya percampuran dalam penulisan ilmu akidah Ketuhanan Islam dengan ilmu falsafah yang sukar dibezakan antara satu sama yang lain (Ibn Khaldun, 1996).

Antara penulisan-penulisan yang dimaksudkan adalah *Asas al-Taqdis fi ‘Ilm al-Kalam* karya Fakhr al-Din Al-Razi (544-606 H / 1149-1209 M), seorang ulama kelahiran Tabrustan (Azerbaijan); *Tawali’ al-Anwar* karya Nasir al-Din Abu Sa’id ‘Abd Allah bin ‘Umar bin Muhammad al-Baydawi al-Syirazi (m. 685 H / 1286 M), seorang ulama kelahiran Bayda’, Shiraz, Iran; dan *Al-Mawaqif fi ‘Ilm al-Kalam* karya Abd al-Rahman bin Ahmad bin ‘Abd al-Ghaffar bin Fadl, atau yang lebih dikenali dengan Al-Qadi ‘Idd al-Din al-Iji (m. 756 H / 1355 M), seorang ulama kelahiran Ij, Shiraz (Ibn Khaldun, 1996).

Percampuran yang berlaku pada ketika itu telah menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah orang Islam dan orang ramai (orang awam), seterusnya menjadi keliru

<sup>1</sup>Al-Imam al-Sanusi iaitu Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yusuf bin ‘Umar bin Syu’ayb al-Sanusi al-Hasani al-Asy’ari al-Maliki al-Tilimsani al-Maghribi (1428-1490 M), seorang ulama yang berakidah Al-Asy’ari dan fikah Maliki, juga pembangun Islam di utara Afrika pada abad 9 H (Hijriah) atau 15 M (Masehi).

dalam soal-soal akidah Ketuhanan Islam (Rosder, 1989; dan Ambak bin Haji Ismail, 1991). Seterusnya dipelajari secara *taklid*, atau dengan kata lain dipelajari secara ikut-ikutan, tanpa menggunakan akal fikiran sendiri. Kerananya, terhentilah kemajuan ilmu pengetahuan ('Abduh, 1979). Melimpah padanya, zaman Al-Imam al-Sanusi, lautan kejahilan dan tersebar padanya, zaman Al-Imam al-Sanusi, kebatilan (al-Sanusi, t.th.b).

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Islam, Al-Imam al-Sanusi (nama penuhnya ialah Al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Sanusi), telah bertindak mengasingkan perbahasan yang berkaitan dengan akidah, di samping mengemukakan pandangan yang jelas dan bukannya fakta-fakta yang beraneka falsafah. Hasil tindakan Al-Imam al-Sanusi ini lahir sebuah penulisan yang dinamakan sebagai *Umm al-Barahin*, disebut juga '*Aqidah Ahl al-Tauhid al-Sughra*, atau *Risalah Al-Sanusiyah*. Al-Imam al-Sanusi membuat kenyataan, diantaranya adalah seperti berikut:

Maka sebahagian daripada yang wajib bagi Tuhan kita Yang Maha Besar dan Yang Maha Mulia dua puluh sifat, iaitu *Al-Wujud* [Ada], *Al-Qidam* [Sedia],<sup>2</sup> *Al-Baqā'* [Kekal], *Mukhalafatuhu Ta'ala li al-Hawadith* [Menyalahi atau berlawanan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu], *Qiyamuhu Ta'ala bi Nafsih* [berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri-Nya] ..., *Al-Wahdaniyyah* [Tunggal] ..., maka ini enam sifat, bermula yang pertamanya *Nafsiyyah* [yang menunjukkan diri sendiri], iaitu *Al-Wujud* dan yang lima kemudiannya *Salbiyyah* [yang menunjukkan negatif], kemudian wajib bagi-Nya Ta'ala tujuh sifat yang dinamai akan dia sifat *Al-Ma'ani* [yang menunjukkan beberapa makna],

<sup>2</sup>Dalam *Al-Fatawa al-Fataniyyah*, Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani berpendapat bahawa "sedia" itu makna bagi *azali*, tetapi dengan alasan eloknya dan manisnya pada pendengaran dan perasaan meminjamkan dia oleh orang Melayu, maka memakai mereka itu akan dia bagi makna *qidam* yang *zati*, iaitu *qidam* Allah Ta'ala dan sifat-Nya, padahal makna *qidam* itu lama. Lihat, bagi maklumat lanjut, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah (1992).

iaitu *Al-Qudrah* [Berkuasa], *Al-Iradah* [Berkehendak] ..., *Al-'Ilm* [Mengetahui] ..., *Al-Hayah* [Hidup] ..., *Al-Sam'* [Mendengar], *Al-Basar* [Melihat] ... dan *Kalam* [Berkata-kata] ... kemudian tujuh sifat yang dinamai akan dia sifat *Ma'nawiyah* [relatif dengan beberapa makna], iaitu yang melazimkan tujuh yang pertama, iaitu *Kaunuhu Ta'ala Qadiran* [Keadaannya Yang Berkuasa], *Muridan* [Yang Berkehendak], *'Aliman* [Yang Mengetahui], *Hayan* [Yang Hidup], *Sami'an* [Yang Mendengar], *Basiran* [Yang Melihat], dan *Mutakalliman* [Yang Berkata-kata] (al-Sanusi, t.th.a).

Setelah beliau membahas bahagian-bahagian yang wajib bagi Zat Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), beliau membahas pula bahagian-bahagian yang absurd bagi-Nya, atau yang dikenali dengan nama sifat "mustahil" bagi Zat Allah SWT sebagai lawan bagi bahagian-bahagian yang wajib tadi, dan diikuti dengan bahagian yang harus, atau *jaiz*, bagi Zat-Nya *Ta'ala* (al-Sanusi, t.th.a).

Dari sini muncullah ajaran *Tauhid Formalistik*, yang terkenal kemudiannya dengan namanya "Sifat 20". Semua perkembangan seperti ini turut diterima dengan baik oleh para ulama dengan menyifatkannya sebagai ajaran *Ahli Sunah Waljamaah*. Dari segi ini, yang dimaksudkan dengan *Ahli Sunah Waljamaah* adalah tetap sebagai suatu aliran *Usuluddin* atau *Kalam* (Haji Abdullah, 1989).

Penemuan ini adalah sama dengan beberapa pendapat para ulama di alam Melayu, seperti dinyatakan oleh Mudasar Rosder dan pendakwah bebas, Abdul Aziz Ambak bin Haji Ismail, seperti berikut ini:

Perbincangan berhubung dengan pertumbuhan Sifat Dua Puluh tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW (*Salallahu 'Alaihi Wassalam*), zaman Sahabat RA (*Radhiallahu Anh*), begitu juga pada zaman *al-Tabi'in*, tetapi pada kurun kesembilan Hijrah perbincangan mengenainya lahir (Rosder, 1989).

Mengaji ilmu *Tauhid* atau *Usul* melalui pendekatan Sifat 20 yang wajib

bagi Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) itu, tidak tumbuh pada peringkat awal ilmu *al-Tauhid* (*Ilm al-kalam*), ianya tumbuh dan dikenali pada abad ke-9 Hijriyah [*sic* Hijrah]. Kitab yang ulung kali membicarakan Sifat 20 ini (setakat yang dapat dikesan) ialah berjudul *Umm al-Barahin* atau Ibu Segala Tanda (Ambak bin Haji Ismail, 1991).

Dalam hal ini juga terdapat segelintir para ulama di alam Melayu yang masih lagi mempertikaikan sejarah kemunculan ajaran Sifat 20. Antaranya ialah Alyahya (1991), penulis buku *Dua Puluh Sifat Allah*, yang berpendapat bahawa sifat-sifat ini telah disusun oleh Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan diikuti kemudiannya oleh para ulama, diberi pula dalil-dalilnya, baik daripada Al-Qur'an mahupun Hadist.

Sebaliknya, Mohd Nor bin Ngah, yang pernah membuat penyelidikan terhadap kitab Jawi, berpendapat bahawa Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari telah menyusun hanya 13 sifat, adapun 7 sifat lagi adalah tambahan daripada pengikutnya yang terkenal, iaitu Abu Bakr al-Baqilani dan Al-Imam al-Haramayn. Oleh yang demikian Razi Jusoh, penulis artikel di International Institute of ISTAC (*Islamic Thought and Civilization*) yang pernah membuat penyelidikan tentang Sifat 20, amat percaya bahawa status Al-Imam al-Sanusi hanya sebagai pengembang, bukannya pengasas kepada Sifat 20 (Jusoh, 2000).

Mudasir Rosder (1989) juga pernah membuat penelitian kitab-kitab karangan Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT, kemudian beliau membuat kesimpulan bahawa Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari telah membicarakan keseluruhan Sifat 20, walaupun ada sesetengahnya dibicarakan secara tidak langsung, umpamanya sifat *Qiyamuhu Ta'ala bi Nafsih* (berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri-Nya), dapat difahami dalam tajuk "Bahawa Allah Bukan *Jisim*" hanya susunan perbincangan

sifat itu tidak seperti perbincangan yang terdapat dalam Sifat 20 Al-Imam al-Sanusi dalam *Umm al-Barahin* (Ibu Segala Tanda).

Oleh yang demikian, pengembalian Sifat 20 kepada para ulama sebelum Al-Imam al-Sanusi sebagai pengasas merupakan pengembalian yang berasaskan perbincangan secara menyeluruh, manakala pengembalian kepada Al-Imam al-Sanusi pula merupakan pengembalian yang berasaskan kesempurnaan dari segi ketetapan susunan dan bilangan, sebagaimana terdapat dalam penulisannya *Umm al-Barahin*.

### **NAMA-NAMA AJARAN SIFAT 20**

Ajaran Sifat 20 *Umm al-Barahin* (Ibu Segala Tanda) telah mendapat tempat yang paling tinggi dan ia merupakan kitab rujukan penting dalam bidang akidah Islam di merata tempat, khususnya di alam Melayu. Berikut adalah pendapat bersabit ajaran Sifat 20:

Bahawasanya ialah kitab yang kecil pada bicara akidah yang terlebih masyhur pada segala Arab dan Jawi dan Turki dan Hindi dan lainnya akan membaca segala mereka itu akan dia serta diamalkan segala barang yang tersebut di dalamnya (Muhammad Badawi al-Sumbawi, t.th.).

Kitab terakhir ini [*Umm al-Barahin*] tidak begitu besar, akan tetapi besar pengaruhnya dalam dunia aliran *Asy'ariyyah*, sehingga banyak yang memberikan ulasan kitab tersebut (Hanafi, 1974).

Kitab *Umm al-Barahin* karangan al-Sanusi telah tersebar luas di Nusantara dan sangat popular di kalangan ulama di rantau ini (Haji Yahaya, 2000).

Oleh sebab penulisan tersebut sangat berguna dan berupaya diamalkan, maka ia turut digemari di Nusantara sehingga aliran *Asy'ariyyah* atau *Ahli Sunah Waljamaah* yang ada di rantau ini ialah yang bercorak *Sanusiyyah* (Hanafi, 1974).

Kitab-kitab tentang akidah selepasnya tidak mencapai sebarang

kemajuan yang berkesan, kecuali *syarah*<sup>3</sup> dan *hasyiah*<sup>4</sup> atau *hasyiah* di atas *syarah*<sup>5</sup> (Haji Abdullah, 1990). Karya-karya yang bersifat *syarah* atau *hasyiah* ini tidak hanya terhad di kalangan ulama Arab, malah meliputi ulama Jawi.

Antara karya *syarah* atau *hasyiah* adalah seperti *Syarh al-Imam al-'Allamah Muhammad bin Mansur al-Hudhudi 'ala Umm al-Barahin*, karya Al-Syaikh Muhammad bin Mansur al-Hudhudi, t.th. (tanpa tahun); *Bidayah al-Hidayah*, karya Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, 1170 H (Hijriah) / 1756 M (Masehi); *Hasyiyah al-Syaikh 'Abd Allah bin Hijazi al-Syarqawi 'ala Syarh al-Imam al-'Allamah Muhammad bin Mansur al-Hudhudi 'ala Umm al-Barahin*, karya Al-Syaikh 'Abd Allah bin Hijazi al-Syarqawi, 1194 H / 1779 M; *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala Umm al-Barahin*, karya Al-Syaikh Muhammad al-Dusuqi, 1214 H / 1799 M; *Hasyiyah al-'Allamah al-Bayjuri 'ala Matn al-Sanusiyyah*, karya Al-Syaikh Ibrahim al-Bayjuri, 1227 H / 1811 M; *Siraj al-Huda pada Menyatakan Akidah Ahl al-Taqwa*, karya Syeikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi al-Sumbawi, 1302 H / 1884 M; dan banyak lagi kitab lain yang sama coraknya.

<sup>3</sup>Perkataan "Syarah" berasal daripada perkataan Arab, *Syarh*. Mahmud Yunus (1973) memberi erti dengan "keterangan", manakala Husain bin Unang (1994) pula memberi erti dengan "menerangkan". Adapun *Kamus Dewan* memberi erti dengan: "keterangan, huraian, penjelasan, atau ulasan" (DBP, 1994). Kata K.H. (Kyai Haji) Sirajuddin Abbas, "*Syarah* ialah huraian lebih panjang tentang *matan*, biasanya *syarah* sesuatu *matan* dibuat oleh orang lain dengan menyelipkan disela-sela *matan*" (Abbas, 1975).

<sup>4</sup>Perkataan "Hasyiah" berasal daripada perkataan Arab, *Hasyiyah*. Husain bin Unang (1994) memberi erti dengan "ulasan atau kupasan". Adapun *Kamus Dewan* memberi maksud dengan "catatan atau keterangan yang ditulis di tepi buku" (DBP, 1994). Kata K.H. (Kyai Haji) Sirajuddin Abbas, "*Hasyiah* ialah komentar-komentar kecil dari *matan* atau dari *syarah* yang ditulis oleh orang lain pula. Biasanya *hasyiah* itu diletakkan di tepi atau di tengah kitab dengan memakai tanda *qauluhu*" (Abbas, 1975).

<sup>5</sup>"*Hasyiah* di atas *syarah*" maksudnya ulasan, kupasan, catatan, keterangan, atau komentar-komentar kecil dari *syarah*.

Selain *syarah* dan *hasyiah*, penulisan *Umm al-Barahin* oleh Al-Imam al-Sanusi ini juga telah diterjemahkan kedalam bahasa yang berlainan, antaranya terjemahan kedalam bahasa Melayu oleh beberapa orang ulama Melayu, bermula semenjak Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi (1756), bahasa Jerman oleh Ph. Wolff (1848), bahasa Perancis oleh Luciani (1896), dan bahasa Inggeris oleh A.J. Wensinck (1932).

Al-Imam al-Sanusi ialah orang yang bertanggungjawab menyusun *matan* mengenai *Umm al-Barahin*. Berasas *matan*-nya itulah, para ulama, sama ada di Kepulauan Melayu, Benua Afrika, mahupun India telah menterjemah, men-*syarah*, dan menyebarkannya di seluruh dunia. Setakat ini tidak kurang dari lima puluh buah kitab *syarah* bagi *Umm al-Barahin* dalam pelbagai bahasa telah dikenal-pasti (Jusoh, 2000).

*Syarah*, *hasyiah*, dan terjemahan Melayu tersebut telah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu *Tauhid* para ulama Islam di alam Melayu, khususnya di Asia Tenggara, dan diguna-pakai seterusnya oleh umat Islam di rantau tersebut. Sehingga kini dibaca dan dipelajari di pondok-pondok, masjid-masjid, dan menjadi buku rujukan dalam bidang ilmu *Tauhid*.

Ajaran Sifat 20 yang semata-mata membicarakan soal-soal kepercayaan telah dikenali dengan pelbagai nama, sekurang-kurang terdapat sembilan nama yang dikenali, antaranya adalah: *Sifat 20*, *'Ilm al-Tauhid*, *'Ilm Usul* atau *Usul al-Din*, *'Ilm al-'Aqa'id*, *Akidah Lima Puluh*, *'Ilm al-Kalam*, *'Ilm al-Jadal*, *'Ilm Ma'rifah*, dan *'Ilm Haqiqah*, tetapi yang paling terkenal di alam Melayu adalah dengan gelaran *Sifat 20*. Kadang-kala disebut juga dengan *Usul*, ringkasan daripada perkataan *'Ilm Usul al-Din*.

Digelarkan dengan *Sifat 20* kerana perbincangan yang terpenting dalam penulisan ini ialah batasan dua puluh sifat Ketuhanan Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), yang mustahak dipercayai

oleh setiap Muslim mukalaf pada peringkat yang paling minimum tentang akidah Ketuhanan. Berikut adalah pendapat bersabit dengan Sifat 20 yang dipelajari oleh ramai orang:

Di Indonesia, ada orang-orang menamainya dengan *Ilmu Sifat Dua Puluh*, kerana di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib (mesti ada) bagi Tuhan (Abbas, 1978).

Di kalangan orang-orang kita, ilmu ini dinamakan *Ilmu Sifat Dua Puluh*, kerana perbincangan yang terpenting sekali di dalam ilmu ini ialah tentang sifat-sifat Ketuhanan Allah yang ditetapkan oleh para ulama *Tauhid* kita; ada dua puluh sifat (Jantan, 1986).

Kaedah Sifat Dua Puluh iaitu Allah itu mempunyai dua puluh sifat yang mustahak diketahui oleh setiap umat Islam (Alyahya, 1991).

Puncanya diberi judul sifat 20 itu kerana dalam kitab tersebut membataskan 20 sifat yang wajib itu wajib diketahui oleh setiap orang mukalaf pada peringkat yang paling minima tentang akidah Ketuhanan atau ma'rifah [*sic* makrifat] Allah (Ambak bin Haji Ismail, 1991).

Adapun gelaran *'Ilm Usul al-Din* adalah kerana perkataan *Usul* berertinya tunjang, asas, pokok, atau pangkal; dan perkataan *Al-Din* ertinya agama. Maka perkataan *'Ilm Usul al-Din* ertinya ilmu yang membicarakan tentang tunjang agama, asas agama, pokok agama, atau pangkal agama tentang *iktikad* Ketuhanan Allah SWT.

Mengikut para penulis dalam bidang akidah di alam Melayu, seperti K.H. (Kyai Haji) Sirajuddin Abbas (m. 1403 H / 1982 M), Osman bin Jantan, Abdul Aziz Omar Ahmad, dan Noraine Abu dinamakan dengan *'Ilm Usul al-Din* kerana ilmu ini membahaskan dan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara pokok dalam Islam, antaranya soal-soal *iktikad*, iman atau kepercayaan yang menjadi pokok agama, iaitu: sifat-sifat yang berkaitan ketuhanan (Abbas, 1978; Jantan, 1986; Abu, 2001; dan Omar Ahmad, 2001).

## AJARAN SIFAT 20 DI ALAM MELAYU

Apabila akidah *Tauhid* merupakan satu bidang ilmu yang paling tinggi kedudukannya dalam agama Islam dan ajaran Sifat 20 telah mendapat tempat yang paling tinggi kedudukan di merata tempat, khususnya di alam Melayu. Persoalannya, bilakah munculnya ajaran Sifat 20 di alam Melayu dan sejauh manakah perkembangannya di rantau tersebut?

Terdapat di alam Melayu sebuah manuskrip (tanpa judul, tanpa pengarang, dan tanpa tahun) petikan kitab *Bahr al-Dahut (Lahut)* yang ditulis pada abad ke-6 H (Hijriah) / 12 M (Masehi) oleh 'Abd Allah al-'Arif, seorang pendakwah Arab Andalusia yang dilahirkan pada 472 H / 1080 M, dan tiba di Pasai (terletak di Lhokseumawe sekarang di Provinsi Aceh Darussalam, Indonesia) pada 1165 M (al-'Arif, 1994). Dalam manuskrip tersebut tercatat perkataan: "Bermula inilah Sifat Dua Puluh" (TP, 1994).

Kitab *Bahr al-Dahut (Lahut)* adalah sebuah kitab yang memberi tumpuan khusus perbincangannya hanya kepada beberapa sifat Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) yang boleh dikaitkan dengan teori *Nur Muhammad*. Ianya bukanlah kitab yang membicarakan tentang persoalan Sifat 20 secara khusus, seperti yang diperkenalkan oleh Al-Imam al-Sanusi dalam *Umm al-Barahin* (Ibu Segala Tanda).

Menurut catatan sejarah, perbincangan tentang Sifat 20 seperti yang diperkenalkan oleh Al-Imam al-Sanusi belum lagi diwujudkan pada abad ke-6 H / 12 M. Disebabkan perbincangan hampir sama dengan perbincangan Sifat 20 daripada Al-Imam al-Sanusi, maka pemetik terkemudian yang pernah mendengar konsep Sifat 20 daripada Al-Imam al-Sanusi dan ingin mempopularkannya, mereka sedia memperkatakan apa-apa sahaja untuk kepentingannya sendiri.

Mahayudin Haji Yahaya (1998) dalam *Islam di Alam Melayu*, contohnya,

berpendapat bahawa penulisan Sifat 20 telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu pada abad ke-15 M (Masehi). Sebenarnya, pendapat ini juga tidak disertai dengan apa-apa bukti yang kukuh dan dapat meyakinkan para pengkaji. Ia juga terlalu awal apabila dibandingkan dengan kematian Al-Imam al-Sanusi, iaitu pada akhir abad ke-15 M, dan juga sejarah perkembangan penulisan *Umm al-Barahin* di alam Islam, khususnya di negara-negara Arab.

Abdul Rahman Haji Abdullah (1990) telah mengemukakan bahawa Sifat 20 yang paling ulung di Nusantara adalah pada akhir abad ke-11 H / 17 M dalam kitab tasawuf karangan Syeikh Abdul Rauf Singkil,<sup>6</sup> yang bertajuk *'Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufarridin*.

Sebenarnya, masih terdapat penulisan-penulisan yang membicarakan tentang Sifat 20 sebelum kitab *'Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufarridin*. Mengikut Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah (m. 1428 H / 2007 M), ahli tarikh ulama Nusantara dan karya-karya mereka, Sifat 20

<sup>6</sup>Syeikh Abdul Rauf Singkil (1024-1106 H / 1615-1695 M) iaitu Syeikh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri, yang lebih terkenal dengan sebutan Syeikh Abdul Rauf, banyak mempunyai gelaran seperti *Syeikh Kuala*, *Syeikh di Kuala* atau *Ciah Kuala*, *Tengku Ciah Kuala*, dan *Abdul Rauf van Singkil*. Beliau berasal dari Fansur (Barus), Singkil, Aceh (Shaghir Abdullah, 1976b). Beliau mendapat pendidikan awal di desa kelahirannya, terutama daripada ayahnya. Kira-kira pada tahun 1052 H / 1642 M, beliau datang ke tanah Arab. Selama di negeri Arab, beliau menuntut ilmu pengetahuan di sepanjang jalan haji, dari Dhuha, Yaman, Jeddah, dan akhirnya di Mekah dan Madinah (Azra, 1995). Pada tahun 1661 M, beliau kembali ke Aceh setelah menghabiskan masa dalam buku pelajaran tidak kurang dari 19 tahun (Bruinessen, 1995). Pada tahun 1665 M, beliau dilantik menjadi *Qadi Malik al-'Adil* atau Mufti kerajaan Aceh Dar al-Salam pada zaman Ratu Safiatuddin (Haji Yahaya, 2000). Syeikh Abdul Rauf Singkil dikenali sebagai pembawa tarekat Syattariyyah ke Indonesia. Gurunya yang paling penting di Madinah ialah Burhan al-Din Malik Ibrahim, anak Hasan al-Kurani al-Syafi'i Syattari (1023-1101 H / 1615-1690 M) atau Ibrahim al-Kurani. Pada ketika itu, Burhan al-Din Malik Ibrahim adalah ulama yang paling besar di Madinah dan murid-muridnya datang dari seluruh dunia Islam (Bruinessen, 1995); dan ia merupakan penerus salah satu aliran tasawuf Mesir, iaitu tradisi yang diwakili oleh Zakariyya al-Ansari dan muridnya, 'Abd al-Wahhab al-Syi'rani (Bruinessen, 1995).

pernah dibicarakan kali pertama oleh seorang ulama Kedah yang sezaman dengan Syeikh Syamsuddin al-Sumatra'i (m. 1039 H / 1630 M), iaitu Ahmad bin Aminuddin Qadhi, dalam sebuah kitab *Tauhid* tanpa judul yang selesai ditulis pada tahun 1032 H / 1622 M, serta manuskripnya ada tersimpan di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia, MS.1092 (Shaghir Abdullah, 1991).

Selain ulama Kedah, ia turut dibicarakan oleh Al-Syaikh Nur al-Din al-Raniri<sup>7</sup> (m. 1069 H / 1658 M) dalam naskhah *Jawahir al-'Ulum fi Kasyf al-Ma'lum, Hidayah al-Iman bi Fadl al-Mannan* (dalam Daudy, 1983); dan dalam sebuah manuskrip yang terdapat di *Royal Asiatic Society*, London, Raffles Malay 79, setebal 173 halaman, bersama-sama fragmen kitab *Syifa' al-Qulub*, *'Umdah al-I'tiqad*, dan fragmen-fragmen lain.

Pada abad ke-12 H / 18 M, ajaran Sifat 20 daripada Al-Imam al-Sanusi telah menjadi sebuah kurikulum yang penting dalam sistem pengajian Islam di Mekah. Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar secara rasmi. Dan terdapat beberapa orang guru di kalangan tokoh ulama Melayu yang mengajar, antaranya Syeikh Muhammad Zain (nama penuhnya ialah Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi).

Pada zaman inilah, ramai orang-orang Melayu dari Nusantara yang mengunjunggi kota Mekah untuk

<sup>7</sup>Nama lengkapnya ialah Nur al-Din ibn 'Ali ibn Husan Ji (Husanji) ibn Muhammad Hamid al-Ranjiri al-Syafi'i (Al-Ranjiri, 1955). Beliau adalah keturunan Hadrami yang berasal dari Rander (Ranjir, terletak di kawasan Teluk Kambai, Gujarat, India). Setelah beliau tamat pengajiannya di Mekah, beliau belayar ke Aceh. Beliau tiba di Aceh pada tahun 1047 H / 1637 M, dan tinggal di situ selama tujuh tahun, 1637-1644 M (Russell, 1974). Pada masa pemerintah Sultan Iskandar Thani (1636-1641 M), beliau diangkat menjadi Mufti Aceh dan meninggal dunia pada 22 Zulhijah 1069 H / 21 September 1658 M (Haji Yahaya, 1994). Mengikut Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah (1976), Al-Syaikh Nur al-Din al-Ranjiri adalah bekas pelajar pusat pengajian Islam Hadramaut yang menganut tarekat Qadiriyyah aliran Al-Asy'ari, pernah datang dari Gujarat menuju Aceh pada tahun 1570 M.

melanjutkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. Disebabkan kekurangan pengetahuan tentang bahasa Arab, maka muncul permasalahan dalam meneruskan pengajian mereka di kota tersebut. Situasi sedemikian telah mendorong para guru bertindak menyediakan teks baru berbahasa Melayu tulisan Jawi. Maka pada 1170 H / 1757 M, lahirlah kitab *Bidayah al-Hidayah* karangan Syeikh Muhammad Zain sebagai huraian kepada penulisan *Umm al-Barahin* daripada Al-Imam al-Sanusi. Kitab tersebut kemudiannya dijadikan teks utama pengajian ilmu *Tauhid* di kota Mekah bagi pelajar-pelajar yang baru tiba dari rantau Nusantara, khususnya sebelum mereka menguasai bahasa Arab.

Berikut adalah petikan kenyataan daripada Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi bersabit dengan kitab yang dibuatnya:

Sungguhnya telah aku melihat pada zaman ini akan orang Jawi daripada kesangkatan, ertinya daripada akal pada berlajar [sic belajar] dengan bahasa Arab, maka aku kehendak aku terjemahkan akan karangan imam yang lebih lagi warak, iaitu Abu 'Abd Allah kunyahnya, Muhammad namanya, anak Yusuf, Sanusi nama negerinya, Hasani bangsanya, yang reda Allah daripadanya, yang dinamai karangannya iaitu *Umm al-Barahin* dengan bahasa Jawi, serta aku nyatakan maknanya dengan barang yang aku lihat akan dia pada setengah daripada beberapa *syarah* dan setengah daripada beberapa *hasyiah*, dan aku himpulkan kepadanya setengah daripada beberapa faedah yang berkehendak kepadanya kerana memberi manfaat dengan dia segala orang yang baharu berlajar [sic belajar] dan aku namai akan dia *Bidayah al-Hidayah* (Faqih Jalaluddin al-Asyi, 1756).

Pada tahun 1212 H / 1797 M, seorang ulama dari Betawi (kini Jakarta, Indonesia), yang bernama Encik Kemering, telah mengemukakan ajaran Sifat 20 daripada Al-Imam al-Sanusi dalam sebuah penulisan yang bertajuk *Surat Sifat Dua Puluh*.

Penulisan ini terdapat di Perpustakaan SOAS (*School of Oriental and African Studies*), Univesiti London, MS.11576 (dalam Haji Yahaya, 2000).

Perlu diingatakan bahawa Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, yang telah selesai menulis *Bidayah al-Hidayah* di Mekah pada 1170 H / 1757 M, tidak selamanya berperanan di situ, malah dia telah kembali ke Aceh dan menjadi seorang ulama terkemuka pada zaman Kesultanan Aceh, iaitu pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Muhammad Syah (1174-1195 H / 1760-1781 M). Dengan itu, sebuah terjemahan teks tulen penulisan *Umm al-Barahin* daripada Al-Imam al-Sanusi, yang disertai dengan huraian dalam bahasa Melayu, turut terjana kali pertama di Nusantara sebelum wujudnya penulisan Encik Kemering lagi.

Selepas kelahiran kitab *Bidayah al-Hidayah*, tidak berapa lama, lahirlah beberapa buah *hasyiah*, seperti: *Hasyiyah al-Syaikh 'Abd Allah bin Hijazi al-Syarqawi 'ala Syarh al-Imam al-'Allamah Muhammad bin Mansur al-Hudhudi 'ala Umm al-Barahin*, karangan Al-Syarqawi pada tahun 1194 H; dikuti dengan *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala Umm al-Barahin*, karangan Al-Dusuqi pada tahun 1214 H; dan *Hasyiyah al-'Allamah al-Bayjuri 'ala Matn al-Sanusiyah*, karangan Al-Bayjuri pada tahun 1227 H (TP, t.th.).

Kelahiran *hasyiah-hasyiah* terbaru telah mendesak para ulama untuk mengubah teks pengajian dengan mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para ulama, yang pakar dalam bidang ilmu *Usuluddin* dan akidah *Tauhid*. Dari sini lahirlah pula sebuah kitab dalam bahasa Melayu, iaitu *Al-Durr al-Thamin fi Bayan 'Aqa'id al-Mu'minin*, karangan seorang ulama Patani yang pernah berguru dengan Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, iaitu Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani.<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Syeikh Daud, nama penuhnya ialah Syeikh Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris al-

Maka, dapat disalurkan dengan mudah kepada golongan sasaran yang tidak mahir berbahasa Arab; dan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani membuat kenyataan seperti berikut:

Maka tatkala pada tahun 1232 daripada hijrah Nabi [1816 M], atasnya itu yang terlebih afdal selawat dan salam, telah bergerak-gerak hatiku yang lemah dan akalku yang pendek bahawa aku hendak menghimpunkan [*sic* menghimpunkan] beberapa kalam ulama yang *muhaqqiqin* [menerangkan segala masalah dan disertai dengan dalil-dalil] pada bicara ilmu *Usulluddin* dan *Akaid Ahl al-Tauhid* [Ahli Tauhid] dan aku sebutkan permata *lu'lu'* [mutiara]-nya dan aku tinggalkan *sadaf*-nya, yakni kulitnya hal keadaannya megemarkan [*sic* menggemarkan] bagi orang yang menuntut lagi keadaannya meterjemahkan [*sic* menterjemahkan] dengan bahasa Jawi supaya dipaham akan dia oleh orang yang tiada ketahuai bahasa Arab (Abdullah al-Fatani, t.th.).

Kedua-dua teks tersebut pada asalnya ditulis hanya untuk menjadi teks pengajian ilmu *Tauhid* dalam bahasa Melayu di Mekah, bukan untuk tujuan lain; tetapi tujuan tersebut telah berubah setelah kedatangan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani,<sup>9</sup>

---

Fatani. Beliau dilahirkan di Kerisik, Patani. Berbagai-bagai pendapat mengenai tahun kelahirannya, ada pendapat yang menyatakan: 1133 H / 1720 M, 1153 H / 1740 M, dan 1183 H / 1769 M. Penemuan terakhir menunjukkan bahawa beliau telah dilahirkan pada tahun 1131 H / 1718 M. Beliau mendapat pendidikan asas di Pondok Kuala Bekah, Pondok Kerisik, Pondok Semela, dan Pondok Pauh Bok, Patani; kemudian berhijrah ke Aceh selama dua tahun. Selepas itu, beliau melanjutkan pengajiannya di Mekah dan Madinah. Belajar di Mekah selama 30 tahun dan di Madinah 5 tahun. Manakala tahun kematiannya juga berbeza-beza pendapat, iaitu: 1263 H / 1846 M dan 1265 H / 1848 M. Berdasarkan penyelidikan terakhir, didapati bahawa beliau meninggal dunia pada tahun 1297 H / 1879 M dalam usia 166 tahun. Beliau telah meninggal dan dikebumikan di Ta'if (BHEI, 1991).

<sup>9</sup>Syeikh Ahmad, nama penuhnya ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad al-Fatani. Seorang ulama Patani berketurunan pendakwah Hadramaut yang datang menyebarkan Islam di Patani. Beliau dilahirkan pada tahun 1272 H / 1856 M di Kampung Jambu, Yaring, Patani, dan meninggal dunia pada tahun 1325 H / 1906 M. Beliau menerima ilmu Islam di Mekah, Jerusalem, dan Universiti al-Azhar. Seterusnya, beliau mengajar di Masjid al-Haram, Mekah, sehingga menjadi seorang ulama yang terkenal. Antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad Yusuf bin Ahmad (1287-

yang pernah berguru dengan dua orang murid Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, iaitu ayahnya Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani (lahir 1233 H / 1817 M) dan Syeikh Nik Dir atau Abdul Qadir bin Abdul Rahman al-Fatani (1244-1315 H / 1829-1898 M).

Berdasarkan latar belakang pengajian Abdullah bin Abdul Kadir (1797-1854 M), dalam hikayatnya, ternyata bahawa pada awal abad ke-19 M, iaitu semasa kecilnya, penulisan *Sifat 20 Umm al-Barahin* telah mendapat pendidikan di Melaka oleh Al-Syaikh bin 'Alawi, yang datang dari Hadramaut pada ketika itu (Abdul Kadir, 1970). Pada tahun 1821 M, penulisan tersebut telah diterjemahkan kedalam bahasa Melayu oleh ulama Betawi dibawah tajuk yang sama, iaitu *Umm al-Barahin*.

Pada tahun 1258 H / 1842 M, Muhammad Syihabuddin bin Muhammad Arsyad al-Banjari telah mengemukakannya di Riau dalam *Tahsil Nayl al-Maram li Bayan Manzumah 'Aqidah al-Awam* sebagai huraian *'Aqidah al-'Awam min Wajib fi al-Din bi al-Tamam*, karangan Abu al-Fauz al-Sayyid Ahmad al-Marzuqi; dan kitab ini juga diterjemah kemudiannya kedalam bahasa Melayu oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Mengikuti Mahayudin Haji Yahaya (2000), tulisan ulama Betawi terdapat di Perpustakaan Universiti Leiden, Cod.Or.5644 (17903); manakala tulisan Muhammad Syihabuddin bin Muhammad Arsyad al-Banjari pula terdapat di *Royal Asiatic Society*, London, Maxwell 80.

Menjelang tahun 1276 H / 1860 M, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah setelah bahasa Arab (Bruinessen, 1995). Berkemungkinan dengan jumlah anak Melayu yang begitu ramai telah mendorong perasaan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani

---

1351 H / 1870-1933 M) atau lebih dikenali sebagai *Tok Kenali*; Wan Musa bin Abdul Samad (1292-1358 H / 1875-1939 M) atau lebih dikenali sebagai *Mufti Haji Wan Musa*; dan Ismail bin Abdul Qadir al-Fatani (1300-1385 H / 1882-1965 M) atau lebih dikenali sebagai *Pak Da Ail*.

yang berada di sana mentashihkan kitab *Bidayah al-Hidayah* pada pagi hari Sabtu, 20 Rejab 1303 H / 1885 M.

Rentetan jasa Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani, kitab *Bidayah al-Hidayah* telah dicetak di beberapa percetakan di Mekah, Mesir, dan Turki; dan sampai sekarang masih berada di dunia perniagaan. Kitab ini adalah sebagai satu bukti bahawa kitab *Bidayah al-Hidayah* masih banyak digunakan di beberapa tempat (Shaghir Abdullah, 1990). Kitab-kitab *Tauhid* atau ilmu *Usuluddin* atau ilmu *Kalam* atau ilmu Sifat Dua Puluh bermunculan di seluruh penjuru Tanah Jawi atau Asia Tenggara atau Alam Melayu (Shaghir Abdullah, 1990).

Pada tahun 1292 H / 1874 M, seorang ulama di Sambas, Kalimantan Barat, telah mengemukakan secara berselindung dalam huraian *Matn Jawharah al-Tauhid*. Pada 1304 H / 1886 M, Sayyid Osman bin Abdullah bin Aqil bin Omar bin Yahya al-'Alawi atau Habib Osman (1238-1333 H / 1822-1914 M), Mufti Betawi, telah menyelesaikan sebuah huraian lengkap tentang sifat-sifat Allah SWT dengan judulnya *Sifat Dua Puluh*.

Pada hari Sabtu akhir bulan Jamadi al-akhir 1308 H / 1890 M, penulisan Sifat 20 *Umm al-Barahin* telah dihuraikan oleh Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani, atau Tuan Minal al-Fatani, dalam *'Aqidah al-Najin fi 'Ilm 'Usul al-Din* dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran. Kitab ini telah dicetak kemudiannya di percetakan Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah di Kaherah, Mesir. Dan turut dicetak juga di percetakan Muhammad Nahdi wa Awladah di Bangkok, Thailand.

Selain *'Aqidah al-Najin fi 'Ilm 'Usul al-Din*, Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani juga telah membuat kesimpulan huraian beliau terhadap ajaran Sifat 20 daripada Al-Imam al-Sanusi, dalam sebuah risalah yang berjudul *Miftah al-Murid fi 'Ilm*

*al-Tauhid* dan dicetak kemudiannya di percetakan Persam di Pulau Pinang, Malaysia.

Pada 16 Muharam 1323 H, bersamaan dengan 1905 M, Muhammad bin Yahya, Terengganu, telah menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu tulisan tangan berhuruf Jawi dan diberi nama dengan *Mukhtasar Zaydah al-Tauhid fi Bayani al-'Aqa'id* atau *Mukhtasar Pati Tauhid pada Nyatakan 'Aqa'id al-Din*, terjemahan ini telah dicetak di Percetakan Singapura.

Pada sekitar awal abad ke-20 M, penulisan Sifat 20 *Umm al-Barahin* pernah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh seorang ulama yang belum dikenal pasti namanya. Terjemahan tersebut pernah dicetak di Patani, Thailand, dan diulangkan lagi cetakannya di kedai buku Sulayman Mar'i di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Pada 1366 H / 1946 M, Abdul Hamid Fadl, Besut, Terengganu, yang pernah berguru dengan bekas murid Abdul Samad, iaitu Tok Kelaba al-Fatani (1280-1367 H / 1863-1948 M), telah menulis sebuah risalah sebagai kesimpulan kepada huraian-huraian dan *hasyiah-hasyiah*, dan diberi nama dengan *Pungkal [sic Pangkal] Umbi Ugama [sic Agama]* dan dicetak kali pertama di Al-Kamaliyyah, Kota Bharu, Malaysia, pada tahun 1367 H.

Pada tahun 1380 H / 1960 M, Abdullah bin Haji Ibrahim bin Abdul Karim al-Fatani, yang berada di wilayah Jala atau Yala, selatan Thailand, telah menyelesaikan sebuah syarah *Faridah al-Fara'id fi 'Ilm al-'Aqa'id*, karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Beliau kemudiannya menamakan huraian tersebut dengan *'Umdah al-Talib al-Mujtahid fi Syarh Faridah al-Fara'id*.

Selain itu, terdapat beberapa naskah manuskrip lain yang membicarakan tentang Sifat 20 dengan tanpa nama pengarang atau penyalin dan tanpa tahun dikarang, seperti

naskhah manuskrip tanpa judul yang tersimpan di Perpustakaan A. Hasjmy, dua naskhah lain yang tersimpan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) dan *Durrah al-Fakhirah bi 'Awn al-Mulk* yang tersimpan juga di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Indonesia, No.Reg.076 (Haji Yahaya, 1994).

Pada awal abad ke-21 M, ajaran yang berkaitan dengan Sifat 20 masih lagi ditulis dan dikaji oleh para sarjana Islam di alam Melayu, seperti *Sifat 20: Ke Arah Memahami 'Aqidah Ahli Sunnah wal-Jama'ah*, karangan Noraine Abu (2001); *Mizan al-Dharari pada Terjemah dan Menerangkan Kitab Tijan al-Darari bi Syarh Risalah Al-Bajuri [sic Al-Bayjuri]*, karangan Ismail bin Omar bin Awwam al-Da'alaji al-Sapanjanji al-Fatani (2002); *'Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah dan Kebatinan*, karangan Abdulfatah Haron Ibrahim (2003); "Pengaruh dan Kesan Penulisan Al-Imam al-Sanusi terhadap Ilmu Tauhid di Selatan Thailand", kajian Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan (2008); "Penggunaan al-Qiyas dalam Kitab *Umm al-Barahin*", kajian Engku Hassan Engku Wok Zin (2010); *Sifat Dua Puluh: Asas untuk Mengenal Allah*, karangan Syahrin bin Jasah (2011); "Penggunaan Hukum Akal dan Mantik dalam Perbahasan Akidah Tauhid: Kajian Kitab *Al-Durr al-Thamin* oleh Shaikh Daud al-Fatani", kajian Faisol Haji Awang (2011); *Misteri & Keajaiban Sifat 20: Kelebihan & Penghayatannya*, karangan Abd Rahman Abd Majeed (2013); dan "Penulisan Sifat Dua Puluh: Tumpuan terhadap Kitab Jawi di Jawa Timur", kajian Agus Sutopo (2014, dalam proses).

## KESIMPULAN

Ajaran Sifat 20 telah muncul kali pertama di utara Afrika pada abad ke-15 M (Masehi) dan tersebar kemudiannya ke alam Arab. Pada abad ke-17 M, ia telah terdedah pada alam Melayu melalui penulisan-penulisan

beberapa orang ulama, antaranya ialah Ahmad bin Aminuddin Qadhi, Al-Syaikh Nur al-Din al-Raniri, dan Syeikh Abdul Rauf Singkil.

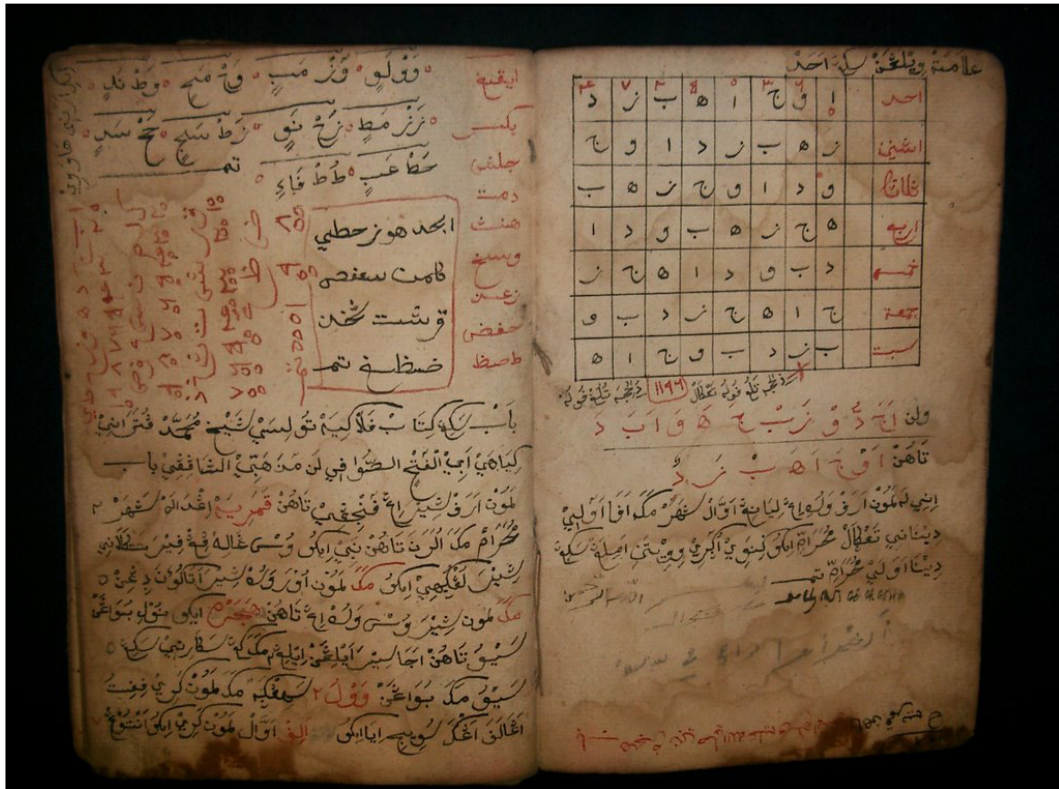
Pada abad ke-18 M, penulisan Sifat 20 *Umm al-Barahin* (Ibu Segala Tanda) mulai diterjemahkan kedalam bahasa Malayu oleh Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, diikuti dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, dan disebar-luas kemudiannya oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani pada abad ke-19 M. Sekalipun ia dikenali dengan pelbagai nama, namun di alam Melayu ia lebih dikenali dengan *Sifat 20* hingga ke hari ini.

## Bibliografi

- Abbas, K.H. Sirajuddin. (1975). *Tabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Syafi'i, dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abbas, K.H. Sirajuddin. (1978). *I'tiqad Ahlussunnah wal-Jama'ah*. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., edisi ke-4.
- Abd Majeed, Abd Rahman. (2013). *Misteri & Keajaiban Sifat 20: Kelebihan & Penghayatannya*. Selangor: Pustaka Ilmi.
- 'Abduh, Al-Syaikh Muhammad. (1979). *Risalah Tauhid*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, terjemahan K.H. Firdaus A.N., edisi ke-7.
- Abdul Kadir, Abdullah bin. (1970). *The Hikayat Abdullah*. Hongkong: Oxford University Press, terjemahan A.H. Hill.
- Abdullah al-Fatani, Syeikh Daud bin. (t.th.). *Al-Durr al-Thamin fi Bayan 'Aqa'id al-Mu'minin*. Pulau Pinang: Penerbit Almuarif.
- Abu, Noraine. (2001). *Sifat 20: Ke Arah Memahami 'Aqidah Ahli Sunah wal-Jama'ah*. Selangor: Pustaka Ilmi, edisi ke-4.
- al-'Arif, 'Abd Allah. (1994). "Bahr al-Dahut (Lahut): Al-Kitab fi al-Bayan al-Alif" dalam Mahayudin Haji Yahaya [ed]. *Naskhah Jawi: Sejarah dan Teks, Jilid 1*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, terjemahan, ms.89-97.
- Al-Qur'an al-Karim*. (1413 H). Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf al-Syarif.
- al-Raniri, Nur al-Din. (1955). "Hujjah al-Siddiq li D'fi al-Zindiq" dalam P. Voorhoeve [ed]. *Twee Maleise Geschriften van Nuruddin Ar-Raniri*. Leiden: E.J. Brill, ms.1-27.
- al-Sanusi, Al-Imam Muhammad bin Yusuf. (t.th.a). *Matn al-Sanusiyyah*. Patani: Dar al-

- Tiba'ah al-Islamiyyah.
- al-Sanusi, Al-Imam Muhammad bin Yusuf. (t.th.b). "Syarh Umm al-Barahin" dalam Al-Dusuqi [ed]. *Al-Dusuqi 'ala Umm al-Barahin*. Bangkok: Muhammad Nahdi wa Awladah, ms.2-238.
- al-Syafi'i, Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris (t.th.). "Al-Fiqh al-Akbar" dalam *Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyyah, ms.7-35.
- Alyahya. (1991). *Dua Puluh Sifat Allah*. Selangor: Citra Publishing Sdn. Bhd.
- Ambak bin Haji Ismail, Haji Abdul Aziz. (1991). "Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani dalam Akidah di Nusantara". *Kertas kerja* yang disampaikan dalam Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama' Peringkat Kebangsaan (Syeikh Daud Abdullah al-Fatani), kali ke-4, anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Akademik Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 17-19 Disember, ms.55-116.
- Awwam al-Da'alahi al-Sapanjanji al-Fatani, Ismail bin Omar bin. (2002). *Mizan al-Dharari pada Terjemah dan Menerangkan Kitab Tijan al-Darari bi Syarh Risalah al-Bajuri*. Patani: Dar al-Tiba'ah al-Islamiyyah.
- Azra, Azyumardi. (1995). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, edisi ke-2.
- BHEI [Bahagian Hal Ehwal Islam]. (1991). "Syeikh Daud Abdullah al-Fatani: Pengenalan Ringkas". *Kertas kerja* yang disampaikan dalam Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama' Peringkat Kebangsaan (Syeikh Daud Abdullah al-Fatani), kali ke-4, anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Akademik Islam, Universiti Malaya, di Kuala Lumpur, pada 17-19 Desember, ms.x-xi.
- Bruinessen, Martin Van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarikat*. Bandung: Penerbit Mizan, edisi ke-2.
- Daudy, Ahmad. (1983). *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin ar-Raniri*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- DBP [Dewan Bahasa dan Pustaka]. (1994). *Kamus Dewan, Edisi Ketiga*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Engku Wok Zin, Engku Hassan. (2010). "Penggunaan al-Qiyas dalam Kitab *Umm al-Barahin*". *Dapatan Kajian Tidak Diterbitkan*. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.
- Faqih Jalaluddin al-Asyi, Syeikh Muhammad Zain. (1756). *Bidayah al-Hidayah*. Misr: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
- Haji Abdullah, Abdul Rahman. (1989). *Gerakan Islah di Perlis: Sejarah dan Pemikiran*. Kuala Lumpur: Penerbit Pena.
- Haji Abdullah, Abdul Rahman. (1990). *Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Haji Awang, Faisol. (2011). "Penggunaan Hukum Akal dan Mantik dalam Perbahasan Akidah Tauhid: Kajian Kitab *Al-Durr al-Thamin* oleh Shaikh Daud al-Fatani". *Dapatan Kajian Tidak Diterbitkan*. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.
- Haji Yahaya, Mahayudin. (1994). *Naskhah Jawi: Sejarah dan Teks*, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Haji Yahaya, Mahayudin. (1998). *Islam di Alam Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Haji Yahaya, Mahayudin. (2000). *Karya Klasik Melayu-Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hanafi, A. (1974). *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Haron Ibrahim, Abdulfatah. (2003). *'Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah dan Kebatinan*. Selangor: Pustaka Ilmi.
- Ibn Khaldun ['Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun]. (1996). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Jantan, Haji Osman bin. (1986). *Pedoman Ilmu Tauhid*. Singapura: Pustaka Nasional, Pte. Ltd., edisi ke-3.
- Jasah, Syahrin bin. (2011). *Sifat Dua Puluh: Asas untuk Mengenal Allah*. Selangor: Pustaka Ilmi.
- Jusoh, Razi. (2000). "Sifat Dua Puluh: Satu Sorotan Sejarah" dalam Ahmad Bazli Shafi [ed]. *Forum ISTAC: Al-Hikmah Menjaja Akal-Budi Ummat*, Bil.1, Thn.6. Kuala Lumpur: t.p. [tanpa penerbit], ms.39-42.
- Muhammad Badawi al-Sumbawi, Syeikh Muhammad Zainuddin bin. (t.th). *Siraj al-Huda pada Menyatakan Akidah Ahl al-Taqwa*. Singapura: Sulayman Mar'i.
- Nik Muhammad Syukri Nik Wan, Masakaree Ardae @. (2008). "Pengaruh dan Kesan Penulisan Al-Imam al-Sanusi terhadap Ilmu Tauhid di Selatan Thailand". *Dapatan Kajian Tidak Diterbitkan*. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.
- Omar Ahmad, Abdul Aziz. (2001). *Asas 'Aqidah Islam*. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Rosder, Mudasir. (1989). *Asas Tauhid Pertumbuhan dan Huraianannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Russell, Jones. (1974). *Nur'd-din ar-Raniri: Bustanu's-Salatin, Bab IV Fasal I*. Kuala Lumpur: Penerbit Art.
- Shaghbir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1976a). "Hamzah Fansuri dan Muridnya, Shamsuddin as-Sumaterani" dalam Mohammad Daud

- Mohammad [ed]. *Tokoh-tokoh Sastra Melayu Klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms.54-62.
- Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1976b). "Syaiikh Abdurrauf bin Ali al-Fansuri" dalam Mohammad Daud Mohammad [ed]. *Tokoh-tokoh Sastra Melayu Klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms.63-71.
- Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1990). *Fari-datul Fara-id Syeikh Ahmad al-Fathani*. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1991). *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1992). *Al'allahamah Syeikh Ahmad al-Fatani: Ahli Fikir Islam dan Dunia Melayu, Guru kepada Hampir Semua Ulama dan Tokoh Asia Tenggara Abad ke-19 – 20*, Jil.1. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- Sutopo, Agus. (2014). "Penulisan Sifat Dua Puluh: Tumpuan terhadap Kitab Jawi di Jawa Timur". *Dapatan Kajian (dalam proses) Tidak Diterbitkan*. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.
- TP [Tanpa Pengarang]. (1994). "Mengenai Tauhid" dalam Mahayudin Haji Yahaya [ed]. *Naskhah Jawi: Sejarah dan Teks, Jilid 1*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms.99-100.
- TP [Tanpa Pengarang]. (t.th.). *Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufarridin*. Pulau Pinang: Perpustakaan Hamzah Sendut I, Universiti Sains Malaysia, Microfilm 2912.
- Unang, Husain bin. (1994). *Qamus al-T'ullab Arabi-Malayuwi*. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.
- Yunus, Mahmud. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an.



Kitab Jawi sebagai Warisan Sejarah Tamadun Islam  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 23/1/2014)

Ajaran Sifat 20 yang semata-mata membicarakan soal-soal kepercayaan telah dikenali dengan pelbagai nama, sekurang-kurangnya terdapat sembilan nama yang dikenali, antaranya adalah: *Sifat 20*, *‘Ilm al-Tauhid*, *‘Ilm Usul* atau *Usul al-Din*, *‘Ilm al-‘Aqa’id*, *Akidah Lima Puluh*, *‘Ilm al-Kalam*, *‘Ilm al-Jadal*, *‘Ilm Ma’rifah*, dan *‘Ilm Haqiqah*, tetapi yang paling terkenal di alam Melayu adalah dengan gelaran *Sifat 20*. Digelarkan dengan *Sifat 20* kerana perbincangan yang terpenting dalam penulisan ini ialah batasan dua puluh sifat Ketuhanan Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta’ala*), yang mustahak dipercayai oleh setiap Muslim mukalaf pada peringkat yang paling minimum tentang akidah Ketuhanan.

LINDA SUNARTI

## Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama

**IKHTISAR:** Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki ciri yang unik. Sebagai tetangga terdekat dan memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek, seperti warisan sejarah, agama, bahasa, dan kebudayaan, hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Makalah ini akan melihat sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia yang mengalami pasang-surut. Dalam melihat dinamika hubungan kedua negara, faktor kepentingan nasional dan figur pemimpin merupakan hal yang paling utama. Jika kepentingan nasional dan figur pemimpin kedua negara tersebut berbeda, maka hubungan kedua negara mengalami ketegangan, sebagaimana nampak pada masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman di Malaysia (1957-1970) dan pemerintahan Soekarno di Indonesia (1945-1966). Sebaliknya, jika kepentingan nasional dan figur pemimpin kedua negara memiliki kesamaan, maka hubungan kedua negara terjalin dengan baik, sebagaimana nampak pada masa pemerintahan Tun Abdul Razak di Malaysia (1970-1976) dan pemerintahan Soeharto di Indonesia (1966-1998). Dengan demikian, hubungan sejarah dan faktor-faktor kesamaan lainnya tidak serta-merta menjadi pengikat yang kuat, bahkan terkadang menjadi masalah dalam hubungan kedua negara serumpun tersebut, Indonesia dan Malaysia.

**KATA KUNCI:** Hubungan Indonesia-Malaysia, persamaan budaya, figur pemimpin, kepentingan nasional, dan keamanan bersama.

**ABSTRACT:** This paper entitled "Malaysia's Foreign Policy toward Indonesia, 1957-1976: From Confrontation toward Cooperation". In the course of its history, the relationship between Indonesia and Malaysia has unique characteristics. As the nearest neighbors and has a much similarities in various aspects, such as the legacy of history, religion, language, and culture, relations between the two countries do not always run smoothly. This paper will look at the history of relations between Indonesia and Malaysia, which have ups and downs. In looking at the dynamics of the relations between the two countries, factors of national interests and leading figure are the most important thing. If national interests and leading figure of the two countries are different, the relations between the two countries are strained, as has been seen during the reign of Tunku Abdul Rahman in Malaysia (1957-1970) and the government of Soekarno in Indonesia (1945-1966). Conversely, if the national interests and leading figure of both countries have in common, then, the relations between the two countries are good, as shown at the time of Tun Abdul Razak's reign in Malaysia (1970-1976) and Soeharto's government in Indonesia (1966-1998). Thus, the relationship of history and other factors in common does not necessarily become a strong bond, even sometimes to be a problem in the relations between the two brother countries, Indonesia and Malaysia.

**KEY WORD:** Indonesia-Malaysia relations, cultural similarities, leading figure, national interests, and common security.

### PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki ciri yang unik. Sebagai

tetangga terdekat dan memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek, seperti warisan sejarah, agama, bahasa, dan kebudayaan, hubungan kedua

Dr. Linda Sunarti adalah Dosen di Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: [lindsayrani@yahoo.co.uk](mailto:lindsayrani@yahoo.co.uk)

negara tidak selalu berjalan mulus. Terdapatnya banyak aspek kesamaan tidak serta-merta menjadi pengikat yang kuat bagi hubungan kedua negara. Bahkan, dalam perkembangan akhir-akhir ini, hubungan kedua negara relatif tidak terlalu harmonis, terganggu oleh masalah-masalah seperti klaim budaya, pembalakan hutan, TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan masalah perbatasan. Aspek kesamaan dalam latar belakang sejarah, agama, bahasa, dan budaya sekarang ini justru menjadi pemicu ketegangan kedua negara, karena saling klaim terhadap bentuk-bentuk budaya tertentu. Kasus yang paling baru adalah klaim Malaysia atas kesenian Barongan yang mirip dengan kesenian Reog dari Ponorogo di Jawa Timur, Indonesia.

Meskipun sering terjadi ketegangan antar kedua negara, bahkan pernah hampir mengarah pada perang terbuka seperti pada era 1963-1966, secara umum hubungan kedua negara relatif dekat. Konflik-konflik yang muncul selalu bisa diatasi lewat mediasi-mediiasi yang dilakukan oleh kedua pihak yang selalu mendengungkan “semangat dan saudara serumpun”. Hal inilah yang selalu menjadi acuan hubungan kedua negara jika menemui masalah dalam hubungan mereka.

Dalam sejarahnya, hubungan kedua bangsa serumpun ini mengalami pasang-surut. Latar belakang bahasa, agama, dan sejarah yang sama tidak serta-merta menjadi faktor pengikat yang kuat bagi hubungan kedua negara. Latar belakang pengalaman kolonialisme yang berbeda, orientasi politik, dan faktor kepemimpinan di kedua negara ternyata lebih berpengaruh dalam dinamika hubungan kedua negara.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini saya ingin membahas hubungan kedua negara dalam kurun waktu 1957 hingga tahun 1976. Tahun 1957 dijadikan titik awal pembahasan karena Malaysia (dahulu Persekutuan Tanah Melayu) merupakan tahun

kemerdekaan Malaysia, sedangkan tahun 1976 dijadikan akhir kajian karena merupakan akhir dari kepemimpinan Tun Abdul Razak (Perdana Menteri Malaysia kedua). Tulisan ini akan lebih memfokuskan pada kebijakan luar negeri Malaysia dalam kurun 1957 hingga 1976, dan kaitannya dengan hubungan antara Malaysia dengan tetangga terdekatnya, yakni Indonesia; dimana sepanjang kurun waktu tersebut, hubungan kedua negara mengalami pasang-surut. Sepanjang era tersebut pula, Malaysia dipimpin oleh dua Perdana Menteri yang memiliki perspektif kebijakan luar negeri yang berbeda, terutama dalam hubungannya dengan Indonesia.

#### **POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA, 1957-1976**

Sebuah negara tidak dapat hidup sendiri dalam sistem hubungan antarbangsa, karena semua negara saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, sebuah negara pasti memerlukan hubungan dengan negara lain, baik dalam bentuk hubungan politik, ekonomi, ataupun sosial. Sebagai contoh, negara-negara industri perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung ketersediaan bahan penunjang industrinya dan juga sebagai daerah pemasaran. Sebaliknya, negara-negara kecil dan miskin juga memerlukan bantuan dari negara-negara lain yang maju untuk membangun ekonominya (Singer, 1980).

Apabila sebuah negara mengadakan hubungan dengan negara lain, hubungan itu dijalin melalui sebuah bentuk dasar tertentu yang dikenal sebagai kebijakan luar negeri. Semua negara yang berada dalam sistem antar bangsa mempunyai dasar-dasar atau pendirian-pendirian tertentu tentang negara lain. Kebijakan luar negeri ini dapat diartikan sebagai dasar yang diamalkan oleh sebuah negara

dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Pada intinya, kebijakan luar negeri berperan sebagai garis panduan bagi segala tindakan yang diambil oleh sebuah negara dalam menjalin hubungannya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri berfungsi sebagai alat bagi sebuah negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Melalui kebijakan luar negeri ini, sebuah negara akan menyatakan pendiriannya terhadap perkembangan yang terjadi di luar negaranya dalam hubungan antarbangsa (Jensen, 1982).

Bentuk kebijakan luar negeri sebuah negara bukanlah sesuatu yang tetap dan kekal. Kebijakan luar negeri sebuah negara biasanya berubah-ubah, mengikuti kepentingan dan keperluan negara yang bersangkutan serta lingkungan eksternalnya yang terdiri atas situasi politik kawasan dan internasional (Nicolson, 1969). Jadi, kebijakan luar negeri merupakan suatu kegiatan yang sering berubah, mengikuti situasi politik internasional serta kepentingan dan keperluan dalam negeri sebuah negara.

Dalam kebijakan luar negeri Malaysia, ada dua tokoh yang sangat berperan memberi bentuk pada kebijakan luar negeri Malaysia, yaitu yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman; dan yang kedua adalah Tun Abdul Razak. Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri Malaysia pertama yang memerintah Malaysia sejak Malaysia memperoleh kemerdekaan tahun 1957 hingga 1970. Tunku Abdul Rahman lebih menumpukan hubungan luar negeri Malaysia dengan negara-negara Barat, bersikap anti-Komunis, dan pro-Barat. Sedangkan Tun Abdul Razak adalah Perdana Menteri Malaysia kedua, yang berkuasa dari tahun 1970 hingga 1976. Tun Abdul Razak adalah tokoh yang menjalankan kebijakan luar negeri yang berbeda sekali dengan Tunku Abdul Rahman. Tun Abdul Razak mengubah kebijakan luar negeri Malaysia yang

pro-Barat menjadi netral dan tidak berpihak.

Titik peralihan kebijakan luar negeri Malaysia semasa Tun Abdul Razak dikenal sebagai jaman "*New Directions under a New Order*" (Saravanamuttu, 1983:15). Berawal dari saat inilah kebijakan luar negeri Malaysia lebih berprinsip terbuka dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain tanpa melihat ideologi negara yang bersangkutan. Dalam sejarah politik Malaysia, Tun Abdul Razak adalah Perdana Menteri Malaysia yang memberi pijakan awal bagi kebijakan luar negeri Malaysia yang menjadi ciri kebijakan luar negeri Malaysia yang dijalankan hingga sekarang.

Politik luar negeri Malaysia, sejak merdeka hingga tahun 1970-an, dapat dibagi dalam tiga fase. Fase pertama, 1957-1962, dapat disebut sebagai "condong pada satu pihak"; fase kedua, 1962-1967, adalah masih memihak (pro-Barat); dan fase ketiga, masa setelah 1967, sebagai "jalan *non-alignment*". Perubahan dari satu fase ke fase berikutnya ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah situasi politik internasional saat itu, kepemimpinan, dan berbagai perkembangan ekonomi dan aspek keamanan (Chee, 1974:16).

Ketika Malaysia memperoleh kemerdekaan pada 1957, situasi politik internasional saat itu diliputi oleh suasana pertentangan antara Blok Barat, dibawah pimpinan Amerika Serikat, dan Blok Timur, dibawah pimpinan Uni Soviet. Pertentangan antara dua Blok ini telah banyak mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Malaysia. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Malaysia sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan negaranya. Pada saat itu tidak ada pilihan bagi Malaysia, selain bersikap pro-Barat, karena pertahanan Malaysia pada masa itu sangat bergantung pada Inggris sebagai anggota Blok Barat.

Karena alasan inilah, Tunku Abdul Rahman menandatangani satu perjanjian dengan Inggris yang berisi Perjanjian Pertahanan Inggris-Tanah Melayu, ataupun sering disebut sebagai AMDA (*Anglo-Malaya Defence Agreement*) pada tahun 1957, yang menyerahkan tanggung jawab pertahanan Tanah Melayu kepada Inggris, sekiranya Malaya diserang dari luar (Saravanamuttu, 1983:141). Hal ini bermakna bahwa tidak ada pilihan lagi bagi Malaya selain bersikap pro-Barat.

Di samping itu, faktor lain yang sangat penting adalah masalah figur pemimpin. Munculnya Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin pertama Malaysia pasca kemerdekaan juga dianggap sebagai faktor yang cukup dominan bagi pembentukan kebijakan luar negeri Malaysia saat itu. Tunku Abdul Rahman merupakan figur yang sangat berpengaruh di Malaysia pada saat itu. Ia merupakan salah seorang putera Sultan Kedah dan mendapat pendidikan Barat; perpaduan antara feodalisme Melayu dan pendidikan Barat menjadikan Tunku dikenal sebagai tokoh politik dengan berpandangan politik sederhana dan pragmatik, serta sangat tidak suka dengan ideologi dan doktrin. Beliau juga disebut sebagai tokoh "*modern yang konservatif, bersikap terbuka terhadap reformasi, dan sangat memusuhi revolusi*" (Ott, 1972:225).

Sejak tahun 1957 sampai akhir 1960-an, Tunku Abdul Rahman mendominasi kebijakan luar negeri Malaysia. Politik luar negeri Malaya/Malaysia sampai akhir 1960-an dapat dikatakan sebagai era Tunku Abdul Rahman; karena pada masanya, kebijakan luar negeri Malaysia merupakan kebijakan dari Tunku Abdul Rahman. Hampir semua keputusan penting dibuat oleh Tunku Abdul Rahman sendiri tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Sebagai contoh, pada masa isu pemisahan antara Malaysia dan

Singapura, Tunku Abdul Rahman hanya membicarakan hal tersebut secara informal dengan Tun Abdul Razak dan Tun Ismail, dan tidak membawa masalah tersebut dalam sidang kabinet (Ahmad, 1987:1).

Di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama, Malaysia lebih memfokuskan hubungan luar negerinya dengan negara-negara Barat, yang mempunyai sistem pemerintahan dan ideologi yang sealiran dengannya. Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan prinsip kebijakan luar negeri yang dijalankannya adalah "*Tanah Melayu bukanlah sebuah negara berkecuali. Kita anti Komunis dan menyokong pihak Barat*" (dalam Abdul Wahid, 1978:15).

Mengenai bagaimana politik luar negeri Malaya pada saat itu diformulasikan dan dijalankan, Marvin Ott (1972:257) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa pada intinya kebijakan luar negeri Malaysia saat itu diformulasikan oleh sekelompok kecil elite yang terdiri dari empat atau lima orang dan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri, yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri, memiliki peranan yang paling menentukan.

Faktor lain yang juga turut menentukan arah politik luar negeri Malaysia saat itu adalah faktor ekonomi. Sejak Malaya/Malaysia merdeka pada tahun 1957 hingga 1960-an, hampir 70% dari perdagangan luar negeri Malaysia dikuasai oleh perusahaan Eropa, terutama perusahaan-perusahaan Inggris. Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia dan 83% perkebunan karet dimiliki oleh perusahaan Eropa. Malaysia juga penghasil timah terbesar di dunia dan 63% bijih timah yang dihasilkan dan diolah oleh perusahaan asing (Parmer, 1966; dan Andaya & Andaya, 1982). Sehingga, dari data di atas, terlihat bahwa ekonomi Malaysia masih sangat tergantung dengan negara-negara Barat.

Dari aspek militer, situasi keamanan dalam negeri yang dirongrong oleh pemberontakan Komunis telah berlangsung sejak tahun 1948 (Hanrahan, 1971). Para pemimpin Malaysia, dan rakyat Malaysia pada umumnya, percaya bahwa sumber pemberontakan Komunis itu datangnya dari Beijing, sebab pelaku utama pemberontakan dan anggota Partai Komunis Malaya (PKM) mayoritas adalah etnis Cina dan diatur dari Cina. Karena itu, pemerintah Malaya/ Malaysia selalu memandang RRC (Republik Rakyat Cina) sebagai ancaman utama bagi keamanan nasionalnya. Para pemimpin Malaysia, terutama Tunku Abdul Rahman, sangat yakin bahwa Cina sedang berusaha untuk membentuk satu rangkaian “kediktatoran komunis di Asia Tenggara” (dalam Chopra, 1974-1975). Keyakinan ini, sampai pada derajat tertentu, masih mendominasi pikiran sebagian pemimpin Malaysia, lama setelah Tunku Abdul Rahman meninggalkan panggung politik sejak tahun 1970-an.

Kebijakan luar negeri Malaysia yang sangat pro-Barat itu kemudian berubah secara drastis sejak awal 1970-an. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dalam pucuk pimpinan tertinggi di Malaysia. Kegagalan Tunku Abdul Rahman mendapat mandat kembali dalam PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1969, dan disusul oleh meletusnya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969, telah mendorong Tunku Abdul Rahman meletakkan jabatannya pada akhir bulan September 1970 (AN Malaysia, 1981:41). Tun Abdul Razak, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, telah mengambil-alih pemerintahan dari Tunku Abdul Rahman. Sebelum Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri dari arena politik secara penuh pada tahun 1970, sebenarnya sejak tahun 1967, ia telah menyerahkan sebagian besar tugas mengendalikan kebijakan luar

negeri secara tidak langsung kepada Tun Abdul Razak.

Walaupun Tun Abdul Razak terlibat secara langsung dalam melaksanakan urusan kebijakan luar negeri Malaysia semasa zaman Tunku Abdul Rahman, tetapi peranan dan fungsi Tun Abdul Razak tidak ubahnya hanya seperti seorang duta yang bertindak menyelesaikan masalah-masalah politik Malaysia dengan negara-negara lain, seperti dalam peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia, pemisahan Malaysia-Singapura, dan tuntutan Filipina atas Sabah. Peristiwa-peristiwa ini telah membawa satu titik perubahan yang besar didalam arah aliran kebijakan luar negeri Malaysia selepas zaman Tunku Abdul Rahman.

Tun Abdul Razak mempelajari seluk-beluk pelaksanaan kebijakan luar negeri Malaysia dan mengadakan hubungan dengan negara-negara luar. Beliau menilai bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Tunku Abdul Rahman banyak kelemahannya dan merugikan Malaysia. Ketergantungan Malaysia dengan Barat, dinilai oleh Tun Abdul Razak telah mengucilkan Malaysia dari negara-negara Asia lainnya, yang kebanyakan menjalankan kebijakan Non-Blok dalam politik luar negerinya. Konfrontasi dengan Indonesia dinilai pula sebagai kegagalan kebijakan luar negeri Malaysia yang cukup signifikan dibawah pimpinan Tunku Abdul Rahman (Chee, 1974; dan Abdul Wahid, 1978).

Malaysia yang dahulunya begitu anti Komunis dibawah pimpinan Tunku Abdul Rahman, kini mulai bergerak ke arah netralisasi dibawah pimpinan Tun Abdul Razak. Tidak seperti Tunku Abdul Rahman, dengan pembawaannya yang sangat dominan, gaya kepemimpinannya yang emosional, dan tidak begitu tertarik dengan kebijakan luar negeri, Tun Abdul Razak adalah seorang tokoh politik yang pragmatis dan menaruh perhatian yang besar kepada masalah luar negeri (Ott, 1972). Stephen Chee

(1974) menambahkan bahwa Tunku Abdul Rahman lebih berorientasi ke Barat, sedangkan Tun Abdul Razak lebih menyadari akan realitas bahwa Malaysia adalah bagian dari Asia Tenggara.

Dibawah pemerintahan Tun Abdul Razak, Malaysia mulai menata kembali politik luar negerinya. Tun Abdul Razak menyatakan pendirian kebijakan luar negeri Malaysia, sebagai berikut:

[...] adalah menjadi asas dasar luar Malaysia yang utama untuk menjalinkan persahabatan dengan semua negara-negara yang menghormati kita dan yang ingin bersahabat dengan kita, tanpa mengira ideologi politik mereka atau corak sistem sosial mereka. Kita di Malaysia akan terus mengikuti dasar luar berkecuali kita dan dasar persahabatan kita dengan semua negara, disamping membuat pengukuran bebas sendiri dalam semua perkara (dalam JCK Malaysia, 1974:79).

Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa kebijakan luar negeri Malaysia mulai berubah orientasinya. Jika pada masa Tunku Abdul Rahman, Malaysia condong ke satu pihak, yaitu Blok Barat; sedangkan pada masa Tun Abdul Razak, Malaysia mulai bergerak ke arah prinsip netralitas. Malaysia ingin menjalin hubungan dengan pihak negara manapun tanpa mengira ideologinya, dan inilah yang disebut tidak memihak dan netral.

Dibawah pimpinan Tun Abdul Razak, Malaysia menjadikan konsep “netralisasi Asia Tenggara” sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Hal ini selaras dengan komitmen Malaysia terhadap keterlibatannya dalam organisasi ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling signifikan setelah selesainya konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1966 adalah rencana pemerintah Inggris untuk menarik pasukannya

dari wilayah-wilayah sebelah Timur Terusan Suez. Rancangan Inggris ini pada awalnya dijadwalkan akan selesai pada tahun 1975, namun dipercepat pada tahun 1971. Hal ini melahirkan masalah yang serius bagi Malaysia, terutama dengan adanya kebangkitan perlawanan bersenjata Komunis dan kebijakan luar negeri yang anti-Komunis.

Untuk mengantisipasi hal ini, pada tahun 1967, sebagai langkah awal menuju netralisasi kebijakan luar negerinya, Malaysia bersama empat negara lain di kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand) membentuk Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Organisasi kawasan yang baru ini memberikan penekanan yang kuat kepada kerjasama untuk menyelesaikan konflik kawasan dengan cara perundingan dan sekaligus memajukan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya (Cantori & Spiegel, 1970). Selain itu, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang tidak memihak, Malaysia juga mulai membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet serta mengubah sikapnya terhadap Cina. Malaysia berkeyakinan bahwa dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, negara tersebut akan mengurangi sikap permusuhannya terhadap Malaysia dan akan menghentikan dukungannya terhadap PKM (Partai Komunis Malaya). Malaysia mulai membuka hubungan diplomatik dengan Cina pada tahun 1974.

### **HUBUNGAN MALAYSIA DAN INDONESIA, 1957-1976**

Ada satu unsur yang selalu diperhitungkan jika membicarakan hubungan kedua negara. Indonesia, karena sebagai negara besar dan memperoleh kemerdekaan lebih dahulu, memiliki kecenderungan untuk bertindak sebagai “saudara tua” atau kakak dan menginginkan diperlakukan

seperti itu. Indonesia menganggap Malaysia sebagai “saudara muda” atau adik yang harus menghormati kakaknya.

Dekatnya hubungan Indonesia-Malaysia tidak terlepas dari sejarah yang menautkan kedua bangsa. Kerajaan atau kesultanan di Malaysia banyak yang berhubungan erat dengan kesultanan yang ada di Indonesia (Tate, 1977:32). Negeri Sembilan di Malaysia, misalnya, erat kaitannya dengan Minangkabau karena Raja Negeri Sembilan berinduk ke Pagaruyung di Sumatera Barat, Indonesia. Selangor dan Johor juga terkait erat dengan Sulawesi Selatan, karena Sultan Selangor dan Johor adalah keturunan Bugis dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Demikian juga Kesultanan Malaka, yang merupakan keturunan dari Raja Parameswara. Cikal-bakal pendiri imperium Malaka ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Adapun Perak dan Kedah sangat erat kaitannya dengan Aceh di Sumatera.

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, meski pusat kekuasaan orang Melayu pindah ke Johor, dan setelah itu berganti-ganti pindah ke Bintan-Lingga-Johor-Penyengat, namun tidak sedikit diantara bangsawan Malaka yang eksodus dan tinggal di kepulauan Nusantara, bahkan ada yang kemudian menetap di Buton, Ternate, Makassar, atau Sumbawa di Indonesia bagian Timur (Tate, 1977). Tidak heran pula bila hampir semua tradisi Nusantara di Indonesia Timur sangat kental dipengaruhi oleh tradisi Melayu Malaka dan Melayu Johor.

Hubungan politik dan budaya yang sangat dekat kemudian berubah setelah kedatangan bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda dan Inggris, yang kemudian menguasai wilayah-wilayah Malaysia dan Indonesia. Perjanjian London 1824, yang dikenal sebagai *Treaty of Commerce and Exchange between Great Britain and Netherlands*, dapat dikatakan merupakan titik awal terpisahnya secara politik antara

Tanah Melayu dan Indonesia (Tate, 1977:119-121). Perjanjian ini membagi dunia Melayu kepada dua kawasan yang berlainan dari segi politik. Berdasarkan Pasal 9 dan 10 dalam Perjanjian London ini, pihak Inggris setuju menyerahkan semua pusat perdagangannya di Sumatera kepada pihak Belanda dan tidak akan membuat sembarang perjanjian dengan pemimpin lokal di pulau tersebut. Belanda juga menyerahkan kota Malaka dan kawasan-kawasannya di Semenanjung Tanah Melayu kepada pihak Inggris dan tidak akan membuat sembarang perjanjian dengan pemimpin lokal di Semenanjung Tanah Melayu.

Perjanjian London 1824 ini telah mengasingkan Tanah Melayu dari segi politik dengan Indonesia, karena Tanah Melayu berada dalam wilayah kekuasaan Inggris dan Kepulauan Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda (Sar Desai, 1981:58). Perjanjian London ini juga menjadi dasar bagi negara Indonesia modern dan Malaysia modern. Penjajahan Inggris atas Tanah Melayu dan Penjajahan Belanda atas wilayah kepulauan Indonesia, selanjutnya, memberi pengalaman sejarah yang berbeda bagi kedua bangsa.

Meskipun kedua negara berada dalam penjajahan, hubungan informal antara kedua bangsa tetap terjalin lewat kelompok-kelompok masyarakat diantara kedua negara. Bahkan, dalam sejarah perkembangan nasionalisme di Malaysia, pengaruh pergerakan kebangsaan dari Indonesia mendapat tempat yang cukup penting, terutama di kalangan masyarakat Melayu pada lapisan menengah ke bawah. Pengaruh Indonesia cukup jelas terlihat pada kelompok masyarakat Melayu yang bersekolah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak, Malaysia, yaitu sekolah tempat mendidik guru-guru untuk masyarakat Melayu. Sekolah ini dikenal sebagai tempat lahirnya kelompok nasionalis Melayu

yang kebanyakan berprofesi sebagai guru dan wartawan.

Selain itu, nasionalis Melayu yang berhaluan kiri seperti Ibrahim Yaakub, Ahmad Bustaman, dan anggota PKM (Partai Kebangsaan Melayu atau *Malay Nationalist Party*) mempunyai hubungan dengan pemimpin Komunis di Indonesia seperti Tan Malaka dan Alimin pada tahun 1940-an (Mackie, 1974:26). Kelompok ini, menurut ukuran Melayu saat itu, dinilai memiliki faham yang radikal. Sebagian besar dari mereka memiliki cita-cita menyatukan Indonesia dan Tanah Melayu dalam sebuah negara, yaitu negara "Melayu Raya" atau "Indonesia Raya".

Pengaruh nasionalisme Indonesia didapat lewat buku-buku atau majalah-majalah dari organisasi-organisasi kebangsaan Indonesia, seperti SI (Sarekat Islam), PKI (Partai Komunis Indonesia), dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Karena keterbatasan bahan ajar yang berbahasa Melayu, yang merupakan bahasa pengantar di sekolah ini, mereka juga banyak menggunakan bahan ajar yang berasal dari Indonesia. Dari sinilah faham-faham kebangsaan yang berasal dari Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat Tanah Melayu. Selain itu, masyarakat Melayu cukup familiar dengan nama-nama tokoh pergerakan nasional Indonesia, seperti Tan Malaka, Tjokroaminoto, Agus Salim, Muhammad Yamin, Mohamad Hatta, dan Soekarno. Organisasi pergerakan Indonesia yang mendapat tempat di Tanah Melayu, diantaranya adalah SI dan PKI (Mackie, 1974).

Namun, di kalangan lapisan elite Melayu, terutama elite Melayu atas, yang kebanyakan merupakan tokoh inti dalam UMNO (*United Malays National Organization*), suatu organisasi politik orang Melayu yang didirikan pada tahun 1946, faham nasionalisme dari Indonesia itu tidak mendapat tempat di kalangan kelompok lapisan atas. Kelompok ini menganggap faham-faham

dari Indonesia, terutama Sosialisme dan Komunisme, dapat membahayakan hak-hak istimewa sebagai pemimpin tradisional Melayu. Karena tujuan dari organisasi-organisasi kebangsaan Melayu yang mendapat pengaruh dari Indonesia, seperti KKM (Kesatuan Melayu Muda), API (Angkatan Pemuda Insyaf), dan Partai Kebangsaan Melayu atau MNP (*Malay Nationalist Party*) adalah membentuk "Negara Republik Malaya", atau bergabung dengan Indonesia dengan membentuk negara "Indonesia Raya". Konsep ini, secara tidak langsung, akan menghapus sistem feodalisme Melayu yang nantinya dikhawatirkan akan menghapuskan pula sistem kerajaan sehingga akan membahayakan kedudukan mereka yang berasal dari kalangan kerajaan (Mackie, 1974:29).

Dalam sejarah Malaysia, kelompok-kelompok yang mendapat pengaruh dari Indonesia dikategorikan sebagai "kelompok radikal", yang tidak disukai oleh dua pihak, yaitu lapisan atas elite Melayu dan pihak kolonial Inggris, karena tujuan dari kelompok ini selain untuk menghapus feodalisme, adalah juga untuk mengusir Inggris dari Tanah Melayu (Andaya & Andaya, 1982).

Berbeda dengan kolonialisme Belanda di Indonesia, yang mendapat banyak penentangan dari berbagai kerajaan dan kelompok masyarakat pribumi di Indonesia, bahkan banyak kerajaan lokal yang dibubarkan oleh Belanda, maka kolonialisme Inggris di Tanah Melayu relatif tidak banyak mendapat penentangan dari kalangan raja-raja di Tanah Melayu. Karena Inggris menjalankan kebijakan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu selama raja-raja tersebut tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kepentingan ekonomi Inggris.

Dalam sistem pemerintahan kolonial Inggris di Semenanjung Tanah Melayu, Inggris relatif tidak banyak mengubah sistem politik yang telah ada. Sistem politik tradisional Melayu tetap

dipertahankan, bahkan Inggris banyak menggunakan pembesar-pembesar Melayu dalam birokrasi pemerintahan. Berdasarkan Perjanjian Pangkor 1870, yang merupakan titik awal masuknya Inggris di Tanah Melayu, ditegaskan bahwa Inggris tidak akan mencampuri dan mengubah adat-istiadat masyarakat Melayu, masalah adat-istiadat dan agama merupakan hak istimewa Sultan Melayu. Inggris hanya akan terlibat dan menasehati Sultan untuk urusan ekonomi, politik, dan keamanan (Andaya & Andaya, 1982). Hal inilah yang, menurut penulis, akan membentuk sikap masyarakat Melayu yang berbeda dengan masyarakat Indonesia dalam hubungannya dengan Barat.

Pada masa kolonialisme Inggris di Tanah Melayu, hampir 80% masyarakat Melayu tinggal di pedesaan, ciri ekonomi mereka adalah “sara diri” dan mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Andaya, 1982:46). Ketika Inggris memperkenalkan sistem ekonomi modern yang berorientasi pasar, Inggris tidak melibatkan masyarakat Melayu (Madjid ed., 1980). Inggris justru mendatangkan buruh-buruh dari India dan Cina untuk mengembangkan sistem ekonomi modernnya. Itulah sebabnya mengapa mayoritas masyarakat Melayu di pedesaan tidak banyak bersentuhan secara langsung dengan sistem ekonomi kapitalis Inggris, sehingga mereka tidak merasakan dampak buruk kebijakan ekonomi kolonial (Andaya, 1982:48).

Di pihak lain, lapisan elite Melayu diserap dalam birokrasi pemerintahan Inggris, sehingga secara umum sikap orang Melayu – baik lapisan elite maupun masyarakatnya – tidak begitu antipati terhadap Inggris. Kelompok masyarakat yang paling terkena kebijakan ekonomi kolonial Inggris adalah masyarakat India dan Cina. Hal ini berdampak pada kemunculan organisasi kebangsaan di kalangan masyarakat Melayu yang relatif terlambat. Organisasi orang Melayu

pertama yang berskala nasional adalah UMNO, yang didirikan pada 1946, sebagai reaksi etnis Melayu terhadap rancangan *Malayan Union* yang ditawarkan oleh Inggris, sebagai proses awal dekolonisasi Inggris. Orang Melayu sangat khawatir atas rencana Inggris yang akan memberikan status kewarganegaraan yang begitu mudah bagi etnis India dan Cina, serta rencana menghapus kedudukan Sultan sebagai pemimpin tertinggi orang-orang Melayu (Ongkili, 1985).

Sebaliknya, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang pahit dalam konteks hubungannya dengan penjajah, yaitu Belanda. Kolonialisme Belanda di Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat eksploitatif, terutama terhadap kelompok pribumi. Sehingga sebagaimana besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pribuminya, terlihat sangat anti terhadap segala hal yang berkaitan dengan Belanda dan Barat. Selain itu, proses kemerdekaan yang direbut lewat perjuangan bersenjata dan diplomasi yang cukup alot selama hampir lima tahun, 1945-1949, menjadikan sikap nasionalisme bangsa Indonesia cukup tinggi dalam berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Barat.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang “bebas-aktif” lahir dari kondisi perjuangan kemerdekaan untuk memperoleh pengakuan status *de facto* dan *de jure* dari dunia internasional. Dalam rangka berjuang untuk memperoleh pengakuan dunia internasional, Indonesia ingin memperlihatkan sikap tidak memihak blok manapun (Barat atau Timur), karena menurut Mohamad Hatta, dalam pidatonya di depan sidang BP-KNIP (Badan Pekerja – Komite Nasional Indonesia Pusat) pada September 1948, sikap memihak justru akan merugikan Indonesia dalam perjuangannya mencari pengakuan dari dunia internasional. Sikap inilah yang akan menjadi ciri penting dari kebijakan

luar negeri Indonesia selanjutnya (Gde Agung, 1973:26).

Sementara itu, proses kemerdekaan yang berbeda dialami oleh Malaysia. Sejak berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945), Inggris telah berencana untuk melakukan proses dekolonisasi secara damai dengan memberikan kemerdekaan bagi negara-negara jajahannya, sehingga proses kemerdekaan yang dijalani oleh Malaysia sangat berbeda dengan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Indonesia mencapai kemerdekaannya lewat revolusi, sementara Malaysia lewat perundingan dan dengan jalan damai.

Pada masa kepemimpinan Tunku Abdul Rahman, dimana politik luar negeri Malaysia lebih mengarah pro-Barat dan anti-Komunis dan Indonesia dibawah Soekarno dengan kebijakan luar negerinya yang konfrontatif, anti-Barat, dan cenderung ke Kiri, hubungan kedua negara jauh dari hangat; karena kepentingan nasionalnya yang sangat berbeda (Indonesia sangat anti-Kolonialisme dan anti-Barat, sementara Malaysia pro-Barat dan anti-Komunis).

Salah satu ciri terpenting kebijakan luar negeri Indonesia sejak merdeka tahun 1945 adalah Non-Blok dan anti penjajahan, serta menumpukan perhatian pada kerjasama Asia-Afrika. Perjuangan menentang penjajahan merupakan aspek penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia semasa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Aspek ini berawal dari perjuangan Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan (1945-1949) dan tuntutan terhadap Irian Barat (1962) daripada penjajahan Belanda. Oleh karena itu, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat tidaklah dekat, karena mereka tidak bersimpati terhadap tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat. Sebaliknya, negara-negara Blok Timur, yaitu Uni Soviet dan RRC (Republik Rakyat Cina), mendukung tuntutan Indonesia (Leifer, 1983:56-74). Dalam waktu yang sama, Malaysia

(Malaya) tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara Blok Timur dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat.

Sejalan dengan hal tersebut, hubungan kedua negara yang pada masa awalnya cukup baik, akhirnya terganggu oleh berbagai persoalan yang timbul. Hubungan baik hanya sempat dibina selama enam bulan pertama sejak kemerdekaan Malaya, pada 31 Agustus 1957. Pada peringkat awal kemerdekaan, hubungan Tanah Melayu – Indonesia berada dalam suasana yang cukup dekat. Kedekatan itu jelas terlihat apabila Indonesia memerintahkan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk tidak menyiarkan atau memutar lagi lagu populer di Indonesia yang berjudul *Terang Bulan*, untuk menghormati tetangganya yang baru merdeka. Ini karena lagu Kebangsaan Tanah Melayu, yaitu *Negaraku*, merupakan gubahan dari lagu *Terang Bulan* (Curtis, 1964:16). Disamping itu, Indonesia merupakan negara pertama yang mengirim duta besar ke Kuala Lumpur (JP Malaysia, 1963:1).

Surat-surat kabar Indonesia juga menyambut hangat kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Surat kabar *Duta Masyarakat* milik NU (*Nahdatul Ulama*), misalnya, mendukung kemerdekaan Tanah Melayu. Bahkan kantor berita ANTARA di Indonesia, dalam buletin hariannya, mendukung penuh kemerdekaan Tanah Melayu tersebut, dengan menyatakan sebagai berikut:

Malaya would be able to remain at peace with nations of the world, and particularly with her close neighbour, Indonesia. Indonesia, which for centuries had established close relations with Malaya in the cultural and other fields, is happy to welcome free Malaya to the community of nations (*Antara Daily News Bulletin*, 4/9/1957).

Namun setelah itu, hubungan kedua negara dengan cepat menjadi

sebaliknya. Dalam pandangan Indonesia, Malaysia yang pada saat itu masih bernama “Malaya” telah melakukan tindakan-tindakan yang dipandang tidak bersahabat, yaitu sikap abstain Malaya terhadap pemungutan suara di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai persoalan Irian Barat; simpati Malaya terhadap pemberontakan PRRI-PERMESTA (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia – Perjuangan Rakyat Semesta) di Sumatera dan di Sulawesi tahun 1958; meningkatnya penyelundupan dari daerah pemberontak ke Singapura dan Malaya; serta timbulnya perbedaan pendapat diantara kedua negara mengenai masalah keamanan regional (Kahin, 1964; dan Kahin & Kahin, 1995). Indonesia menganggap bahwa Kolonialisme dan Imperialisme sebagai ancaman utama, sedangkan Malaya menganggap Komunisme sebagai ancaman utama. Walaupun demikian, lima tahun selanjutnya tampak pelunakan sikap Malaya yang mulai mendukung perjuangan Irian Barat pada tahun 1962.

Pada periode 1963-1966 merupakan periode yang paling pahit dalam sejarah hubungan kedua negara. Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, dibawah pimpinan Presiden Soekarno (1959-1966), melaksanakan politik luar negeri konfrontatif. Sikap anti-Barat (Belanda) dalam masalah Irian Barat berlanjut dengan sikap anti-Barat (Inggris) dalam masalah pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 (Poulgrain, 1998).

Dalam pandangan Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia akan menjadi alat Inggris (Barat), yang akan memantapkan kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Hal ini dilihat oleh Presiden Soekarno sebagai NEKOLIM (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) yang akan mengepung Indonesia (Legge, 1972). Pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan DWIKORA (Dwi Komando Rakyat)

untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai “pengganyangan Malaysia”. Keberhasilan Indonesia dengan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) dalam perjuangan membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajahan Belanda pada tahun 1962, ingin diterapkan kembali oleh Indonesia dalam menghadapi Malaysia dengan DWIKORA-nya pada tahun 1963.

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu adalah melihat dunia sebagai pertentangan antara OLDEFOS (*Old Established Forces* atau negara-negara Kapitalis yang sudah mapan dan maju di Barat) dengan NEFOS (*New Emerging Forces* atau negara-negara yang baru merdeka dan sedang bangkit di Asia dan Afrika). Dalam konteks ini, Indonesia menilai bahwa Malaya sebagai anggota OLDEFOS, karena Malaya mempunyai ikatan pertahanan dan ekonomi yang kuat dengan Inggris (Leifer, 1983:59).

Akibat dari adanya perbedaan persepsi dalam kepentingan nasionalnya masing-masing pada saat itu, ditambah dengan munculnya dua figur pemimpin yang bertentangan antara Indonesia dan Malaya (Soekarno yang anti-Barat dan Tunku Abdul Rahman yang pro-Barat), membuat hubungan kedua negara berada dalam titik nadirnya, bahkan hampir mengarah pada perang terbuka, yaitu peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia, 1963-1966 (Hindley, 1964; Sutter, 1966; dan Mackie, 1974).

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika terjadi perubahan kepemimpinan di kedua negara, yakni Soeharto menggantikan Soekarno di Indonesia pada tahun 1966 dan Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri menggantikan Tunku Abdul Rahman di Malaysia pada tahun 1970, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam kebijakan politik luar negeri kedua negara.

Berbeda dengan pemerintah Orde Lama (1959-1966), dimana hubungan Indonesia dan Malaysia lebih didominasi oleh konflik antara kedua negara, pada masa pemerintah Orde Baru (1966-

1998), hubungan lebih banyak diwarnai oleh kerjasama. Membaiknya hubungan kedua negara ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu faktor intern dan ekstern.

Dari faktor intern, membaiknya hubungan kedua negara ini tidak lepas dari munculnya figur baru di kedua negara, yaitu Soeharto di Indonesia dan Tun Abdul Razak di Malaysia. Kedua tokoh ini memiliki peran yang sangat besar bagi terciptanya hubungan baik Indonesia-Malaysia. Soeharto dan Tun Abdul Razak adalah tokoh yang memiliki pandangan dan wawasan yang sama tentang berbagai hal, diantaranya adalah tentang pentingnya stabilitas kawasan dan hubungan serantau.

Malaysia dibawah Tun Abdul Razak mengubah kecenderungan politik luar negeri Malaysia yang sebelumnya pro-Barat menjadi netral dan tidak memihak (MoFA Malaysia, 1971); sedangkan di Indonesia, Soeharto juga mengubah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif dan *high profile* menjadi lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah dalam negeri, *low profile*, serta lebih mementingkan stabilitas nasional dan regional (Van der Kroef, 1986).

Proses normalisasi kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia, menjadi titik awal bagi hubungan yang lebih baik, bahkan dapat dikatakan cukup erat, pada masa kedua pemimpin tersebut (Soeharto dan Tun Abdul Razak) memimpin negaranya masing-masing. Banyak kerjasama telah dilakukan, diantaranya yang paling penting adalah pembentukan ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) pada tahun 1967 bersama tiga negara Asia Tenggara lainnya, yakni Thailand, Filipina, dan Singapura. Hubungan kedua negara pada era ini lebih didominasi oleh kerjasama dibanding perselisihan (Irvine, 1982).

Pada saat inilah, hubungan kedua negara kembali terjalin dengan baik. Prioritas utama kebijakan luar negeri

kedua negara pada saat itu memiliki beberapa persamaan, yang paling utama adalah mendukung pentingnya netralitas kawasan guna mendukung stabilitas kawasan yang berkaitan dengan stabilitas dalam negeri dan persepsi yang sama terhadap ancaman Komunisme.

Perbaikan hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam pandangan Soeharto, politik konfrontatif dan *mercusuar*-nya Soekarno telah menyebabkan kemerosotan ekonomi, hubungan buruk dengan negara tetangga, dan isolasi Indonesia oleh masyarakat internasional. Untuk mengatasi hal itu, Indonesia harus kembali membina hubungan baik dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara tetangga. Hubungan baik akan menciptakan keadaan yang stabil dan damai, sehingga pembangunan negara dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara lain (Hatta, 1965).

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998). Normalisasi hubungan kedua negara mulai dilakukan dengan diadakannya usaha-usaha pendekatan untuk mengakhiri konfrontasi kedua negara, yakni pada bulan Mei 1966 (Mukmin, 1991). Pada tanggal 11 Agustus 1966, ditandatangani persetujuan diakhirinya konfrontasi dan normalisasi hubungan kedua negara oleh MENLU (Menteri Luar Negeri) negara masing-masing, yakni Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia, di Jakarta (Weinstein, 1976:79).

Sedangkan terjadinya perubahan kebijakan politik luar negeri Malaysia didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah munculnya figur Tun Abdul Razak, yang mempunyai

pandangan sangat berbeda dengan Tunku Abdul Rahman. Menurut Tun Abdul Razak, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Malaysia pada masa Tunku Abdul Rahman, yang bersifat konservatif, tidak membawa kebaikan bagi Malaysia, bahkan dinilai lebih merugikan Malaysia. Dengan kebijakan pro-Barat dan terlalu menggantungkan diri pada negara-negara Barat, terutama Inggris, membawa banyak kelemahan dalam pemerintahan Malaysia. Sebagai sebuah negara yang telah mencapai kemerdekaan, adalah tidak wajar masih menggantungkan keselamatan dan kedaulatan negaranya kepada pihak luar. Menurut Tun Abdul Razak, rakyat Malaysia harus menyadari bahwa keamanan dan kedaulatan negaranya bergantung pada kekuatan dan kemampuannya sendiri (JCK Malaysia, 1974:79).

Peristiwa konfrontasi Malaysia-Indonesia telah memberikan pelajaran yang sangat penting bagi Malaysia. Karena ketika konfrontasi berlangsung, Malaysia tidak mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika (Ott, 1967). Semasa pemerintahan Tunku Abdul Rahman dari 1957 hingga 1963, satu hal yang diabaikan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama tersebut adalah menjalin hubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga. Jadi, tidaklah aneh jika Malaysia kurang mendapat dukungan dari negara-negara Dunia Ketiga.

Konfrontasi dengan Indonesia juga telah mengubah pandangan Tun Abdul Razak terhadap Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat yang dinilai tidak tegas terhadap Indonesia, karena kekhawatiran Amerika Serikat akan menguatnya pengaruh Komunis di Indonesia. Amerika Serikat dinilai lebih mengutamakan kepentingannya sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara. Dari peristiwa itu, Tun Abdul Razak menilai bahwa sikap pro-Barat lebih banyak merugikan dibanding keuntungannya. Tun Abdul Razak

berpendirian bahwa Malaysia harus menjalankan kebijakan luar negeri yang baru, satu dasar yang bebas dan netral terhadap pihak manapun (JCK Malaysia, 1974).

Sedangkan dari faktor ekstern adalah rencana ditariknya pasukan Inggris dari Timur Jauh dan pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Tenggara (Doktrin Nixon), yang membuat wilayah Asia Tenggara mengalami kekosongan kekuatan militer Barat yang selama ini menjadi penjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan mulai memanasnya kembali konflik Indochina yang Komunis, maka kedua negara (Indonesia dan Malaysia) khawatir akan masuknya intervensi asing, terutama kekuatan Komunis, dalam hal ini dari Cina ke wilayah Asia Tenggara. Faktor-faktor inilah yang mendorong kedua negara mendukung konsep "Netralitas Asia Tenggara" (Shafie, 1971).

Dalam mengkaji hubungan kedua negara pada masa itu, ada dua isu penting yang dapat dikatakan menjadi faktor penting dan menjadi pendorong terjalannya kembali hubungan kedua negara yang semakin erat, yaitu isu Komunisme dalam hubungannya dengan RRC (Republik Rakyat Cina) dan Netralitas Asia Tenggara. Kedua negara (Indonesia dan Malaysia) memiliki pandangan yang sama terhadap kedua hal ini.

Hubungan kedua negara dengan RRC merupakan isu penting setelah peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966). Pada masa Soekarno, Indonesia melihat RRC sebagai negara sahabat dan sekutu yang penting, tetapi peristiwa G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) tahun 1965 telah mengubah hal tersebut. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto meyakini bahwa RRC adalah dalang dalam peristiwa G-30-S/PKI dan konfrontasi terhadap Malaysia. Malaysia juga turut meyakini bahwa konfrontasi

yang dijalankan oleh Soekarno pada 1963 mempunyai kaitan dengan RRC (Weinstein, 1976:90-95).

Persepsi Indonesia dan Malaysia atas ancaman asing hampir serupa. Meskipun Malaysia telah membuka hubungan diplomatik dengan RRC pada tahun 1974, hubungan antara Kuala Lumpur dengan Beijing dapat dikatakan tidak dekat. Cina masih dilihat sebagai ancaman utama terhadap Malaysia, karena dukungan Beijing terhadap Partai Komunis Malaya (Suryadinata, 2004:101-108).

Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto juga memiliki kecurigaan terhadap Beijing dan memandang RRC sebagai ancaman serius terhadap keamanan, karena dukungan Cina terhadap PKI. Malaysia dan Indonesia juga melihat Cina sebagai ancaman terhadap keselamatan Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia merasa khawatir terhadap bantuan yang diberikan Cina kepada pergerakan Komunis di Asia Tenggara, termasuk Partai Komunis di Malaysia dan di Indonesia.

Meskipun, dalam perkembangan selanjutnya, Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan dalam hal cara pendekatan dan berhubungan dengan Cina, namun persepsi kedua negara tentang ancaman terhadap stabilitas Asia Tenggara tidak berubah, yakni Cina tetap dianggap sebagai ancaman yang mesti diwaspadai. Hal ini terlihat ketika RRC menginvasi Vietnam, untuk memberikan pelajaran atas pendudukan Vietnam terhadap Kamboja, maka Jakarta memperkuat kerjasama keamanannya dengan Kuala Lumpur. Pada bulan Maret 1980, Soeharto bertemu dengan Hussen Onn, yang merupakan pengganti Tun Abdul Razak, dan menghasilkan apa yang dikenal sebagai "Doktrin Kuantan" (Das, 1980:12-13).

Doktrin ini menganggap bahwa Vietnam dibawah tekanan Cina, sebagai akibatnya, Vietnam akan

lebih mendekati Uni Soviet dan ini akan membahayakan keamanan regional Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia meyakini bahwa Vietnam pada dasarnya sangat nasionalistik dan apabila Vietnam mempunyai satu pilihan, misalnya jika bantuan akan datang dari negara-negara ASEAN, maka secara bertahap Vietnam akan menarik diri dari sekutunya, yakni Uni Soviet (Tilman, 1987). Doktrin Kuantan, dengan demikian, ingin menawarkan bantuan kepada Vietnam. Tetapi Thailand merasa bahwa sikap dan posisi politik seperti itu akan mengorbankan kepentingan bersama di Asia Tenggara. Doktrin Kuantan akhirnya menciptakan friksi didalam ASEAN sendiri, dan akhirnya prinsip-prinsip dalam doktrin tersebut ditinggalkan secara diam-diam (Das, 1980; dan Vatikiotis, 1996).

## **KESIMPULAN**

Kebijakan luar negeri merupakan alat yang diperlukan oleh sebuah negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Pada umumnya, kebijakan luar negeri sebuah negara itu merupakan pengejawantahan daripada kepentingan dalam negerinya. Andrew H. Berding (1966:1), dalam bukunya *The Making of Foreign Policy*, menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah azas dan kerangka kerja sebuah negara didalam hubungannya dengan negara-negara lain. Pada prinsipnya, kebijakan luar negeri merupakan seperangkat prinsip yang memandu sebuah negara dalam kegiatan diplomasinya dengan negara lain dan bertujuan untuk keselamatan serta perkembangan negara tersebut.

Kebijakan luar negeri dapat dinilai sebagai instrumen atau alat yang diperlukan sebuah negara untuk berhubungan atau berinteraksi dengan negara lain, baik yang bertetangga dekat maupun yang jauh dari negara tersebut. Melalui politik luar negeri, sebuah negara menyatakan pendiriannya tentang suatu isu, baik yang terjadi di dekat negaranya maupun negara lain

yang jauh kedudukan geografisnya. Dalam sistem hubungan antarbangsa, pembentukan politik luar negeri juga perlu melihat bagaimana kebijakan luar negeri atau sikap negara-negara lain.

Terkait dengan hal tersebut, kita dapat melihat bagaimana perkembangan politik luar negeri Malaysia memiliki hubungan yang erat dengan dinamika hubungan antara Malaysia dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Indonesia. Indonesia adalah negara tetangga terdekat Malaysia yang memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek. Sebagai tetangga terdekat Malaysia, ditambah lagi dengan latar belakang kesamaan sejarah, budaya, bahkan berasal dari rumpun yang sama, hubungan antara Malaysia dan Indonesia dapat dinilai memiliki hubungan yang istimewa.

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki ciri yang unik, sebagai tetangga terdekat dan memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek seperti warisan sejarah, agama, bahasa, dan kebudayaan. Hubungan kedua negara tersebut pada suatu masa terlihat sangat erat dan memiliki kesamaan visi, tetapi dalam beberapa hal terkadang muncul perselisihan yang tajam, bahkan dalam periode tertentu, kedua negara ini terlibat perseteruan yang hampir terlibat dalam perang terbuka (1963-1966).

Jadi, dalam melihat dinamika hubungan kedua negara, faktor kepentingan nasional dan figur pemimpin merupakan hal yang paling utama. Jika kepentingan nasional kedua negara memiliki kesamaan, maka hubungan kedua negara terjalin dengan baik. Hal ini terlihat pada masa Orde Baru (1966-1998) di Indonesia; sedangkan jika kepentingan nasional kedua negara tersebut berbeda, maka hubungan kedua negara mengalami ketegangan, sebagaimana terlihat pada masa Orde Lama (1959-1966). Hubungan sejarah dan faktor-faktor

kesamaan lainnya tidak serta-merta menjadi pengikat yang kuat, bahkan terkadang menjadi masalah dalam hubungan kedua negara serumpun tersebut.

## Bibliografi

- Abdul Wahid, Zainal Abidin. (1978). *Sejarah Dasar Luar Malaysia*. Kuala Lumpur: Kementrian Belia dan Sukan.
- Ahmad, Abdullah. (1987). *Tengku Abdul Rahman dan Dasar Luar Malaysia, 1963-1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.
- Andaya, B.W. & L.Y. Andaya. (1982). *Sejarah Malaysia*. Kuala Lumpur: McMillan.
- AN [Arkib Negara] Malaysia. (1981). *Hari ini dalam Sejarah*, Jilid I. Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara.
- Antara Daily News Bulletin* [surat kabar]. Jakarta: 4 September 1957.
- Berding, Andrew H. (1966). *The Making of Foreign Policy*. Washington D.C., United States of America: The Free Press.
- Cantori, Louis J. & Steven L. Spiegel. (1970). "The International Relations of Regions" dalam *Polity*, Vol.2, No.4 [Summer], hlm.397-425.
- Chee, Stephen. (1974). "Malaysia's Changing Foreign Policy" dalam Yong Cheong Mun [ed]. *Trends in Malaya*. Singapore: ISEAS [Institute of South East Asian Studies] Publisher.
- Chopra, Pran. (1974-1975). "Malaysia's Strategy for Survival" dalam *Pacific Affairs*, Vol.47, No.4 [Winter], hlm.437-458.
- Curtis, Robert. (1964). "Malaysia and Indonesia" dalam *New Left Review*, 1/28 [November-December].
- Das, K. (1980). "The Kuantan Principle" dalam *Far Eastern Economic Review*, 4 April.
- Gde Agung, Ide Anak Agung. (1973). *Twenty Years Indonesian Foreign Policy, 1945-1965*. Paris: Mouton.
- Hanrahan, G.H. (1971). *The Communist Struggle in Malaya*. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Hatta, Mohammad. (1965). "One Indonesian View of the Malaysia Issue" dalam *Asian Survey*, Vol.5, No.3 [March], hlm.139-143.
- Hindley, Donald. (1964). "Indonesia's Confrontation with Malaysia: A Search for Motives" dalam *Asian Survey*, Vol.4, No.6 [June], hlm.904-913.
- Irvine, R. (1982). "The Formative Years of ASEAN, 1967-1975" dalam Alison Broinovsky [ed]. *Understanding ASEAN*. London: The Macmillan Press Ltd.
- JCK [Jabatan Chetak Kerajaan] Malaysia. (1974). *Buku Rasmi Tahunan Malaysia, 1972-1974*. Kuala Lumpur: Jabatan Chetak Kerajaan.

**LINDA SUNARTI,**

*Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia*

- Jensen, Lyod. (1982). *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- JP [Jabatan Penerangan] Malaysia. (1963). *Malaya/Indonesia Relations, 31 Ogos 1957 – 15 September 1963*. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan.
- Kahin, George McT. (1964). "Malaysia and Indonesia" dalam *Pacific Affairs*, Vol.37, No.3 [Autumn], hlm.253-270.
- Kahin, George McT. & Audrey R. Kahin. (1995). *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York: The New Press.
- Legge, Jhon D. (1972). *Soekarno: A Political Biography*. New York: Praeger Publisher.
- Leifer, Michael. (1983). *Indonesian Foreign Policy*. London: The Royal Institute of International Affairs, George Allen & Unwin Ltd.
- Mackie, J.A.C. (1974). *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Madjid, Zurina [ed]. (1980). *Masyarakat Melayu*. Pulau Pinang: Penerbit USM [Universiti Sains Malaysia].
- MoFA [Ministry of Foreign Affairs] Malaysia. (1971). "Neutralization of Southeast Asia" dalam *Foreign Affairs Malaysia*. Kuala Lumpur: Ministry of Foreign Affairs, Malaysia.
- Mukmin, Hidayat. (1991). *TNI dalam Politik Luar Negeri RI: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia – Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nicolson, Harold. (1969). *Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.
- Ongkili, J.P. (1985). *Nation Building in Malaysia, 1946-1974*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Ott, Marvin. (1967). "Malaysia: The Search for Solidarity and Security" dalam *Asian Survey*, Vol.8, No.2.
- Ott, Marvin. (1972). "Foreign Policy Formulation in Malaysia" dalam *Asian Survey*, Vol.12, No.3 [March]. California, USA: University California Press, hlm.225-241.
- Parmer, J. Norman. (1966). "Malaysia: Changing a Little to Keep Pace" dalam *Asian Survey*, Vol.7, No.2, hlm.131-137.
- Poulgrain, G. (1998). *The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunai, Indonesia, 1945-1965*. London: C. Hurst & Co.
- Saravanamuttu, J. (1983). *The Dillema of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy, 1957-1977*. Pulau Pinang: Penerbit USM [Universiti Sains Malaysia].
- Sar Desai, D.R. (1981). *Southeast Asia: Past and Present*. New Delhi: Vikas Publications House.
- Shafie, Ghazali. (1971). "The Neutralization of South East Asia" dalam *Pacific Community*. Vol.III, No.1. [October].
- Singer, Marshall R. (1980). "The Foreign Policies of Small Developing States" dalam James N. Rosenau, Kenneth W. Thomson & Gavin Boyd [eds]. *Worlds Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Suryadinata, Leo. (2004). *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*. Singapore: Cavendish Square Publishing.
- Sutter, John O. (1966). "Two Faces of Konfrontasi: Crush Malaysia and the Gestapu" dalam *Asian Survey*, Vol.6, No.10 [October], hlm.523-546.
- Tate, D.J.M. (1977). *The Making of Modern Southeast Asia*, Jilid I. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Tilman, R.O. (1987). *Southeast Asia and the Enemy beyond ASEAN: Perceptions of External Treats*. United States of America: West View Press, Inc.
- Van der Kroef, Justus M. (1986). "Normalizing Relations with China: Indonesian's Policies and Perceptions" dalam *Asian Survey*, Vol.26, No.28 [August].
- Vatikiotis, Michael R.J. (1996). *Political Change in Southeast Asia: Trimming the Banyan Tree*. London: Routledge.
- Weinstein, Franklin B. (1976). *Indonesian Foreign Policy and the Dillema of Dependence from Soekarno to Soeharto*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

ARVIN TAJARI

## Regional Dimension of Malaysia's Foreign Policy during the Cold War, 1957-1989: A Historical Evaluation

**ABSTRACT:** Malaysia, like other countries in the world, has formulated her foreign policy to achieve her national interests. Foreign policy of Malaysia has been developed since the independent, and regional dimension played an important role in shaping Malaysia's foreign policy. This article examines Malaysia's foreign policy since the independent from the regional perspective. It is understood that Malaysia's foreign policy is very much shaped from the Southeast Asia region, in particular ASEAN (Association of South East Asia Nations) itself. Since the independent, Southeast Asia becomes one of the major concerns in Malaysia's foreign policy, where the region experienced major event happened directly and indirectly influenced foreign policy of the countries in Southeast Asia. In fact, regional dimension has shaped Malaysia's foreign policy from the beginning of the independent. The study, firstly, evaluate on historical background on Malaysia's foreign policy since the first Prime Minister, Tunku Abdul Rahman, until Dr. Mahathir Mohamad. Secondly, the study seeks to highlight main issues, orientation, and changes in Malaysia's foreign policy by examining the different administration. Thirdly, the article seeks to look the importance of Malaysia's foreign policy within the regional aspect.

**KEY WORD:** Malaysia's foreign policy, national interests, the roles of prime ministers, regional cooperation, security, and economic development.

**IKHTISAR:** Artikel ini bertajuk "Dimensi Serantau dalam Dasar Luar Malaysia semasa Perang Dingin, 1957-1989: Satu Penilaian Sejarah". Malaysia, seperti negara-negara lain di dunia, telah merumuskan dasar luar untuk mencapai kepentingan negara berkenaan. Dasar luar Malaysia telah dibangunkan sejak merdeka, dan dimensi serantau memainkan peranan yang penting dalam membentuk dasar luarnya. Artikel ini mengkaji dasar luar Malaysia sejak merdeka dari perspektif serantau. Difahami bahawa dasar luar Malaysia adalah sangat direka-bentuk oleh rantau Asia Tenggara, khususnya ASEAN (Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) itu sendiri. Sejak merdeka, Asia Tenggara menjadi salah satu kebimbangan utama dalam dasar luar Malaysia, dimana rantau ini mengalami peristiwa besar yang berlaku secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dasar luar negara-negara di Asia Tenggara. Malah, dimensi serantau telah membentuk dasar luar Malaysia dari permulaan kemerdekaan. Kajian ini, pertamanya, menilai tentang latar belakang sejarah dasar luar negara Malaysia sejak Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, sehingga Dr. Mahathir Mohamad. Keduanya, kajian ini bertujuan untuk mengetengahkan isu-isu utama, orientasi, dan perubahan dalam dasar luar Malaysia dengan memeriksa pentadbiran yang berbeza. Ketiganya, artikel ini bertujuan untuk melihat kepentingan dasar luar Malaysia dalam aspek serantau.

**KATA KUNCI:** Dasar luar Malaysia, kepentingan negara, peranan perdana menteri, kerjasama serantau, keselamatan, dan pembangunan ekonomi.

### INTRODUCTION

Malaya, later Malaysia, gained independence in 31<sup>st</sup> August 1957. Since her independence, Southeast

Asia becomes one of major concern in Malaysia's foreign policy. The establishment of Association of South East Asian Nations (ASEAN) in 1967,

**Arvin Tajari** is a Lecturer at the Faculty of Social Science and Liberal Art UCSI (University College Sedaya International), No.1, Jalan Menara Gading, UCSI Heights, Cheras 56000, Kuala Lumpur, Malaysia. He is also as Ph.D. Candidate for Security and International Relations at the School of History, Politic, and Strategy UKM (National University of Malaysia). His e-mail address is [arvintajari@gmail.com](mailto:arvintajari@gmail.com)

when countries including Malaysia together with Indonesia, Philippines, Singapore, and Thailand, agreed to form regional organization among the Southeast Asia countries (Andaya & Andaya, 1982).

Malaysia, like other countries in the world, has formulated her foreign policy to achieve her national interests. In order to achieve national interests, foreign policy need to be formulated accordingly and should be implemented within the framework of national interests, where “*state act in their national interests*” (Nye Jr., 2009:50). Foreign policy of Malaysia has been developed since the independent, and regional dimension played an important role in shaping Malaysia's foreign policy. Southeast Asia or ASEAN to be more specific played a pivotal role Malaysia's foreign policy. Since establishment of ASEAN in 1967, ASEAN become one of the priorities in Malaysia's foreign policy.

Historically, the region has experienced many events that directly and indirectly shaped its orientation towards the other countries (Rosenau, 2006). The end World War II (WW2) and the emergence of the Cold War has given an impact to the region in many aspects, particularly in security, defence, economy, as well in political issues. Malaysia, like other countries, cannot escape from the Cold War environment which leads to shape Malaysia's foreign policy approaches and orientations (Azhari Karim, Howell & Okuda, 1990).

The establishment of ASEAN marked a very significant impact to all members of ASEAN, including Malaysia. With the policy of confrontation by Indonesia, Philippines's claim over Sabah, as well as separation of Singapore from Malaysia added with the domestic problem which was Communist insurgency, made Malaysia in the critical condition.<sup>1</sup> But, with the

---

<sup>1</sup>The term of “Malaya”, gained the independence in 1957, was before the establishment of the Federation of Malaysia in 1963. Throughout the article, Malaysia will

establishment of ASEAN, bilateral issues during that period also slowly resolved.

Since ASEAN was established until today, ASEAN play a key role and cornerstone in shaping Malaysia's Foreign Policy (MFP). Even though at the first two decades after independence, Southeast Asia was not at her top priority like British, but Southeast Asia from early time of independence consider as one of the national's priority. Leaders, from Tunku Abdul Rahman till today, have maintained that ASEAN should be an important entity in terms of security, politics, cultural, and economy for Malaysia. The study seeks to evaluate regional dimension of MFP from Tunku Abdul Rahman till Dr. Mahathir Mohamad.<sup>2</sup>

#### **FORMING FOREIGN POLICY DIRECTION AND ORIENTATION: PRO-WESTERN, 1957-1970**

Tunku Abdul Rahman was Malaysia first Prime Minister. Tunku Abdul Rahman can be considered as the person who was shaping Malaysia's foreign policy after the independent. This was because Tunku Abdul Rahman also was hold position as Malaysian Foreign Minister. Major role was taken by Tunku Abdul Rahman alone during his administration, especially in foreign policy approaches, posture, and orientation.

His administration facing many events which directly shaped his foreign policy orientation and approach. During his tenure, Tunku Abdul Rahman's administration was facing internal and external problems that put Malaysia security at stakes. Tunku Abdul Rahman was appointed as Prime Minister of Malaysia during the time of the Cold War as well spread of

---

be used instead of Malaya.

<sup>2</sup>This article is extended version of paper presented at an International Conference of Social Sciences and Humanities (ICOSH) at UKM (National University of Malaysia) in Bangi, on 12-13 December 2012, with the title “Regional Dimension of Malaysia's Foreign Policy from Tunku to Tun Mahathir: An Evaluation”.

Communist insurgency in Southeast Asia, where Malaysia was mostly affected from these events.

Tunku Abdul Rahman's time as a Prime Minister can be marked as forming a foreign policy for a new independent state and its orientation of the nation towards other nations. Taking position as a Prime Minister as well as Minister of Foreign Affairs showed that influenced in the foreign policy decision making was very influential. His influence can be seen in terms of foreign policy direction and orientation. His influence of the nation's foreign policy was shaped by his close relations with the former colonial power (Britain).

His pre-dominant of nation's policy formation later shaped mostly from his policy of anti-Communist and pro-Western stand during his time. Cannot be denied that Tunku Abdul Rahman was a major actor in shaping Malaysia's foreign policy. But, the role of other bureaucrats during his tenure also important, where different ministers were helping Tunku Abdul Rahman in his foreign policy (Ott, 1972).

Under Tunku Abdul Rahman's administration, Malaysia is still new to maintain its own defence and security. For any new states, matter of defence and security become one of the fundamental aspects that leader should take more serious attention in order to ensure survival of the state in the future. Malaysia close relation with Britain provides Malaysia with defence and security assistance and alliance. Through the Anglo-Malayan Defense Agreement (AMDA), Britain provides a security umbrella to Malaysia. AMDA considered as a foundation of Malaysia's security and defence policy.

With this agreement, parties that involves agreed to assist each other in case if there is any attack attempt on every states. According to AMDA, "the Government of the United Kingdom undertakes to afford to the Government

of the Federation of Malaya such assistance [...] for the external defense of its territory".<sup>3</sup>

Malaysia was formed with the inclusion of Sabah, Sarawak, and Singapore in 1963. With the formation of Malaysia, neighbouring states feel uncomfortable with the new federation and react against it. Indonesia sees the formation as a type of neo-imperialist (Saravanamuttu, 1983:63); and Philippines claimed Sabah as their territory from the historical point of view.

These were two majors' events happened after the creation of Malaysia. Indonesia declared *Konfrontasi* (confrontation) against Malaysia right after the establishment of new federation. Philippines, on the other hand, claimed over Sabah creates a diplomatic problem amongst both nations, Malaysia and Philippines (Saravanamuttu, 1983:62-63).

### CONFRONTATION POLICY BY INDONESIA

Establishment of Malaysia, which consists of Malaya, Sabah, Sarawak, and Singapore in 1963, gives big impact to Malaysia. Her neighbouring countries did not recognized this new federation and threaten to takes action against Malaysia. Because of that, Malaysia relations with certain states in Southeast Asia become worst compared to prior of the establishment of Malaysia.

Confrontation by Indonesia and Philippines claimed over Sabah not only creates bilateral problems with Indonesia and Philippines, but also with other international organization which Malaysia applied to become a membership. One of the examples was Malaysia application to be a member of the Afro-Asian People's Solidarity Organization was rejected because of the intervention from Indonesia and

<sup>3</sup>See, for example, Article 1 AMDA (Anglo-Malayan Defense Agreement) in 1957.

China (Saravanamuttu, 1983:69); where Indonesia and China threaten to withdraw if the organization accepted Malaysia's application to become a member. This is considered as one of the attempts created by Indonesia to reduce Malaysia influence from getting more recognition in international arena.

Indonesia was the first country that reacted against the formation of Malaysia. It is clear that policy of confrontation introduced by Indonesia was because of action taken against Malaysia and its former colonial country, Britain. Formation of Malaysia, in Indonesia's perspectives, was one of form of imperialism in Southeast Asia. This is why in the eyes of Indonesian leaders, this formation was kind of "neo-imperialism" and "neo-colonialism".

In fact, Indonesia's reaction was not surprise because of conflict occurred between Malaysia and Indonesia during the confrontation. Indonesia's reaction against Malaysia to become member to international organization was motivated as reaction taken by Malaysia during the establishment of Federation. On the other hand, confrontation was directly makes Malaysia's security and defence at stakes. During the confrontation, Malaysia and Indonesia's relation was totally at the worst situation. This situation, during the confrontation, become worst as a result of involvement of Indonesian Army in supplying arms to the rebellion group in the border of Sarawak and Sabah (Sidhu, 2009:2-3).

#### ***On the Separation of Singapore.***

One of the major issues that reflect Malaysia's foreign policy was separation of Singapore from Malaysia in 1965. After the establishment of Malaysia, two years after that, Singapore was separated from the federation and become an independent state. Singapore's prior to the establishment of Malaysia was also British colonies, where Singapore considers as one of the vital state for British in Southeast Asia. Singapore joint other states in

order to form Malaysia in 1963 directly gave Singapore and other colonies in the region (Sabah and Sarawak) an independent. The coalition was to ensure that Singapore's internal security was maintained even though Britain was not presence after the independent was achieved.

Separation of Singapore from Malaysia, which later resulted of emergence of new independent country in Southeast Asia, was rooted by several problems. One of the major problems was internal conflict between Central government in Kuala Lumpur and Singapore government (Sopiee, 1976:183). Another aspect that can be considered was the high Chinese population in Singapore that can bring ethnic imbalanced, especially in Peninsula of Malaysia.

In fact, all of these events happened during the first decade of independent do not become an obstacle for Malaysia to have relations with the Southeast Asia nations, particularly with the neighbouring countries. This can be seen in 1967, where several countries in Southeast Asia form Association of South East Asian Nations (ASEAN), which Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand becomes in founding members of this regional organization. Despite of all problems that facing Southeast Asia, this regional organization consider as a tool that can become a means to bringing all countries in Southeast Asia together.

#### **NON-ALIGNMENT ORIENTATION, NEUTRALITY, AND ASEAN AS CORNERSTONE, 1970-1981**

Malaysia's second Prime Minister, Tun Abdul Razak, on the other hand, used different approach in Malaysia's foreign policy and relation. Tun Abdul Razak become Malaysia's Prime Minister after the ethnic clashes between Malay and Chinese on 13<sup>th</sup> May 1969. He succeeded Tunku Abdul Rahman on September 1970.

His approach in Malaysia foreign policy different from his predecessor in terms of Malaysia's stand over a certain issues. Compared to Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak consider as one of the leader in developing countries who are taking stand not to side any of superpowers during his time. This can be sees during his time when he becomes amongst the leader who are recognized China even though China is a Communist state.

During Tun Abdul Razak's administration, nature of MFP (Malaysia Foreign Policy) was also changed its direction. MFP can be seen has changed in terms of Malaysia stance from pro-Western policy and anti-Communist policy to Neutralism. Johan Saravanamuttu (2010) mentioned Malaysia's stance of Communist countries changed by opened up Malaysia's diplomatic relations with China. Johan Saravanamuttu mentioned as follows:

Malaysia's opening up to diplomatic relations with China was part of an overall transition in its foreign policy from a pro-Western to a Non-Aligned stance and recognition of the imperative for coexistence among Non-Communist and Communists state in the global system (Saravanamuttu, 2010:1).

One of the major significant contributions of Tun Abdul Razak, especially Malaysia's foreign policy, was change of Malaysia's policy orientation towards the countries like China. Policy of Non-Alignment and Neutralism later become Malaysia primary concern. Neutralism approach has greater significant for small country like Malaysia during the Cold War environment, which Jayaratnam Saravanamuttu (1983) explained reason why Third World countries, like Malaysia, prefer this stance. He explained further as follows:

[...] Neutralism has the advantage of having a broader meaning of Non-

Alignment in the Cold War or even perhaps non-involvement in any "hot" war with superpower participation or support. Neutralism should, however, not be confused with "neutrality" which is legal concept for non-combatant status in war situations. Very often, Non-Alignment and Neutralism are used synonymously and neutrality is taken to be neutralism (Saravanamuttu, 1983:2).

Tun Abdul Razak's foreign policy approaches were mostly motivated by the situation happened during the Cold War, where superpowers competing amongst each other to gained more influence from the developing countries. This situation becomes worst when the superpowers directly involve in conflict and support for the countries which directly involve in conflict. Taking position not to align with any of these superpowers ideologies considered as the best option that can be taken for developing countries like Malaysia.

One of the major actions taken by Malaysia during Tun Abdul Razak's time was the initiatives to ensure that Southeast Asia as free zone from any interference of any superpowers and proposed ideas of "neutralization" (Ott, 1972:237). This can be seen when Kuala Lumpur initiated the idea of Zone of Peace, Free, and Neutrality (ZOPFAN) in 1971.<sup>4</sup> The idea was to ensure that there is no superpowers will interfere in terms of spread their ideology, influenced, and they need to respect Southeast Asia as a free region which taken stand not to align with either sides.

From Tun Abdul Razak onward, regional dimension on Malaysia foreign policy was taking place. During Tunku Abdul Rahman's time, regional dimension was not fully been focusing in Malaysia foreign policy, especially when there were conflict among the countries in Southeast Asia. Only when ASEAN (Association of South East Asian Nations) was established, then,

<sup>4</sup>See, for example, "ZOPFAN Declaration". Available [online] also at <http://www.aseansec.org/1215.htm> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 16<sup>th</sup> May 2012].

regional dimension really took place in Malaysia's foreign policy. As a matter of fact, ASEAN dimension in Malaysia's foreign policy taking place during the Tun Abdul Razak, where major shift of MFP (Malaysia Foreign Policy) taking place during his time. Foreign policy orientation also different from pro-West posture to Non-Alignment posture.

When Tun Hussein Onn replaced Tun Abdul Razak in 1975, there are no major changes made by Tun Hussein Onn in his foreign policy. Rather, he strengthening what was inherited by his predecessor, Tun Abdul Razak. Tun Hussein Onn's foreign policy priority was basically more concern on regional aspect where during his time, ASEAN started to become a cornerstone in Malaysia's foreign policy<sup>5</sup> till the present day.

Issues of security and regional stability become one of the main concerns of Malaysia's foreign policy during Tun Hussein Onn. Southeast Asia nations, particularly ASEAN members, afraid that Communist ideology will spread among the Southeast Asia nations. After the defeated of USA (United States of America) in Vietnam during the Vietnam War, added by the fall of South Vietnam (Saigon) to the North Vietnam which practices Communist ideology makes security environment in Southeast Asia changed (Sodhy, 1991:343).

When USA was defeated by Communist in Vietnam, there are strong believed that Southeast Asia will again become a hot place for the superpowers competition, especially spread of Communist ideology throughout the region. After the fall of South Vietnam to the North Vietnam, the unification of South-North Vietnam become one unified state lead to insecure feeling among the states in the region (Baginda ed., 2009).

The threat also increased when Vietnam invaded Cambodia in late 1970s. Furthermore, conflict happened in Indochina states not only become state issues, but also become international issues that should be taken seriously. Increased of refugee among the Vietnamese in the region, especially to the neighbouring countries, also creates problems to the domestic issue. Malaysia also cannot run from the increased of refugees to whom run from the conflict happened in Vietnam (Saravanamuttu, 2010:167-168).

Tun Hussein Onn, like his predecessor, continues to strengthen relation with China. After the first visit during Tun Abdul Razak, Malaysia enhances relation with China. This is in order to gain support and request for China to stop supporting Communist Party of Malaya or Malaya Communist Party, MCP (Hossain, 2008:277).

After USA withdrew from Vietnam and Vietnam invasion in Cambodia, there were feel that Communist will be motivated with what happened in Vietnam. Countries like Malaysia whom is facing Communist insurgency starting from the period after World War II (WW2) afraid with this events. Communist movement will creates instability in the country which the aim creating Communist state in Malaysia. Such perception and added with the presence of Communist insurgency for more than a decade's creates dilemma in Malaysia's security policy. With the enhancement of bilateral with China, Malaysia hopes that China will stop to supporting MCP.

Another of the major actions taken by Tun Hussein Onn was to established relationship with Indochina countries (Jaafar, 2007:105). Relations with other ASEAN countries during Tun Hussein Onn become closer and there are two major declaration signed by the ASEAN members which also explained their state's foreign policy. Declaration of ASEAN Concord and Treaty of Amity

---

<sup>5</sup>See, for example, "Malaysia, Ministry of Foreign Affairs". Available [online] also at <http://www.kln.gov.my/web/guest/evolution> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 17<sup>th</sup> May 2012].

and Cooperation was signed in 1976.<sup>6</sup> These two declaration explained states' external behaviour toward each other in the region and also maintaining the region as a free zone area.

### **PRAGMATIC AND NEW FOREIGN POLICY DIRECTION UNDER MAHATHIR MOHAMAD, 1981-1990**

Tun Mahathir Mohamad become a fourth Malaysia Prime Minister. Compared to his predecessors, Mahathir Mohamad becomes Malaysia first Prime Minister who has different background. He comes from medical background where he studied at University of Malaya in Singapore and graduated not from Britain; where all of his predecessors graduated from British universities which describe why most of his predecessors favour Western countries compare to others (Wariya, 1989).

**First decade of his administration during the Cold War.** Foreign policy of Malaysia under Mahathir Mohamad's administration has been marked by his new approach in the direction and theme of the policy itself. Mahathir Mohamad's foreign policy marked by his major shifted by looking at the new potential for Malaysia's national interests. With the emphasize more of the issue of economic development of the nation and active role in international organization. His foreign policy shifted from the security concerned to economic issues, where unlike his predecessors concerned on security and defense (Dhillon, 2009:2).

Unlike other former Malaysia's Prime Ministers, Mahathir Mohamad view of Britain and other Western countries was not really rely on them. This can be seen right after he took place as Prime Minister, he introduced "Buy

British Last" or BBL (Dhillon, 2005:235). Mahathir Mohamad introduces BBL as a result of dissatisfaction of him towards the British looking at Malaysia as their former colony not as a sovereign and Free State (Pathmanathan & Lazarus, 1983:45).

This changes can be said unexpected came from the former colonies of British, especially Malaysia since independent rely mostly on British in terms of economic, security, and defense issues. Mahathir Mohamad's anti-West and anti-colonialism perception creates some problems with other Western countries, where his view on these two aspects was reflected by his personal experienced during the time of WW2 (World War II) and Japan's invasion in Southeast Asia, 1942-1945 (Md Khalid, 2011:430).

As a result of his anti-Western perception, Mahathir Mohamad look at another potential partner and cooperation. This led him to play an active role in South-South Cooperation and emphasis on the regional aspect of interdependency. Like other leaders in Third World countries, Mahathir Mohamad considered as one of the leader that very out-spoken personal and always calling for the Third World, or developing countries, to strengthening cooperation and self-reliance among the Third World countries (Md Khalid, 2011:431).

During his first decade at office, Mahathir Mohamad introduces many changes as a result of the need of the nation to cope with the external environment. Mahathir Mohamad not only introduced BBL, but also redirected Malaysia's economic policy towards the other side of the world. By introducing "Look East Policy", Mahathir Mohamad hopes that Malaysia will not depending on the West in terms of economic and other aspect of development.

His ambition is to develop a country, which has strong economic capability, motivated him to focusing on economic issue rather than security issue, where

<sup>6</sup>See, for example, "Declaration of ASEAN Concord, Indonesia: 24<sup>th</sup> February 1976". Available [online] also at <http://www.aseansec.org/5049.htm> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 16<sup>th</sup> May 2012]; and "Treaty of Amity and Cooperation". Available [online] also at <http://www.aseansec.org/5047.htm> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 16<sup>th</sup> May 2012].

developing countries are always been used by the developed countries, because they do not have economic capability. Because of that, developing countries will always been exploited by developed countries (Baginda ed., 2004; and Harun ed., 2006). By introducing Look East Policy, Mahathir Mohamad sees potential for Malaysia to learn from the East Asia countries, in particular Japan, to industrialized the countries and accelerated economic growth.

Look East Policy was a mechanism that been used by Mahathir Mohamad in his foreign policy to enhance Malaysia's economic interests. For him, historically, Malaysia since Tunku Abdul Rahman never looks at the Eastern part of the world as an example for Malaysia, especially in work ethics and economic strength (Saravanamuttu, 2010:187).

The reasons of introducing Look East Policy is because of the success made by the Eastern countries (Japan, Taiwan, South Korea, and Hong Kong) to make the countries become highly industrialized in short of time; and the other reason was the nature of Western economic is exploitative in nature (Saravanamuttu, 2010). Mahathir Mohamad, through the Look East Policy, clearly wants Malaysia to achieve Newly Industrializing Country (NIC). By adopting and stressing on Eastern value, achieving NIC consider as a positive result.

Despite on his Look East Policy dominated his first decade in office, Mahathir Mohamad also look at the other potential cooperation among the developing countries. Establishment of South-South Cooperation and G-15 (Group of Fifteen) comprised of several developing countries further enhance Mahathir Mohamad's leadership as well as known as a Third World spokesman (Robani, 2009). By enhancing economic cooperation among the developing countries, it wills directly reduced dependency on Western countries. G-15 consider as catalyst on mutual

economic cooperation<sup>7</sup> that can provide its members positive impact.

#### ***Post-Cold War foreign policy.***

Demised of Soviet Union in late 1980s brought new perspective in national security discussion among the leaders. The rise of unipolar international system describes the dominant of Western democracy and its influence throughout the global (Kofman & Youngs eds., 1996).

The external influence also important in influencing Malaysia's external behaviour. Post-Cold War time can be describe as strengthening intra-regional relations in aspects of political, economics, and socio-cultural relation. ASEAN (Association of South East Asian Nations) growing its memberships by accepting Indochinese countries as ASEAN member. Malaysia is the country who strongly agree and initiate to expanding ASEAN membership by inclusion of Indochinese countries.

ASEAN remains as Malaysia top priority in her foreign policy. Relations with other ASEAN countries in post-Cold War time was strengthen by the introducing of several mechanisms that can benefit Southeast Asian countries. In aspect of economy, Mahathir Mohamad was one of the leaders in ASEAN which stress the important of intra-regional cooperation, especially looking at the Northeast Asia countries as an example and the important of regional cooperation in the aspect of economy. Mahathir Mohamad's spoke about the idea of East Asia Economic Grouping (EAEG) and, later, ASEAN's leader agreed to establish ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Increase of intra-regional cooperation, especially in economic aspect, is important to ensure that ASEAN did not rely mostly on the Western countries. With AFTA, economic relation among the member's states will increase

---

<sup>7</sup>See, for example, "Group of Fifteen: Aims and Objectives". Available [online] also at <http://www.g15.org/gfaims.html> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 18<sup>th</sup> May 2012].

automatically if it endorsed according to the plan. With the inclusion of Indochinese countries and Myanmar, AFTA's plan was later been modified to ensure that Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam (CLMV) can cope with the idea of free trade area.

Furthermore, matter of national security also important during the post-Cold War time. Malaysia sees the emergence of China as regional power in Asia as a threat. Because of that, Malaysia was the country who is taken serious consideration to bring another country to become ASEAN members to minimize that threat. Malaysia agreed with the inclusion of Vietnam as a result to reduce China's influenced in Asia-Pacific region (Singh, 2004:13-14).

In summary, Malaysian foreign policy has been changed since the first year of independent. From Tunku Abdul Rahman's time up to the Prime Minister of Mahathir Mohamad, Malaysia has shown many faces of its foreign policy orientation (Baginda ed., 2007).

## **CONCLUSION**

Like other state in the world, forming a good foreign policy is necessary for any countries in the world. Foreign policy of one country might be varied from another countries, but the main reasons of forming foreign policy is to achieve and protect national interest of the state itself.

Malaysia's foreign policy orientation has been evolved and different from the early time to the present time. The fundamental change in Malaysia's foreign policy was not surprised consider that foreign policy is changeable and according to the need of the state. State act and react to the change of the environment which came from the domestic demand and external pressure, where the nature of every foreign policy is not static and require change if needed and necessary.

Country like Malaysia has experienced many changes in its

foreign policy. But this changes are not meaning that Malaysia's did not have strong position over a certain issue. Rather, it is a result of constructive approaches that been used since the first year of independent.

Malaysia's approach during the Cold War and post-Cold War time might be differ in terms of the orientation as well priority. Historically, change in foreign policy has been always made by the country's leader.

During the Tunku Abdul Rahman, Malaysia's foreign policy was pro-Western and anti-Communist. When Tun Abdul Razak become a Prime Minister, his approach was different because the orientation was Non-Alignment. After that, during Tun Hussein Onn, regional dimension come into a place and maintain as a cornerstone in MFP (Malaysia's Foreign Policy). Indeed, major shift in Malaysia's foreign policy taking place under Tun Mahathir Mohamad. From security concern to economic development of Malaysia become his priority during the Cold War and after that.

## **Bibliography**

- Andaya, Barbara Watson & Leonard Y. Andaya. (1982). *A History of Malaysia*. London: MacMillan Press Ltd.
- Azhari Karim, Mohammed, Llewellyn D. Howell & Grace Okuda. (1990). *Malaysia Foreign Policy: Issues and Perspectives*. Kuala Lumpur: National Institute of Public Administration.
- Baginda, Abdul Razak [ed]. (2004). *Malaysia and the Islamic World*. United Kingdom: ASEAN Academic Press Ltd.
- Baginda, Abdul Razak [ed]. (2007). *Malaysia's Foreign Policy: Continuity and Change*. Kuala Lumpur, Malaysia: Marshall Cavendish Editions.
- Baginda, Abdul Razak [ed]. (2009). *Malaysia's Defence and Security Since 1957*. Kuala Lumpur: Malaysia Strategic Research Centre.
- "Declaration of ASEAN Concord, Indonesia: 24<sup>th</sup> February 1976". Available [online] also at <http://www.aseansec.org/5049.htm> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 16<sup>th</sup> May 2012].
- Dhillon, Karminder Singh. (2005). "Malaysian

- Foreign Policy in the Mahathir Era, 1983-2003". *Unpublished Ph.D. Thesis*. Boston, USA: Boston University.
- Dhillon, Karminder Singh. (2009). *Malaysian Foreign Policy in the Mahathir Era, 1983-2003: Dilemmas of Development*. Singapore: NUS [National University of Singapore] Press.
- "Group of Fifteen: Aims and Objectives". Available [online] also at <http://www.g15.org/gfaims.html> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 18<sup>th</sup> May 2012].
- Harun, Ruhanas [ed]. (2006). *Malaysia's Foreign Relations: Issues and Challenges*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Hossain, Ishtiaq. (2008). "Foreign Policy" in Abdul Rashid Moten [ed]. *Government and Politics in Malaysia*. Singapore: Cengage.
- Jaafar, Faridah. (2007). *Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia, 1957-2005* [Prime Ministers and Malaysian Foreign Policy, 1957-2005]. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].
- Kofman, Eleonore & Gillian Youngs [eds]. (1996). *Globalization: Theory and Practice*. New York: Pinter.
- "Malaysia, Ministry of Foreign Affairs". Available [online] also at <http://www.kln.gov.my/web/guest/evolution> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 17<sup>th</sup> May 2012].
- Md Khalid, Khadijah. (2011). "Malaysia's Foreign Policy Under Najib: A Comparison with Mahathir" in *Asian Survey*, Vol.51(3), pp.429-452.
- Nye Jr., Joseph S. (2009). *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*. New York: Longman Classics in Political Science, 7th edition.
- Ott, Marvin C. (1972). "Foreign Policy Formulation in Malaysia" in *Asian Survey*, Vol.12(3), pp.225-241.
- Pathmanathan, Murugesu & David Lazarus. (1983). *Winds of Change: The Mahathir Impact on Malaysia's Foreign Policy*. Kuala Lumpur: Eastview Production.
- Robani, Anidah. (2009). *The Palestinian Issue: A Malaysian Perspective*. Kuala Lumpur: IIUM [International Islamic University of Malaysia] Press.
- Rosenau, James N. (2006). *The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges*, Vol.1. New York: Routledge.
- Saravanamuttu, Jayaratnam. (1983). *The Dilemma of Independence: Two Decades of Malaysia's Foreign Policy, 1957-1977*. Penang: Penerbit USM [Universiti Sains Malaysia].
- Saravanamuttu, Johan. (2010). *Malaysia Foreign Policy, the First Fifty Years: Alignment, Neutralism, Islamism*. Singapore: ISEAS [Institute of South East Asian Studies] Publisher.
- Sidhu, Jatswan S. (2009). "Malaysia's Defence and Security Since 1957: An Overview" in Abdul Razak Baginda [ed]. *Malaysia's Defence and Security Since 1957*. Kuala Lumpur: Malaysia Strategic Research Centre.
- Singh, Hari. (2004). "Malaysia's National Security: Rhetoric and Substance" in *Contemporary Southeast Asia*, Vol.26(1), pp.1-25.
- Sodhy, Pamela. (1991). *The US-Malaysian Nexus: Themes in Superpower-Small State Relations*. Malaysia: Institute of Strategic and International Studies (ISIS).
- Sopiee, Mohamed Noordin. (1976). *From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unification in the Malaysia Region, 1945-1965*. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].
- "Treaty of Amity and Cooperation". Available [online] also at <http://www.aseansec.org/5047.htm> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 16<sup>th</sup> May 2012].
- Wariya, Chamil. (1989). *Dasar Luar Era Mahathir*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.
- "ZOPFAN Declaration". Available [online] also at <http://www.aseansec.org/1215.htm> [accessed in Kuala Lumpur, Malaysia: 16<sup>th</sup> May 2012].

MAMAN LESMANA

## Teks-teks Humor Politik di Indonesia: Sekedar Hiburan atau Sekaligus Kritikan?

**IKHTISAR:** Dalam buku yang dieditori oleh Willibald Ruch (2007) disebutkan bahwa ada lima fungsi humor yang berkaitan dengan politik, yaitu: (1) untuk mengekspresikan nilai dan sikap politik seseorang secara tidak langsung; (2) melihat sosok penguasa yang bobrok; (3) mengekspresikan sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir; (4) mengeksplor topik-topik yang tabu; dan (5) mencapai suatu keadilan. Lalu, bagaimanakah fungsi humor politik di Indonesia? Artikel ini bertujuan untuk mengungkap bentuk dan isi teks humor politik di Indonesia. Fungsi humor politik di Indonesia, seperti halnya humor pada umumnya, oleh kebanyakan orang masih dianggap sebagai sarana hiburan, bukan sebagai alat untuk memahami isu politik atau meningkatkan keefektifan pesan politik. Jadi, orang membaca humor politik bukan untuk melihat isu-isu politik yang terdapat di dalamnya, tapi untuk melihat unsur-unsur humornya. Sehingga, berhasil atau tidaknya teks tersebut tidak dilihat dari tajam atau tidaknya kritikan politik yang terdapat di dalamnya, tapi dari lucu atau tidaknya humor yang dibacanya. Dari teks-teks yang diteliti ditemukan bahwa jika dilihat dari bentuk dan isinya, teks-teks humor politik di Indonesia memang lebih banyak yang bersifat fiksi daripada yang non-fiksi, sehingga fungsinya pun lebih banyak ke arah hiburan daripada kritikan.

**KATA KUNCI:** Humor, politik, masyarakat Indonesia, hiburan, kritikan, fiksi, non-fiksi, dan fungsi kontrol sosial.

**ABSTRACT:** This article entitled "Texts in Indonesian Political Humor: Mass Criticism or Just Entertainment?". In a book edited by Willibald Ruch (2007) mentioned that there are five functions of humor that related to politics, namely: (1) to express one's political values and attitudes indirectly; (2) look dilapidated authority figures; (3) express something that cannot be tolerated; (4) explore taboo topics; and (5) achieve a justice. Then, how is the function of political humor in Indonesia? This article aims to reveal the form and content of the text in Indonesian political humor. Function of humor in Indonesian politics, as well as humor in general, is still regarded by most people as a means of entertainment, not as a tool for understanding political issues or improve the effectiveness of political message. Thus, someone is to read the political humor not to see the political issues contained in it, but to see the elements of humor. Thus, success or failure of the text is not seen from whether or not the sharp of political criticism contained in it, but from whether or not the humor funny read. From the texts studied found that if seen from the shape and contents, texts in Indonesian political humor are more fiction than non-fiction, so the function was more towards entertainment rather than criticism.

**KEY WORD:** Humor, politics, the people of Indonesia, entertainment, criticism, fiction, non-fiction, and function of social control.

### PENDAHULUAN

Humor sudah berlangsung sejak lama dan bukan hanya ada di berbagai bangsa, tapi telah menjadi bagian dalam kebudayaan dunia. Karena itulah, penulis tertarik untuk meneliti

tentang humor, yaitu humor politik di Indonesia.

Di Indonesia, tradisi humor politik cukup lama mengakar. Bentuknya ada dua, yaitu yang formal dan informal. Termasuk kedalam yang formal adalah

---

Dr. Maman Lesmana adalah Dosen di Program Studi Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: [malessutiasumarga@yahoo.com](mailto:malessutiasumarga@yahoo.com)

humor politik yang terdapat pada editorial di berbagai media massa, lawak, atau dagelan di panggung, televisi, atau radio, tulisan jenaka di media massa cetak, dan lain-lain. Sementara yang informal, yaitu desas-desus mendadak yang berkeliaran di tengah masyarakat, dan biasanya sulit diketahui siapa penciptanya (Suprana, 2009:63).

Dalam pengamatan penulis, humor-humor politik yang ada di Indonesia, terutama yang terdapat dalam buku-buku yang bertajuk *Humor Politik di Indonesia*, seperti halnya humor pada umumnya, oleh kebanyakan orang masih dianggap sebagai sarana hiburan, bukan sebagai alat untuk memahami isu politik atau meningkatkan keefektifan pesan politik. Jadi, orang membaca humor politik bukan untuk melihat unsur-unsur politik yang ada di dalamnya, tapi untuk melihat unsur-unsur humornya. Sehingga, berhasil atau tidaknya teks tersebut tidak dilihat dari tajam atau tidaknya kritikan politik yang terdapat di dalamnya, tapi dari lucu atau tidaknya cerita yang dibacanya.

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang “teks humor politik” yang ada di Indonesia, yaitu dengan meneliti bentuk dan isinya, dengan tujuan untuk mengungkap karakteristiknya, apa hanya berupa hiburan, sebagai cara untuk memahami isu politik dan meningkatkan keefektifan pesan politik, atau kedua-duanya.

Penelitian ini perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang karakteristik humor politik di Indonesia, sehingga mereka bisa menilai mana humor politik yang hanya berfungsi sebagai hiburan dan yang sekaligus berfungsi sebagai cara untuk memahami isu politik dan meningkatkan keefektifan pesan politik, sehingga mereka bisa menggunakannya sesuai dengan yang mereka perlukan.

Demikian juga, bagi para pembuat humor, dengan adanya penelitian ini

diharapkan akan menjadi sadar, apa tujuan mereka membuat humor. Kalau maksudnya untuk hiburan, maka mereka harus belajar bagaimana membuat humor yang menarik, sehingga dapat dijadikan hiburan oleh yang membacanya. Demikian juga, kalau tujuannya untuk individu, kebijakan, posisi kekuasaan, institusi atau sistem politik secara keseluruhan, mereka juga harus bisa membuatnya dengan baik agar bisa dijadikan masukkan bagi pembacanya.

Dalam artikel tentang “humor politik” ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks, yaitu mengambil korpus penelitian dari teks-teks yang ada dalam buku atau media elektronik, baik yang pada judulnya disebut secara jelas kata-kata “humor politik di Indonesia” maupun yang di dalamnya terdapat bagian buku yang diasumsikan sebagai teks humor politik.

Masalah yang akan dilihat dalam pembahasan ini, pertama-tama, adalah tentang bentuknya, karena dari aspek bentuknya dapat dilihat bahwa humor tersebut berfungsi sebagai apa; kemudian dari aspek isinya, sejauh mana tingkat kelucuan dan unsur politik yang terdapat di dalamnya, karena menurut Villy Tsakona & Diana Elena Popa, humor politik dianggap akan lebih efektif kalau kritiknya tajam dan humornya benar-benar lucu (Tsakona & Popa eds., 2011:5).

## **BENTUK HUMOR POLITIK DI INDONESIA**

Teks humor politik di Indonesia banyak sekali jumlahnya. Ada yang pendek, panjang, dan panjang sekali. Ada yang merupakan bagian dari buku khusus yang bertajuk humor politik, tapi ada juga yang berada pada buku lain yang berisi campuran humor. Bentuknya juga bermacam-macam, ada yang berupa dialog pendek atau berupa narasi panjang. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

*Pesawat Hercules sedang terbang pada ketinggian lima ribu meter. Pasukan bersiap melakukan latihan terjun yang pertama. "Siapkan semuanya!", seru instruktur. "Hei, kamu belum pakai parasutmu, Kasmu". "Nggak perlu Sersan", jawab Kasmu. "Ini kan, cuma latihan terjun, bukan perang betulan" (Felicia, 2009:89).*

Teks di atas memang lucu. Bagian yang lucunya terletak pada kata-kata, "Ini kan, cuma latihan terjun, bukan perang betulan". Efek kelucuan ini muncul, karena perilaku yang lugu dari si Kasmu. Seharusnya, baik dalam latihan maupun dalam perang betulan, kalau mau terjun memang sudah seharusnya mengenakan parasut agar tidak jatuh dari udara.

Seperti yang disebutkan oleh para ahli jiwa bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat orang jadi tertawa, yaitu karena gerakannya, gayanya, ucapannya, atau sifatnya (Lesmana, 2010:49). Teks di atas tadi memang lucu, karena sifat si Kasmu yang terlalu lugu.

Namun, jika dilihat dari aspek politiknya, bagian mana yang mengandung unsur politik? Apakah karena ada kata-kata: *Pasukan, Pesawat Hercules, parasut, Sersan, atau perang betulan*, kemudian teks ini dimasukkan ke dalam kategori humor politik?

Menurut Ofer Fildman (2005), humor politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam bahasa politik. Humor politik bisa berupa lelucon, komedi, satire, atau karikatur yang berisi tentang suatu rezim pemerintahan, sistem dan institusi politik, para politisi atau para pembuat kebijakan. Humor politik kadang-kadang dapat membantu para individu untuk mencurahkan kekecewaan terhadap institusi politik atau para politisi (Fildman, 2005:190). Contoh lainnya adalah sebagai berikut:

*Seorang turis Amerika berkunjung ke Bogor. Dia mau naik becak keliling kota. Singkat cerita, ia menemukan beca milik Iwan Solar.*

*Turis, "Can you speak English?"  
Tukang Becak, "Apa? Gereja Inggris, Tuan?"  
Turis, "What?"  
Tukang Becak, "Kuat, dong"  
Turis, "Are you crazy?"  
Tukang Becak, "Ah, Tuan, bisa saja. Saya dari Bogor, bukan Bekasi"  
Turis, "Hmm ... How much?"  
Tukang Becak, "Saya bukan Amat, saya Iwan Solar"  
Turis, "What? One Dollar? Oke, lets go" (Felicia, 2009:89).*

Kalau dilihat dari aspek humornya, humor di atas memang dapat dikatakan lucu, karena mengandung unsur humor yang membuat orang bisa tertawa, yaitu adanya perbedaan pemahaman antara si Turis dan Tukang Becak. Ketika ditanya dengan bahasa Inggris, tukang becak itu menjawabnya dengan bahasa Indonesia, karena ucapannya mirip dengan bahasa Indonesia.

Al-Hufi menyebut humor seperti ini dengan istilah *al-la'bu al-ma'ani*, yaitu humor yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam memahami suatu makna kata *majaz* atau hakiki, denotatif atau konotatif (dalam Lesmana, 2009:9).

Namun jika dilihat dari aspek politiknya, apakah teks di atas dapat disebut dengan humor politik? Sigmund Freud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "humor politik" adalah humor yang topiknya tentang politik, seperti tokoh politik, tokoh pemerintahan, dan kehidupan masyarakat di bawah pemerintahan suatu rezim (dalam Lesmana, 2009:44). Apakah tema yang dibicarakan dalam teks di atas itu mengenai politik? Apakah Turis dan Tukang Becak termasuk tokoh politik atau pemerintahan?

Demikian juga Sigmund Freud menyebutkan bahwa dasar dari humor politik ada dua, *pertama*, yaitu mencemarkan seseorang, partai, pemikiran, dan seluruh masyarakat; serta, *kedua*, mencemooh rezim politik (dalam Lesmana, 2009:44). Lalu, apakah teks di atas menggambarkan kedua dasar tersebut?

Menurut Villy Tsakona & Diana Elena Popa, banyaknya humor yang bertemakan politik karena humor merupakan salah satu cara untuk memahami isu politik. Humor sering meningkatkan keefektifan pesan politik. Humor politik dapat disusun sebagai suatu rangkaian kesatuan, mulai dari hal-hal yang mendukung dan bersifat lembut sampai pada hal-hal yang merusak dan subversif (Tsakona & Popa eds., 2011).

Humor politik biasanya diproduksi selain oleh para politisi untuk menghancurkan lawan politiknya, juga dilakukan oleh para jurnalis, pengamat politik, karikaturis, atau orang biasa untuk mengkritik keadaan politik dan para politisinya. Latarnya bisa politik, bisa juga bukan. Latar humor politik biasanya terjadi di arena politik yang serius, seperti di parlemen, debat politik atau kongres partai, wawancara, dan lain-lain (Mitchel, 2012).

Selain itu, Villy Tsakona & Diana Elena Popa juga mengatakan bahwa humor politik yang diproduksi oleh media atau orang biasa pada umumnya berupa jenis humor yang institusional, seperti kartun, pertunjukkan komedi di radio atau televisi, di situs-situs atau festival humor, dan lain-lain. Jenis humor yang lainnya terdapat dalam laporan berita, coretan-coretan, slogan-slogan politik, atau yang lainnya seperti dalam musik (Tsakona & Popa eds., 2011).

Humor politik berhubungan erat dengan wacana politik. Tanpa pengetahuan kontekstual tentang isu politik, humor tidak dapat diproses dan diinterpretasikan. Humor politik muncul dalam berbagai latar dan jenis, baik yang institusional maupun bukan. Bentuk dan isinya secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan politik, sosial, dan budaya dimana humor itu diproduksi (Tsakona & Popa eds., 2011:5).

Lebih jauh lagi, humor politik membantu para politisi dan insan media

untuk menyeimbangkan antara kritik yang ditujukan kepada para penguasa politik dan hiburan untuk para pemirsa yang lebih luas. Contoh humor politik yang lain adalah sebagai berikut:

*Seorang pejabat ditodong di jalan sepi.  
Penodong, "Berikan semua uangmu!"  
Pejabat, "Tidak! Kamu tahu aku ini  
seorang pejabat penting!"  
Penodong, "Kalau begitu, berikan uangku  
sekarang" (Felicia, 2009:89).*

Seperti pada contoh sebelumnya, teks di atas memang lucu. Tapi, untuk mengetahui efek kelucuannya diperlukan pemahaman yang lebih matang, karena unsur humor yang ada didalamnya tidak disampaikan secara langsung. Pertama adalah pertentangan antara kata ganti objek *-mu* pada kalimat: "*Berikan semua uangmu!*", dengan kata ganti objek *-ku* pada kalimat: "... *berikan uangku sekarang*". Pada kalimat pertama, yang diminta oleh si Penodong adalah betul-betul uang yang ditodong. Tapi, ketika yang ditodong mengatakan bahwa ia seorang Pejabat, maka yang diminta oleh si penodong bukan uang si pejabat itu, tapi uangnya, karena menurut si penodong, uang yang dimiliki oleh pejabat itu adalah uang korupsi, dan didalam uang yang dikorupsi itu, terdapat juga uang rakyat, yang didalamnya termasuk uangnya si Penodong.

Al-Hufi menyebut humor seperti itu sebagai *at-takhallushu al-fakihu*, yaitu humor yang terjadi karena pintarnya seseorang dalam mencari jawaban, ketika orang tersebut dalam keadaan terjepit (dalam Lesmana, 2009:48). Dibandingkan dengan kedua contoh humor di atas, meskipun bentuknya sama: berupa dialog pendek, sederhana, dan jenisnya masih berupa fiksi, tidak menyebut siapa yang mengatakan dan siapa yang dituju, namun isinya dapat dikatakan bertema politik, mengkritik pejabat yang suka korupsi.

## FUNGSI HUMOR POLITIK DI INDONESIA

Tujuan humor politik adalah untuk memberikan kritik atau masukan kepada pihak-pihak tertentu yang secara politis memiliki peran, fungsi, dan pengaruh politik dalam masyarakat. Biasanya, menjelang momentum kenegaraan yang penting, seperti PEMILU (Pemilihan Umum), akan banyak persoalan sosial dan politik yang dapat diangkat lewat humor-humor politik yang disajikan dengan nuansa yang bermacam-macam (Rahardi, 2006:97). Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

*Ani bertanya pada Lia, adiknya yang terkenal lucu.*  
*Ani: "Lia! Apa kepanjangan PEMILU?"*  
*Lia: "Anu ... Pemenangnya Masih yang Dulu, kak".*  
*Ani: ??? (Mulyanto, 2007:17).*

Teks di atas sebenarnya lucu. Bagian lucunya terdapat pada kata "PEMILU", yang seharusnya dipanjangkan menjadi "Pemilihan Umum", tetapi di sini diplesetkan menjadi "Pemenangnya Masih yang Dulu". Ini merupakan kritik yang sangat pedas terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak mau melepaskan posisinya sebagai orang nomor satu, atau yang selalu berambisi untuk memperoleh posisi terhormat di negerinya. Namun sayangnya, humor ini tidak dimasukkan ke dalam kategori "humor yang bertepatan politik", melainkan pada kategori "humor untuk anak-anak".

Dengan adanya kesalahan dalam penempatan humor ini menunjukkan bahwa humor di atas lebih menekankan unsur hiburan daripada kritiknya, karena humor ini tidak cocok untuk konsumsi anak-anak; dan isi yang terkandung dalam humor tersebut bukan berasal dari hasil pemikiran anak-anak, melainkan hasil dari pemikiran orang dewasa.

Humor politik itu penting tidak hanya dapat digunakan untuk menentang

keditaktoran, tapi juga untuk melihat aktivitas demokrasi sehari-hari (Morrcall, 1983:102). Seperti halnya contoh berikut ini:

*Anak I: "Di kampungku ada balon bisa bicara, aneh, ya?"*  
*Anak II: "Ah, masak ... Balon apa, sih, itu?"*  
*Anak I: "Balon Kades alias Bakal Calon Kepala Desa".*  
*Anak II: "Bisa saja kau?" (Mulyanto, 2007:15).*

Teks di atas, menurut penulis, juga tidak cocok dikonsumsi oleh anak-anak, melainkan untuk orang dewasa. Jika dilihat dari bentuk teksnya yang sederhana, yang berupa teka-teki dan bahasanya, yaitu bahasa sehari-hari, mungkin teks tersebut diterima oleh anak-anak, tapi isinya belum tentu dapat diterima, apalagi anak-anak yang tidak tinggal di desa dan tidak tahu tentang adanya istilah "KADES" yang merupakan kepanjangan dari "Kepala Desa".

Dengan adanya ketidaktahuan anak terhadap isi dari teks tersebut akan membuat efek kelucuan dari teks tersebut berkurang. Teks di atas itu akan lebih cocok jika dimasukkan ke dalam "teks humor politik untuk orang dewasa", agar fungsinya lebih kelihatan.

Humor sering berfungsi sebagai sebuah alat dalam politik. Humor dapat digunakan oleh para politisi untuk menjelaskan konsep politiknya, menegosiasi konflik, dan lain-lain. Para pengamat politik juga menggunakan humor untuk mengungkap ketidakmampuan atau perilaku yang buruk dalam pemerintahan atau parlemen.

Dulu, humor politik digunakan sebagai cara untuk menyampaikan realitas politik; tapi sekarang, penggunaan humor bergerak dari sebuah metode untuk mengelola informasi menjadi metode untuk memperoleh informasi, sehingga humor politik mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia politik (Brewer, 2007:25). Perhatikan contoh berikut ini:

*Pada pertemuan besar bisnis internasional di Bali, pada akhir tahun 1999, di depan ratusan peserta dari berbagai negara, dengan rileks, Gus Dur bicara dalam bahasa Inggris yang fasih.*

*"Presiden dan Wakil Presiden kali ini adalah tim yang ideal", katanya.*

*"Presidennya tidak bisa melihat dan Wakilnya tidak bisa ngomong ..."* (Basya'ib & Hermawan, 2010:16).

Kalau dilihat dari tokoh dan latar yang disebutkan dalam teks di atas, ada kemungkinan teks ini bersifat objektif dan bertema politik. Jadi, fungsinya bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sekaligus kritikan, atau yang disebut dengan *self-mockery* (mengejek diri sendiri). Al-Hufi memasukkan humor ini kedalam jenis *at-tahakkum bi al-'uyuub al-jasadiyah*, yaitu humor yang terjadi, karena kepandaian seseorang dalam memperolok-olok kekurangan fisik orang lain (dalam Lesmana, 2009:47).

Di sini, Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengolok-olok dirinya sendiri yang "tidak bisa melihat"; dan Wakil Presidennya, Megawati Soekarnoputri, yang tidak bisa ngomong. Seperti yang disebutkan oleh Joanne R. Gilbert bahwa fungsi humor dalam arena politik adalah sebagai sebuah cara untuk membangun atau menghancurkan suatu persekutuan dengan menampilkan kekurangan atau kelemahannya (Gilbert, 2004:14).

Fungsi sosial dari humor meliputi berbagai aspek. Humor dapat digunakan untuk: (1) melakukan kontrol sosial terhadap anggota dari suatu kelompok dengan cara mempermalukan atau mengintimidasinya; (2) menyampaikan norma-norma sosial mengenai sesuatu yang tabu atau yang tidak dapat diterima; (3) mencari perhatian dengan mengambil hati atau menjilat pihak-pihak tertentu; (4) mengalihkan wacana atau menghentikan topik yang sedang dibahas; serta (5) mempengaruhi pendengar agar tertarik pada pendapat seseorang atau suatu kelompok

tertentu (Attardo, 1994:324). Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

*Karena capek, seorang calon legislatif beristirahat di lantai lima sebuah hotel, bersama sekretarisnya. Tiba-tiba, pintunya digedor.*

*"Pasti ada lawan politik yang membocorkan pertemuan kita, Pak!", ucap sekretarisnya. "Melompatlah lewat jendela ini!"*

*"Lho, memang kamu lupa, kita ada di lantai lima".*

*"Bapak kan, politikus ulung, mengapa percaya sama takhayul, yang tabu itu angka tigabelas, bukan lima"* (Sudarmo, 2005:59).

Meski cenderung bersifat fiktif, karena tokohnya tidak jelas disebutkan dan isi ceritanya belum tentu benar, namun tampaknya si penulis teks ini ingin menyampaikan kontrol sosialnya kepada "calon legislatif" tentang apa yang sering dilakukannya, seperti tidur di hotel bersama sekretarisnya. Bagian yang lucu dari teks ini terletak pada kata *lima*-nya. Di sini terjadi adanya perbedaan persepsi antara sang calon legislatif dan sekretarisnya. Calon legislatif memahami angka *lima* sebagai angka dari tingkat sebuah gedung, karena itu ia takut untuk melompat; sedangkan sang sekretaris memahami angka *lima* dari segi ketakhayulannya, yang tabu itu bukanlah angka *lima*, tapi angka *tigabelas*, karena itu di hotel tidak ada kamar yang bernomor *tigabelas*.

Al-Hufi, kembali lagi, menyebut humor jenis ini dengan istilah *al-la'bu al-ma'ani*, yaitu humor yang terjadi, karena adanya perbedaan persepsi dalam memahami suatu makna kata, *majaz* atau hakiki, denotatif atau konotatif (dalam Lesmana, 2009:47).

Selain itu, Salvatoggunakare Attardo juga mengatakan bahwa humor dapat: (1) meningkatkan kepandaian, karena untuk membuat humor atau memahami humor membutuhkan kepandaian; (2) sarana untuk melakukan komunalitas atau keakraban bagi kaum wanita; (3) sarana untuk melakukan agresi atau

dominasi bagi kaum laki-laki; dan (4) memperbaiki situasi yang tidak menyenangkan (Attardo, 1994). Semua fungsi ini dapat digunakan sebagai alat politik dalam sebuah aktivitas politik. Seperti halnya contoh berikut ini:

*Dosen Politik sedang memberikan kuliah. "Dalam politik ada beberapa tujuan, yaitu: tujuan masyarakat atau public goals; dan tujuan pribadi seseorang atau individual goals. Jadi, politik suatu negara harus mempunyai goals".*

*"Maaf, ralat, Pak!", kata seorang mahasiswa. "Akan lebih relevan, kalau kuliah ini diberikan di Sekolah Tinggi Olah Raga, khususnya bidang studi Sepak Bola" (Sudarmo, 2005:57).*

Pada teks di atas itu, humor tidak berfungsi untuk mengkritik seseorang atau suatu kelompok, tapi untuk meningkatkan kepandaian pembaca, yaitu dengan memberikan pengetahuan bahwa politik itu mempunyai beberapa tujuan. Namun demikian, unsur humornya masih tetap terlihat, meskipun untuk memahami humor ini pembaca harus mempunyai pengetahuan tentang bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, karena efek kelucuannya terletak pada *goals*-nya. Dalam istilah umum, *goal* itu berarti "tujuan", sedangkan dalam istilah olahraga, *goal* itu berarti "gol". Ada dua hal yang menyebabkan bagian ini menjadi lucu, yaitu karena ada perbedaan pemahaman istilah antara Dosen dan Mahasiswa.

Seperti pada contoh sebelumnya, yang oleh Al-Hufi disebut *al-la'bu al-ma'ani*, atau bisa juga masuk dalam jenis *al-hazalaqah*, yaitu humor yang terjadi, karena sikap seseorang yang berlagak pintar atau mempunyai kemampuan yang lebih daripada orang yang lainnya, padahal sebaliknya (dalam Lesmana, 2009:47). Dalam hal ini, si Mahasiswa merasa lebih pintar daripada sang Dosen, padahal sebaliknya.

Humor politik merupakan indikator yang baik untuk melihat situasi dan

sentimen dalam sebuah masyarakat. Namun, humor politik penuh dengan ambiguitas dan penggunaan ironi secara luas. Humor politik yang berupa ironi mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk mengkritik para penindas dan sistem yang digunakannya, untuk menghindari hukuman, untuk membangun solidaritas dengan yang lain, dan untuk merasakan kebebasan (Barbe, 1995:96). Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

*Partai Demokrat Bersama mengadakan evaluasi atas kekalahan mereka dalam pemilihan calon legislatif.*

*"Kita harus memprotes cara-cara mereka yang licik. Mereka menggunakan perempuan nakal untuk merayu pendukung kita dan menguras dompetnya", kata Samuel.*

*"Kau punya cukup bukti?", tanya Ketua Kampanye.*

*"Punya, ayo kita laporkan ke Komisi Pemilihan Umum".*

*"Kalau begitu, Kau lah yang mengurusnya".*

*"Jangan", jawab Samuel dengan lemas. "Karena aku juga terkena rayuan mereka" (Sudarmo, 2005:60).*

Teks di atas dapat dikatakan fiksi, karena pembuat humor tidak menyebut objek yang dituju dengan jelas dan tidak ada dalam realita. Namun untuk mencapai tujuannya, yaitu mengkritik suatu partai tertentu (Partai Demokrat), ia menggunakan nama yang hampir mirip dengan nama sebuah partai (Partai Demokrat Bersama), sehingga menimbulkan sesuatu yang ambigu. Tujuannya adalah agar ia terhindar dari tuduhan mencemarkan nama baik seseorang. Yang membuat humor ini lucu adalah karena ada salah seorang anggota dari sebuah partai, yang mengadakan sebuah kasus pada partainya, tapi ia sendiri terlibat dalam kasus tersebut.

Humor seperti itu oleh Al-Hufi dimasukkan ke dalam kategori *tahakkum asy-syakhsyi bi nafsih*, yaitu karena perbuatan seseorang yang menjadikan dirinya seperti

orang lain (dalam Lesmana, 2009:47). Dalam kasus ini, Samuel menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak terlibat dalam kasus tersebut, sehingga ia mengadukannya kepada Ketua Kampanye dan ingin melaporkannya ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), padahal ia sendiri yang melakukannya.

Humor politik dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah media untuk berinteraksi dalam sistem sosial-politik. Sejumlah fungsi humor menggambarkan pentingnya humor dalam berinteraksi untuk saling mempengaruhi di antara para politisi dan institusi politik.

Ada lima fungsi humor yang berkaitan dengan politik, yaitu: (1) untuk mengekspresikan nilai dan sikap politik seseorang secara tidak langsung; (2) untuk melihat sosok penguasa yang bobrok; (3) untuk mengekspresikan sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir; (4) untuk mengeksplor topik-topik yang tabu; dan (5) untuk mencapai suatu keadilan (Ruch ed., 2007:81).

## **KESIMPULAN**

Banyak alasan yang menyebabkan bahwa orang menganggap humor politik yang ada di Indonesia itu hanya sebagai hiburan. *Pertama*, adalah dari istilah “humor politik” itu sendiri. Dengan diletakkannya kata “humor” di depan, lalu diikuti dengan kata “politik”, menyebabkan orang beranggapan bahwa teks yang dibacanya itu adalah teks humor, sedangkan “politik”-nya hanya dianggap sebagai tambahan. Jadi, humor yang dibacanya itu adalah humor yang bertema politik, bukan humor yang umum.

*Kedua*, adalah istilah “politik”-nya. Apa yang dimaksud dengan kata “politik” dalam istilah “humor politik”? Apakah artinya cerita tentang peristiwa politik, tokoh politik, hal-hal yang bersangkutan dengan politik, atau yang lainnya? Karena, ada cerita humor politik yang di dalamnya hanya menyebut nama tokoh dengan kata

“anggota dewan”, “jenderal”, atau “pengurus partai”, padahal isinya tidak bercerita tentang politik. Ketidakjelasan seperti inilah yang juga menyebabkan orang menganggap bahwa humor politik di Indonesia sebagai hiburan.

*Ketiga*, adalah bentuknya. Humor politik yang ada di Indonesia lebih banyak yang berupa cerita fiksi, yaitu berupa narasi pendek, deskripsi singkat, dan dialog – seperti halnya lelucon, kisah fiktif dari anggota suatu kolektif, seperti suku, bangsa, golongan, dan ras; atau anekdot, kisah fiktif lucu dari seorang tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada – sehingga memberi kesan bahwa peristiwa yang ada dalam cerita-cerita tersebut hanya berupa khayalan belaka. Padahal, banyak cerita politik non-fiksi lucu yang tokoh dan ceritanya benar-benar nyata, sehingga perhatian orang tidak tertuju pada unsur politik yang ada di dalamnya, tapi pada unsur-unsur lain yang menghiburnya.

## **Bibliografi**

- Attardo, Salvatoggunakare. (1994). *Linguistic Theories of Humor*. New York: Mouton de Gruyter.
- Barbe, Katharina. (1995). *Irony in Context*. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.
- Basya'ib, Hamid & Fajar W. Hermawan. (2010). *Ger-geran Bersama Gusdur*. Jakarta: Penerbit Nawas.
- Brewer, Angela. (2007). “Beyond Rocking the Vote: An Analysis of Rhetoric Designed to Motivate Young Voters”. *Unpublished Ph.D. Thesis*. Texas, USA: University of Worth Texas.
- Felicia, N.S. (2009). *Humor Politik Indonesia*. Yogyakarta: Medpress.
- Fildman, Ofer. (2005). *Talking Politic in Japan Today*. United Kingdom: Sussex Academic Press.
- Gilbert, Joanne R. (2004). *Performing Marginality: Humor, Gender, and Culture Critique*. USA: Wayne State University Press.
- Lesmana, Maman. (2009). *Kitab al-Bukhala, Karya Al-Jahiz: Analisis Struktur Teks dan Isi*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (Universitas Indonesia).

- Lesmana, Maman. (2010). *Menelusuri Gaya Humor Abunawas Abad VIII dan Abunawas Abad XX*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (Universitas Indonesia).
- Mitchel, Sturat. (2012). "Political Humor and Conspiracy Theories". Tersedia [online] juga dalam <http://EzineArticles.com/> [diakses di Depok, Jawa Barat, Indonesia: 1 Juli 2013].
- Morrall, John. (1983). *Taking Laughter Seriously*. Albania: SUNY (State University of New York) Press.
- Mulyanto, Dedy. (2007). *Gudang Tertawa: 175 Humor Anak*. Jakarta: Gorga Media.
- Rahardi, Kunjana. (2006). *Dimensi-dimensi Kebahasaan: Aneka Masalah Bahasa Indonesia Terkini*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ruch, Willibald [ed]. (2007). *The Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Sudarmo, Darminto M. (2005). *HOT (Humor Orang Terpelajar)*. Jakarta: Kombat Publisher.
- Suprana, Jaya. (2009). *Naskah-naskah Kompas Jaya Suprana*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Tsakona, Villy & Diana Elena Popa [eds]. (2011). *Studies in Political Humor*. Amsterdam: John Benyamin Publishing.



**Kartun dan Humor Politik di Indonesia**  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 15/1/2014)

Humor politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam bahasa politik. Humor politik bisa berupa lelucon, komedi, satire, atau karikatur yang berisi tentang suatu rezim pemerintahan, sistem dan institusi politik, para politisi atau para pembuat kebijakan. Humor politik kadang-kadang dapat membantu para individu untuk mencurahkan kekecewaan terhadap institusi politik atau para politisi.

AHMAT ADAM

## Pendidikan Sejarah di Malaysia Dewasa ini: Sejauh Manakah ia Relevan kepada Pembinaan Nasion?

**IKHTISAR:** Pendidikan sejarah, bagi negara multi-etnik dan multi-bahasa seperti di Malaysia, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena ia bisa dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan semangat “esprit de corp” atau rasa persatuan antara sesama warga negara. Sementara itu, pendidikan sejarah di Malaysia menempuh era baru apabila mata pelajaran sejarah dijadikan subjek wajib lulus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk ujian SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) menjelang akhir tahun 2013. Tetapi untuk pelaksanaan yang bijak, rencana pengajaran sejarah di sekolah-sekolah harus membereskan beberapa masalah, seperti perancangan kurikulum yang semrawut, isi silabus dan materi buku pelajaran yang tidak seimbang, serta pendekatan yang membawa persepsi bahwa sejarah Malaysia tidak inklusif untuk semua suku. Ikut dibicarakan adalah langkah-langkah yang harus diambil agar pengajaran sejarah di sekolah berdasarkan prinsip dan metode sejarah yang menekankan objektivitas dan pencarian kebenaran. Makalah berikut ini membicarakan isu-isu pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dan coba membahas persoalan-persoalan pendidikan sejarah serta memberikan saran-saran untuk mencari jalan keluar dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah tersebut demi peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian sejarah.

**KATA KUNCI:** Pendidikan sejarah, negara-bangsa Malaysia, guru, siswa, dan kurikulum, serta objektivitas dalam sejarah.

**ABSTRACT:** This article entitled “History Education in Malaysia Today: Which Far it Relevant to Development of the Nation?”. History education, for a multi-ethnic and multi-language country such as in Malaysia, require special attention from the government because it can be used as a means to instill the spirit of “esprit de corp” or a sense of unity among the citizens. Beside, education in Malaysia has now reached a new turn when passing the history subject is made compulsory for all secondary school students sitting for the School Certificate Examinations. This requirement which was first implemented for candidates who sat for the said examinations towards the end of 2013, however, means that a review of the history curriculum and syllabus is needed in order to ensure that the bureaucrats involved in the drafting of a new curriculum and syllabus understand the proper notion of the historical method and the correct understanding of historical concepts such as objectivity and the search for truth. Also needed is the conscious effort at ensuring the writing of school textbooks are free from bias and ideological propaganda in order to demonstrate inclusiveness for all Malaysians. The following article attempts to demonstrate the weaknesses inherent in the present state of affairs in regard to history teaching in secondary schools and to propose certain steps in order to promote a better understanding of the concept of historical inquiry and enhance the quality of history teaching in schools.

**KEY WORD:** History education, nation-state of Malaysia, teachers, students, and curriculum, and objectivity in history.

### PENDAHULUAN

Tema yang berjudul “pelestarian pemikiran dalam pendidikan sejarah” yang diusung dalam seminar ini

sangat menarik, tetapi ia seolah-olah satu anomali karena tujuan untuk melestarikan pengajaran sejarah telah juga diumumkan oleh Wakil Perdana

**Profesor Emeritus Dr. Ahmat Adam** ialah seorang ilmuwan dan sejarawan independen dari Malaysia, yang pakar tentang sejarah pers di Indonesia. Banyak melakukan penelitian dan menulis buku, diantaranya adalah *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan* (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 2003). Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: [ahmatadam41@gmail.com](mailto:ahmatadam41@gmail.com)

Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sejak tanggal 23 Oktober 2010 yang lalu (dalam Abdullah Sani, 2010).

Rakyat Malaysia juga sudah maklum bahwa mata pelajaran Sejarah memang menjadi subjek wajib lulus dalam ujian SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) mulai akhir tahun 2013.

Betapapun demikian, saya kira, diskusi dan pertukaran pikiran yang dihasilkan oleh seminar ini tentu saja akan menjadi menarik lantaran usaha Kementerian Pendidikan Malaysia itu sesungguhnya dianggap bermakna, mengingat ilmu sejarah memang sangat penting bagi membantu proses pembinaan negara berbangsa tunggal (*nation-state*). Malahan pada tahun 2012, di Inggris (*United Kingdom*), juga di Parlemen Inggris, turut dibicarakan secara serius dan banyak orang yang mendukung agar mata pelajaran sejarah wajib diajarkan di semua sekolah di Inggris (*Britain*).

Barangkali tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sejarah sebagai satu mata pelajaran hanya diperkenalkan kepada masyarakat umum di Tanah Melayu,<sup>1</sup> untuk pertama kalinya pada tahun 1918, ketika ia dimasukkan sebagai satu mata kuliah dalam program latihan guru oleh R.O. Winstedt, setelah beliau dilantik dan menjabat sebagai Asisten Direktur Pendidikan di Negeri-negeri Selat (*Straits Settlements*) dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (*Federated Malay States*) pada tahun 1916.

Buku-buku pelajaran yang digunakan, antara lain, adalah *Sulalatu's-Salatin (Sejarah Melayu)*, *Hikayat Hang Tuah*, dan *Hikayat Abdullah*. Pada tahun 1918, R.O. Winstedt juga, bersama-sama dengan Daeng Abdul Hamid bin Tengku Muhammad Salleh, telah menghasilkan buku sejarah yang pertama dalam bahasa Melayu, dan diberi judul *Kitab*

*Tawarikh Melayu*. Buku ini juga, kemudian, menjadi buku pelajaran untuk *maktab* (lembaga atau sekolah) keguruan.

Menurut Za'aba (Zainal Abidin bin Ahmad), seorang pemikir, ahli bahasa, dan pengarang terkenal pada zaman sebelum Perang Dunia II (1939-1945), inilah karya sejarah orang Melayu yang pertama, dengan menggunakan istilah dan konsep sejarah yang benar, yang berbeda dari legenda. Pada tahun 1922, ketika lembaga keguruan di Melaka dan Matang, Perak, digabungkan menjadi SITC (*Sultan Idris Training College*), mata pelajaran sejarah tetap menjadi salah satu subjek yang diprioritaskan.

Pada tahun 1925, salah seorang tamatan perguruan SITC, yaitu *Cikgu*<sup>2</sup> Abdul Hadi bin Haji Hasan, yang berasal dari Melaka, telah menghasilkan buku yang berjudul *Sejarah Alam Melayu*, yang segera menjadi buku pelajaran utama untuk pendidikan sejarah pada masa itu. Buku ini paling terkenal pada zaman sebelum Perang Dunia II karena waktu jilid pertamanya mula-mula terbit dalam tahun 1925 di Singapura, sambutan dari kalangan mereka yang belajar di sekolah Melayu, terutamanya guru-guru dan para siswa yang mengikuti latihan keguruan sekolah Melayu, sangatlah antusias atau memberangsangkan.

Bahkan, guru-guru yang dilatih di Institut Keguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak, Malaysia pada zaman sebelum Perang dan tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, menganggap *Cikgu* Abdul Hadi bin Haji Hasan lah sejarawan yang telah berjasa dari segi menggerakkan perasaan kebangsaan Melayu melalui karyanya yang sempat diterbitkan dalam tiga jilid. Barangkali efek yang ditimbulkan oleh karya *Cikgu* Abdul Hadi bin Haji Hasan inilah yang telah memberi dorongan pula kepada *Cikgu* Buyong Adil untuk

<sup>1</sup>Sebelum tahun 1963, sebutan untuk Malaysia adalah Semenanjung Tanah Melayu atau Malaya.

<sup>2</sup>*Cikgu* adalah sebutan atau gelar untuk guru sekolah di Malaysia; sama dengan *Pak Guru* atau *Bu Guru* kalau di Indonesia.

menulis jilid keempat dan kelima *Sejarah Alam Melayu* itu.

### SEJARAH SEBAGAI PENGEMBLENG IDENTITAS

Semangat kebangsaan yang ditanamkan dan disemaikan oleh buku-buku zaman sebelum Malaya merdeka (1957) jelas memperlihatkan betapa kesadaran kebangsaan dari golongan intelegensia Melayu itu lahir justru karena mata pelajaran sejarah yang telah membuat mereka mengenali diri dan masyarakatnya. Sesungguhnya, setiap bangsa ataupun individu mempunyai ingatan pengalaman masing-masing. Lewat ingatan sejarah lah bangsa atau individu itu bisa mengenali dirinya dan lingkungan sekitar, dunia yang didiaminya. Hanya setelah mengetahui sejarah lingkungan sekitar dan dunia di sekelilingnya, barulah bangsa atau individu itu dapat mengadaptasikan dirinya dan bertindak dengan bijak agar menjadi mudah dengan kondisi lingkungan di sekitarnya itu.

Sebagai contoh, dalam sebuah masyarakat plural seperti di Malaysia, komunitas NON-PRI (Non-Pribumi atau Non-Bumiputra) akan lebih gampang mengerti dan selanjutnya menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya setempat setelah memahami sejarah negara ini. Justru, karena sejarah itu adalah memori atau gumpalan pengalaman masa lalu kepada sesuatu bangsa, maka pengalaman atau memori itu adalah merupakan sejarah yang diwarisi bersama-sama oleh rakyat negara itu. Dengan kata lain, tidak dapat dipungkiri bahawa sejarah adalah peringatan pada pengalaman berkelompok sesuatu bangsa.

Persoalan identitas adalah isu dan masalah besar dalam psikologi pembinaan *nasion* atau negara-bangsa. Justru, sejarah itu penting karena tanpa sejarah yang sah dan benar, maka sebuah bangsa tidak mungkin bisa membangun. Setiap warga *nasion*

Malaysia tentulah diharap dapat memahami realitas dan mengerti hakikat bahwa lantaran proses sejarah negara inilah maka lahirnya bangsa, negara, dan agama yang bersifat pluralistik. Seyogianya juga dipahami, justru karena pengalaman sejarah jugalah, maka sesuatu bangsa itu ingin bertindak atau berbuat sesuatu. Sebagai contoh, negara Malaysia pernah mengalami peristiwa permusuhan antar-ras, khususnya antara orang Melayu dan Cina – bukan saja pada periode setelah berakhirnya Perang Dunia II, setelah tentara Jepang menyerah kalah kepada tentara Sekutu pada 15 Agustus 1945, tetapi juga, yang agak lebih serius lagi, adalah ketika terjadi kerusuhan rasial yang dikenali sebagai “Peristiwa 13 Mei 1969”.

Demi untuk menghindari berulangnya konflik antar suku dan ras inilah maka pengertian budaya inter-etnik itu amat perlu diperkuat dan dilestarikan – dan apalagi wadah yang lebih baik dan ampuh jika bukan lewat pembelajaran Sejarah Tanah Air – yang memang bisa menanamkan semangat saling memahami dan menghormati perbedaan tradisi dalam warisan kebudayaan yang beraneka-ragam.

Dengan mengakui hakikat dan realitas bahwa *nasion* Malaysia adalah bersifat pluralistik, yang memiliki banyak ciri-ciri kepelbagaian (diversitas), maka tidaklah heran jika pihak-pihak yang peduli dan prihatin terhadap kenyamanan dan kesentosaan hidup bernegara dan bermasyarakat di Malaysia ini mengharap bahwa lewat pendidikan sejarahlah dapat dipupuk dan dilestarikan keharmonisan dan kesejahteraan antar-ras dalam *nasion* Malaysia.

Semua pihak yang peduli dan prihatin tentu menyadari bahwa rakyat sebuah negara pluralistik, yang tidak mengetahui sejarahnya, akan melahirkan rasa cemburu, tidak percaya, dan sikap prasangka yang pada akhirnya mempertajam rasa

tidak aman (*insecurity*) yang bisa membawa kepada konflik antar-ras. Gejala ini dapat kita lihat jika kita sering mengikuti ekspresi rasa gelisah, kecewa, dan tidak puas hati dalam media internet yang menjurus kadangkala kepada celaan yang menghina dan menista satu suku atau ras, kendatipun semuanya mengakui bahwa Malaysia adalah negara kesayangan masing-masing.

Berdasarkan ekspresi kecewa, sakit hati, yang berbaur dengan perasaan hasad dan dengki, serta polemik-polemik yang bersifat rasial itu ditonjolkan dewasa ini, baik dalam media cetak seperti surat kabar maupun dalam “dunia maya” seperti media sosial di internet, maka rakyat yang membaca bisa dengan mudah menanggapi betapa rapuhnya dan kurang padunya bangunan (fabrik) masyarakat multi-rasial yang dijalin sejak kemerdekaan ini. Melalui gejala-gejala yang kita saksikan ini dapat ditarik kesimpulan dan dirumuskan bahwa apa yang sedang terjadi dalam negara Malaysia sekarang adalah rakyat pelbagai suku di negara ini sedang menghadapi krisis identitas.

Perselisihan dan perpecahan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang semakin mengkhawatirkan ini membuat setiap warga Malaysia prihatin dan menyadari bahwa upaya memugar, memupuk, dan melestarikan suatu *sense of identity* nasional, atau *deria* jati diri kebangsaan, tidak bisa dianggap ringan dan perlu disegerakan. Dan ini, tentunya, membawa makna bahwa upaya mendidik rakyat agar memahami Sejarah Tanah Air harus diberi perhatian utama.

Seperti semua orang memaklumi bahwa Malaysia adalah sebuah *nasion* yang masih muda. Sebagai sebuah negara yang sarat dengan sifat-sifat ke-*bhinneka*-an, baik dari segi etnisitas, kebudayaan, agama, bahasa, maupun pengalaman sejarahnya,

maka usaha untuk menelusuri sejarah silam Malaysia lewat pembelajaran, pengajaran, dan penelitian tentulah sangat bermanfaat dan penting bagi mengolah dan mengukuhkan roh kebangsaan *nasion* ini demi untuk menolong proses pembinaannya. Betapa pun demikian, di balik sambutan positif dari kalangan para pendidik dan pengamat sejarah pembinaan *nasion* Malaysia modern, perasaan curiga, kurang percaya, dan sinis juga diekspresikan oleh sebagian masyarakat yang *literate* dan peka sejarah.

Berdasarkan suara-suara yang diungkapkan di dalam media (khususnya media internet di dunia maya), kaum intelegensia yang sadar politik kelihatannya sangat prihatin dan bahkan menaruh keraguan dan kekhawatiran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kualitas isi, materi, dan pendekatan pengajaran ilmu sejarah di sekolah-sekolah dewasa ini – khususnya dari segi menjadikan sejarah sebagai alat untuk menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi baru Malaysia. Masalah yang muncul adalah apakah sejarah harus menjadi alat propaganda?

### **SITUASI PENGAJARAN SEJARAH YANG KALUT**

Walaupun niat dan tekad pemerintah mungkin benar-benar ingin menjadikan pendidikan sejarah sebagai sarana pembinaan bangsa, tetapi dengan menekankan bahwa misi pengajarannya adalah untuk melahirkan generasi yang patriotik, para sejarawan yang jujur pun rata-rata menganggap bahwa paksaan yang bersifat ideologis adalah bertentangan dengan filsafat ilmu sejarah dan ilmu pendidikan itu sendiri. Keraguan ini semakin kuat dan dipengaruhi oleh fakta bahawa pengajaran sejarah di sekolah dewasa ini adalah dalam keadaan tidak karuan dan penuh dengan kekalutan – sekurang-kurangnya dari segi kerangka konseptualnya.

Situasi kalut dan kacau ini, pada hemat saya, terjadi justru karena betapa kurang dalamnya konsep sejarah itu dimengerti oleh mereka yang menyusun, merangka, dan mendesain kurikulum dan silabus ilmu sejarah itu. Penyediaan buku-buku pelajaran untuk mata pelajaran sejarah ini juga dibatasi dan dikungkung oleh syarat-syarat yang bersifat ideologis dan cara berfikir yang masih kolot, yang jelas terbelenggu oleh kedaifan dan absurditas dalam memahami arti sejarah dan filsafat yang tersirat di dalamnya.

Walaupun ramai yang mengkritik isi, materi, dan orientasi buku-buku pelajaran sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah menengah dewasa ini akan menyalahkan para pengarang buku pelajaran tersebut, tetapi kenyataan dan hakikat yang sebenarnya adalah tidak adil menyalahkan para pengarangnya secara total, karena mereka hanyalah menuruti arahan dan mengikuti petunjuk “dasar” (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Biro Buku Pelajaran, yang mewakili bagian kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan penting, sekaligus pernyataan, terkait dengan masalah tersebut.

**Pertama, mengapa misi menanamkan patriotisme itu bertentangan dengan filsafat sejarah?** Sejarah, menurut definisi asalnya, berarti *inquiry* atau penelitian, siasatan; makna selanjutnya adalah “ilmu pengetahuan yang diperoleh akibat dari hasil *inquiry* itu”. Sejak Herodotus, 484-425 SM (Sebelum Masehi), mula memperkenalkan istilah Yunani, *historia*, lebih dua ribu tahun yang lalu, arti sejarah itu pada akhirnya mencakup ruang ilmu yang mengandung makna riwayat kejadian-kejadian yang memberi kesan dan pengaruh kepada sebagian besar manusia, baik ianya dalam bentuk tertulis maupun yang terekam secara lisan.

Tugas sejarawan adalah untuk menyampaikan dan menginformasikan kisah kejadian-kejadian yang diselidikinya itu. Sejarawan seharusnya memberikan informasi yang akurat mengenai apa yang telah terjadi. Sasaran dan target sejarawan ialah akurasi pada suatu kejadian; dan untuk mencari kebenaran sesuatu peristiwa itu, sejarawan menggunakan metode yang khusus.

Dalam usaha untuk memberikan penjelasan yang akurat, sejarawan akan memanfaatkan narasi yang diberikan oleh orang lain, apakah yang berbentuk lisan oleh saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu terjadi atau dokumen kontemporer yang mungkin juga berdasarkan kepada penceritaan secara lisan. Tetapi tidak semestinya semua narasi itu diperlakukan secara objektif, atau tanpa bersikap bias, atau berat sebelah. Justru, adalah tugas utama seorang sejarawan untuk tidak, secara sadar, memberikan gambaran atau deskripsi sesuatu peristiwa itu dengan purbasangka atau kecurigaan.

Menurut pemikir ulung Islam, Ibn Khaldun (1332-1406), pendefinisian atau pentakrifan inti sejarah adalah melibatkan spekulasi dan percobaan mencari kebenaran, menjelaskan secara halus dan tidak ketara tentang sebab-musabab dan asal-usul benda-benda yang telah ada, serta memelihara pengetahuan yang dalam mengenai bagaimana dan mengapa terjadinya sesuatu peristiwa (dalam Rosenthal, 1958, I:6).

Dalam konteks pernyataan Ibn Khaldun tersebut di atas, bisa kita andaikan bahwa jika berlaku sikap tidak jujur terhadap filsafat sejarah oleh sang perancang dan perencana kurikulum, maka kemungkinan besar efeknya ialah sejarah yang diajarkan akan menjadi tidak akurat, tidak dapat menghindarkan diri dari distorsi, dan bahkan lebih menjurus kepada propaganda. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Khaldun,

sejarah semestinya berusaha untuk mencari kebenaran. Dan menurut sejarahwan abad ke-14 dan 15 ini lagi, pembengkakan dan penyerongan dalam penafsiran sejarah bisa terjadi lantaran pelibatan orang dalam disiplin keilmuan itu telah diambil-alih oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kewibawaan dalam ilmu itu (dalam Rosenthal, 1958, I:6-10).

Hal inilah yang dikhawatirkan telah terjadi dalam perencanaan dan perancangan kurikulum mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Niat dan tekad untuk menjadikan sejarah sebagai sarana untuk mengindoktrinasi semangat patriotik kepada generasi baru Malaysia telah mengorbankan prinsip ilmu dan filsafat sejarah, mengelakkan ia dari sekedar menjadi alat propaganda. Istilah *propaganda* merujuk kepada ikhtiar untuk menyampaikan informasi atau maklumat dalam bentuk yang bias (serong), yang bersifat mengelirukan, dan digunakan untuk mendukung suatu tujuan politik atau sudut pandangan tertentu.

**Kedua, pengajaran sejarah, apanya yang kurang?** Pengajaran sejarah yang biasa dan lumrah adalah berdasarkan kepada tiga komponen, yaitu: (1) Naratif yang bersifat kronologis; (2) Kerangka konseptual; dan (3) Strategi berpikir.<sup>3</sup>

Mengenai komponen “naratif yang bersifat kronologis” ini telah pun diberi penekanan dan keutamaan dalam kurikulum sejarah dewasa ini. Tetapi naratif kronologis seperti yang terdapat sekarang ini tidak digabungkan dengan “kerangka konseptual”, yang

merupakan komponen utama kedua dalam pengajaran sejarah. Mungkin dalam pikiran mereka yang merancang dan menyusun kurikulum sejarah dan mereka yang menentukan apa yang harus terkandung dalam buku pelajaran, menurut mereka, kerangka konseptual itu tidak sepenting naratif kronologis. Mereka tidak sadar bahwa kerangka konseptual itu bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman menyeluruh dengan menunjukkan kepada peserta didik (siswa) beberapa tema yang bisa memperlihatkan faktor-faktor seperti kepelbagaian (diversitas), perubahan, kegiatan ekonomi, teknologi, dan filsafat.<sup>4</sup>

Tanggapan bahawa sejarah Malaysia bisa dimengerti dengan mudah tanpa melihatnya dalam konteks perkembangan peradaban (tamadun) di kepulauan Melayu, misalnya, menyebabkan periode yang membicarakan perkara *polity*<sup>5</sup> orang Melayu, yang akhirnya membawa kepada perwujudan tata-negara Malaysia modern sekarang ini, hanya dipaparkan secara kronologis. Padahal, konsep-konsep seperti “kerajaan”, “hubungan raja dengan rakyat”, “masyarakat berhierarki”, dan “sistem feodal Melayu” memerlukan penjelasan dan penguraian lebih lanjut. Bahkan, “kuasa raja” itu sendiri pun sangat perlu dijelaskan, termasuk “sistem hamba”, konsep “kerah”, serta konsep “setia” dan “durhaka”, begitu juga dengan “sumber hasil dan ekonomi perdagangan yang melibatkan kerajaan” (Shuhaimi *et al.*, 2010).

Demikian juga ketika para perencana dan perancang kurikulum mengandaikan bahwa “nasionalisme Melayu” itu muncul secara tiba-

<sup>3</sup>Pembicaraan dan diskusi mengenai tiga komponen utama, yang membentuk apa yang disebut sebagai *body of historical knowledge* untuk pengajaran sejarah, dapat dikunjungi lewat website: [www.studentsfriend.com](http://www.studentsfriend.com) [diakses di Kajang, Malaysia: 12/8/2013], yang diselenggarakan dan dieditori oleh Michael G. Maxwell. Lihat juga, misalnya, artikel yang berjudul “What to Teach: An Overview” dalam [www.studentsfriend.com](http://www.studentsfriend.com) [diakses di Kajang, Malaysia: 12/8/2013]; dan Peter Stearns, “Why Study History?”, tersedia [online] juga dalam [www.studentsfriend.com](http://www.studentsfriend.com) [diakses di Kajang, Malaysia: 12/8/2013].

<sup>4</sup>Lihat, misalnya, artikel “Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5” dalam [Laman Web Rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia](http://LamanWebRasmiBahagianPembangunanKurikulumKementerianPendidikanMalaysia) [diakses di Kajang, Malaysia: 11/8/2013].

<sup>5</sup>*Polity* adalah tatanan masyarakat atau “pemerintah” sebagai entitas politik.

tiba hanya karena adanya gagasan *Malayan Union* yang diperkenalkan oleh pihak penjajah Inggris, tanpa memperhitungkan persekitaran politik, ekonomi, dan sosial di wilayah-wilayah yang dewasa ini terangkum dalam negara federasi (persekutuan) Malaysia, yang menjadi latar belakang pertumbuhan nasionalisme itu (di samping adanya pengaruh luar), maka ia akan mengabaikan dan menafikan peserta didik (siswa) peluang untuk berpikir secara kritis dengan membuat perbandingan dan mengaplikasikan teori sebab-musabab dalam sejarah.

Justru karena kurang mengerti disiplin ilmu sejarah itu jugalah, barangkali, yang menyebabkan tidak dinyatakan secara eksplisit betapa pertumbuhan “nasionalisme Melayu” itu juga dilatarbelakangi oleh gerakan kesadaran politik orang Cina yang lebih dulu lahir, ketika gerakan *Kuomintang* (1912-1949) dan Partai Komunis Malaya (1930-1989) tampil bersaing dengan sengit pada tahun 1930-an untuk meraih dukungan orang Cina – walaupun kiblat politiknya adalah ke daratan dan tanah besar Cina serta perjuangannya jelas bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi orang Melayu.

Juga yang tidak dilihat adalah bahwa pertumbuhan “nasionalisme Melayu” itu sendiri terjadi dalam konteks pengaruh gerakan radikal dari nasionalisme Indonesia dan peranan ide-ide pemikiran dari Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka di Indonesia, yang dikutip oleh Ibrahim Haji Yaacob di Malaysia (Adam, 2013). Dari segi sejarah politik di Tanah Melayu juga, tahun-tahun 1920-an dan 1930-an adalah periode yang memperlihatkan upaya masyarakat Cina untuk mempertahankan kebebasan mereka dalam berpolitik, kendatipun dikekang dan dihalang oleh Inggris, serta upaya mereka untuk menegakkan sistem pendidikan “vernacular” (bersifat kedaerahan berdasarkan etnis) mereka, yang secara

historis menandakan bermulanya permasalahan *nation-building* yang berlaku selepas kemerdekaan negara ini.

Agak kurang juga diberikan perhatian ialah menjawab pertanyaan mengapa kemunculan konsep koalisi politik pertama antar-etnik, yaitu AMCJA-PUTERA (*All Malaya Council of Joint Action – Pusat Tenaga Rakyat*),<sup>6</sup> yang bersifat anti-kolonial dan melibatkan orang Melayu, Cina, India dan *Serani* (Indo) itu berakhir dengan kegagalan. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan sejarah pembinaan *nasion* Malaysia itu dipersepsikan oleh sebagian kalangan dan berbagai pihak sebagai sejarah yang kurang bersifat inklusif.<sup>7</sup>

Barangkali, lantaran kurangnya perhatian diberikan kepada komponen “kerangka konseptual” inilah, yang menyebabkan pengajaran sejarah kurang menarik dan para siswa di SMA (Sekolah Menengah Atas)<sup>8</sup> Tingkatan atau Kelas IV dan V – bahkan di SMA Tingkatan atau Kelas VI pun – sukar memahami Sejarah Tanah Air; dan konsekuensi dari semua ini, menyebabkan siswa tidak dilatih untuk memberi pertimbangan, mengikuti jalan

<sup>6</sup>*All Malaya Council of Joint Action* artinya Dewan Aksi Bersama Seluruh Malaya.

<sup>7</sup>Lihat, misalnya, artikel yang berjudul “Malaysian History Textbooks: Whose History?” dalam [dbctan.blogspot.com/2011/01/malaysian-history-textbooks-whose.html](http://dbctan.blogspot.com/2011/01/malaysian-history-textbooks-whose.html), Sabtu, 8 Januari 2011 [diakses di Kajang, Malaysia: 10/8/2013].

<sup>8</sup>SMA di Malaysia berbeda dengan Sekolah Menengah di Indonesia yang, di Indonesia, membagikan pendidikan menengahnya kepada SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). SMA Tingkatan IV di Malaysia adalah setara dengan Kelas I SMA di Indonesia, atau sekarang Kelas X SMA di Indonesia, mengingat Kelas I dan VI adalah untuk SD (Sekolah Dasar), Kelas VII hingga IX adalah untuk SMP, dan Kelas X hingga XII adalah untuk SMA di Indonesia. Di Malaysia, Sekolah Menengah Rendah dimulai dari Tingkatan I hingga III, dan SMA dimulai dari Tingkatan IV hingga VI. Pada tahapan Tingkatan V, para siswa SMA di Malaysia bisa mengambil ujian SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), atau UN (Ujian Nasional) di Indonesia, yang membolehkan seorang siswa memasuki PT (Perguruan Tinggi) di Malaysia. Tetapi setelah Tingkatan V, seorang siswa juga bisa, jika memenuhi syarat-syarat, memilih untuk ke Tingkatan VI Rendah dan kemudian Tingkatan VI Atas, sebelum ke universitas.

pikiran yang tajam, dan menganalisis suatu kejadian dalam sejarah.

Keterampilan berpikir dan menganalisis sebetulnya juga berkaitan erat dengan “strategi berpikir” yang disebut sebagai komponen utama yang ketiga dalam pengajaran sejarah. Strategi berpikir adalah praktek mengaplikasikan pengetahuan sejarah dan juga bertujuan untuk melatih siswa memanfaatkan sumber sejarah dan mengenali proses sejarah, sesuai dengan tujuan membangkitkan minat pada siasatan, penyelidikan, dan penelitian sejarah (*historical inquiry*).

Kemampuan peserta didik (siswa) dalam memahami beberapa konsep yang disebutkan di atas, termasuk konsep “raja konstitusional”, “demokrasi parlementer”, “pemilihan umum”, “hak rakyat dan hak asasi manusia”, serta “globalisasi” merupakan beberapa strategi berfikir yang diharapkan bisa melatih siswa yang belajar sejarah untuk berfikir secara objektif, dengan melihat sesuatu gejala itu bukan dengan pandangan yang sempit, tetapi melihatnya dalam konteks keterkaitan dengan dunia luar dan peradaban bangsa lain (tamadun asing). Pengabaian komponen “strategi berfikir” ini akan menyebabkan salah satu daripada tujuan atau kebaikan belajar sejarah itu tidak tercapai.

*Ketiga, sasaran pengajaran sejarah.* Sejarah adalah sumber inspirasi bagi manusia dalam melahirkan gagasan, pikiran, atau ide untuk memperbaiki keadaan masa kini dan masa yang akan datang. Peranan sejarah adalah untuk mengeksplorasi, atau menerokai, ranah masa lalu demi mencerahkan pemahaman tentang masa kini dan masa depan. Oleh karena ilmu sejarah itu merupakan memori kolektif bagi sebuah *nasion*, maka amatlah penting pengajarannya menuju kepada tujuan untuk memupuk kesejahteraan *nasion* yang sedang dibina. Demi mencapai sasaran ini, narasi sejarah negara seharusnya

meliputi ranah waktu yang lebih luas, yang dapat menjelaskan asal-usul negara ini dan dapat menjelaskan pula mengapa keadaan semasa demikian bentuk dan rupanya.

Berbicara tentang ranah waktu, atau ruang masa, ia sebenarnya melibatkan soal periodisasi. Dengan mengabaikan jangka waktu sejarah Malaysia yang lebih panjang daripada apa yang ditekankan dalam pengajaran di sekolah, mereka yang sadar dan melek sejarah melihat betapa terpasungnyanya pandangan sejarah yang tidak logis, yang menganggap “semuanya bermula dengan Melaka”. Apakah ada motif tertentu untuk menyatakan bahawa sejarah *polity* Melayu itu hanya bermula dari zaman kesultanan Melaka Islam, yang hanya berusia sekitar 111 tahun? Pengabaian ranah waktu yang lebih panjang, yang menunjukkan peradaban orang Melayu pernah pada suatu waktu tidak bersendikan Islam, saya pikir, adalah sebuah pembengkokan dan distorsi sejarah.

Juga, usaha untuk menyembunyikan fakta bahawa bangsa Melayu pernah menganut agama Buddha dan agama sinkretik Hindu-Buddha selama hampir seribu tahun sebelum masuknya Islam ke wilayah kepulauan Melayu, dan bahwa sebagian dari *psyche* Melayu itu sebenarnya adalah warisan dari nilai-nilai zaman pra-Islam (seperti yang terjelma dalam konsep “budi”, “seni”, dan “etos” golongan rumpun Melayu), telah menyebabkan masyarakat Malaysia hari ini tidak dapat memahami mengapa nilai Melayu yang diwarnai oleh tiga aliran agama besar dunia (termasuk Islam) sangat berbeda dengan nilai orang Cina yang diwarnai oleh sistem kepercayaan yang berpegang pada Taoisme, pemujaan roh nenek-moyang, dan Konfusianisme.

Usaha menyembunyikan kenyataan bahwa raja yang bergelar Parameswara, ketika membuka Melaka, adalah beragama Buddha yang berbaur Hinduisme sinkretik, dan kegagalan

mengaitkan kemunculan kerajaan Melaka sebagai penerus *polity* Melayu yang telah bermula dengan kerajaan Melayu-Jambi dan kerajaan Sriwijaya di Palembang adalah juga suatu kejanggalan dalam pengajaran sejarah, karena pemutarbalikan atau distorsi yang dilakukan telah memperkosa filsafat sejarah yang coba mencari kebenaran, sekalipun elusif sifatnya.

Oleh yang demikian, sikap memberi fokus yang berlebihan kepada kesultanan Melaka demi menunjukkan “keagungan” kerajaan dan budaya Melayu-Islam sehingga zaman Melaka menjadi seolah-olah titik mulanya orang Melayu berbudaya, atau bertamadun, adalah sebetulnya suatu distorsi sejarah. Orang mungkin berfikir bahwa jika sejarah Sriwijaya itu diberikan ruang yang lebih luas, maka ini akan memperkecil niat dan hasrat untuk memberi fokus kepada negara Malaysia. Tetapi konsep “Malaysia” itu bukanlah lahir secara tiba-tiba. *Polity* Melayu yang terpakai di Melaka itu, seperti yang disebutkan tadi, adalah sebetulnya satu mata rantai dalam sejarah peradaban Melayu yang bermula dengan *polity* kerajaan Melayu-Jambi dan kemudian kerajaan Sriwijaya di Palembang (Wolters, 1970).

Bukti keterkaitan sejarah peradaban kuno yang usianya, menurut sumber arkeologi, bermula pada sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi tentulah tidak wajar dikesampingkan. Kita tahu bahwa sejarah Kedah pada abad ke-7 pun tidak dapat dipisahkan daripada sejarah kerajaan Sriwijaya di Palembang; dan kaitan Tanah Melayu dengan Majapahit di Jawa Timur, yang pernah melebarkan wibawa pengaruhnya di negeri-negeri Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Johor, dan bahkan juga wilayah yang disebut di dalam *Nagarakretagama* seperti Paka, Dungun, Muar, Kelang, Jerai, Langkasuka, dan juga Temasik adalah suatu kenyataan, atau hakikat, sejarah (Slametmulyana, 1979:280, *pupuh* xiv).

Kajian prasasti Trengganu (berangka-tahun 1303) juga menunjukkan betapa banyaknya istilah “Jawa kuno” yang dipakai di dalam teks prasasti itu, yang jelas menunjukkan adanya pengaruh Majapahit (Adam, 2014). Pada zaman berikutnya, yakni pada abad ke-17, negeri Kedah, Perak, Pahang, dan Johor pun pernah diduduki dan dikuasai oleh kerajaan Aceh. Mungkin tidak banyak pula orang yang tahu bahawa gelar “Datuk Maharaja Lela”, yang digunakan di Perak, dan peristiwa golongan pembesar Aceh melantik anak raja Perak dan Pahang menjadi Sultan Aceh adalah sebagian dari sejarah Malaysia.

Saya menyebutkan perkara-perkara di atas justru karena saya ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengajaran sejarah Malaysia tidak dapat dipisahkan dari mengkaji pertalian dan keterkaitannya dengan kerajaan-kerajaan di seberang Selat Melaka, terutamanya pulau Sumatera.

Jelaslah sekarang kepada kita bahwa persoalan besar yang dihadapi oleh sejarawan di Malaysia kini adalah masalah “periodisasi” Sejarah Tanah Air. Persoalan ini berkaitan pula dengan kurangnya penelitian tentang sejarah zaman awal negara ini, yang walaupun setidaknya telah dibantu oleh data yang dikemukakan oleh beberapa orang arkeolog, tetapi kurang mendapat dukungan para sejarawan untuk ikut menyumbang dan mencerahkan lagi sejarah awal negara Malaysia melalui penelitian.

Minat untuk menyoroti isi manuskrip lama yang memakai aksara Jawi (Arab) di kalangan sejarawan di Malaysia juga secara relatif agak kurang. Masalah ini berangkali erat kaitannya dengan masalah kurangnya dana untuk para sarjana dalam melakukan penelitian sejarah yang bisa, misalnya, memanfaatkan koleksi manuskrip Jawi di perpustakaan-perpustakaan luar negeri.

Masalah ini pun menjadi bertambah ruwet ketika pengajaran sejarah

dijadikan tujuan untuk propaganda demi menegakkan persepsi sejarah dari orang-orang yang membuat kebijakan dan mereka yang terlibat dalam perancangan kurikulum yang, saya kira, terdiri dari kaum birokrat yang pada hakikatnya bukan sejarawan yang *bona fide* alias bisa dipercaya. Jika penglibatan sepihak ini terus terjadi, tanpa pakar dan sarjana sejarah negara untuk diajak konsultasi, maka berlakulah distorsi atau tindakan memutarbalikkan fakta dan sasaran pendidikan sejarah.

Masalah distorsi sejarah ini tidak lepas dari persoalan ingin menjadikan pengajaran sejarah sebagai sesuatu yang mempunyai arah tujuan yang khusus, seperti untuk menanamkan semangat patriotisme, atau memberi warna citra kebudayaan bangsa Melayu itu, sebagai hanya berdasarkan Islam saja. Seharusnya, yang diutamakan adalah upaya memberikan uraian sejarah secara koheren dengan melihatnya dalam konteks persekitaran, seperti melihat kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi dan membentuk suatu fenomena sejarah. Pendirian seperti ini dibutuhkan agar warga negara tidak selalu berpandangan jumud dan sempit dalam menginterpretasikan sejarah.

Justru karena itulah, apabila kita membicarakan isu nasionalisme maka perbincangan itu tidak bisa dipisahkan dari melihat konteks zaman dan meletakkannya dalam perspektif sejarah yang lebih luas, yang tentunya memerlukan perhatian bukan saja terhadap orang Melayu dan suku-suku lain di negara ini, tetapi juga yang berupa pengaruh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar Tanah Air. Oleh karena itulah, pengajaran peradaban-peradaban dunia harus dilihat dalam konteks hubungan dan efeknya kepada pertumbuhan peradaban di Asia Tenggara yang turut memberi pengaruh kepada peradaban dan budaya masyarakat di Malaysia.

Adalah juga suatu kejanggalan apabila buku pelajaran sejarah di SMA (Sekolah Menengah Atas) Malaysia,<sup>9</sup> Tingkatan IV, tidak memberikan penekanan yang sama berat ketika membicarakan sejarah peradaban-peradaban dunia. Lebih celaka lagi adalah bahwa dengan memasukkan sejarah peradaban-peradaban dunia itu tanpa menimbulkan korelasi dan pengaruh dengan peradaban dan budaya setempat, lantaran ia diberikan secara terpisah-pisah; pengertian sejarah mengenai masyarakat Malaysia juga bisa mengelirukan dan membingungkan siswa.

Walaupun sejarah peradaban Eropah diberikan tempat, tetapi pengajarannya tidak membolehkan siswa menghayatinya lantaran pengintegrasian dengan peradaban dan budaya Asia Tenggara tidak dilakukan. Oleh karena itu, tema-tema penting seperti “Renaissans”, “Reformasi Gereja Protestan”, “Feodalisme Eropah”, “Revolusi Agraria dan Industri di Inggris”, dan juga tema “Revolusi Politik” seperti revolusi Amerika Serikat, Perancis, dan Rusia, serta juga konsep “Kolonialisme” dan beberapa yang lain tidak dapat dijelaskan secara utuh. Bahkan, saya diberitahu oleh guru-guru yang saya wawancarai, bahwa mereka tidak sempat juga menguraikan sejarah peradaban Eropah dengan waktu yang cukup, lantaran silabus untuk SMA Tingkatan IV terlalu luas.

Selain sifat keterasingan bab-bab tentang peradaban itu antara satu sama lain, informasi yang diberikan dalam buku pelajaran sejarah juga kelihatan terlalu rinci, sehingga bahan-bahan yang digarap itu bisa digunakan oleh para mahasiswa di PT (Perguruan Tinggi). Dengan kata lain, materi sejarah yang diberikan itu tidak sepadan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan para siswa di sekolah.

---

<sup>9</sup>Megenai SMA di Malaysia, yang berbeda dengan SMA di Indonesia, lihat kembali catatan kaki nomor 8 dalam artikel ini.

Barangkali sejarah peradaban kuno itu lebih bermanfaat bagi para siswa jika pendekatannya berdasarkan tema, yang melibatkan juga metode, apa yang disebut dengan menggunakan *conceptual framework* atau kerangka konseptual. Barangkali juga pengajaran sejarah peradaban ini akan menjadi lebih efektif jika susunannya berkisar pada tema yang berasaskan konsep-konsep, seperti “pemerintahan”, “ilmu dan teknologi”, “masyarakat dan kebudayaan”, yang diduga berkemungkinan akan membawa pengaruh yang lebih baik dari segi kemampuan siswa dalam memahami asal-usul, perkembangan, dan pencapaian peradaban-peradaban tersebut.

Juga di peringkat SMA Tingkatan IV dan V, pengajaran sejarah negara akan mudah dihayati atau menjadi lebih menarik bagi para siswa Malaysia jika sifat inklusif semua suku, etnis, atau ras dalam proses pembinaan negara bangsa disisipkan. Tema “sejarah pembangunan ekonomi” yang bisa memperlihatkan partisipasi semua suku, etnis, dan ras, misalnya, adalah sangat penting dalam sejarah negara, tetapi sayangnya tema ini pun sedikit sekali diberikan penekanan, kecuali perkembangan ekonomi negara pada zaman Inggris.

Saran-saran di atas, walau bagaimanapun, hanyalah bersifat spekulatif semata-mata, karena pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, menurut informasi, sedang atau mungkin sudah juga selesai merencanakan kurikulum yang baru untuk pengajaran sejarah di sekolah-sekolah.

### **SITUASI PENDIDIKAN SEJARAH MASA KINI**

Menonjolkan terus-menerus, yang diulangi banyak sekali, dalam naratif sejarah Malaysia, ataupun sejarah Islam, di beberapa tahap pembelajaran di sekolah, dan pengisiannya dalam

buku-buku pelajaran yang sarat dengan fakta tetapi tidak terintegrasi dari segi perkaitan ide antara satu dengan yang lainnya, tentu saja menjadikan pembelajaran sejarah membosankan. Sejarah bukanlah semata-mata penceritaan fakta saja, tetapi, lebih daripada itu, ia juga membutuhkan pemahaman yang analitis dan kritis tentang mengapa peristiwa tertentu terjadi. Namun sayangnya, suasana dan keadaan pendidikan masa kini terlalu menekankan pada ujian (peperiksaan) dan hal ini juga menempatkan peserta didik (siswa) dan pendidik (guru) dalam keadaan terpaksa untuk bergantung sepenuhnya kepada buku pelajaran.

Di kalangan para pendidik (guru-guru), mereka merasa seolah-olah harus membanting tulang dan bekerja keras (berhempas-pulas) untuk melengkapi silabus sehingga sistem pembelajaran yang sangat berorientasikan pada ujian (peperiksaan) ini mengikis kepercayaan guru untuk mendidik para siswa agar bisa menghayati Sejarah Tanah Air. Justru karena tidak adanya keseimbangan, baik dari segi isi dan materi buku pelajaran maupun pengintegrasian penjelasan, maka timbul suara-suara yang kini tampaknya semakin lantang menentang beberapa aspek pengajaran sejarah, sehingga hal ini dipersepsikan oleh sebagian golongan dalam masyarakat Malaysia sebagai rasial sifatnya.

Berdasarkan observasi dan tinjauan saya di beberapa *Sekolah Kebangsaan* dan *Sekolah Jenis Kebangsaan*,<sup>10</sup> para guru dan siswa merasakan bahwa informasi yang diberikan dalam buku pelajaran adalah krusial untuk lulus ujian. Justru itu, sikap dan pendirian untuk bergantung sepenuhnya pada buku pelajaran adalah penting karena jawaban dalam ujian yang keluar

<sup>10</sup>*Sekolah Kebangsaan* di Malaysia adalah sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajarnya; sedangkan *Sekolah Jenis Kebangsaan* adalah sekolah yang menggunakan Bahasa Cina (Mandarin) atau Tamil (India) sebagai bahasa pengantarnya.

berasal dari isi buku pelajaran. Walaupun jawaban itu berdasarkan pada fakta sejarah dan argumennya bisa dianggap logis (munasabah), tapi ianya tidak akan diterima oleh penilai ujian (pemeriksa), yang semata-mata hanya berpedoman kepada apa yang terkandung dalam buku pelajaran resmi versi pemerintah saja. Justru karena itulah, guru dan siswa terpaksa bergantung kepada buku pelajaran semata-mata dan kurang berminat untuk membaca lagi untuk mendapatkan pengetahuan tentang sejarah Malaysia dari sumber lain, yang mungkin memberikan interpretasi yang lebih meyakinkan walaupun berbeda dengan isi buku-buku milik pemerintah.

Situasi ini juga memberi isyarat kepada para siswa tentang betapa pentingnya menghafalkan fakta dalam buku pelajaran sejarah. Bagi para siswa dan guru non-Muslim pula, penekanan yang berlebihan kepada sejarah Islam, yang disajikan secara rinci dalam bentuk kronologis tanpa diimbangi dengan kerangka konseptual, juga menyulitkan mereka untuk memahami dan menghayati sejarah peradaban (tamadun) Islam bila dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya. Penekanan pada susunan fakta yang banyak dan kronologis tentang Islam juga menimbulkan persepsi di kalangan para siswa non-Muslim bahwa terdapat ciri-ciri yang bias dan mencurigakan dalam pengajaran sejarah, karena mereka tidak melihat adanya relevansi dan kegunaan dengan sejarah pembinaan *nasion* Malaysia.

**Adakah jalan keluar dari kemelut ini?** Jalan keluar kepada masalah pengajaran sejarah nasional di sekolah-sekolah ialah agar para perancang kebijakan dan perencana kurikulum harus kembali kepada premis asal ilmu sejarah, yaitu menelusuri zaman silam yang telah berlalu dengan tekad untuk mencari kebenaran agar mengerti situasi masa kini Malaysia dan menghadapi tantangan di masa depan

(Cannadine, 2013). Pengajaran sejarah yang efektif dan menyeluruh dari segi menanamkan pemahaman mengenai proses pembinaan negara-bangsa (*nation-state*) akan dengan sendirinya menanamkan satu perasaan bersatu (*sense of belonging*) rakyat dari berbagai suku dan keturunan, dan sekaligus menggembeleng rasa cinta kepada Tanah Air tanpa perlu disuguhkan dengan propaganda terang-terangan lantaran ingin menanamkan semangat patriotisme.

*Sense of belonging*, yang pada gilirannya juga membawa kepada kesetiaan, hanya akan lahir pada diri anak Malaysia apabila generasi yang dididik dan diasuh dengan pengajaran sejarah yang benar dan transparan betul-betul memahami proses pembinaan *nasion* yang dilalui oleh negara. Pengertian yang “benar” ini akan membolehkan dan menjadikan generasi muda itu mampu mengenali diri dan identitas mereka sebagai sebagian daripada *nasion* Malaysia, yang dibentuk melalui proses dengan penuh kepercayaan dan keinsafan.

Untuk melestarikan pengajaran sejarah yang dapat diterima dan disangga dengan kuat oleh semua lapisan masyarakat, perencanaan dan perancangan yang efektif oleh pemerintah dalam memperbaiki prasarana pendidikan sejarah di sekolah perlu juga segera diusahakan. Kekurangan guru-guru yang terlatih dalam disiplin ilmu sejarah hendaklah segera ditangani. Perpustakaan sekolah harus memberi prioritas (tumpuan) kepada usaha memperbanyak koleksi buku-bukunya, termasuk buku-buku dan jurnal-jurnal sejarah, bukan saja yang diterbitkan dalam Bahasa Melayu tetapi juga Bahasa Inggeris. Tindakan ini perlu karena tidak bisa disangkal bahwa peneliti dan penulis sejarah yang menggunakan bahasa Inggeris ternyata telah menghasilkan lebih banyak karya mengenai sejarah Malaysia dan Asia Tenggara.

*Field-trips*, atau karyawisata, ke tempat-tempat bersejarah, selain museum dan situs warisan budaya, amat perlu dianjurkan dan diadakan. Tetapi ini hanya bisa terwujud jika pemerintah sanggup menambah alokasi anggaran (keuangan) di sekolah-sekolah dan jumlah siswa di dalam sebuah kelas pun tidak terlalu banyak. Juga tidak kurang pentingnya adalah ikhtiar mengurangi obsesi untuk terlalu bergantung kepada buku pelajaran, lantaran isi dan materi kurikulum yang terlalu sarat dan berat.

Pengajaran sejarah di lembaga-lembaga keguruan pun perlu direformasi agar kualitas latihan guru ditingkatkan lagi dengan memberi penekanan kepada penggunaan sumber yang berbagai. Ini berarti bahwa calon guru-guru sejarah hendaklah terdiri dari mereka yang gemar membaca dan memiliki kekuatan daya penelitian sejarah (*historical inquiry*) yang tangguh. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa penelitian sejarah Malaysia perlu diberi dukungan kuat oleh universitas dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Antara bentuk dukungan itu ialah dengan menyediakan dana yang mencukupi untuk para sarjana dalam menjalankan penelitian. Akhirnya, terkait dengan soal ini ialah bahwa proses pengajaran dan hasil penelitian di PT (Perguruan Tinggi) sudah barang tentu juga diperlukan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

## KESIMPULAN

Pendidikan sejarah, bagi negara multi-etnik dan multi-bahasa seperti di Malaysia, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena ia bisa dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan semangat *esprit de corp* atau rasa persatuan antara sesama warga negara, justru karena setiap warga akan merasa inklusif dengan pengalaman sejarah yang diwarisi

bersama. Mereka yang merancang kurikulum dan silabus mata pelajaran sejarah harus menyadari bahwa upaya mempelajari sejarah adalah suatu usaha dan percobaan untuk mencari kebenaran.

Disiplin ilmu sejarah berusaha untuk memberikan uraian dan penjelasan yang tak ketara dan nyata tentang sebab-musabab dan asal-usul keadaan dan situasi yang ada. Justru, pengajaran sejarah harus senantiasa peka dan waspada terhadap elemen propaganda yang bersifat ideologis dan harus berusaha menolaknya demi untuk menghindari sikap yang berat sebelah dalam interpretasi sejarah.<sup>11</sup>

## Bibliografi

- Abdullah Sani, Asrul Hadi. (2010). "Muhyiddin Brushes Aside History Textbook Criticisms" dalam [www.malaysiakini.com](http://www.malaysiakini.com), 16 Desember [diakses di Kajang, Malaysia: 12 Agustus 2013].
- Adam, Ahmat. (2013). *Melayu, Nasionalisme Radikal, dan Pembinaan Bangsa*. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].
- Adam, Ahmat. (2014). "Membaca Semula Batu Bersurat Terengganu: Satu Tafsiran Epigrafi". *Hasil Penelitian Belum Diterbitkan*. Kajang, Selangor, Malaysia.
- Artikel "Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5" dalam [Laman Web Rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia](#) [diakses di Kajang, Malaysia: 11 Agustus 2013].

<sup>11</sup>Makalah ini, sebelum diperbaiki dan diterbitkan dalam bentuknya sekarang, merupakan naskah Pidato Utama saya yang disampaikan dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan dan Geografi, yang diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial UMS (Universitas Malaysia Sabah), di Kota Kinabalu, Malaysia, pada tanggal 29 Agustus 2013. Beberapa perubahan dari segi istilah dan catatan kaki telah dibuat untuk penyesuaian dengan bacaan dalam Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Andi Suwirta, Ketua Umum ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) dan juga Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, yang telah ikut menyempurnakan beberapa kalimat dalam makalah ini agar sejalan dengan tata-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun begitu, semua isi dan interpretasi dalam makalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab akademik saya secara pribadi.

**AHMAT ADAM,**

*Pendidikan Sejarah di Malaysia Dewasa ini*

- Artikel "Malaysian History Textbooks: Whose History?" dalam [dbctan.blogspot.com/2011/01/malaysian-history-textbooks-whose.html](http://dbctan.blogspot.com/2011/01/malaysian-history-textbooks-whose.html), Sabtu, 8 Januari 2011 [diakses di Kajang, Malaysia: 10 Agustus 2013].
- Artikel "What to Teach: An Overview" dalam [www.studentsfriend.com](http://www.studentsfriend.com) [diakses di Kajang, Malaysia: 12 Agustus 2013].
- Cannadine, David. (2013). "The Future of History" dalam *The Times Literary Supplement* [13 March].
- Rosenthal, Franz. (1958). *Ibn Khaldun, the Muqaddimah: An Introduction to History*, Vol.I. London: Routledge & Kegan Paul, terjemahan.
- Shuhaimi, Nik Hassan *et al.* (2010). *Sejarah Tingkatan 4*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Slametmulyana. (1979). *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Stearns, Peter. (2013). "Why Study History?". Tersedia [online] juga dalam [www.studentsfriend.com](http://www.studentsfriend.com) [diakses di Kajang, Malaysia: 12 Agustus 2013].
- Wolters, O.W. (1970). *The Fall of Srivijaya in Malay History*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

**INFO-SUSURGALUR-TAINMENT**

Volume 6(2) November 2013

ISSN 1979-0112

# SOSIO HUMANIKA

Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan



Wayang Kulit, Sengkuni  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 15 November 2013)

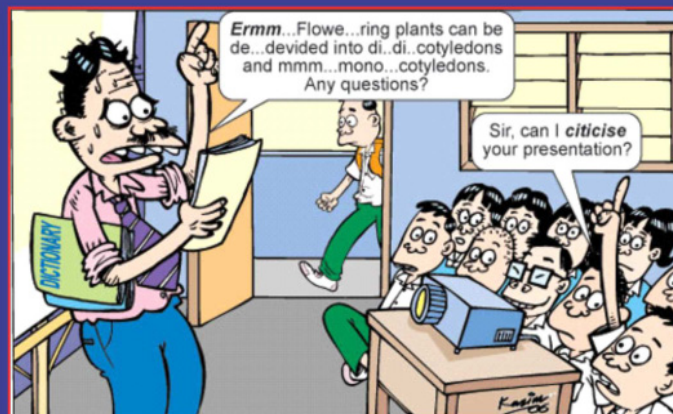
**SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan.** Jurnal ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2008, dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia. Sejak edisi Mei 2009, jurnal *SOSIOHUMANIKA* diterbitkan oleh ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung. Untuk periode 2013-2018, jurnal *SOSIOHUMANIKA* terakreditasi oleh Ditjendikti Kemdikbud RI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Untuk informasi lanjut, silahkan kunjungi website kami di: [www.sosiohumanika-jpssk.com](http://www.sosiohumanika-jpssk.com) dan [www.aspensi.com](http://www.aspensi.com) Alamat e-mail: [sosiohumanika@gmail.com](mailto:sosiohumanika@gmail.com) dan [aspensi@yahoo.com](mailto:aspensi@yahoo.com)

Volume 6, Number 2, February 2014

ISSN 1979-7877

# EDUCARE

International Journal for Educational Studies



"Cartoon of Education"  
Sources: www.google.com, 17/2/2014

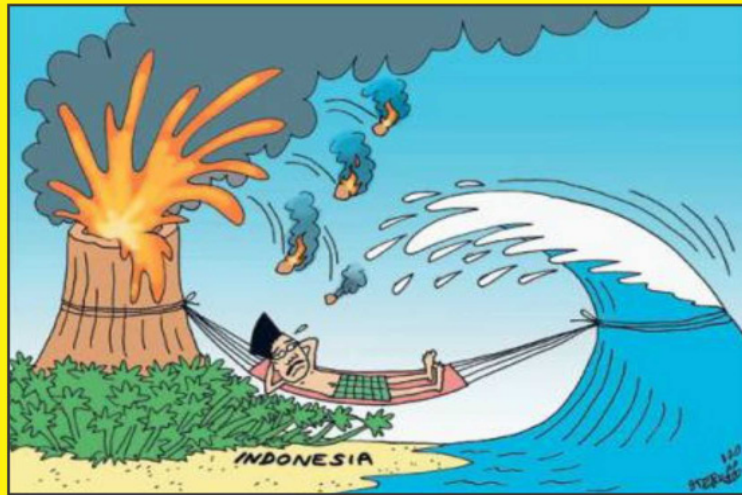
Telah terbit **EDUCARE: International Journal for Educational Studies**. Jurnal ini diterbitkan setiap bulan Agustus dan Februari. Sejak pertama kali terbit, tanggal 17 Agustus 2008, jurnal ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) di Jawa Tengah dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia (ASPENSI) di Bandung. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami di: [www.educare-ijes.com](http://www.educare-ijes.com) dan [www.aspensi.com](http://www.aspensi.com); atau hubungi e-mail kami di: [ijes.educare@gmail.com](mailto:ijes.educare@gmail.com) dan [aspensi@yahoo.com](mailto:aspensi@yahoo.com)

Volume 5, Number 1, October 2013

ISSN 2085-0980

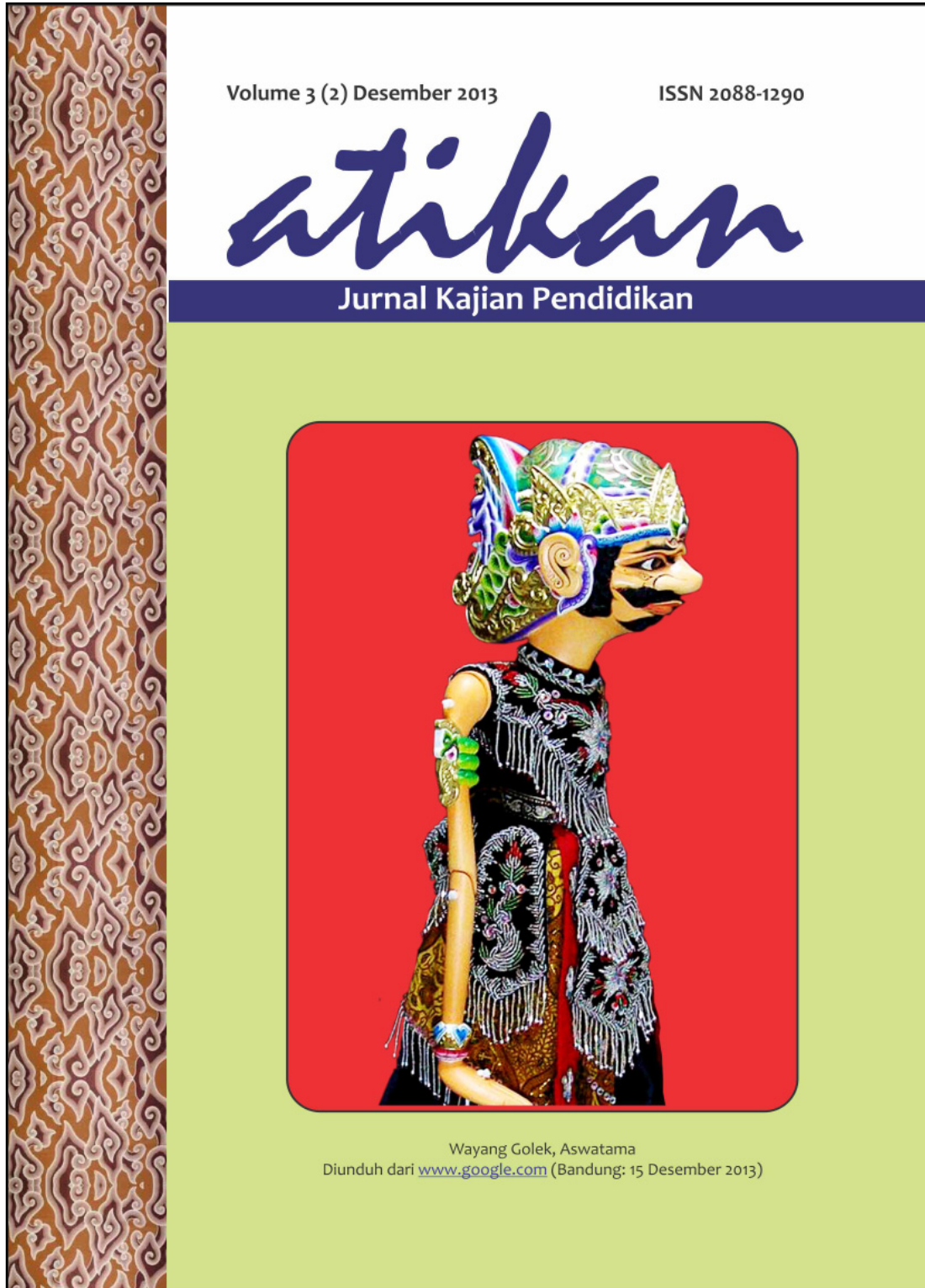
# TAWARIKH

International Journal for Historical Studies



"Cartoon on Disaster in Indonesia"  
(Source: [www.google.com](http://www.google.com), 28 October 2013)

Telah terbit **TAWARIKH: International Journal for Historical Studies**. Jurnal ini diterbitkan sejak tanggal 28 Oktober 2009 dan selalu terbit setiap bulan Oktober dan April. Sejak edisi April 2012, jurnal ini diterbitkan atas kerjasama antara Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UVRI (Universitas Veteran Republik Indonesia) di Makassar, Sulawesi Selatan dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia (ASPENSI) di Bandung, Jawa Barat. Untuk periode 2012-2017, jurnal **TAWARIKH** ini terakreditasi oleh Ditjendikti Kemdikbud RI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Bagi yang ingin berlangganan dan informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami di: [www.tawarikh-journal.com](http://www.tawarikh-journal.com) dan [www.aspensi.com](http://www.aspensi.com); atau hubungi e-mail kami di: [tawarikh.journal2009@gmail.com](mailto:tawarikh.journal2009@gmail.com) dan [aspensi@yahoo.com](mailto:aspensi@yahoo.com)



Telah terbit **ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan**. Jurnal ini pertama kali diterbitkan sejak tanggal 1 Juni 2011 dan selalu terbit setiap bulan Juni dan Desember. Sejak edisi Juni 2012, jurnal ini diterbitkan atas kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSUR (Universitas Suryakencana) di Cianjur dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia (ASPENSI) di Bandung. Bagi yang ingin berlangganan dan informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami di: [www.atikan-jurnal.com](http://www.atikan-jurnal.com) dan [www.aspensi.com](http://www.aspensi.com); atau hubungi langsung e-mail kami di: [atikan.jurnal@gmail.com](mailto:atikan.jurnal@gmail.com) dan [aspensi@yahoo.com](mailto:aspensi@yahoo.com)



Anggota Redaksi Jurnal *SUSURGALUR* dalam sebuah Acara Silaturahmi di rumah Prof. Madya Dr. Haji Awg Asbol bin Haji Mail (duduk paling kiri) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada bulan April 2013. “Kami bertekad untuk menjadikan *SUSURGALUR* ini sebagai jurnal ilmiah yang bertaraf, baik nasional maupun regional Asia Tenggara”, kata PM Dr. Asbol, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Redaksi Jurnal *SUSURGALUR*.



Acara penandatanganan MoA (*Memorandum of Agreement*) antara ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung, yang diwakili oleh Andi Suwirta, M.Hum. (Ketua Umum ASPENSI) dan Dr. Anzar Abdullah (Sekretaris Jenderal ASPENSI), dalam rangka kerjasama penerbitan *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* dengan Dosen APB UBD (Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam), yang diwakili oleh Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, dan Dosen Program Sejarah, Fakultas Sastera dan Sains Sosial UBD, yang diwakili oleh Prof. Madya Dr. Haji Awg Asbol bin Haji Mail, di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada tanggal 27 September 2013.

## INDEKS PENGARANG

- Adam, Ahmat. 101-114.  
Ahmad, Qasim. 1-10.  
Ahmad Wani, Hilal & Andi Suwirta. 41-50.  
Andaya, B.W. & L.Y. Andaya. 68, 72-73, 79.  
Attardo, Salvatoggunakare. 96-98.  
Awang Abbas, Masdiana. 32, 37.  
Azra, Azyumardi. 57, 62.
- Baginda, Abdul Razak [ed]. 86, 88-89.  
Barbe, Katharina. 97-98.  
Blake, R. 6, 9.  
Berding, Andrew H. 78-79.  
Bose, Sumantra. 41-42, 50.  
Brown, D.E. 32, 37.  
Bruinessen, Martin Van. 57, 59, 62.
- Cannadine, David. 112, 114.  
Chuli, Chang. 16, 27.  
Curtis, Robert. 74, 79.
- Das, K. 78, 79.  
Davis, Feiling. 15, 17, 19-20, 22-25, 27.  
Dhillon, Karminder Singh. 87, 89-90.
- Enoch Muas, Tuty. 11-28.
- Felicia, N.S. 93-94, 98.  
Fung, Yulan. 22, 27.
- Ganguly, Sumit. 42-43, 50.  
Gardiner, Patrick. 2, 9.  
Gde Agung, Ide Anak Agung. 74, 79.  
Gilbert, Joanne R. 96, 98.
- Haji Wahsalfelah, Siti Norkhalbi. 29-40.  
Hilali, A.Z. 44, 48, 50.  
Hindley, Donald. 75, 79.  
Hossain, Ishtiaq. 86, 90.  
Hsu, Immanuel C.Y. 23, 27.  
Hughes-Hallett, H.R. 32, 38.
- Ibn Khaldun. 52, 62.  
Irvine, R. 76, 79.
- Jaafar, Faridah. 86, 90.  
Jenkins, Keith. 2, 9.  
Jensen, Lyod. 67, 80.  
John, Spencer St. 31, 38.  
Jusoh, Razi. 54-55, 62.
- Kahin, George McT. 75, 80.  
Koithara, Verghese. 48, 50.  
Kolko, Gabriel. 7, 10.
- Lamb, Alastair. 45, 50.  
Layton, R. 36, 38.  
Leifer, Michael. 74-75, 80.  
Lesmana, Maman. 91-100.
- Mat Arus, Baharuddin. 30, 38.  
McCullagh, C. Behan. 2, 10.  
Md Khalid, Khadijah. 87, 90.  
Mohd Pir, Ali & Ab Rashid Shiekh. 43, 50.  
Mukmin, Hidayat. 76, 80.
- Nicholl, R. [ed]. 32, 38.  
Nicolson, Harold. 67, 80.  
N.M.S. Nik Wan, M. Ardae. 51-64.  
Nye Jr., Joseph S. 82, 90.
- O'Callaghan, Sean. 15, 22, 27.  
Ongkili, J.P. 73, 80.  
Ott, Marvin C. 83, 85, 90.
- Patten, Chris. 5, 10.  
Pg Hj Osman, Pg Karim. 30-31, 38.  
Poulgrain, G. 75, 80.
- Rahardi, Kunjana. 95, 99.  
Reid, Anthony. 6, 10.  
Renne, E.P. 33, 38.  
Robani, Anidah. 88, 90.  
Rosenthal, Franz. 105-106, 114.  
Russell, Jones. 57, 62.
- Sar Desai, D.R. 71, 80.  
Scherpen, Bastiaan. 7, 10.  
Schofield, Victoria. 47, 50.  
Slametmulyana. 109, 114.  
Sodhy, Pamela. 86, 90.  
Stanton, William. 13-15, 18, 21, 27.  
Stearns, Peter. 106, 114.  
Sunarti, Linda. 65-80.  
Suprana, Jaya. 92, 99.  
Sweeney, A. 36, 39.
- Tajari, Arvin. 81-90.  
Tate, D.J.M. 71, 80.  
Terrill, Ross. 5, 10.  
Tianjiang, Wang. 13, 16-17, 27.  
Tsakona, V. & D.E. Popa [eds]. 92, 94, 99.
- Unang, Husain bin. 55, 63.
- Van der Kroef, Justus M. 76, 80.  
Vatikiotis, Michael R.J. 78, 80.
- Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir *et al.* 32, 39.  
Ward, J.M.S. & W.G. Stirling. 13, 19, 21, 27.  
Wariya, Chamil. 87, 90.  
Weinstein, Franklin B. 76, 78, 80.  
Windschuttle, Keith. 2, 10.  
Wolters, O.W. 109, 114.
- Yue-Yi, Hwa. 5, 10.  
Yunus, Mahmud. 55, 63.  
Yusuf, P.M. 35, 39.

## INDEKS SUBJEK

- Adat-istiadat diraja. 35-36.  
*Agreeing upon a premise*. 6-7.  
 Ajaran sifat 20. 51-54.  
 Alam Melayu. 51-52, 56-61.  
*Al-la'bu al-ma'ani*. 93, 96-97.  
 Anggota dan sistem Serikat Rahasia. 15-19.  
*ASEAN as cornerstone*. 84-87.
- Bentuk humor politik. 92-95.  
*Bidayah al-Hidayah*. 58, 60.  
 Brunei Darussalam. 29-30, 35-37.  
*Buy British Last*. 87-88.
- Celapa*. 30, 32, 35, 37.  
*Cikgu Buyong Adil*. 102.  
*Confrontation policy*. 83-84.  
*Contested notions*. 1-2, 8-9.
- Debats on Kashmir*. 43-47.  
*De facto dan de jure*. 73.
- Efek kelucuan. 94-95.  
*Exhortation to learn from history*. 3-4.
- Filsafat sejarah. 105-106.  
*Focusing on the obvious*. 6-7.  
*Forming foreign policy*. 82-83.  
 Fungsi humor politik. 95-98.
- G-30-S/PKI di Indonesia. 77-78.  
*Gelao Hui*. 16-17.  
*Greater Kashmir*. 48.
- Hasil kraftangan. 30-32.  
 Hiburan atau kritikan. 91-92.  
*Historical evaluation*. 81-82.  
 Hubungan Malaysia dan Indonesia. 70-78.  
*Huidang*. 13-15.
- Ibn Khaldun. 105-106.  
*Ignoring the lessons of history*. 7-8.  
*Ilm Usul al-Din*. 56, 58-60.  
 India and Pakistan. 41, 44-45.  
 Indonesia Raya. 72-73.
- Jalan keluar dari kemelut sejarah. 112-113.  
*Jammu and Kashmir*. 43-44.  
*Jiaomen*. 13-15.
- Kartu anggota dan bahasa rahasia. 20-22.  
*Kashmiri movement*. 47-49.  
 Kepala Desa. 95-96.  
 Kraftangan logam. 32-36.
- Laudable aspirations*. 4-5.  
*Learning from the past*. 1-3.  
*Line of Control*. 45-46.  
*Look East Policy*. 87-88.
- Mahathir Mohamad. 87-89.  
 Masyarakat Melayu. 32-36.  
 Menanamkan patriotisme. 105-106.  
*Mimi Shehui*. 11-12.
- Nama-nama ajaran sifat 20. 54-56.  
*Negaraku*. 74.  
*Non-Alignment orientation*. 84-87.
- Orde Baru. 75-76.  
 Organisasi kawasan. 70-71.  
 Owen Dixon. 45-46.
- Pelestarian kraftangan. 36-37.  
 Pembinaan *nasion*. 101-102.  
 Pendidikan sejarah masa kini. 111-112.  
 Pengajaran sejarah yang kalut. 104-105.  
 Pengeluaran dan penggunaan. 30-32.  
 Politik luar negeri Malaysia. 65-70.  
*Pragmatic and new foreign policy*. 87-89.
- Qidam yang zati*. 53.  
*Qiyamuhu Ta'ala bi Nafsih*. 54.
- Rationality and irrationality*. 8-9.  
 Respon masyarakat. 22-26.  
 Ritual dan sumpah pelantikan. 19-20.  
*Royal Asiatic Society*. 59.
- Sasaran pengajaran sejarah. 108-111.  
 Sejarah sebagai penggembleng identitas. 103.  
 Sekolah Jenis Kebangsaan. 111-112.  
 Serikat rahasia Tiongkok. 13-15.  
 Silsilah Raja-raja Brunei. 36.  
*Sultan Idris Training College*. 102.
- Tahakkum asy-syakhsyi bi nafsih*. 97-98.  
 Tan Sri Muhyiddin Yassin. 101-102.  
 Teks-teks humor politik. 91-92.  
 Tenaga Kerja Indonesia. 66.  
*Triad*. 11, 13-15, 26-27.  
 Tunku Abdul Rahman. 65, 67, 69, 81-83, 89.
- Umm al-Barahin*. 51-56, 58, 60-61.  
*United Malays National Organization*. 72.  
*United Nations*. 43-47.
- Versions of the same past*. 5-6.  
*Vietnam syndrome*. 7-8.
- Warisan tradisi. 32-35.  
*World War II*. 81-82, 86.
- Xiansheng*. 17.  
*Xiao*. 22.
- Yakuza*. 11.  
*Youmin Wuchanzhi Duiwu*. 17-18.

## **SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah (Journal of History Education and Historical Studies)**

This journal, with ISSN 2302-5808, was firstly published on March 24, 2013. Since issue of September 2013, the *SUSURGALUR-JKSPS* journal has been joining publication between ASPENSI (the Association of Indonesian Scholars of History Education) in Bandung with the Lecturers of APB UBD (Academy of Brunei Studies, University of Brunei Darussalam) and the Lecturers of History Program FASS (Faculty of Arts and Social Sciences) UBD in Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. This journal is published twice a year i.e. every March and September.

### **EDITORIAL BOARD**

#### **Honorable Patrons:**

Vice Chancellor of UBD in Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam  
Chairperson of ASPENSI in Bandung, Indonesia

#### **Editor-in-Chief:**

Assoc. Prof. Ampuan Dr. Haji Brahim A. Haji Tengah (APB UBD, Bandar Seri Begawan)

#### **Vice Chief Editor:**

Assoc. Prof. Dr. Haji Awg Asbol Haji Mail (FASS UBD, Bandar Seri Begawan)

#### **Managing Editor:**

Sri Redjeki Rosdianti, M.M.Pd. (ASPENSI, Bandung, Indonesia)

#### **Expert Reviewer Board for March Issue:**

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (UBD, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam)  
Prof. Dato Dr. Qasim Ahmad (UiTM, Shah Alam, Malaysia)  
Prof. Dr. Robert Cribb (ANU, Canberra, Australia)  
Prof. Dr. A. Rasyid Asba (UNHAS, Makassar, Indonesia)

#### **Expert Reviewer Board for September Issue:**

Prof. Dr. Mikio Oshi (APB UBD, Bandar Seri Begawan)  
Prof. Dr. Ismail Ali (UMS, Kota Kinabalu, Malaysia)  
Prof. Dr. Mikihiko Moriyama (NU, Nagoya, Japan)  
Prof. Dr. Gusti Asnan (UNAND, Padang, Indonesia)

#### **Associate Editors:**

Dr. Haji Tassim bin Haji Abu Bakar (APB UBD, Bandar Seri Begawan)  
Dr. Hjh Asiyah az-Zahra A. Kumpoh (FASS UBD, Bandar Seri Begawan)  
Andi Suwirta, M.Hum. (ASPENSI, Bandung, Indonesia)  
Dr. Linda Sunarti (UI, Depok, Indonesia)  
Dr. Eko Supraptono (SMAN 1 Lebak, Banten, Indonesia)

#### **Secretariat Staff:**

Dk Hailmyana binti Pg Md Yusof (APB UBD, Bandar Seri Begawan)  
Dyg Munirah binti Hj Zainal Abidin (FASS UBD, Bandar Seri Begawan)  
Suci Noor Anisa Putri PRD (UPI, Bandung, Indonesia)

#### **Office Address:**

Main office: Secretariat of ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia),  
Komp Vijaya Kusuma B-11 No.16 Cipadung, Bandung 40614, West Java, Indonesia.  
Phone/Fax: +6222 7837741. Mobile: +628122178018.  
E-mail: [susurgalur.jurnal2013@gmail.com](mailto:susurgalur.jurnal2013@gmail.com) and [aspensi@yahoo.com](mailto:aspensi@yahoo.com)

Branch office: APB (Akademi Pengajian Brunei) UBD (Universiti Brunei Darussalam),  
Jalan Tungku-Link, Bandar Seri Begawan, BE1410, Negara Brunei Darussalam.  
Phone: +6732463001 ext. 1459. Fax: +6732461518. Mobile: +673870965.  
E-mail: [brahim.tengah@ubd.edu.bn](mailto:brahim.tengah@ubd.edu.bn)

Website: [www.susurgalur-jurnal.com](http://www.susurgalur-jurnal.com), [www.aspensi.com](http://www.aspensi.com), and [www.ubd.edu.bn](http://www.ubd.edu.bn)

*Copy Right © by Association of Indonesian Scholars of History Education (ASPENSI) in Bandung, West Java, Indonesia in collaboration with the Lecturers of APB UBD (the Academy of Brunei Studies, University of Brunei Darussalam) and the Lecturers of History Program, Faculty of Arts and Social Sciences UBD in Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without prior written permission from the publisher.*

**Article Guidelines/Instruction for the Authors**  
**SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah**  
**(Journal of History Education and Historical Studies)**

**SUSURGALUR-JKSPS** journal will provide a peer-reviewed forum for the publication of thought-leadership articles, briefings, discussion, applied research, case and comparative studies, expert comment and analysis on the key issues surrounding the history education and historical studies, and its various aspects. Analysis will be practical and rigorous in nature.

Prospective authors must adhere to the following guidelines: (1) Article length is 15 pages minimum and 25 pages maximum, including bibliography and appendices; (2) Abstract and its key words are included; (3) Article may be written by three persons maximum; (4) Article may also be written in English as well as in Indonesian and Malay languages; and (5) Attach a bio mentioning author's current profession, photo, postal and e-mail addresses.

The article should follow the outline:

**Title** (brief, clear, and interesting)

**Name of author** (with full address and e-mail)

**Abstract** (in two languages i.e. English and Indonesian/Malay languages)

**Introduction**

**Sub title**

**Sub title**

**Sub title** (adjusted as needed)

**Conclusion** (including the recommendation)

**Bibliography** (contains literature cited in the text)

Citation takes the following form: "... (Ismail Ali, 2009:17); bibliography from books and journals should be in the following order respectively: Suwirta, Andi. (2005). *Revolusi Indonesia dalam News and Views*. Bandung: ASPENSI Press; and Saripudin, Didin. (2009). "Re-sosialisasi Anak Jalanan di Kota Bandung" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 2(2), pp.25-40. Internet sources and interview should include place and date of access.

The article should be sent at least 3 (three) months prior to the publication months (March and September), addressed to the editor of *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*. It is recommended that the article should be sent via e-mail at: [susurgalur.jurnal2013@gmail.com](mailto:susurgalur.jurnal2013@gmail.com) and [aspensi@yahoo.com](mailto:aspensi@yahoo.com)

Information on the article's possible publication will also be sent via e-mail. *SUSURGALUR-JKSPS* is the scientific journal nationally, regionally, and internationally, especially for the scholars of Southeast Asia regions. Published articles will require that the authors contribute the journal fee for editing, printing, and shipping costs which amount will be determined later by the editorial board.

Authors of published articles and paid the journal fee, he/she will get 3 (three) exemplars of the journal and 2 (two) journal off prints; and his/her full article in PDF and photograph will also be displayed in the journal website at: [www.susurgalur-jksp.com](http://www.susurgalur-jksp.com) and [www.aspensi.com](http://www.aspensi.com)

Meanwhile, authors of published articles and unpaid the journal fee, he/she will not get the journal print. For unpublished articles, it will also not be returned, except on written requests from the author.

Articles in the **SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah** do not necessarily represent the views of the Editor or the Editorial Committee. The Editor is responsible for the final selection of the content of *SUSURGALUR-JKSPS* and reserve the right to reject any material deemed inappropriate for publication. Responsibility for opinions expressed and for the accuracy of facts published in articles rests solely with the individual authors.